



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/P Tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Sulawesi Barat dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Masa Jabatan 2017-2022, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Masa Jabatan 2017-2022 sesuai dengan tanggal pelantikan akan berakhir pada tanggal 12 Mei 2022;
 - b. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2017-2022, akan berakhir pada tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan Diktum KESATU dan Diktum KETIGA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomo 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
- (2) RPD berfungsi sebagai:
 - a. pedoman penyusunan Renstra OPD dan Penyusunan RKPD;
 - b. pedoman dalam penyusunan RKPD untuk kurun waktu 4 (empat) tahun; dan
 - c. instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2

- (1) RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;

e. BAB V ...

- e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
 - g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX Penutup.
- (2) Isi dan uraian RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026.

Pasal 4

RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dapat diubah apabila:

- a. hasil pengendalian evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksiting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. terjadi perubahan mendasar; dan
- d. dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 1 Maret 2022
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 1 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c
NIP :19740112 199311 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 MARET 2022
TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
BARAT TAHUN 2023-2026.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bentuk proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk menghasilkan pembangunan yang baik dan berkualitas diperlukan sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Penyusunan dokumen pembangunan daerah yang terukur, efektif dan efisien perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, holistik, teknokratik, integratif dan spasial.

Merujuk pada Pasal 260 Ayat (1) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Namun, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, diinstruksikan kepada Gubernur agar menyusun Dokumen Perencanaan Menengah Pembangunan Daerah 2023–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026 disusun secara teknokratik dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah tetap memperhatikan kondisi, potensi, masalah dan isu–isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026 memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Tahun 2017–2022;
4. Isu–isu strategis yang berkembang;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi berlaku.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005 – 2025;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 – 2034;
31. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan KeTiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. Hubungan RPD Provinsi Sulawesi Barat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 yang tercantum Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

1.3.2. Hubungan RPD Provinsi Sulawesi Barat dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat

Penyusunan RPD Provinsi Sulawesi Barat perlu memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025 yang termuat dalam Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Barat 20 tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026 didasarkan pada visi RPJPD Provinsi, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

1.3.3. Hubungan RPD Provinsi Sulawesi Barat dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–PD) pada rentang waktu 4 (empat) tahun, dimana Renstra–PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pemerintahan untuk jangka 4 (empat) tahun.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2023–2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2023–2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Renstra PD Provinsi agar memperhatikan:

- a. Penyelarasan Program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing–masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2021;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
- d. Isu–isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah.

1.3.4. Hubungan RPD Provinsi Sulawesi Barat dengan RTRW Provinsi Sulawesi Barat

Penyusunan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 memperhatikan RTRW Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

1.3.5. Hubungan RPD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain hubungannya dengan beberapa dokumen perencanaan tersebut, RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain:

1. RPJMD dan RTRW Provinsi sekitar;
2. Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs);

3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
4. Masterplan dan Rencana Strategis Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Sulawesi Barat;
5. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat (RP3KP) Tahun 2021–2040;
6. RAD Pangan dan Gizi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022–2026;
7. RAD Stunting Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022–2026
8. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Sulawesi Barat;
9. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Provinsi Sulawesi Barat serta;
10. Rencana Aksi Daerah Hak Asasi Manusia (RAD HAM) Provinsi Sulawesi Barat.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 dimaksudkan untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 dengan peraturan perundangan–undangan yang berlaku, perkembangan pembangunan dan capaiannya serta permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir serta penyesuaian nomenklatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dokumen hasil RPD ini nantinya akan memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha dalam membangun kesepakatan, kesepakatan, dan komitmen bersama.

1.4.2. Tujuan

Selanjutnya, tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 adalah:

- 1.4.2.1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- 1.4.2.2. Memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
- 1.4.2.3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan pada level pemerintah, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama tahun 2023–2026;

- 1.4.2.4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Barat, dan Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat;
- 1.4.2.5. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RPD ini;
- 1.4.2.6. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023–2026;

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan RPD yang terdiri dari: (1) Latar Belakang, (2) Dasar Hukum, (3) Hubungan antar Dokumen, (4) Maksud dan Tujuan serta (5) Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini menjelaskan dan menyajikan tentang Gambaran Umum selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi: (1) Aspek Geografi dan Demografi; (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (3) Aspek Daya Saing Daerah; dan (4) Aspek Pelayanan Umum.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pada bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data serta analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: (1) Kinerja Keuangan Masa Lalu terdiri atas Kinerja Pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah; (2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu terdiri atas Proporsi Penggunaan Anggaran dan Analisis Pembiayaan; serta (3) Kerangka Pendanaan 4 (empat) tahun yang terdiri atas Proyeksi Pendapatan dan Belanja serta Penghitungan Kerangka Pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam bab ini berisi penyajian isu–isu strategis meliputi: (1) Permasalahan Pembangunan; dan (2) Isu Strategis yang memperhatikan isu/kebijakan global, nasional, regional, daerah sekitar dan kebijakan Provinsi Sulawesi Barat.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini berisi penyajian terhadap Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Dalam bab ini berisi tentang: (1) Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran; serta (2) Arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 4 (empat) tahun.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Target, Perangkat Daerah Penanggung Jawab berdasarkan bidang urusan yang terdiri dari Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah dan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Bab ini menguraikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode.

BAB IX PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan tentang RPD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD dibawah kepemimpinan Pejabat Kepala Daerah. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPD dijadikan pedoman bagi setiap kepala PD dalam menyusun Renstra–PD dan setelah ditetapkannya RPD maka Renstra Perangkat Daerah akan menyesuaikan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Gambaran umum akan menyajikan dan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing dan aspek pelayanan umum.

Bab ini akan memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara Geografis Provinsi Sulawesi Barat terletak pada posisi geografis 0°12' - 3°38' Lintang Selatan dan 118°43'15" - 119°54'3" Bujur Timur (Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka) Dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejarah terbentuknya Sulawesi Barat bertolak dari semangat "*Allamungan Batu di Luyo*" yang mengikat Mandar dalam perserikatan "*Pitu Ba'bana Binanga dan Pitu Ulunna Salu*" dalam sebuah muktamar yang melahirkan "*Sipamanda*" (saling memperkuat). Dengan semangat "*Sipamanda*" dan perjuangan yang panjang dari seluruh unsur masyarakat mandar serta dukungan pemerintah maka lahirlah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 yang menjadi awal sejarah pembentukan Provinsi yang ke-33 di Indonesia yaitu Provinsi Sulawesi Barat dengan ibu kota di Mamuju.

Sejak awal berdirinya, Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan salah satunya dalam bidang pemerintahan, di mana pada awal pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten, hingga pada tahun 2013 terjadi pemekaran yaitu Kabupaten Mamuju Tengah dari Induk Kabupaten Mamuju, sehingga jumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 6 (enam) kabupaten, antara lain sebagai berikut:

1. Kabupaten Mamuju dengan Ibu Kota Mamuju terletak pada posisi 2°08'7" - 2°57'50" LS dan 117°3'57" - 119°51'17" BT.
2. Kabupaten Majene dengan Ibu Kota Majene. Terletak pada posisi 2°38'45" - 3°38'15" LS dan 118°45'00" - 119°4'45" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 143 Km.
3. Kabupaten Polewali Mandar dengan Ibu Kota Polewali. Terletak pada posisi 3°4'10" - 3°32'00" LS dan 118°40'27" - 119°29'41" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 199 Km.
4. Kabupaten Mamasa dengan Ibu Kota Mamasa. Terletak pada posisi 2°39'216" - 3°19'288" LS dan 119°0'216" - 119°38'144" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 292 km.
5. Kabupaten Pasangkayu dengan Ibu Kota Pasangkayu. Terletak pada posisi 0°40'10" - 1°50'12" LS dan 119°25'26" - 119°50'20" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi 276 km.
6. Kabupaten Mamuju Tengah dengan Ibu Kota Tobadak. Terletak pada posisi 1°43'33" - 2°18'54" LS dan 119°7'35" - 119°52'18" BT, dengan jarak ke ibu kota provinsi sebesar 115 km.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

NO	KABUPATEN	LUAS (KM ²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS SULAWESI BARAT
1.	Majene	947,84	5,65
2.	Polewali Mandar	1 775,65	10,58
3.	Mamasa	3 005,88	17,91
4.	Mamuju	4 999,69	29,78
5.	Pasangkayu	3 043,75	18,13
6.	Mamuju Tengah	3 014,37	17,96
TOTAL (SULAWESI BARAT)		16 787,18	100,00

Sumber: BPS, Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Secara administratif, wilayah Provinsi Sulawesi Barat terbagi ke dalam 6 kabupaten, meliputi 69 Kecamatan, 575 Desa dan 75 kelurahan. Kabupaten terluas adalah Mamuju dengan luas wilayah sebesar 4 999,69 (29,78 terhadap luas wilayah provinsi Sulawesi Barat) dan yang terkecil adalah kabupaten Majene dengan luas wilayah sebesar 947,84 dengan luas wilayah provinsi Sulawesi Barat sebesar 5, 65. Untuk mengetahui wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat secara jelas dapat dilihat pada gambar peta di bawah ini:

Gambar 2.2 Peta Topografi Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Jumlah gunung di Sulawesi Barat sekitar 193 buah yang tersebar di beberapa kabupaten. Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 meter di atas permukaan laut yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju. Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas yaitu sekitar 70 persen dari total luas wilayah dan umumnya menempati bagian tengah ke timur dengan bentuk memanjang utara-selatan, lembah-lembah yang terbentuk merupakan wilayah yang curam.

Tabel 2.2 Jumlah Gunung dan Nama Gunung Tertinggi Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

Kabupaten	Jumlah Gunung	Nama Gunung Tertinggi	Ketinggian Gunung (meter)
Majene	11	Seteng	1 001
Polewali Mandar	28	Tetuho	1 448
Mamasa	31	Mambulilling	2 873
Mamuju	109	Gandang Dewata	3 037
Pasangkayu	14	Pandabatu	284

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat

2.1.1.3 Geologi

Geologi di Sulawesi Barat disusun dari beberapa jenis batuan, yaitu batuan sedimen, malihan, gunung api dan terobosan. Umurnya berkisar antara Mesozoikum sampai Kuartar. Urutan stratigrafi batuan tersebut dimulai dari yang tertua ke yang muda adalah batuan Malihan Kompleks Wana (TRw) yang terdiri sekis, genes, filit dan batusabak. Satuan ini dijumpai pada lembar Mamuju dan Lembar Pasangkayu yang diduga berumur lebih tua dari Kapur dan tertindih tak selaras oleh Formasi Latimojong (Kls) dibagian timur memanjang utara-selatan wilayah Sulawesi barat. Formasi ini terdiri dari filit, kuarsit, batu lempung malih, dan pualam. Satuan batuan ini berumur Kapur. Formasi Latimojong ditindih tak selaras Formasi Toraja pada bagian timur wilayah mamuju dan mamasa yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, kuarsit, serpih dan batu lempung yang umumnya berwarna merah atau ungu, setempat dijumpai batubara. Formasi ini mempunyai mempunyai Anggota Rantepao (Tetr) yang terdiri dari batu gamping numulit berumur Eosen Tengah – Eosen Akhir. Sedangkan pada wilayah pasangkayu formasi Latimojong di tindih tidak selaras batuan gunung api Formasi Lamasi (Toml) dan Formasi Talaya. Formasi Lamasi bersusunan andesit-dasit berumur Oligosen-Miosen Awal. Formasi Talaya bersusunan andesit-basal berumur Miosen Awal-Miosen Akhir. Formasi Lamasi menindih tidak selaras Formasi Toraja yang berumur Oligosen Akhir.

Miosen Awal, yang merupakan Batuan gunung api beranggotakan Batu gamping (Tomc), tertindih selaras oleh Formasi Riu (Tmr) yang terdiri dari batu gamping napal. Formasi Riu berumur Miosen Awal – Miosen Tengah dan tertindih tak selaras oleh Formasi Sekala (Tmps) dan Batuan Gunung api Talaya (Tmtv). Formasi Sekala terdiri dari grewake, batu pasir hijau, napal dan batu gamping, bersisipan tufa dan lava yang tersusun oleh andesit – basal. Formasi ini berumur Miosen Tengah – Pliosen dan berhubungan menjemari dengan Batuan Gunung api Talaya. Batuan Gunung api Talaya terdiri dari breksi, lava dan tufa yang tersusun oleh andesit – basal. Batuan ini mempunyai Anggota Tuf Beropa (Tmb) dan menjemari dengan Batuan Gunung api Adang (Tma), terutama yang disusun oleh leusit - basal.

Sedangkan Pada bagian barat wilayah Kab. Pasangkayu didominasi oleh batuan sedimen Formasi Lariang (Tmpl) dan Formasi Pasangkayu (TQp). Formasi ini merupakan endapan molase terdiri dari konglomerat, batu pasir dan batulempung. Batuan berumur Miosen Tengah – Miosen Akhir dan mempunyai hubungan ketidakselarasan dengan batuan yang lebih tua di bawahnya dan juga batuan yang lebih muda di atasnya termasuk Formasi Pasangkayu. Formasi Pasangkayu terdiri dari batu pasir dan batu lempung, tempat ditemukan batu gamping dan konglomerat. Umur

formasi ini adalah Pliosen dan ditindih secara tidak selaras oleh satuan aluvial (Qa) yang berumur holosen dan mendominasi bagian barat.

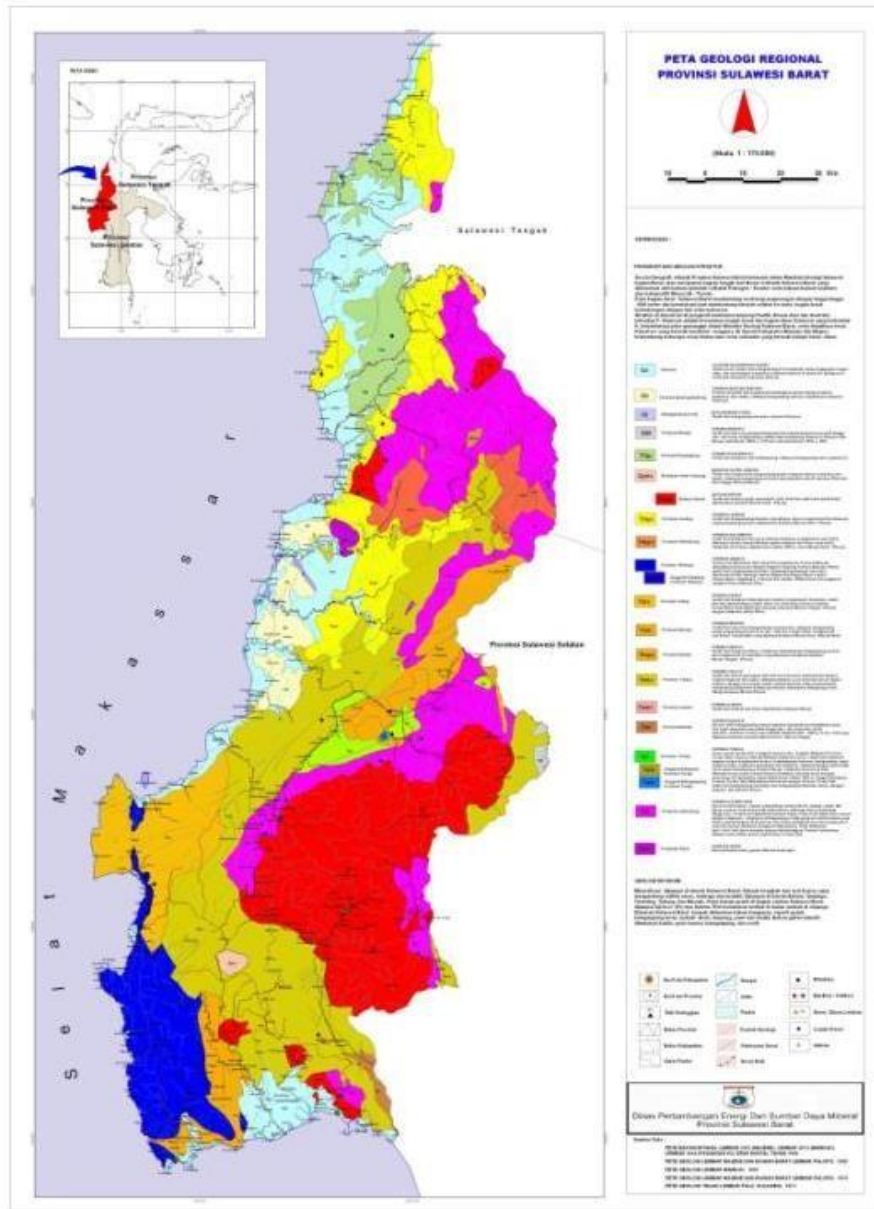
Batuan Gunung api Adang berhubungan menjemari dengan Formasi Mamuju (Tmm) yang berumur Miosen Akhir. Formasi Mamuju terdiri atas napal, batu pasir gampingan, napal tufaan dan batu gamping pasiran bersisipan tufa. Formasi ini mempunyai Anggota Tapalang (Tmmt) yang terdiri dari batugamping koral, batu gamping bioklastik dan napal yang banyak mengandung moluska. Formasi Lariang terdiri dari batu pasir gampingan dan mikaan, batulempung, bersisipan kalkarenit, konglomerat dan tufa. Formasi ini berumur Miosen Akhir – Pliosen Awal.

Pada bagian timur wilayah Sulawesi barat disusun oleh batuan terobosan batolit granit (Tmpi) dengan penyebaran yang cukup luas menerobos semua satuan yang lebih tua (mendominasi bagian utara timur laut atau daerah Mamasa). Batuan ini terdiri dari granitik, diorit, riolit dan setempat gabro. Batuan terobosan berbentuk batolit ini diduga berumur Pliosen. Ke arah tenggara wilayah Mamasa, batuan ini didominasi oleh batuan epiklastik gunung api Formasi Loka (Tml). Formasi ini terdiri atas batu pasir andesitan, konglomerat, breksi dan batu lanau. Batuan ini mempunyai umur Miosen Tengah – Miosen Akhir. Pada bagian tengah ditempati oleh batuan gunung api Walimbong (Tmpv) yang terdiri atas lava dan breksi. Penyebaran batuan ini cukup luas dan menyebar hingga ke arah tenggara. Batuan ini diduga berumur Mio-Pliosen. Di wilayah Mamuju jumpai batuan Tufa Barupu (Qbt) yang terdiri dari tufa dan lava, yang diduga berumur Pliosen.

Sedangkan di bagian barat wilayah Sulawesi Barat pada umumnya disusun oleh endapan sedimenter di mana di wilayah mamuju tersingkap Formasi Budongbudong (Qb) yang terdiri dari konglomerat, batu pasir, batulempung dan batugamping koral (Ql). Endapan termuda di Lembar ini adalah endapan kipas aluvium (Qt) dan aluvium (Qa) terdiri dari endapan- endapan sungai, pantai dan antar gunung. Sedangkan wilayah Majene dan Polewali Mandar tersusun dari batuan sedimen dari Formasi Mandar. Batuan tersebut terdiri atas batu pasir, batu lanau dan serpih serta lensis batubara. Hasil penanggalan menunjukkan bahwa umur formasi ini Miosen Akhir. Selain Formasi Mandar (Mamuju), pada bagian barat juga ditemukan batuan sedimen klastik lainnya (Formasi Mapi/Tmpm) yang tersusun oleh batu pasir, batu lempung, batu gamping pasiran dan konglomerat. Umur dari satuan ini adalah Miosen Tengah – Pliosen.

Proses tektonik yang pernah terjadi wilayah Sulawesi Barat menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan berumur Eosen Formasi Toraja dan batuan Berumur Miosen Formasi Lariang (Tmpl), pembentukan batuan sedimen molase Formasi Pasangkayu (TQp). Dalam fase tektonik yang berbeda juga menyebabkan lipatan dan pensesaran pada kelompok batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).

Gambar 2.3 Peta Geologi Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat

Secara stratigrafi, kelompok batuan tertua pada Mandala Sulawesi Barat bagian tengah berupa kompleks batuan Metamorf dan endapan flysch Formasi Latimojong (K1s). Secara umum Formasi ini mengalami pemalihan lemah-sedang; terdiri atas serpih, filit, rijang, marmer dan kuarsit dengan ketebalan tidak kurang dari 1000 m serta diintrusi oleh batuan granitic hingga basaltic baik berbentuk stock ataupun retas. Umur Formasi ini diperkirakan Kapur Akhir dan diendapkan pada lingkungan laut dalam. Bergman, dkk (1996) membagi Sulawesi Bagian Barat menjadi tiga kelompok tektonik yaitu:

- a. Fold belt aktif di mana batuan vulkanik yang berumur Pliosen-Miosen menyebar hingga ke selat Makassar
- b. Central belt yang terdiri dari Formasi Latimojong sebagai basement, paparan karbonat dan batuan sedimen klastik yang berumur oligo-eosen, sub marin vulkanik yang berumur Miosen.
- c. Akresi ophiolit kompleks Lamasi berumur Kapur-Paleogen.

Proses tektonik yang pernah terjadi di wilayah ini menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan vulkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps).

Kelompok Toraja terdiri atas Formasi Bonehau yang terendapkan pada lingkungan laut terbuka. Formasi Kalumpang yang terdiri dari batulempung, batubara, batu pasir kaya kuarsa dan sedikit batuan vulkanik menindih tak selaras Formasi Bonehau. Formasi Kalumpang terendapkan pada lingkungan transisi hingga fluvial. Di atas Formasi tersebut terendapkan Formasi Rantepao yang didominasi oleh batugamping berumur Eosen. Pada bagian atas dari kelompok Toraja ini adalah Formasi Batio yang berumur Oligosen dan tersusun oleh napal. Kelompok batuan ini dominan terendapkan pada lingkungan laut dan pada saat bagian barat Sulawesi memisah (rifting) dari Kalimantan.

Kelompok Lariang terletak tidak selaras dengan kelompok Toraja di bawahnya. Kelompok Lariang ini terdiri atas Formasi Tabiora yang juga didominasi oleh napal. Di atas Formasi ini terendapkan secara selaras Formasi Lisu yang berumur Miosen Atas. Pada Formasi ini terlihat adanya peningkatan kandungan klastik kasar ke arah selatan. Kelompok batuan ini umumnya tersusun oleh endapan-endapan laut di mana materialnya sebagian berasal dari batuan yang lebih tua. Kelompok batuan tersebut mengalami deformasi sebelum terbentuknya kelompok Pasangkayu. Batuan Kelompok Formasi Pasangkayu berumur Plio-Pleistosen dan didominasi oleh konglomerat yang kaya akan kuarsa. Batuan ini terendapkan pada daerah cekungan foreland pada saat orogenesis ke arah timur.

2.1.1.4 Hidrologi

Sejumlah sungai yang tergolong besar mengalir wilayah Sulawesi Barat, dengan jumlah aliran terbanyak di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 5 (lima) aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 2 (dua) sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang dan Polewali Mandar serta Sungai Karama yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju, dengan panjang masing-masing sekitar 150 km.

Tabel 2.3 Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai di Sulawesi Barat Tahun 2021

Nama Sungai	Panjang (km)	Lokasi
Saddang	150	Tanah Toraja, Enrekang, Pinrang, Polewali Mandar
Matakali	28	Polewali Mandar
Mambi	95	Polewali Mandar
Mandar	90	Polewali Mandar
Manyamba	28	Majene
Malunda	38	Majene
Kaluku	32	Mamuju, Polewali Mandar
Karama	150	Mamuju

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Barat merupakan ekosistem dengan tingkat kepentingan sangat tinggi dan menjadi isu sentral. Ini terjadi karena Sulawesi Barat

dominan dibangun oleh wilayah dengan topografi bergunung dengan curah hujan tinggi, dijejali begitu banyak sungai besar. Sementara, wilayah-wilayah dengan topografi datar yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Sulawesi Barat merupakan kawasan/dataran pengaruh banjir dan sedimentasi sungai-sungai besar. Karena itu, ekosistem dan daya dukung wilayah datar ditentukan oleh kualitas ekosistem DAS-DAS besar yang mempengaruhinya. Berdasarkan itu, mudah dipahami bahwa arahan pengembangan ekologi DAS perlu dirancang dengan baik.

Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Daerah Aliran Sungai (DAS) harus dilihat sebagai ekosistem yang perlu dijaga kualitas dan keberlanjutan fungsinya (misalnya untuk menjaga daya dukung sumber daya DAS dan kehidupan manusia), sekaligus sebagai kawasan pengembangan ekonomi. Aspek ini juga dibahas pada Rencana Pengembangan Kawasan Lindung dan Penentuan Kawasan Strategis Kepentingan SDA. Pengembangan ekologi DAS harus terintegrasi dengan pengembangan fungsi ekonominya, seperti PLTA, air irigasi dan fungsi-fungsi lain, tidak bisa jalan sendiri-sendiri.

Tabel 2.4 Kebijakan pengelolaan DAS-DAS utama di Sulawesi Barat

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa DAS yang memiliki persentase wilayah kritis terbanyak adalah Mamuju sebesar 44,9 persen dari total wilayah DAS, menyusul DAS Mandar sebesar 39,2 persen, DAS Mapilli 34 persen dan DAS Saddang 27,1 persen. DAS Karama yang merupakan wilayah DAS terbesar dengan luas 344.899 ha, juga merupakan DAS dengan persentase lahan kritis yang besar yakni sebesar 24,54 persen dari total wilayah DAS Karama. Adapun data kekritisian Daerah-daerah Aliran Sungai di wilayah provinsi Sulawesi Barat, dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Kondisi Kekritisian DAS-DAS di Provinsi Sulawesi Barat

DAS	Tdk Kritis (ha)	% DAS	Kritis (ha)	% DAS	Total DAS (ha)	Persen (%)
DAS Budong-Budong	260 823	80	65 756	20	326 579	19,3
DAS Karama	260 240	75	84 659	25	344 899	20,4
DAS Karossa	141 362	93	10 024	7	151 386	8,9
DAS Lariang	155 897	93	11 688	7	167 585	9,9
DAS Malunda	66 218	98	1 549	2	67 767	4,0
DAS Mamasa	75 234	84	13 872	16	89 106	5,3
DAS Mamuju	82 415	55	67 066	45	149 481	8,8
DAS Mandar	56 772	61	36 656	39	93 428	5,5
DAS Mapilli	151 659	66	77 983	34	229 643	13,6
DAS Saddang	52 401	73	19 448	27	71 850	4,2
Grand Total	1 303 022	77	388 701	23	1 691 723	100,0

Sumber: Materi Teknis RTRW Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034

Pengembangan DAS ke depan hendaknya dilakukan dengan pertimbangan prioritas yang mengacu pada pengendalian lahan kritis dengan kegiatan seperti reboisasi, Penghijauan, Pembinaan pertanian berbasis konservasi, penggalangan partisipasi masyarakat dalam perhutanan desa. Perlindungan terhadap aktivitas pengrusakan hutan melalui pengawasan yang ketat terhadap aktivitas penebangan liar, Pengetatan pemberian izin bagi masyarakat atau instansi yang akan mengelola kawasan hutan. DAS DAS yang perlu mendapat prioritas adalah Karama, Mamuju, Budong-Budong, Karossa dan Mapilli yang memiliki tingkat kekritisian yang besar.

2.1.1.5 Klimatologi

Iklim sangat berpengaruh terhadap keadaan lingkungan, khususnya terhadap siklus hidrologi, sumber daya tanah, air dan tanaman. Umumnya, ketersediaan air bagi kepentingan makhluk hidup di atas permukaan tanah sangat ditentukan oleh keadaan iklim dan ekosistemnya. Berada di bawah pengaruh iklim tropis dengan curah hujan tinggi, seringkali terjadi pencucian hara dan translokasi partikel-partikel tanah, baik secara lateral yang membawanya ke daerah aliran, maupun vertikal pada tubuh tanah dari horizon atas ke horizon tanah di bawahnya.

Iklim di wilayah Sulawesi Barat umumnya tropis karena dilalui juga garis khatulistiwa serta mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi. Sebagai daerah yang memiliki pinggir pantai, yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, maka Sulawesi Barat memiliki pola suhu udara yang bergantung kepada musim angin laut. Pada tahun 2020 suhu udara di Sulawesi Barat berkisar antara 20,6°C hingga 35°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 28,1°C, Sedangkan kelembaban udara dalam setahun berkisar antara 46,00 persen sampai dengan 100 persen. Pemantauan suhu udara di Sulawesi Barat, terpantau oleh Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang berada di Kabupaten Majene.

Tabel 2.6 Keadaan Suhu dan Kelembaban Udara menurut Bulan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Bulan	Suhu Udara (°c)			Kelembaban Udara (%)
	Minimal	Maksimal	Rata-Rata	
Januari	20,60	28,16	35,00	80,03
Februari	21,40	28,30	33,80	80,50
Maret	22,00	28,25	33,40	80,67
April	23,00	28,28	35,00	80,48
Mei	24,00	28,38	34,20	81,70
Juni	23,60	27,93	32,40	79,34
Juli	20,60	27,45	33,60	79,05
Agustus	22,20	28,07	33,00	74,09
September	24,00	28,07	33,00	74,09
Oktober	23,80	28,43	34,20	75,37
November	23,80	28,43	34,40	80,13
Desember	23,40	27,28	33,60	80,91

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Dalam perkembangannya, luas kawasan hutan di Indonesia dan khususnya di Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami banyak perubahan, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data spasial dengan mengakomodir proses-proses pengukuhan kawasan hutan seperti tata batas, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan secara parsial. Luas kawasan hutan di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 sebesar 1.069.989 Ha, Rincian luas kawasan hutan pada masing-masing Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun SK 2020 (hektar)

Kabupaten	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Konversi	Jumlah
Majene	45.052	0	7.627	0	0	52.679
Polewali Mandar	65.814	986	23.036	0	0	89.836
Mamasa	90.151	63.261	49.539	0	368	203.319
Mamuju	128.691	71.883	85.242	41.027	10.851	337.694
Pasangkayu	99.530	612	54.603	2.264	8.988	165.997
Mamuju Tengah	26.795	53.604	111.202	27.639	1.224	220.464
Sulawesi Barat	456.033	190.346	331.249	70.930	21.431	1.069.989

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2021

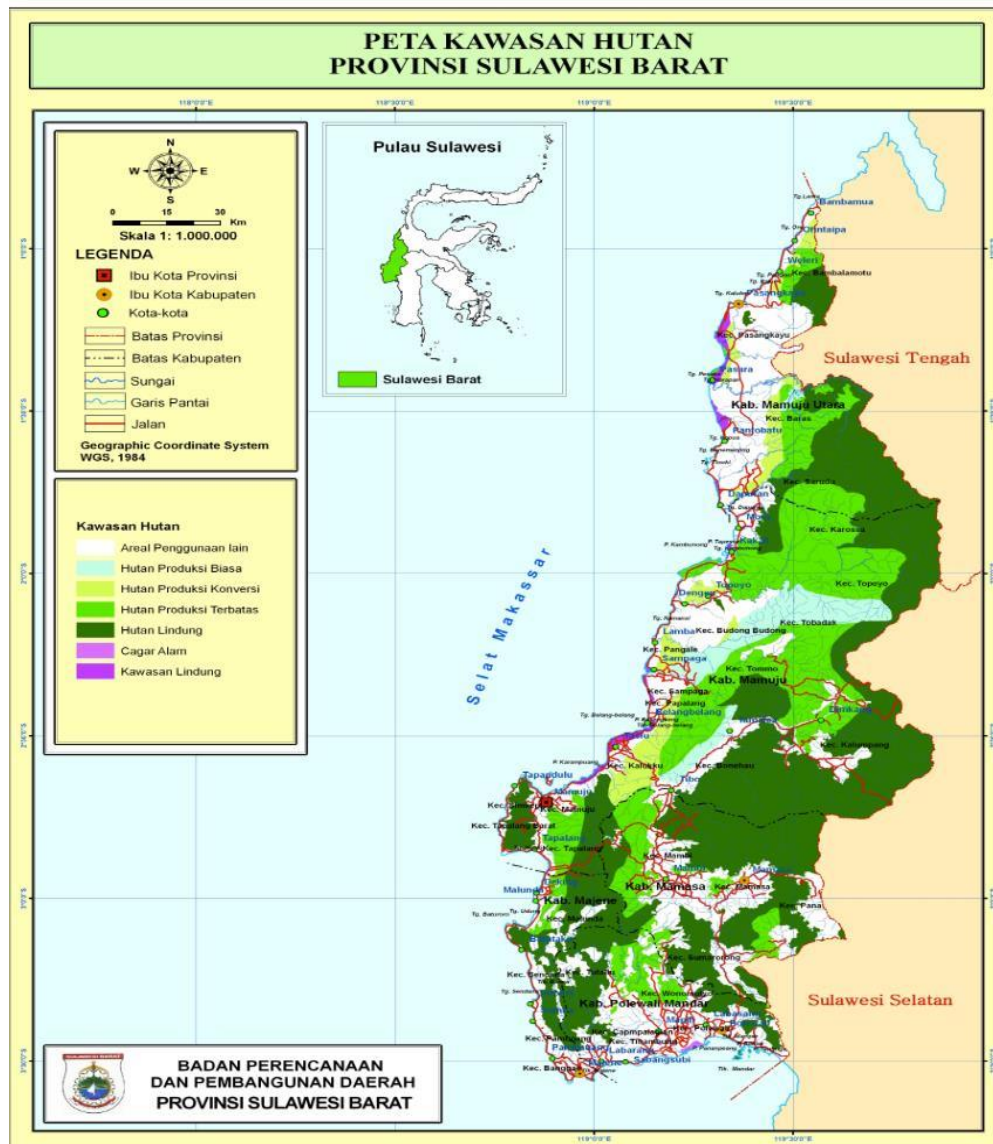
a. Kawasan Lindung

Kawasan lindung wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (2014-2034) seluas 665.763,85 Ha, meliputi:

1. Kawasan Hutan Lindung

Luas Kawasan Hutan Lindung di Sulawesi Barat sebesar 450.639,13 (RTRW Prov. Sulbar 2014-2034) yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Wilayah Provinsi meliputi Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi dan Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Provinsi yang merupakan kewenangan provinsi. Kawasan Lindung yang ditetapkan dalam RTRWN disebut Kawasan Lindung Nasional merupakan kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Gambar 2.5 Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air, meliputi; Hutan Lindung Mamuju, Hutan Lindung Mamuju Tengah, Hutan Lindung Pasangkayu, Hutan Lindung Majene, Hutan Lindung Polewali Mandar, Hutan Lindung Mamasa. Kawasan Perlindungan setempat dengan arah pemanfaatan ruang meliputi sempadan pantai sepanjang kurang lebih 781 km di beberapa kabupaten, kawasan pantai berhutan bakau primer, sempadan sungai dengan lebar sempadan 100 meter serta kawasan sekitar DAM.

2. Rencana Kawasan Suaka Alam, Pelestarian dan Cagar Budaya.

Rencana Kawasan Suaka Alam berdasarkan arah pemanfaatan ruang di RTRW Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas taman nasional Ganda Dewata, Kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa (SM), Taman wisata alam (TWA), Taman wisata alam laut Bala balakang, Taman wisata Goa alam.

3. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Sulawesi Barat meliputi:

- a) Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
 - b) Tsunami di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
 - c) Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa dan Mamuju Tengah;
 - d) Rawan Banjir di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
 - e) Rawan Abrasi di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
 - f) Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh pantai Provinsi Sulawesi Barat;
 - g) Potensi banjir bandang di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
 - h) Potensi likuifaksi di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
 - i) Potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah;
 - j) Potensi bahaya kekeringan di Kabupaten Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Pasangkayu dan Mamuju Tengah.
- b. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya Provinsi merupakan kawasan yang mempunyai nilai strategis provinsi yang dapat dikembangkan. Di mana kawasan budidaya Provinsi meliputi : Kawasan hutan produksi (Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Konversi); Kawasan Hutan Rakyat; Kawasan pertanian; Kawasan perikanan; Kawasan peternakan; Kawasan pertambangan; Kawasan Industri; Kawasan Perdagangan; Kawasan Pariwisata; Kawasan Permukiman, dan; Kawasan peruntukan lainnya.

2.1.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga menjadikan Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah yang berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam. Bencana yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun tahun 2021 relatif sedikit jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.

Tabel 2.8 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

Kabupaten	Angin Puting Beliung	Banjir	Banjir Rob	Gempa Bumi	Tsunami	Gempa Bumi dan Tsunami	Tanah Longsor
Majene	1	3	-	2	-	-	3
Polewali Mandar	1	2	-	1	-	-	3
Mamasa	-	1	-	1	-	-	1
Mamuju	2	3	2	2	-	-	3
Pasangkayu	-	1	-	-	-	-	-
Mamuju Tengah	-	2	-	-	-	-	-
Sulawesi Barat	4	12	2	4	-	-	10

Sumber : BPBD Provinsi Sulawesi Barat 2022

Wilayah rawan bencana sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat 2014 - 2034 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju (Kecamatan Tapalang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, kecamatan Simboro, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Belang-Belang, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Sampaga); di Kabupaten Mamuju Tengah (Kecamatan Pangale, dan Budong-Budong); Kabupaten Polewali Mandar (Kecamatan-Kecamatan Tutallu, Wonomulyo); Kabupaten Pasangkayu (Bambalamotu, Bambaيرا, Pasangkayu, Baras, Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Simboro Kepulauan, Tapalang Barat, Sampaga, dan Papalang); Kabupaten Mamuju Tengah (Budong-Budong, Topoyo dan Karossa), Majene (Malunda, Sendana, Pamboang, Banggae) dan Polewali Mandar (Tinambung, Campalagian, Limboro, Balanipa, Luyo, Mapilli, Wonomulyo, Anreapi dan Polewali).
- b. Tsunami di Kabupaten Pasangkayu (Bambaيرا, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-Budong); Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Bala balakang, Simboro, Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).
- c. Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Kalukku, Simboro, Tapalang Barat), Majene (Ulumanda, Malunda, Tubo, Tammerodo, Pamboang, Banggae), Mamasa (seluruh kecamatan) dan Polewali Mandar (Tutar, Matangnga, Limboro, Allu, Luyo, Anreapi dan Bulu).
- d. Rawan Banjir di Kabupaten Pasangkayu (Sarjo, Bambalamotu, Pasangkayu, Lariang, Tikke dan Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Kalukku, Sampaga, Papalang); Mamuju Tengah (Topoyo dan Budong- Budong, dan Karossa), Majene (Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana dan Malunda) dan Polewali Mandar (Allu, Limboro, Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Binuang dan Polewali).
- e. Rawan Abrasi di Kabupaten Pasangkayu (Bambaيرا, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-budong); Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Bala-Balakang, Simboro, Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae,

Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).

- f. Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh pantai Provinsi Sulawesi Barat, di kepulauan Bala-Balakang Kabupaten Mamuju dan pulau Lere-Lerekang di Kabupaten Majene.

Mitigasi bencana jangka panjang terdiri dari kegiatan perencanaan untuk jangka sepuluh tahun (Tahun 2014 – 2024) atau dua puluh tahun mendatang (Tahun 2014 – 2034). Untuk mitigasi bencana jangka panjang, alternatif kegiatan yang dominan (misalnya) berupa :

- 1) Pengembangan program konservasi dan pengendalian banjir;
- 2) Pengembangan program penataan kawasan (sistem lahan dan sistem alur);
- 3) Pengembangan program operasi dan pemeliharaan jaringan drainase makro dan mikro termasuk instrumentasi early warning sistem, serta pemberdayaan sumber daya manusia.

Kawasan yang diidentifikasi berpotensi rawan bencana di Provinsi Sulawesi Barat berupa gerakan tanah terutama pada Daerah Tobadak, Budong-Budong, Tommo, Kalumpang, Bonehau, Mamasa, Sumarorong dan Polewali, berupa Longsor bahan rombakan terutama pada Daerah Malunda, dan Batu Takuk, potensi tsunami terutama pada Daerah Campalagian, Sabang Subbik, Topoyo, Karossa dan Sarudu, potensi pusat gempa terutama pada Daerah Tutallu, Sumarorong, Mambi dan Wonomulyo, potensi pusat longsor bongkah terutama pada daerah Tutallu, Malunda dan Mambi, dan potensi wilayah kegempaan terutama pada daerah Mamasa, Mambi, Tappalang, Mamuju, Kalukku, Simboro, Bonehau, Belang-Belang, Papalang, Sampaga, Pangale dan Budong-Budong. Potensi frekuensi banjir tinggi terutama pada DAS Budong-Budong (Daerah Topoyo sampai mempengaruhi jalan arteri primer), DAS Karama, wilayah hulu DAS Mamasa, DAS Mapilli dan wilayah hulu DAS Saddang.

Curah hujan yang tinggi di Sulawesi Barat, topografi bergunung cukup dominan, tanah yang cukup labil dan besarnya harapan penduduk pada pemanfaatan sumber daya lahan yang ada, kawasan tertentu di Sulawesi Barat tergolong rentan terhadap longsor. potensi kekritisian, erosi dan longsor di Sulawesi Barat dirinci berdasarkan DAS. Hampir di semua DAS ditemukan kawasan rawan longsor yang luas. Karena itu, sangat penting untuk membangun sistem peringatan dini, prasarana pengamanan dan evakuasi, serta prosedur pengamanan di daerah-daerah yang dikategorikan rawan bencana longsor.

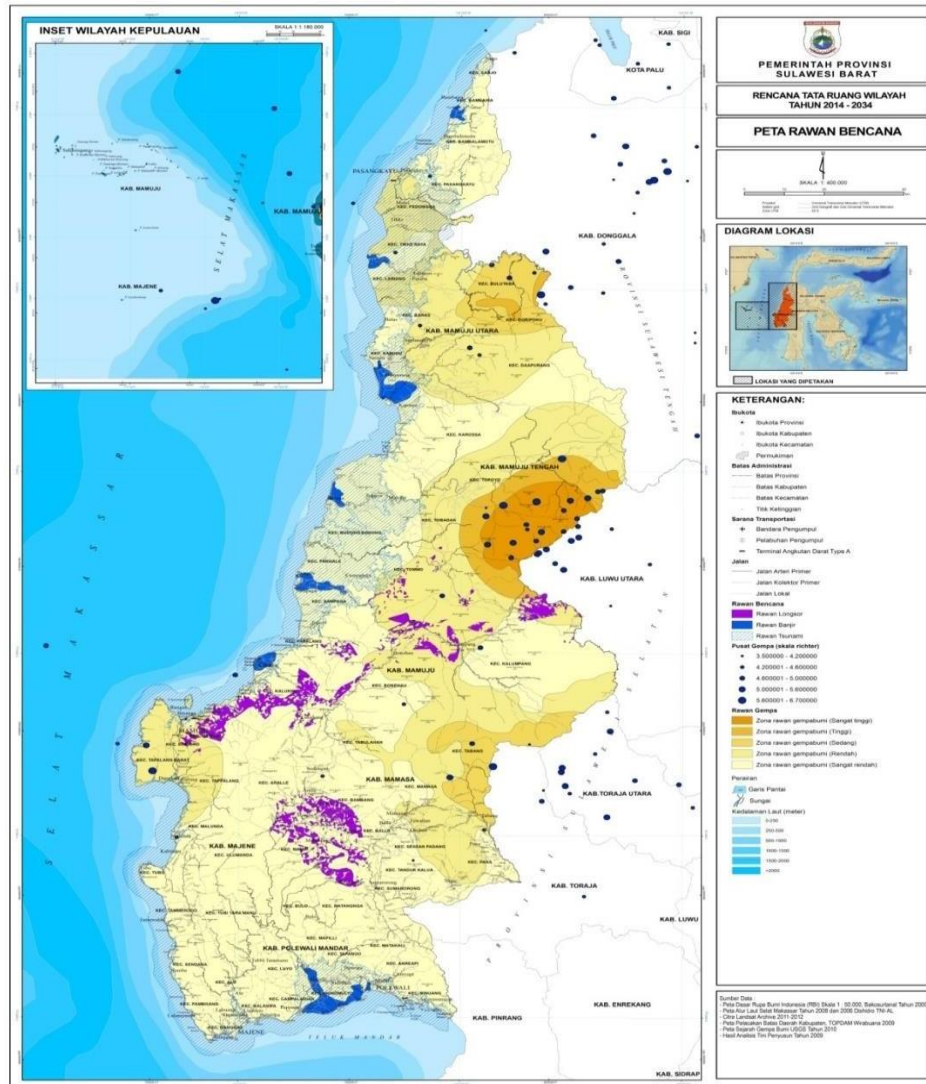
Tabel 2.9 Arahan kebijakan pengendalian DAS dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat

Nama DAS atau Kelompok DAS	Luas (ha)	Areal kritis (ha)	Potensi kekritisian			Potensi Erosi			Potensi longsor			Arahan kebijakan Konsel
			Kriteria	%	Rank	Kriteria	%	Rank	Kategori	%	Rank	
Budong-Budong	326.579	65.756	Kritis	20,1	6	Tinggi-Sgt tinggi	0,2	7	Cukup tinggi-Tinggi			
Karama	344.899	84.659	Kritis	24,5	5	Tinggi-Sgt tinggi	4,4	2	Cukup ti			
Karossa/Benggoulu	151.395	10.024	Kritis	6,6	9	Tinggi-Sgt tinggi	0,0	8				
Lariang/Pasangayu	167.587	11.688	Kritis	7,0	8	Tinggi-Sgt tinggi						
Malunda	67.767	1.549	Kritis	2,3	10	Tingg						
Mamasa	89.106	13.872	Kritis	15,6								
Mamuju	149.487	67.067	Kr									
Mandar	93.462											
Mapilli	2											
Saddang (hulu)												
Tota												

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Langkah pencegahan yang paling mendasar adalah mempertahankan semua kawasan yang dikategorikan sebagai rawan longsor untuk tidak dijadikan lahan budidaya, permukiman dan budidaya pertanian, untuk menghindari meluasnya kawasan rawan lebih lanjut. Untuk itu, perlu merujuk pada peta potensi rawan bencana. Kawasan yang terutama penting untuk mendapatkan perhatian adalah yang tergolong potensi longsonya tinggi, yaitu sebagian besar wilayah di Kabupaten Mamasa, sebagian wilayah Kecamatan Mamuju dan Kalukku, serta di sejumlah lokasi di Kecamatan Kalumpang dan Bonehau dalam wilayah DAS Karama. Kabupaten Polewali Mandar dan Majene juga memiliki wilayah yang tingkat kerawanan longsonya cukup tinggi dengan sebaran yang luas.

Gambar 2.6 Peta Rawan Bencana di Sulawesi Barat



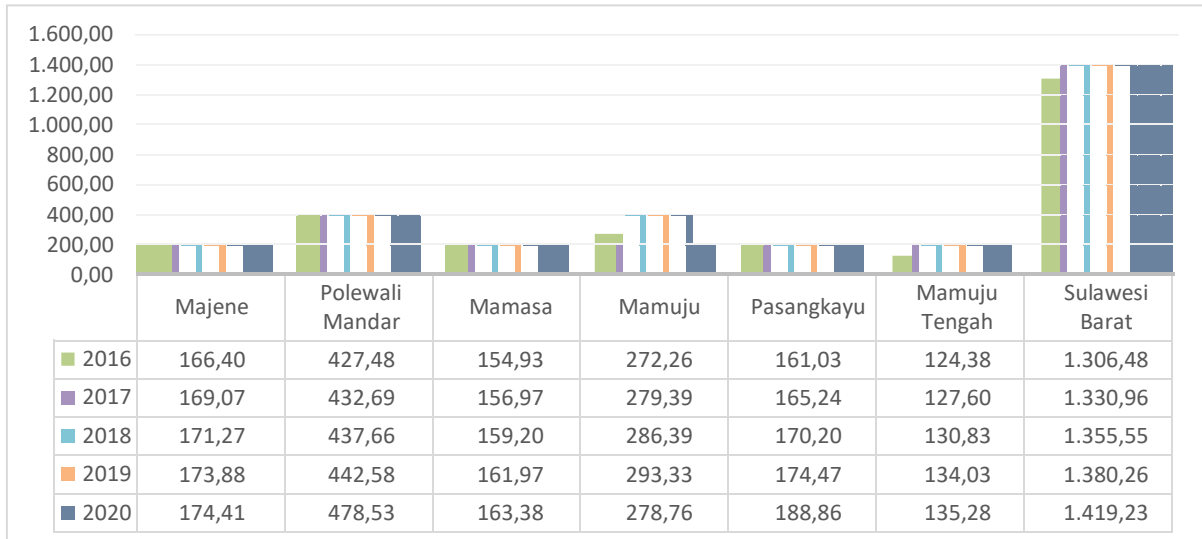
Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

2.1.2 Aspek Demografi

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2020 provinsi Sulawesi Barat memiliki jumlah penduduk sekitar 1.419.229 dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 720.187 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 699.042 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 103 artinya terdapat 103 laki laki untuk setiap 100 perempuan.

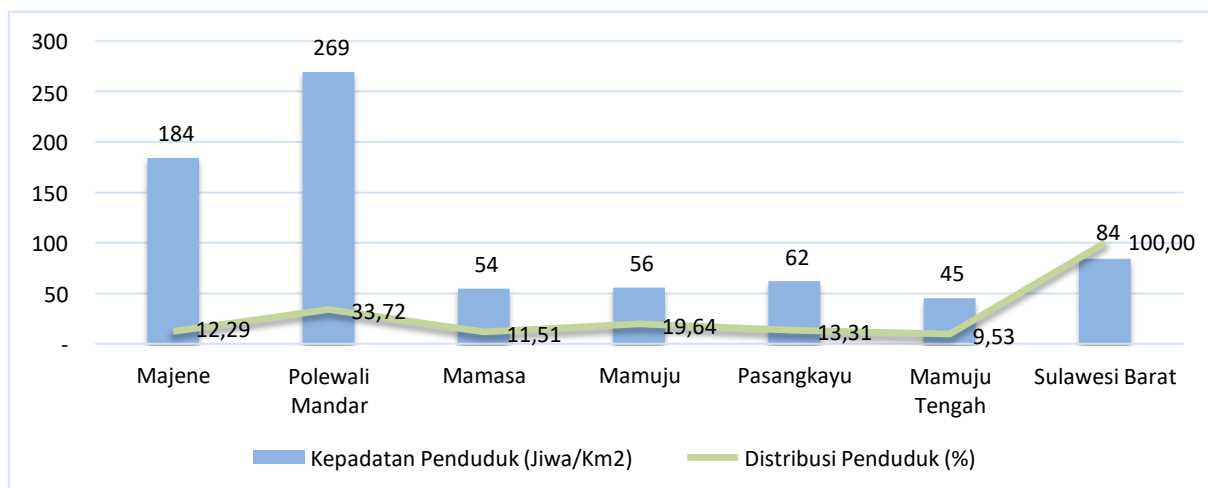
Grafik 2.1 Jumlah Penduduk Sulawesi Barat Tahun 2016-2020 (ribu)



Sumber: BPS, Hasil SP2020

Penduduk terbesar berada di Kabupaten Polewali Mandar sebesar 33,72 persen dan terkecil di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 9,53 persen dari total penduduk di Sulawesi Barat. Kepadatan Penduduk di 6 kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 237 jiwa/km², selanjutnya Kabupaten Majene sebesar 184 jiwa/km², Kabupaten Pasangkayu 62 jiwa/km², Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa dengan kepadatan yang sama sebesar 56 jiwa/km², serta terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 45 jiwa/km² pada tahun 2020.

Grafik 2.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten dan Provinsi Tahun 2020



Sumber: BPS, Hasil SP2020

Penduduk di Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk yang beragama Islam yaitu sebesar 80,24 persen dari total penduduk, kemudian Kristen Protestan sebesar 16,18 persen serta agama yang minoritas yaitu Katolik, Budha dan Hindu dengan jumlahnya di bawah rata-rata dua persen. Adapun gambaran persentase penduduk menurut Kabupaten dan Agama seperti yang tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

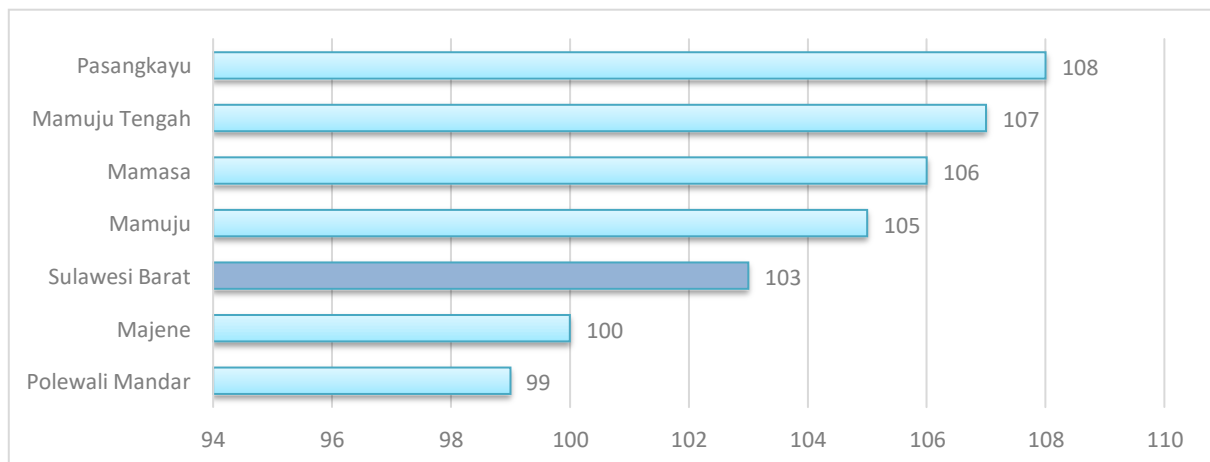
Kabupaten	Persentase Penduduk					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Majene	99,66	0,16	0,10	0,05	0,03	0
Polewali Mandar	95,04	4,13	0,58	0,23	0,02	0
Mamasa	22,72	70,23	4,20	2,82	0,03	0
Mamuju	81,52	16,11	0,67	1,64	0,05	0
Pasangkayu	85,83	7,87	1,60	4,66	0,04	0
Mamuju Tengah	79,04	12,43	1,70	6,56	0,27	0
Sulawesi Barat	80,24	16,18	1,30	2,22	0,06	0

Sumbr: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.1.2.2 Rasio Jenis Kelamin

Penduduk di Sulawesi didominasi oleh laki-laki di mana perbandingan rasionya sebesar 103. Rasio jenis kelamin tiap kabupaten juga berbeda di mana untuk Kabupaten Polewali Mandar mempunyai rasio jenis kelamin di bawah dari nilai 100 (seratus) sebesar 99 untuk Kabupaten Polewali Mandar artinya bahwa untuk setiap seratus penduduk perempuan hanya ada 99 penduduk laki-laki atau dengan kata lain penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. Jumlah rasio terbesar berada di Kabupaten Pasangkayu yang sebesar 108 sedangkan untuk kabupaten lainnya dengan nilai rasio lebih besar dari seratus, seperti yang tampak pada tabel berikut ini.

Grafik 2.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



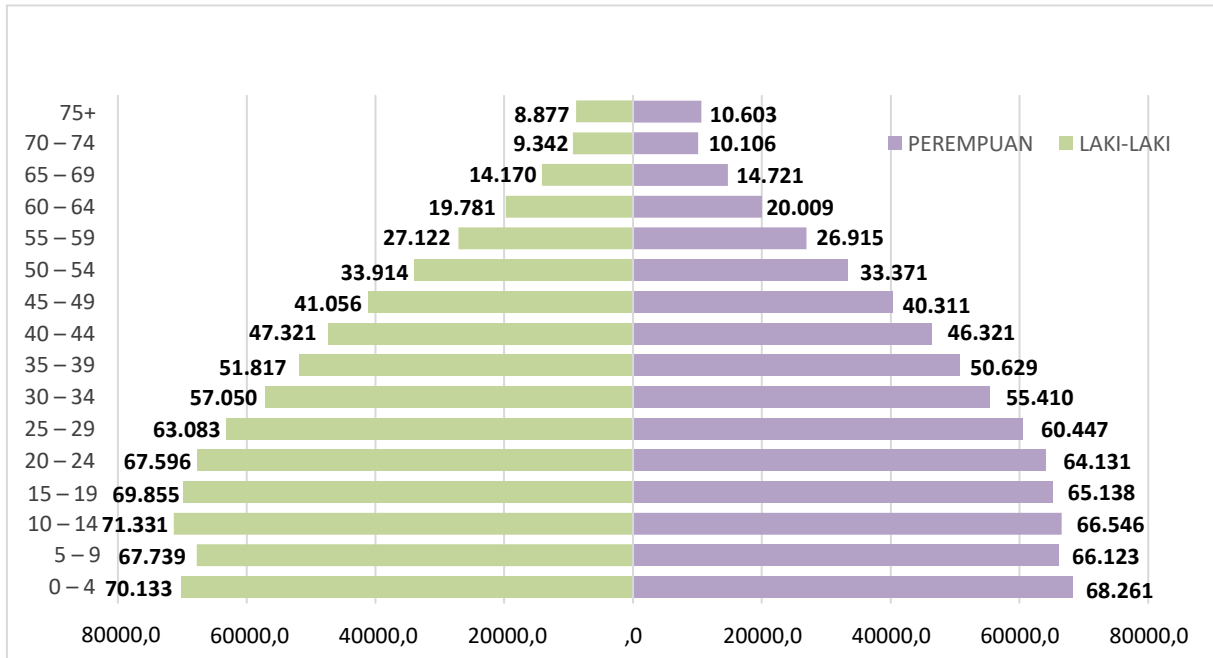
Sumber: BPS, Hasil SP2020

2.1.2.3 Struktur Usia Penduduk

Struktur Usia penduduk di Sulawesi Barat di mana angka terbesar berada pada kelompok usia muda yaitu antara usia 0-49 tahun, hal itu menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk pada usia muda yang cukup tinggi. Jumlah penduduk usia belum produktif antara 0-14 tahun sebesar 410.133 jiwa, sedangkan jumlah penduduk usia produktif antara 15-64 tahun sebesar 941.277 jiwa serta jumlah penduduk usia tidak produktif \geq 65 tahun sebanyak 67.819 jiwa. Disamping itu Struktur Usia

penduduk di Provinsi Sulawesi Barat masih berada pada struktur umur muda di mana persentase penduduk umur muda jauh lebih tinggi dibanding yang berumur tua. Dari piramida penduduk di bawah ini terlihat bahwa bagian dasar dari piramida yang cukup lebar dan bagian puncak yang sempit mencerminkan tingkat kelahiran dan kematian yang relatif masih tinggi.

Diagram 2.1 Piramida Kependudukan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Sumbr: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 – 4	70 133	68 261	138 394
5 – 9	67 739	66 123	133 862
10 – 14	71 331	66 546	137 877
15 – 19	69 855	65 138	134 993
20 – 24	67 596	64 131	131 727
25 – 29	63 083	60 447	123 530
30 – 34	57 050	55 410	112 460
35 – 39	51 817	50 629	102 446
40 – 44	47 321	46 321	93 642
45 – 49	41 056	40 311	81 367
50 – 54	33 914	33 371	67 285
55 – 59	27 122	26 915	54 037
60 – 64	19 781	20 009	39 790
65 – 69	14 170	14 721	28 891
70 – 74	9 342	10 106	19 448
75+	8 877	10 603	19 480
Jumlah	720 187	699 042	1 419 229

Sumbr: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Apabila dilihat dari struktur usia penduduk menurut kelompok umur tahun 2019 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) sebesar 1.068.098 lebih banyak dibandingkan usia non produktif (0-14 tahun dan 65 + tahun)

sebesar 416,311 jiwa. Proporsi penduduk usia 0 – 14 Tahun turun dari 36,91 persen pada tahun 2020 menjadi 28,90 persen pada tahun 2020. Dalam periode yang sama penduduk usia kerja 15 – 64 tahun meningkat dari 59,64 persen menjadi 66,32 persen. Sementara penduduk usia 65 tahun ke atas naik dari 3,45 persen menjadi 4,78 persen.

Berdasarkan gambaran tersebut struktur umur penduduk Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh generasi milenial (24-39 tahun) sebesar 364,27 ribu jiwa (25,67 persen) dan generasi Z (8-23 tahun) sebesar 432,55 ribu jiwa (30,48 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa Sulawesi Barat telah mengalami bonus demografi. Di mana jumlah usia produktif lebih banyak daripada jumlah usia non produktif.

2.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

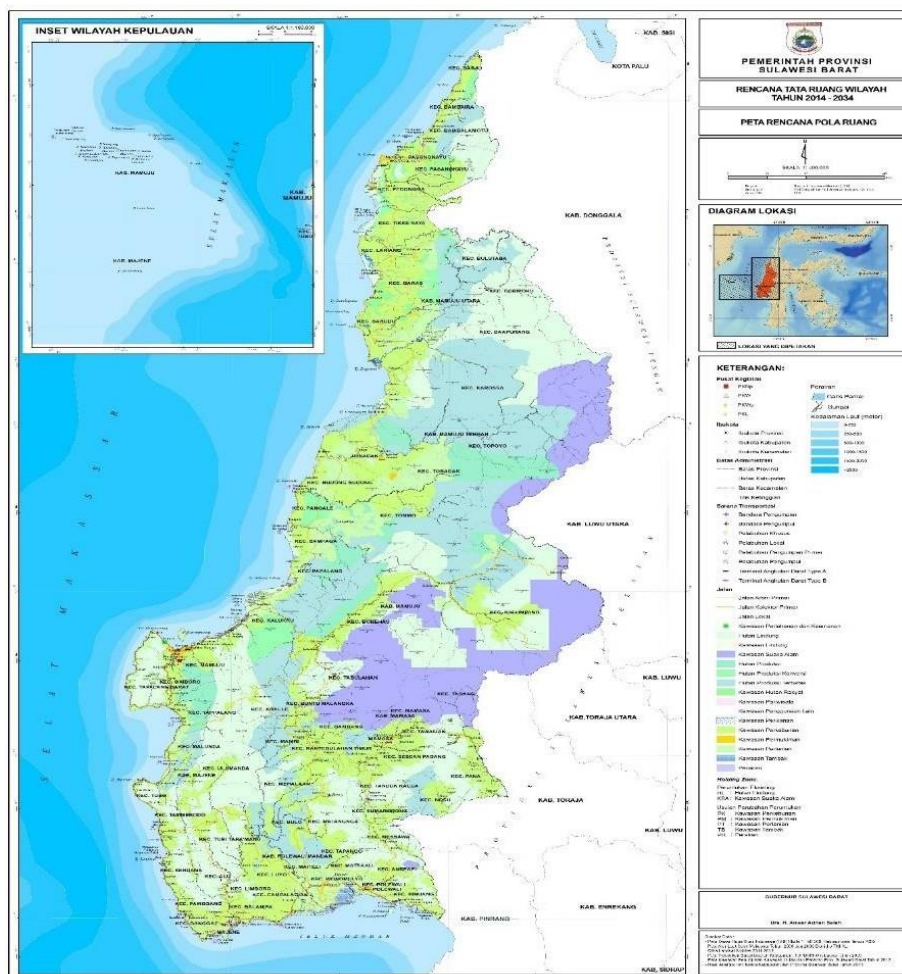
Potensi pengembangan wilayah sebagaimana yang sudah dikaji dalam Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kawasan Budidaya di Sulawesi Barat dengan luasan sebesar 10.168,88 Ha.

Pengembangan Kawasan pada beberapa sektor harus sesuai dengan Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi berdasarkan RTRW, hal itu untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, menghindari penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, menjaga keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai alat pengendali pengembangan kawasan, mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan untuk melindungi kepentingan umum.

Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Barat Strategi pengembangan kawasan terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Mamuju (Ibukota Kabupaten Mamuju) – Tampa Padang – Belang-Belang (MATABE) yang potensial berfungsi sebagai pusat kegiatan terpadu kepelabuhanan, kebandarudaraan, industri, perdagangan, pergudangan, peti kemas dan pariwisata;
- b. mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Majene (ibukota Kabupaten Majene) sebagai pusat pendidikan, Pasangkayu (ibukota Kabupaten Pasangkayu) sebagai PKW yang potensial dikembangkan menjadi agropolitan dan mempromosikan Polewali (ibukota Kabupaten Polewali Mandar) sebagai PKWp yang potensial dikembangkan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa, Mamasa (ibukota Kabupaten Mamasa) sebagai PKWp yang potensial dikembangkan menjadi pusat pelayanan pariwisata
- c. mengembangkan Pusat-Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Tobadak (Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah) sebagai pusat pengembangan Kota Terpadu Mandiri agropolitan), dan Wonomulyo sebagai sentra lumbung beras.

Gambar 2.7 Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

2.1.3.1 Kawasan Hutan Produksi

Luas Hutan Produksi di Sulawesi Barat sebesar 423.424 hektar, terdiri dari hutan produksi terbatas 331.249 hektar, hutan produksi tetap 70.930 hektar dan hutan produksi dapat dikonversi 21.063 hektar. Kawasan hutan produksi ini selain pernah dimanfaatkan sebagai kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), juga sebagian telah dikonversi oleh rakyat sebagai lahan budidaya tanaman perkebunan (terutama kakao dan sawit, khususnya di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu). Pada bekas areal HPH, banyak dari kawasan ini yang belum dihutankan kembali, hanya dibiarkan terlantar setelah kayunya diambil. Sebagian dari kawasan ini termasuk dalam wilayah yang tergolong rawan longsor atau menjadi wilayah tangkapan air dari DAS krusial, sehingga perlu direhabilitasi. Rencana pengembangan Hutan produksi berdasarkan arahan RTRW Provinsi Sulbar terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu,
- b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.
- c. Kawasan hutan produksi konversi, yang terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa.

2.1.3.2 Kawasan Pertanian

Sulawesi Barat berada pada iklim tropis, di mana kondisi ini menjadikan Sulawesi Barat sangat potensial terhadap pengembangan sektor pertanian, hal ini juga didukung oleh potensi lahan pertanian seluas 1.429,29 km² dan lahan perkebunan seluas 3.969,32 km² yang ada di Sulawesi Barat. Pengembangan kawasan pertanian berdasarkan arahan RTRW Sulawesi Barat tahun 2014-2034 adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan yang berpotensi untuk budidaya komoditi unggulan tanaman pangan alternatif padi sawah dan palawija berada di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene;
- b. Kawasan potensial budidaya tanaman pangan unggulan Hortikultura di Kabupaten Mamasa;
- c. Kawasan Pertanian berkelanjutan (sawah beririgasi teknis, yang dipaduselaraskan dengan perencanaan dan manajemen DAS dengan lokasi Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Polewali Mandar;
- d. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan sawit di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu;
- e. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan Kakao di Seluruh kabupaten di wilayah Prov.Sulbar;
- f. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan Kelapa di Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Pasangkayu dan Kabupaten Majene;
- g. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan jeruk di Kabupaten Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Pasangkayu;
- h. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan perkebunan kopi arabika, robusta dan teh di kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa;
- i. Kawasan potensial budidaya komoditi unggulan tanaman obat dan aromatika (nilam) di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 2.12 Luas Lahan Sawah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021

Kabupaten	Luas Lahan Tahun (Ha)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Majene	1.426	731	739,54	739,54	739,54
Polewali Mandar	18.453	15.621	16614,71	16614,71	16614,71
Mamasa	12.867	11.853	10176,08	10176,08	10176,08
Mamuju	16.375	7.547	7471,45	7471,45	7471,45
Pasangkayu	3.982	2.255	811,96	811,96	811,96
Mamuju Tengah	11.129	4.209	3671,24	3671,24	3671,24
Sulawesi Barat	64.232,00	42.216,38	39.484,98	39.484,98	39.484,98

Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2022

Ket: Tahun 2017 data diambil dari BPS tanpa data spasial, tahun 2018 dan 2019 merupakan data rilis BPN beserta data spasial, Tahun 2020 dan 2021, belum dilakukan update data lahan sawah.

Tabel 2.13 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (hektar)

Kabupaten	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Sementara Tidak Diusahakan
Majene	12 014	7 292	3 316
Polewali Mandar	20 246	17 361	6 488
Mamasa	17 189	16 163	12 350
Mamuju	19 378	8 080	17 686
Pasangkayu	48 517	43 531	11 229
Mamuju Tengah	17 477	3 883	9 486
Sulawesi Barat	134 821	96 310	60 555

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.1.3.3 Kawasan perikanan

Sulawesi Barat berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP.713). Alur Pelayaran Internasional (ALKI-II), dengan luas Wilayah Laut ± 20.342 Km². Secara geografis, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat. Potensi Perikanan Tangkap sebesar 929.700 ton/tahun dan hanya sekitar 10 (sepuluh) persen saja yang telah dimanfaatkan. Potensi Lahan Perikanan Budidaya sebesar 74.300 Ha (Budidaya Laut 20.300 Ha, Budidaya Tambak 30.000 Ha dan Budidaya Air Tawar 24.000 Ha. Lahan Perikanan Budidaya Termanfaatkan Seluas 24.748,9 Ha terdiri dari 13.769 Ha budidaya tambak, 8.478 Ha Budidaya air tawar dan 2.501,5 Ha Budidaya laut (DKP Prov. Sulbar 2016). Kondisi ini memberi peluang yang cukup potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan. Berdasarkan arahan pengembangan wilayah dalam RTRW Provinsi Sulawesi Barat maka kawasan perikanan terbagi atas:

- a. Kawasan tambak udang dan ikan bandeng terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene;
- b. Kawasan budidaya perikanan air tawar terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa;
- c. Kawasan budidaya rumput laut dan ikan laut yang berada di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Pasangkayu;
- d. Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi (Majene), Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Banggae Majene, Kasiwa (Mamuju), Lantora, Campalagian (Polewali Mandar) dan Salotambung (Majene) beserta area pemanfaatan di wilayah lautnya.

Tabel 2.14 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Budidaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Kabupaten	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung	Sawah	Jumlah
Majene	0	315	190	0	0	0	505
Polewali Mandar	354	3.003	473	0	10	25	3.864
Mamasa	0	0	1.743	0	0	10.774	12.517
Mamuju	467	891	1.012	0	0	0	2.369
Pasangkayu	0	2.129	212	0	0	0	2.341
Mamuju Tengah	20	607	350	0	0	0	978
Sulawesi Barat	840	6.945	3.980	0	10	10.799	22.575

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.15 Jumlah Perahu/Kapal Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kapal Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Kabupaten	Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor
Majene	862	1.969	1.597
Polewali Mandar	525	1.195	839
Mamasa	-	-	-
Mamuju	603	2.704	942
Pasangkayu	366	1.038	95
Mamuju Tengah	151	761	15
Sulawesi Barat	2.507	7.667	3.487

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.1.3.4 Kawasan Peternakan

Kawasan Peternakan berdasarkan arah pengembangan wilayah di RTRW Provinsi Sulawesi Barat antara lain :

- Kawasan pengembangan peternakan kambing yang meliputi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene;
- Kawasan pengembangan peternakan sapi yang meliputi kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu.

Tabel 2.16 Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (ekor)

Kabupaten	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
Majene	-	18 543	176	213	72 514	-	-
Polewali Mandar	-	36 792	408	486	99 087	-	1 155
Mamasa	-	9 350	7 316	470	254	-	105 588
Mamuju	-	18 883	811	106	15 261	-	30 013
Pasangkayu	-	15 775	7	3	5 105	-	4 326
Mamuju Tengah	-	13 319	169	101	8 840	-	29 565
Sulawesi Barat	-	112 662	8 887	1 379	201 061	-	170 647

Lanjutan Tabel di atas

Kabupaten	Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik/Itik Manila
Majene	194 927	44 780	608 547	18 783
Polewali Mandar	1 913 682	99 158	970 728	210 738
Mamasa	94 165	74 548	18 804	33 445
Mamuju	1 255 146	72 983	860 714	39 807
Pasangkayu	412 692	14 780	573 749	16 856
Mamuju Tengah	1 575 446	39 459	48 288	40 234
Sulawesi Barat	5 446 058	345 708	3 080 830	359 863

Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.1.3.5 Kawasan Pertambangan

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Provinsi yang kaya akan sumber daya alam diantaranya galian logam meliputi emas, biji besi, perak dll. serta potensi akan minyak dan gas bumi yang tersebar di beberapa wilayah di Sulawesi Barat. Berdasarkan arahan RTRW terkait pengembangan kawasan pertambangan diantaranya yaitu :

- a. Kawasan potensial tambang galian logam yang tersebar di beberapa kabupaten antara lain tambang emas (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa); tambang bijih besi (Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamasa); tambang galena (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Pasangkayu); tambang perak (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa); tambang mangan (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa).
- b. Kawasan potensial tambang galian industri meliputi : tambang mika (kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa); Tambang gypsum (Kabupaten Polewali Mandar); Tambang Sulfat (Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar); tambang zeolit (Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa); tambang Pasir Kuarsa (Kabupaten Mamasa).
- c. Kawasan potensial tambang minyak dan gas bumi (Migas), Blok Suremana, Blok Pasangkayu dan sebagian Blok Kuma di Kabupaten Pasangkayu; sebagian Blok Kuma di Kabupaten Pasangkayu, Blok Budong-Budong dan Blok Karama di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah; Blok Malunda dan Blok Karana di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene, blok sebuku di pulau lerelerekang Kabupaten Majene; Blok South Mandar dan dan Blok Mandar yang sebagian di Kabupaten Majene dan sebagian lagi di Kabupaten Polewali Mandar; tambang batubara (Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kab. Polewali Mandar dan Kabupaten Pasangkayu).

Tabel 2.17 Potensi Bahan Galian Tambang (Logam, Batubara, Panas Bumi) Menurut Sebaran Lokasi, di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
Majene				
Kec Ulumanda, Desa Sambabo	Logam Bijih Besi (Fe)	-	-	Data KP. Distamben Kab. Majene
Kec Pamboang	Logam Emas (Au)	-	-	Data KP. Bina Alam Sukses
Kec Sendana, Desa Limboro Rambu	Panas Bumi	38,9° C	-	Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Majene, 2014
Kec Ulumanda, Sungai Ure kang	Panas Bumi	42,3° C	-	Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Majene, 2014
Kec Pamboang, Desa Siang Adholang Dhua	Panas Bumi	37,9° C	-	Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Majene, 2014
Kec Pamboang, S. Loppa Adholang Dhua	Panas Bumi	52° C	-	Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Majene, 2014
Polewali Mandar				
Tapango, Desa Tapango	Logam Bijih Besi (Fe)	163823,8 3	5,2979	Wilayah IUP PT. Isco Iron, Tahap Operasi Produksi/Survei Logam oleh CV. Saga Bangun Persada, 2006
Kec Tapango, Desa Tapango	Logam Bijih Besi (Fe)	500000,0 0	943	PT. ISCO IRON
Kec Tapango, Desa Lapejang	Logam Bijih Besi (Fe)	-	787	
Kec Tapango, Desa Simbalutung	Logam Bijih Besi (Fe)	-	300	Wilayah IUP Eksplorasi. Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman,
Kec Tapango, Desa Bussu	Logam Bijih Besi (Fe)	-	-	
Kec Tapango, Desa Takaturung	Logam Bijih Besi (Fe)	-	1500	
Kec Anreapi, Desa Ulugalung	Logam Bijih Besi (Fe)	-	1750	Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010
Kec Binuang, Desa Mammi	Logam Bijih Besi (Fe)	6044,04	2445	Survei Logam Oleh CV. Saga Bangun Persada, 2006
Kec Matakali, Desa Barumbung	Logam Bijih Besi (Fe)	-	912	Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010
Kec Campalagian, Desa Sumarrang	Logam Emas (Au)	-	-	Penyelidikan Umum/ Lap. Penelitian Umum Oleh PT. Manggis Mitra Minerals 2007
Kec Binuang, Desa Kurma	Logam Emas (Au)	-	3000	Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi &

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
				Distamben Polman, tahun 2010
Kec Mapilli, Desa Taalangga, Beroangin, Pulliwa	Logam Emas (Au)	-	5000	Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010
Kec Anreapi, Desa Basseang, Kunyi, Duampanu, Papandangan	Logam Galena (Pb)	1500000 (Terukur)	199	Wilayah KP. Eksploitasi PT. Isco Polman. ReSource dan PT. Inti Karya Polman/ Data KP Distamben Kab.Polman Thn 2009. Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010
Kec Anreapi, Desa Basseang, Kunyi, Duampanu, Papandangan	Logam Galena (Pb)	3570405 MTon	776	PT. Inti Karya P.
Kec Binuang, Desa Batetangga	Logam Galena (Pb)	-	2000	Wilayah IUP Eksplorasi. Laporan Hasil Penyelidikan Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi & Distamben Polman, tahun 2010
Kec Bulu, Desa Sapporakki	Panas Bumi	95-97 ^o C	4700	Survey Pendahuluan Daerah Panas Bumi Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar, Oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi PSDG Bandung 2009. Laporan Akhir Survei Terpadu Geologi dan Geokimia Daerah Panas Bumi Lilli Kab. Polman Prov. SulBar Tahun 2010. Laporan Akhir Penyelidikan Geofisika Terpadu Daerah Panas Bumi Lilli - Sepporaki Kab. Polman SulBar 2011. Laporan Akhir Magnetotellurik Daerah Panas Bumi Lilli - Sepporaki Kab. Polman Prov. Sulbar Tahun 2011.
Kec Matangnga, Desa Matangnga	Panas Bumi	60,9-84 ^o C	Kec Matangnga, Desa Matangnga	
Kec Tapango, Desa Riso/Kalimbua	Panas Bumi	47-54 ^o C	-	Survey Pendahuluan Daerah Panas Bumi Polewali Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat, Oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi PSDG Bandung 2009. Laporan Akhir Survei Geofisika Terpadu Panas Bumi Daerah Riso Kab. Polman, Prov. Sulbar Tahun 2011.

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
Kec Balanipa, Desa Bala	Panas Bumi	38-40°C	-	Survey Pendahuluan Daerah Panas Bumi Polewali Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat, Oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Geologi PSDG Bandung 2009
Kec Mapilli, Desa Batupanga Daala	Panas Bumi	46-48°C	-	Survey Pendahuluan Daerah Panas Bumi Polewali Kab. Polman Provinsi Sulawesi Barat, Oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kec Mapilli, Desa Andau	Panas Bumi	47-49°C	-	
Kec Alu, Desa Pao - Pao	Panas Bumi	45-47°C	-	
Mamasa				
Kec Messawa, Desa Batubusa	Logam Tembaga (Cu)	-	-	Survei Logam Oleh PT. Siduppa Group, 2007
Kec Pana, Desa Karaka, Ulusalu, Sapan, Saloan, Paken	Logam Tembaga (Cu)	-	-	Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010
Kec Pana, Desa Karaka, Ulusalu, Sapan, Saloan, Paken	Logam Seng (Zn)	-	-	Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010
Kec Tabulahan, Desa Talopak	Logam Bijih Besi (Fe)	-	Hipotesa	Wilayah KP. PT. Antam/Survei Logam Oleh PT. Siduppa Group, 2007
Kec Sumarorong, Desa Ratte Bo'te	Logam Bijih Besi (Fe)	-	Hipotesa	Survei Logam Oleh PT. Siduppa Group, 2007. Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010
Kec Aralle, Desa Salu Kaiyang, Sungai Aralle	Logam Bijih Besi (Fe)	-	-	Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010.
Kec Mamasa, Desa Makuang Pebassian	Logam Mangan (Mn)	-	Hipotesa	Kawasan Pertanian/Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2005&2010.
Kec Aralle, Desa Salu Kaiyang, Sungai Aralle	Logam Mangan (Mn)	-	-	Inventarisasi bahan galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2010.
Kec Mamasa, Desa Sipai Pebassian	Logam Pasir Besi	-	900	Belum Pernah dikelola/ Inventarisasi Bahan Galian Tambang, Oleh Distamben Mamasa, 2005&2010.
Kec Mamasa, Desa Usango, Desa Rambusaratu, Desa Makau, Desa Salu Mokanan Utara, Desa Lindu Hahangan, Desa Uhailano, Desa Rantetangga, Desa Salu Kanan, Desa Mungin, Desa	Panas Bumi	51,14°C	-	Survey dan Pemetaan Potensi Panas Bumi Kab. Mamasa, 2015

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
Rantekatoang, Desa Indobanua, Desa Rantekamiri, Desa Tamalatik, Desa Timbu Kanan, Desa Malimbong.				
Mamuju				
Kec Bonehau, Desa ButtuAda S. Malotong	Logam Emas (Au)	-	-	Eksplorasi /Survei Logam Oleh CV. Citra MulticonThn 2008
Kec Bonehau, Desa Buttu Ada S. Malotong	Logam Mangan (Mn)	-	-	Eksplorasi /Survei Logam Oleh CV. Citra MulticonThn 2008
Kec Kalumpang, Desa Karataun (Sungai Karataun)	Logam Emas Placer (Au)	-	-	Tambang Rakyat/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008
Kec Kalumpang, Desa Karataun (Batuisi)	Logam Emas Primer (Au)	-	-	Hasil Eksplorasi / Oleh Penyelidikan JICA, ke-Tiga Lokasi Perusahaan Tambang KP. Ekplorasi Oleh PT. North Mining Toraja (Australia), 1997 PT.PT Mandar Uli Mineral (Singapura), PT. Antam,
Kec Kalumpang, Desa Bulo'	Logam Tembaga (Cu)	-	-	Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008
Kec Kalumpang,	Nikel (Ni)	47353	604	Survey dan Inventarisasi Potensi Nikel Kecamatan Kalumpang, Kab.mamuju
Kec Bonehau, Desa Tamalea	Logam Emas Primer (Au)	-	-	Hasil Eksplorasi / Oleh Penyelidikan JICA, ke-Tiga Lokasi Perusahaan Tambang KP. Ekplorasi Oleh PT. North Mining Toraja (Australia), 1997 PT. PTMandar Uli Mineral (Singapura), PT. Antam,
Kecamatan Bonehau	Batu Bara	1900000	96	PT. Bonehau Prima Coal
Kecamatan Tapalang	Batu Bara	Indikasi	-	Wilayah Perkebunan Masyarakat/ Informasi Distamben Mamuju
Kec Tapalang Barat, Desa Tappalang	Panas Bumi	53,5° C	-	Survey Pendahuluan Geologi dan Geokimia Panas Bumi Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, oleh Kementerian ESDM Badan Geologi PSDG, Bandung 2012
Kec Simboro, Desa Karema	Panas Bumi	47,7°C	-	-
Kec Kalukku, Kelurahan Bebanga, dusun Ampallas	Panas Bumi	66-71°C	-	-
Kec Kalukku, Desa Pontanakayyang	Panas Bumi	42°C	-	-
Pasangkayu				
Kec Tikke, Desa S. Lariang	Logam Emas Placer (Au)	103	DAS Lariang. Bekas	Kec Tikke, Desa S. Lariang

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
			Penambangan Rakyat/ Survei dan Pemetaan Geologi Oleh GDA Consultan, 2007. Survey dan Pemetaan Bahan Galian Logam Kab Pasangkayu, Kerjasama Distamben Prov. Sulbar & CV Armedia Consultant, 2009.	
Kec Dapurang, Desa Masabo dan Desa B. Tarkedo	Logam Emas (Au) dan Tembaga (Cu)	-	-	Daerah Pegunungan Masabo, Pernah di Eksplorasi PT. RIO TINTO / Survei dan Pemetaan Geologi Oleh GDA Consultan, 2007 dan Survei Logam CV. Armedia Consultan 2009
Kec Dapurang, Desa Masabo dan Desa B. Tarkedo	Logam Emas (Au) dan Tembaga (Cu)	-	-	Daerah Pegunungan Masabo, Pernah di Eksplorasi PT. RIO TINTO / Survei dan Pemetaan Geologi Oleh GDA Consultan, 2007 dan Survei Logam CV. Armedia Consultan 2009
Kec Baras dan Kec Sarudu	Batubara	-	-	Wilayah Eklorasi PT. Tambang sekarsa Adaya/Data Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Dinas PESDM Prov. Sulbar, 2009
Kec Sarudu, Desa Doda	Panas Bumi	37,2°C	-	Survey Pendahuluan Geologi dan Geokimia Panas Bumi Kab Mamuju dan Pasangkayu Prov. SulBar, oleh Kementerian ESDM Badan Geologi PSDG, Bandung 2012
Mamuju Tengah				
Kec Topoyo, Desa Tabolang	Logam Seng (Zn)	-	-	Eksplorasi/Survei Logam Oleh CV. Citra MulticonThn 2008
Kec Topoyo, Desa Tabolang	Logam Mangan (Mn)	-	-	Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra MulticonThn 2008
Kec Tobadak, Desa Panasuan	Panas Bumi	-	-	Survey Pendahuluan Geologi dan Geokimia Panas Bumi Kabupaten

Sebaran Lokasi	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (Ha)	Status/Sumber Data
				Mamuju dan Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, oleh Kementerian ESDM Badan Geologi PSDG, Bandung 2012
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Emas Primer (Au)	-	-	Wilayah Eksplorasi/ Survey dan Pemetaan Bahan Galian Logam di Kab. Mamuju, Kerjasama Distamben Prov. SULBAR & CV. CITRA MULTICON, 2008
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Bijih Besi (Fe)	-	-	Wilayah Penyelidikan Umum/Data Pengelolaan Mineral dan Batubara, Provinsi Sulawesi Barat, 2009
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Tembaga (Cu)	-	-	Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Mangan (Mn)	-	-	Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Seng (Zn)	-	-	Eksplorasi/ Survei Logam Oleh CV. Citra Multicon Thn 2008
Kec Karossa, Desa Sanjango	Logam Galena (PbS)	-	-	Wilayah Eksplorasi/Data Pengelolaan Pertambangan dan Mineral, Oleh Dinas PSDM. Prov. Sulawesi Barat, 2009
Kec Tobadak, Desa Sungai Andeang	Logam Dasar (Cu, Pb, Zn)	-	-	Survey dan Pemetaan Bahan Galian Emas di Kecamatan Tobadak oleh CV. Armedia Consultant Thn 2013
Kec Tobadak, Desa Salulekbo	Logam Dasar (Cu, Pb, Zn)	-	-	Survey dan Pemetaan Bahan Galian Emas di Kecamatan Tobadak oleh CV. Armedia Consultant Thn 2013
Kec Tobadak, Desa Salulekbo	Logam Emas (Au)	-	-	Survey dan Pemetaan Bahan Galian Emas di Kecamatan Tobadak oleh CV. Armedia Consultant Thn 2013.

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.1.3.6 Kawasan Industri

Paradigma baru pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pergeseran kegiatan usaha-usaha primer ke sekunder hingga ke tersier, untuk lebih meningkatkan nilai tambah, dalam hal ini pengembangan industri. Salah satu ciri daerah yang sudah maju ditandai oleh dominannya kontribusi penciptaan nilai tambah pada kategori industri dibanding kategori lainnya. Pengolahan hasil-hasil komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan serta disamping pertambangan dan Gas yang menjadi potensi di Sulawesi Barat, jelas akan sangat mendukung pengembangan industri yang secara nyata akan berdampak pada peningkatan lapangan kerja,

pengurangan pengangguran dan Kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi. Rencana pengembangan industri baik skala besar maupun skala kecil telah termuat dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014-2034. Arah pengembangan industri tersebut antara lain :

- a. Kawasan industri skala besar diantaranya agroindustri pengolahan komoditi hasil-hasil perkebunan, peternakan dan perikanan direncanakan pengembangannya di Belang-Belang, dan industri pengolahan hasil tambang batubara dan besi di Kambunong.
- b. Kawasan industri skala menengah, agroindustri pengolahan hasil-hasil perkebunan selain kelapa sawit direncanakan pengembangannya di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar.
- c. Kawasan aglomerasi industri skala menengah pengolahan kelapa sawit, di Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju.
- d. Kawasan Industri Perikanan berupa pengolahan komoditas hasil perikanan direncanakan pengembangannya di Palipi Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.

Pemerintah saat ini telah berupaya untuk melakukan pengembangan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus yang berada di Belang-Belang, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju seiring dengan RTRWP Sulawesi Barat 2014-2034 yang telah menentukan Matabe sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Posisi strategis Matabe di selat Makassar sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), serta penentuan kawasan Belang belang sebagai kawasan terpadu pelabuhan, Bandar udara, stasiun KA barang, industri, perdagangan, pergudangan dan petikemas. Inti sentra pertumbuhan ekonomi Matabe nantinya adalah Eco-Industrial-Park (EIP) dan Special Economic Zone (SEZ/KEK) Belang-Belang.

Tabel 2.18 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri pada Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Industrial	Perusahaan	Tenaga Kerja
Industri Makanan	12	-
Industri Tekstil	5	-
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1	-
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	1	-
Industri Barang Galian Bukan Logam	1	-
JUMLAH	20	-

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2021

2.1.3.7 Kawasan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang pendapatan bagi daerah. Selain faktor finansial bagi daerah, pengembangan sektor pariwisata juga dinilai menjadi suatu hal yang sangat penting baik sebagai salah satu penyerap tenaga kerja. Salah satu aspek pemegang peranan dalam meningkatkan sektor pariwisata adalah jasa perhotelan. Dalam perekonomian Sulawesi Barat, kegiatan perhotelan tergabung dalam kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Selain data pertumbuhan

ekonomi, indikator meningkatnya kegiatan perhotelan di suatu wilayah dapat berupa tingkat penghunian.

Potensi budaya yang ada Provinsi Sulawesi Barat ini disempurnakan dengan panorama yang sangat mempesona mulai dari pesisir pantai Polewali Mandar hingga Pasangkayu, sampai pemandangan alam persawahan dan hutan primer di pegunungan, dan kehadiran ratusan air terjun yang melengkapi keindahan *landscape* alam pegunungan. Berdasarkan RTRW Sulawesi Barat tahun 2014-2034 ditetapkan Rencana Kawasan Pariwisata yang berisi tentang keanekaragaman potensi wisata dari wisata alam seperti air terjun dan arung jeram, wisata sosial budaya seperti tarian tarian unik, tenunan khas dan perayaan-perayaan tradisional dan wisata minat khusus memiliki keunikan yang mempunyai daya tarik yang besar. Disamping pengembangan wisata di daratan, potensi pengembangan wisata pantai seperti Pulau Karampuang di Kabupaten Mamuju serta gugusan pulau-pulau kecil dan terumbu karang di Pulau-pulau Ambo di sebelah barat Kabupaten Majene perlu dikembangkan. Pembukaan jalur jalan yang menghubungkan Belang-belang ke kota Palopo di bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan serta jalan yang menghubungkan kota Mamasa dan kota Makale di Kabupaten Tana Toraja akan memberi dampak pada peningkatan akses jalan ke obyek-obyek wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Potensi-potensi wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.19 Jenis Dan Lokasi Potensi Wisata di Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

Jenis Tujuan Wisata	Kab	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Kegiatan wisata	Arahan Rencana Pengembangan
Wisata Alam	Mamuju	Mamuju	Gunung Paken	Pemandangan laut dan kepulauan	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah
		Mamuju	Air terjun Tamasapi	Air terjun	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah
		Kalukku	Taman Wisata Gentungan	Panorama Alam	Peningkatan jalan akses
		Mamuju	Pulau Karampuang	Wisata Bahari / pasir putih	Penataan obyek dan akses dari kota Mamuju
		Simboro kepulauan	Pantai Toangsang	Pasir Putih	Penyediaan fas. Transportasi ke dan dari kawasan wisata
		Simboro kepulauan	Wisata Pulau	Wisata Pulau	Penyediaan fas. Transportasi ke dan dari kawasan wisata
	Majene	Tammeroddo	Permandian Air panas Limbroo	Air Panas	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah
		Banggae	Pembuatan Perahu Sandeq	Perahu layar	Peningkatan Promosi dan Pelestarian
		Banggae	Pantai Rangas	Pasir Putih	Penataan kawasan dan jalan akses
		Banggae Timur	Pantai Dato'	Pantai dan Tebing	Penataan kawasan dan jalan akses
	Polewali Mandar	Banggae Timur	Pantai Barane	Pantai	Penataan kawasan dan jalan akses
		Anreapi	Air terjun Indo Rannoang	Air Terjun	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah
		Binuang	Kanang	Wisata Agro	Penataan kawasan dan jalan akses

Jenis Tujuan Wisata	Kab	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Kegiatan wisata	Arahan Rencana Pengembangan
		Anreapi	Bendungan Sekka-sekka	Wisata air	Pengelolaan obyek dan fasilitas jalan
		Tinambung	Pantai Palippis	Wisata Bahari / Panorama	Penataan wilayah
		Binuang	P. Gusung Toraya	Panorama pantai	Penataan wilayah dan sistem transportasi
		Wonomulyo	Pantai Mampie	Pantai, Bahari dan Ekowisata	Penataan kawasan dan jalan akses
	Mamasa	Sumarorong	Air Terjun Liawan	Air terjun	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas yang mudah
		Messawa	Air Terjun Sallokan	Air terjun dan Air panas	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Messawa	Air Panas Malimbong	Air terjun dan Air panas	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Mamasa	Air Panas Kole	Permandian air panas	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Mamasa	Gunung Mambulilling	Hiking, Trecking	Penataan <i>tracking paths</i>
		Balla	Puncak Mussa' dan Perkampungan Tradisional Balla Peu'	Panorama dan perkampungan adat	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas serta fasilitas penginapan
		Sesena Padang	Perkampungan Tradisional Sesena Padang	Wisata Alam dan perkampungan tradisional	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas serta fasilitas penginapan
	Pasangkayu	Bambaira	Goa Ape	Wisata Goa	Perbaikan jalan akses
		Pasangkayu	Pantai Tanjung Batu Oge'	Wisata Pantai / Terumbu karang	Perbaikan jalan akses dan promosi wisata
		Pasangkayu	Pantai Tanjung Babia	Wisata Pantai	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Baras	Pantai Salukaili	Wisata Pantai	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
	Mamuju Tengah	Topoyo	Air Terjun Kalando	Air Terjun	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Karossa	Pantai Kambunong	Wisata Pantai	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Kec. Pangale	Pantai Karama	Wisata Pantai	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Budong-Budong	Pantai Babana	Wisata Pantai	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
		Karossa	Air Terjun Lembah Hopo	Wisata Air Terjun	Penataan obyek wisata dan aksesibilitas
	Wisata Budaya	Mamuju		Pure	Kegiatan keagamaan Hindu
Mamuju			Monumen Ahmad Kirang	Tugu/Patung	Promosi wisata
Mamuju			Banoa Sibatang	Rumah Tradisional Kalumpang	Promosi wisata
Mamuju			Sandeq Race	Lomba Perahu Layar Tradisional	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
Mamuju			Massossor Manurung	Pesta Rakyat dan HUT Manakarra	Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata
Mamuju			Festival Pulau Karangpuang	Karnaval Budaya, Festival Seni Budaya dan Pesta Nelayan	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
Mamuju			Rumah Adat Mamuju	Rumah Adat Tradisional	Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata

Jenis Tujuan Wisata	Kab	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Kegiatan wisata	Arahan Rencana Pengembangan
	Majene	Majene	Museum Mandar	Museum	Promosi wisata
		Malunda, Sendana dan Banggae	Sandeq Race	Lomba Perahu Layar Tradisional	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
		Banggae	Makam Raja Raja	Makam	Promosi wisata
		Malunda	Pa'bandangan Manu' manu'	Upacara syukuran panen	Promosi wisata
			Makam Syech Abdul Mannan	Makam	Promosi wisata
		Banggae	Maulidan Salabose	Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW	Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata
	Polewali Mandar	Limboro	Makam Todilaling	Makam Raja I Balanipa	Promosi wisata
		Binuang	Makam Sysch Al-Ma'rif	Makam	Promosi wisata
		Campalagian	Makam Imam Lapeo	Makam	Promosi Wisata
		Campalagian	Makam Raja Tie Tie	Makam	Promosi Wisata
		Polewali	Sandeq Race	Lomba Perahu Layar Tradisional	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
		Polewali	Polewali Mandar Internasional Folk & Art Festival (PIFAF)	Festival Seni Budaya dan Pariwisata tingkat Internasional	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
	Mamasa		Prosesi Mangngasa'	Adat / kegiatan pertukangan	Promosi wisata
		Balla	Makam Tua Tedong-tedong	Kuburan adat	Promosi wisata
			Rambu Solo'	Pesta pemakaman	Promosi wisata
		Nosu	Ritual Mangaro'	Prosesi adat Kematian	Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata
		Mamasa	Perayaan HUT Kab. Mamasa	Karnaval Budaya, Festival Seni Budaya dan Ritual Adu Kerbau	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata
		Mamasa	Monumen To'Pao	Sejarah Perjanjian Kerajaan Pitu Ulunna Salu	Dukungan Pelestarian Sejarah dan Promosi Pariwisata
		Mamasa	Rumah Adat Rambusaratu	Rumat Tradisional Mamasa	Dukungan Pelestarian Budaya dan Promosi Pariwisata
	Pasangkayu	Bamballamotu	Suku Bunggi	Adat tradisional	Promosi wisata
		Pasangkayu	Sumur tua Parappe'	Sumur tua	Promosi wisata
		Pasangkayu	Monumen Sejarah Vovasanggayu	Monumen Sejarah	Promosi wisata
Mamuju Tengah	Tobadak	Festival Bumi Lalla Tassisara	Peringatan Hari Bakti Transmigrasi dan Hari Jadi Kab Mamuju Tengah	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata	
		Festival Nusantara Tassisara	Festival Seni, Budaya, Pariwisata dan Etnis	Dukungan Penyelenggaraan Event dan Promosi Pariwisata	
Wisata Minat	Mamuju	Kalumpang	Tenun Sekomandi	Tenunan tradisional	Promosi wisata dan penataan lokasi pertunanan

Jenis Tujuan Wisata	Kab	Kecamatan	Nama Obyek Wisata	Kegiatan wisata	Arahan Rencana Pengembangan	
Khusus (Belanja, Pertunjukan dan Pendidikan)			Tari Bambamanurung	Tarian adat	Promosi wisata	
			Tari Ma'bundu'	Tarian adat	Promosi wisata	
		Mamuju		Daiving	Menyelam dan Pemotretan di bawah laut	Promosi wisata
				Majene	Banggae	Tenun Sutra Mandar
	Tari Pa'jinang	Tarian adat	Promosi wisata			
	Tari Pa'dego	Tarian adat	Promosi wisata			
		Banggae Timur		Wisata Pendidikan	Universitas Sulawesi Barat	Pengembangan dan promosi
				Banggae	Mancing Mania	Mancing di laut dalam
	Polewali Mandar	Tinambung Dan Balanipa		Tenun Sutra Mandar	Tenunan tradisional	Promosi wisata dan penataan lokasi pertununan
				Sayyang Pattu'du	Tarian adat	Promosi wisata
		Binuang		Desa Wisata Batetangnga	Perkampungan Tradisional	Pembangunan daya tarik, pemberdayaan masyarakat dan Promosi wisata
				Binuang	Kampung Bahasa Inggris	Sekolah Tradisional Bahasa Inggris
	Mamasa		Mamasa	industri souvenir	Souvenir	Promosi wisata dan penataan lokasi kerajinan dan lokasi pemasaran
				Tari Bulu Londong	Tarian adat	Promosi wisata
				Musik Iyo iyo	Musik tradisional	Promosi wisata
				Tari Luya	Tarian adat	Promosi wisata
				Tari Pararuk	Tarian adat	Promosi wisata
				Tari Burake	Tarian adat	Promosi wisata
				Tari Bisu	Tarian adat	Promosi wisata
				Tari Simbong	Tarian adat	Promosi wisata
				Gunung Mambulilling Lintas	Petualangan dan Pendaki gunung	Penyediaan akses dan promosi
Sungai Mamasa	Arung Jerang	Pengembangan dan promosi				
Pasang kayu			Tari Mataro	Tarian adat	Promosi wisata	

Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034

2.1.3.8 Kawasan Permukiman

Kawasan Peruntukan Permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

1. Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan Permukiman Perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri atas sumber daya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan.

- a. Bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKNp dan PKWp yang padat penduduknya diarahkan pembangunan perumahannya vertikal dengan tetap memperhatikan tingkat kerawanan gempa;

- b. Pola Permukiman Perkotaan yang paling rawan terhadap tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian lebih besar atau sama dengan 30 m di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.
2. Kawasan Permukiman Perdesaan
 - a. Didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk serta prasarana dan sarana perkotaan yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan lahan untuk keperluan non agraris.
 - b. Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung.

Tabel 2.20 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Kabupaten	Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal			
	Milik Sendiri	Kontrak/Sewa	Lainnya	Jumlah
Majene	94,27	1,18	4,56	100,00
Polewali Mandar	90,61	1,60	7,80	100,00
Mamasa	86,61	2,18	11,21	100,00
Mamuju	87,50	3,32	9,18	100,00
Pasangkayu	74,79	3,11	22,10	100,00
Mamuju Tengah	88,76	1,31	9,93	100,00
Sulawesi Barat	87,56	2,15	10,29	100,00

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

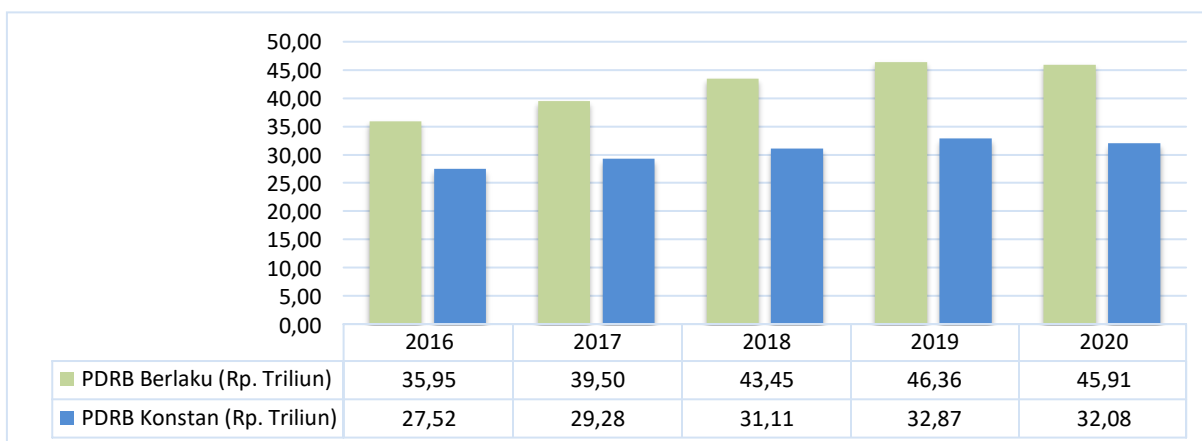
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator statistik yang lazim dipergunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah pada kurun waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

Pada tahun 2019, PDRB dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2010. PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Barat mencapai 45,91 triliun rupiah sedangkan PDRB ADHK mencapai 32,08 triliun rupiah. Ekonomi Sulawesi Barat tahun 2020 kontraksi 2,42 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 13,31 persen. Dari sisi pengeluaran kontraksi terdalam terjadi pada komponen Impor yakni sebesar 14,91 persen.

Grafik 2.4 Nilai PDRB Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

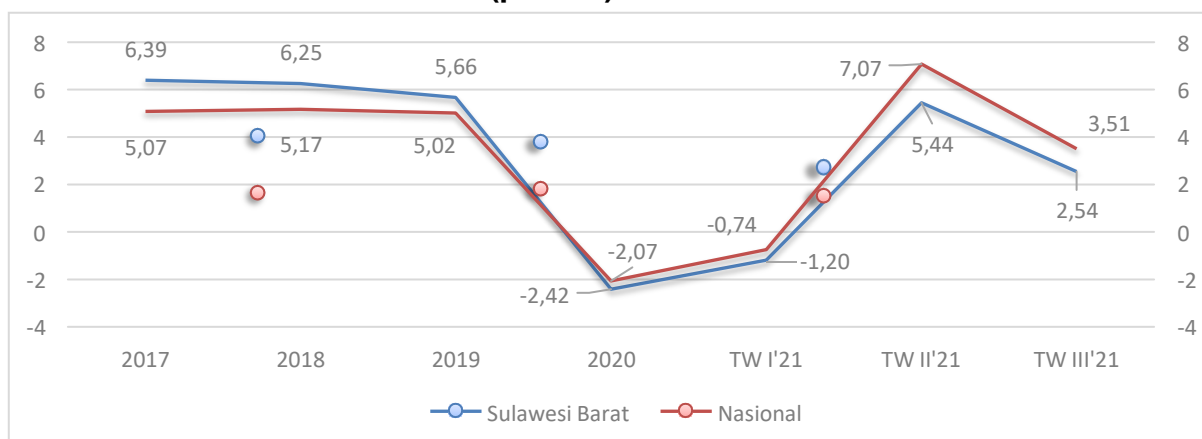


Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian, akan tetapi capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya bukan sebatas pada capaian saja, tapi dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dapat mencerminkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan lapangan kerja, perkembangan indeks harga yang relatif terkontrol dan sebagainya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2021 diperkirakan berada di level 3,0% - 4,0% (yoy) (Bank Indonesia).

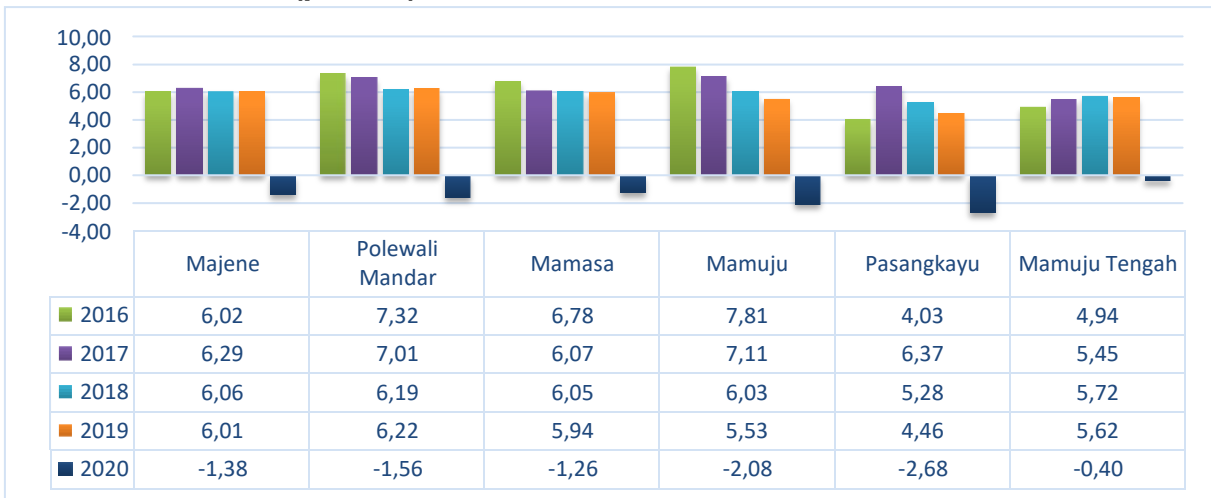
Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, namun masih selalu berfluktuasi setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 sampai dengan triwulan III mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 2,54 persen. Meskipun berfluktuasi dan terjadi perbaikan kondisi seiring tumbuhnya perekonomian secara nasional, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat berada di bawah pertumbuhan rata-rata nasional yaitu sebesar 3,51 persen pada tahun triwulan III tahun 2021. Hal ini utamanya didorong oleh peningkatan mobilitas sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan, berlanjutnya stimulus kebijakan termasuk stimulus bantuan sosial oleh Pemerintah.

Grafik 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017–2021 (persen)



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

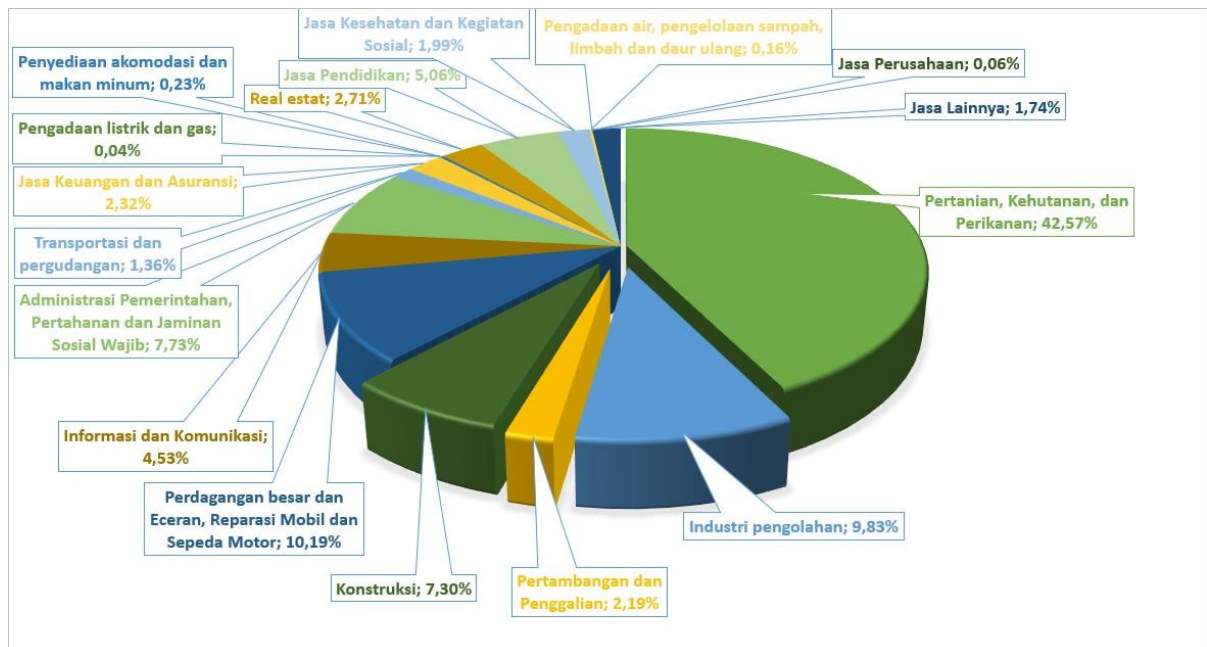
Grafik 2.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 (persen)



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat masih berfluktuasi namun masih tumbuh dengan positif hingga tahun 2019, meskipun mengalami kontraksi di seluruh kabupaten. Kabupaten Pasangkayu dengan tingkat pertumbuhan yang paling menurun dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat mengalami kontraksi sebesar 2,68 persen tahun 2020.

Diagram 2.2 Struktur Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2020



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Struktur perekonomian Sulawesi Barat pada tahun 2020 didominasi oleh lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan yang sebesar 42,57 persen. meskipun jenis lapangan usaha ini masih mendominasi namun semakin mengalami tren penurunan dari tahun 2013 sebesar 47,44 persen yang diakibatkan

adanya peralihan jenis usaha di masyarakat yang beralih ke sektor lainnya seperti industri pengolahan, perdagangan, dan lain-lain.

Tabel 2.21 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2021 (persen)

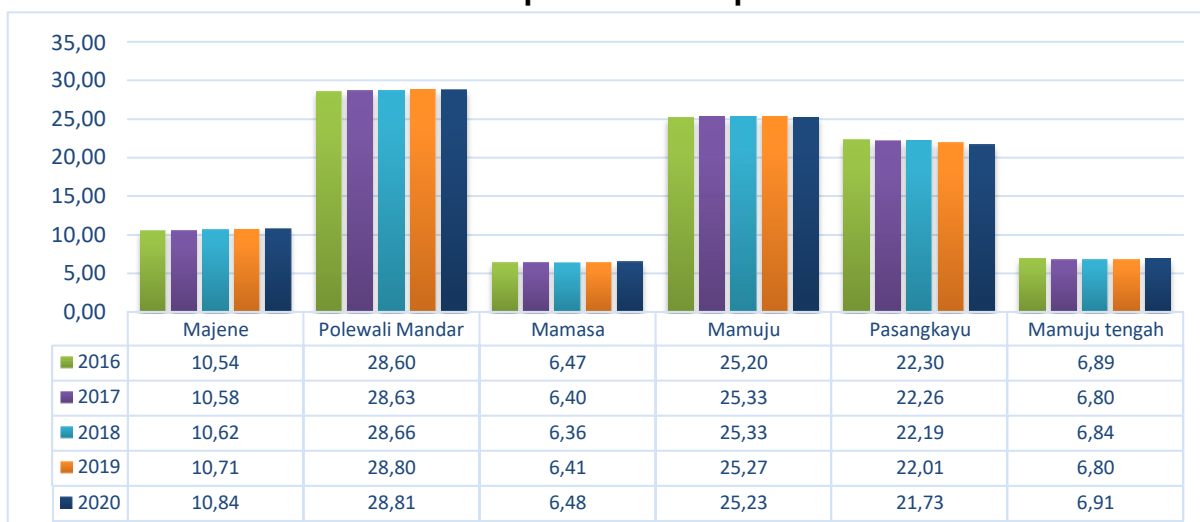
LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020	2021 Tw III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,08	6,51	6,11	4,62	0,54	3,01
Pertambangan dan Penggalian	10,89	6,37	8,25	5,28	-4,90	11,53
Industri Pengolahan	-2,46	7,96	7,51	5,13	-3,52	14,24
Pengadaan Listrik dan Gas	19,66	9,59	7,19	8,29	6,85	2,26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,24	10,05	8,81	9,61	1,63	0,04
Konstruksi	10,85	6,37	4,99	6,65	-13,31	15,73
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,02	5,56	6,16	5,07	-2,60	3,01
Transportasi dan Pergudangan	5,78	5,79	5,66	4,23	-6,47	4,12
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	9,33	1,55	7,92	9,69	-7,19	5,61
Informasi dan Komunikasi	9,26	9,97	7,86	12,54	5,73	1,14
Jasa Keuangan	14,90	8,61	4,60	3,37	6,76	1,01
Real Estate	5,94	4,59	6,31	7,28	1,90	-0,15
Jasa Perusahaan	4,62	5,33	3,06	7,49	-5,42	-0,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,04	3,08	6,79	4,91	-8,61	-21,08
Jasa Pendidikan	10,90	6,20	4,22	8,17	-6,65	-0,52
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,83	6,17	7,43	4,23	2,36	-0,07
Jasa Lainnya	8,90	8,27	5,75	10,53	-5,08	3,46
PERTUMBUHAN PDRB	6,01	6,39	6,26	5,67	-2,42	2,54

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Sektor pertanian, merupakan sektor mata pencaharian utama penduduk Sulawesi Barat. Sektor ini hanya berkontribusi sebesar 3,01 persen pada triwulan III tahun 2021, mengalami peningkatan dari tahun 2020. Pada tahun 2021 Triwulan III

hampir semua lapangan usaha mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya disebabkan oleh mulai berputarnya perekonomian setelah dibukanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,73 persen Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Industri pengolahan sebesar 14,24 persen dan lapangan usaha Pertambangan dan penggalian sebesar 11,53 persen. Sementara Lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum dalam pertumbuhannya sampai 5,61 persen.

Berdasarkan kabupaten, Polewali Mandar merupakan daerah dengan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 28,81 persen dan Mamasa dengan kontribusi terendah sebesar 6,91 persen pada tahun 2020. Persentase kontribusi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.7 Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap total PDRB Tahun 2016–2020

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.2.2 Laju Inflasi

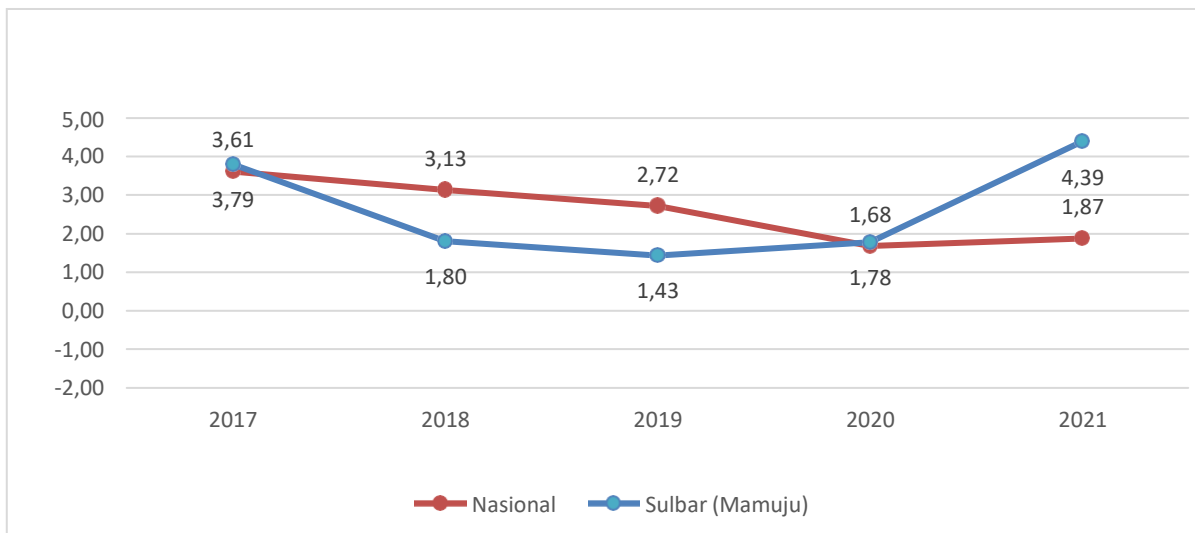
Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian inflasi bisa juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (BPS). Inflasi terbagi atas dua jenis yaitu 1) Inflasi Inti, di mana Cenderung menetap/persisten (Persistent component). Pergerakan inflasinya dipengaruhi oleh : 1) Interaksi Permintaan dan penawaran, 2) Lingkungan eksternal : nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang, 3) Ekspektasi inflasi dan pedagang dan konsumen. 2) Inflasi Non Inti, Volatilitasnya tinggi. Dipengaruhi oleh selain faktor fundamental di antaranya : 1) Volatile Food (dipengaruhi oleh shock karena panen, gangguan alam, perkembangan harga komoditas domestik). 2) Administered Price (dipengaruhi oleh shock kebijakan harga oleh pemerintah BBM bersubsidi, Tarif Listrik, Tarif Angkutan, dll).

Tingkat perubahan indeks tahun kalender dan perubahan indeks tahun ke tahun Desember 2020 di Mamuju adalah inflasi 0,30 persen. Inflasi di Mamuju pada Desember 2020 terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks harga pada enam kelompok pengeluaran yaitu kelompok kesehatan 1,63 persen; Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0,53 persen; transportasi 0,49 persen; makanan, minuman, dan tembakau 0,44 persen; pakaian dan alas kaki 0,30 persen; Informasi, Komunikasi, dan jasa keuangan 0,15 persen; dan Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya 0,09 persen. Sementara itu kelompok Rekreasi, Olahraga, dan budaya; Pendidikan; Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran serta Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga relatif stabil atau tidak mengalami perubahan.

Perkembangan inflasi tahunan di Sulawesi Barat sangat berfluktuatif dan terkadang lebih tinggi dari inflasi rata-rata nasional, pada tahun 2017 inflasi Sulawesi Barat sebesar 3,79 persen berada di atas rata-rata nasional sebesar 3,61 persen. Inflasi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019 yang sebesar 1,43

persen namun pada saat itu inflasi nasional juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 2,72 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 inflasi tahunan di Sulawesi Barat sebesar 4,39 persen berada di atas angka nasional sebesar 1,87 persen.

Grafik 2.8 Laju Inflasi Tahunan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (persen)

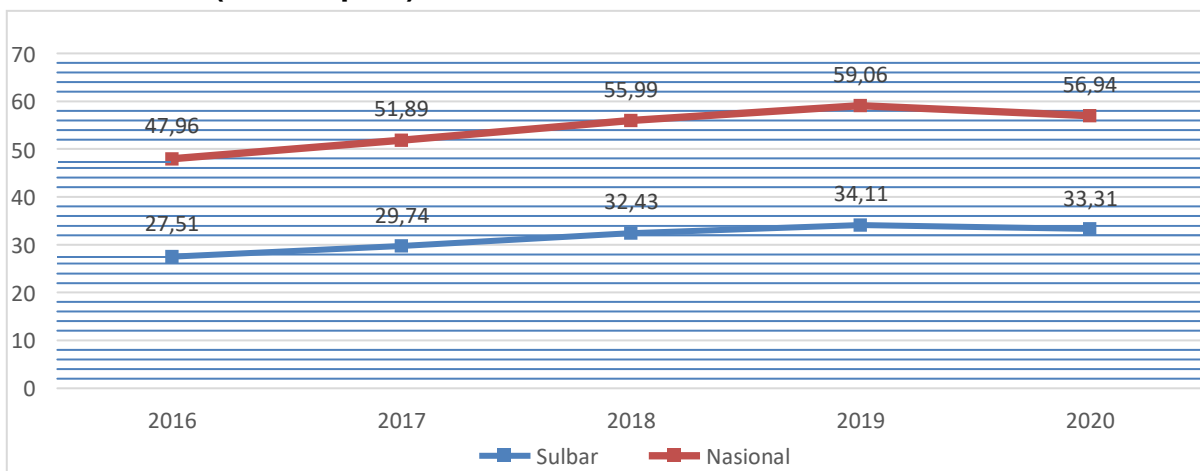


Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

2.2.3 Pendapatan Per Kapita

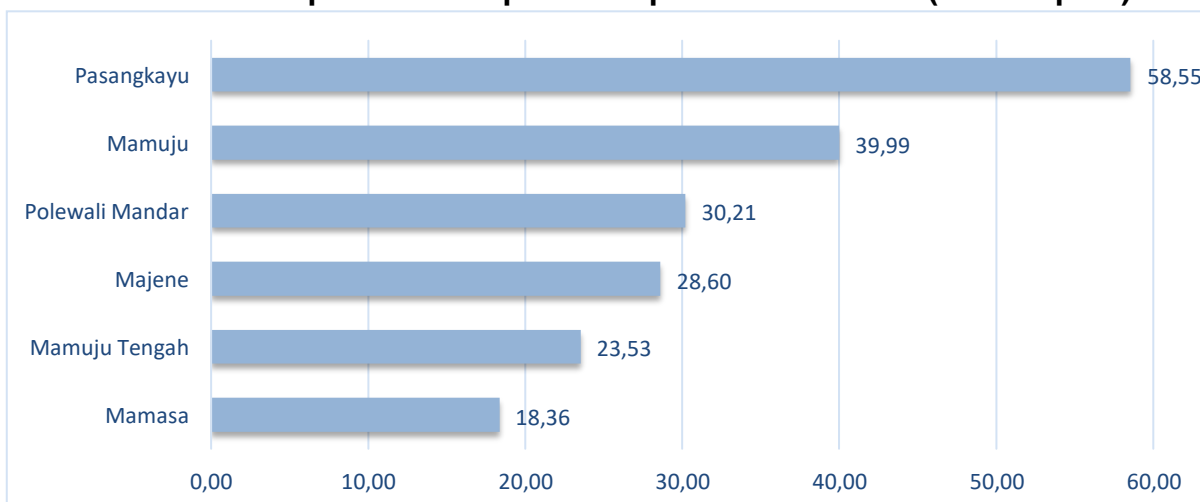
Untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah salah satunya menggunakan angka pendapatan per kapita yang merupakan ukuran yang paling dapat diandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah. Ini disebabkan karena pendapatan per kapita telah mencakup faktor jumlah penduduk sehingga secara langsung menunjukkan tingkat kemakmuran, sementara komponen pendapatan lainnya seperti GNP, GDP, dan lain sebagainya belum menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat secara langsung karena tidak memperhitungkan faktor jumlah penduduk.

Grafik 2.9 Pendapatan Per Kapita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS, *Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021*

Grafik 2.10 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Tahun 2020 (Juta Rupiah)



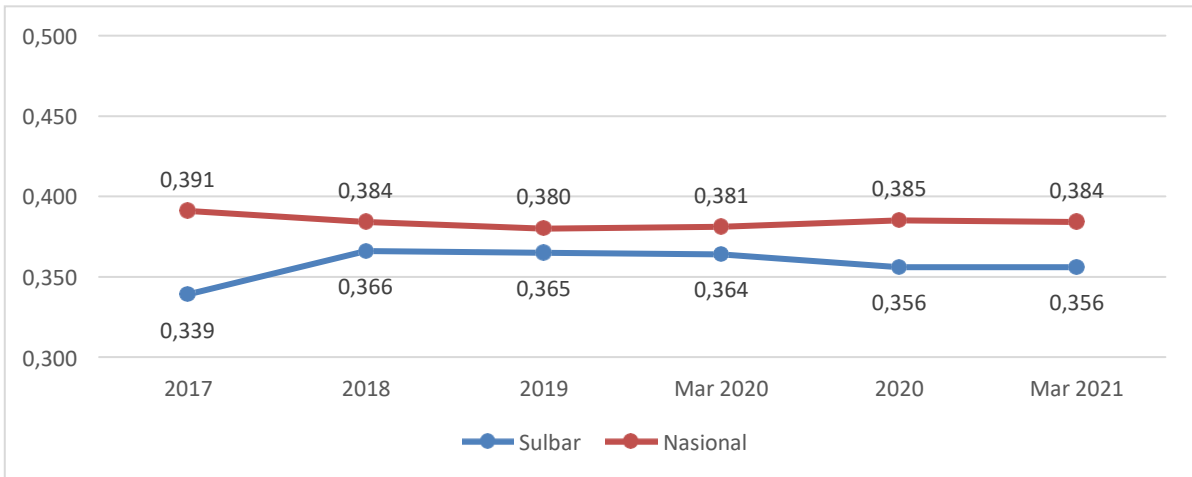
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Pendapatan per kapita Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ketahun terus mengalami kenaikan walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2016 pendapatan per kapita Sulawesi Sulawesi Barat sebesar 27,51 juta meningkat sebesar 33,31 juta pada tahun 2020 masih jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 56,94 juta. Rasio Pendapatan Per Kapita antara Sulawesi Barat dan Nasional tahun 2016 sebesar 57,36 persen meningkat tahun 2020 sebesar 58,50 persen. Untuk wilayah kabupaten, terjadi Ketimpangan PDRB yang tinggi antar Kabupaten di mana Pasangkayu sebesar 58,55 juta dan Mamasa hanya sebesar 18,36 juta rupiah. Tingginya pendapatan per kapita masyarakat namun tidak secara riil menunjukkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.4 Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

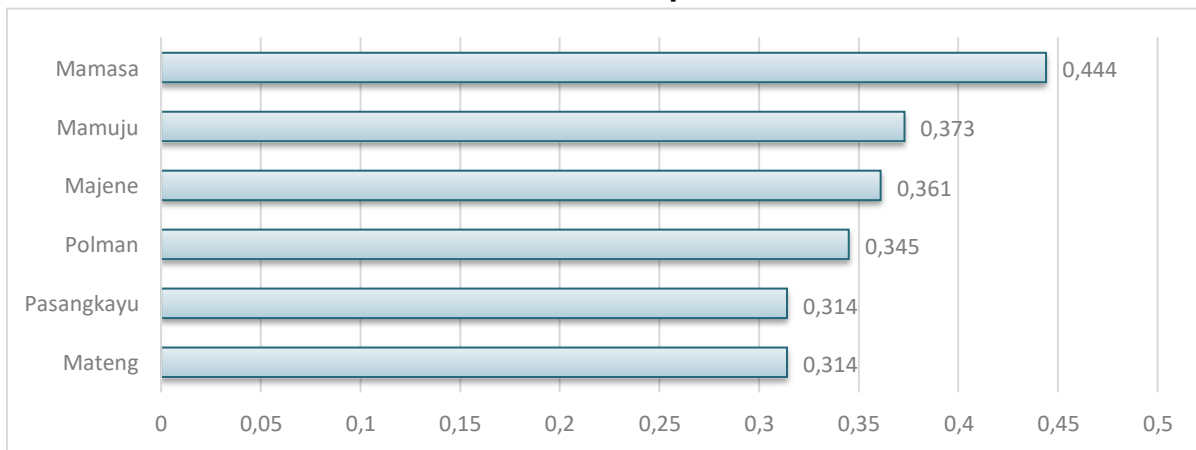
Untuk mengukur ketimpangan pendapatan antara penduduk di suatu daerah maka digunakan indeks gini rasio. Indeks gini rasio (ketimpangan pendapatan penduduk) di mana Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang diukur oleh Gini Rasio tercatat sebesar 0,356 angka ini menurun sebesar 0,008 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2020 yang sebesar 0,364, hal ini menunjukkan bahwa mulai terjadi perbaikan pemerataan pembangunan di provinsi Sulawesi Barat walaupun belum signifikan.

Grafik 2.11 Indeks Gini Rasio di Sulawesi Barat Tahun 2017–2021



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Grafik 2.12 Indeks Gini Rasio menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2020



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

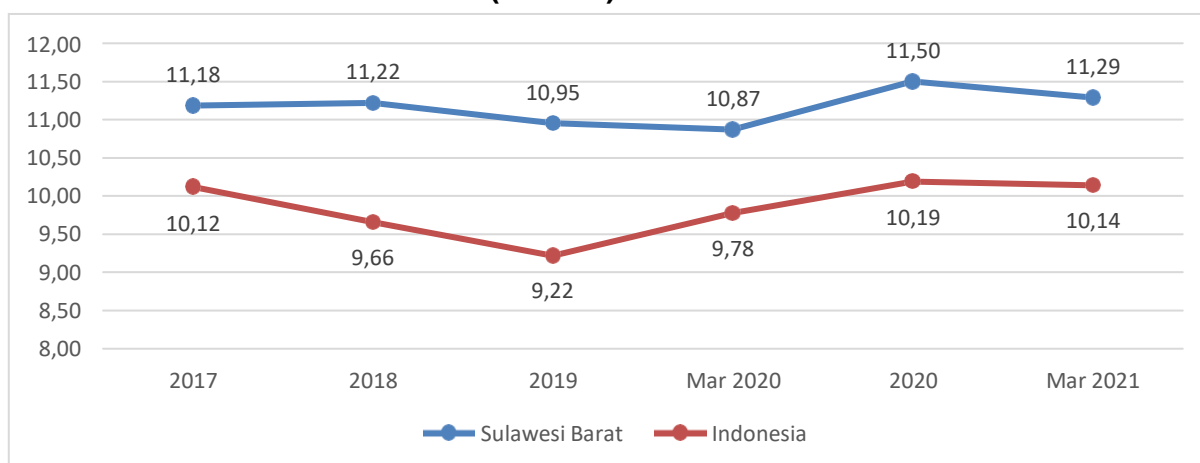
2.2.5 Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara holistik yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan memerlukan keterpaduan di dalamnya. Kemajuan pembangunan berkaitan erat dengan pendapatan suatu daerah, dan tingkat pertumbuhan ekonominya. Persyaratan utama terjadinya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai pemerataan pendapatan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan dalam menentukan garis kemiskinan adalah berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basicneeds approach*), yang dalam hal ini adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori serta kebutuhan bukan makanan, yakni kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS). Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan proporsi jumlah penduduk yang pengeluarannya per kapitanya di bawah garis kemiskinan terhadap total populasi di suatu wilayah.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017 sampai dengan 2021 terus menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun yaitu 11,18 persen pada tahun 2017 (September) menjadi 11,50 persen pada tahun 2020 (September) dan pada tahun 2021 (Maret) kembali mengalami penurunan menjadi 11,29 persen. Pencapaian itu sebuah hal positif meskipun dalam kondisi pandemi covid-19, namun persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 10,19 persen pada tahun 2021 (September). Rata-rata penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat sebesar 0,05 poin persentase per tahun sedangkan nasional sebesar 0,10 poin persentase per tahun. Kondisi Perekonomian Sulawesi Barat tahun 2021 tumbuh secara positif Proses vaksinasi dan pembangunan pasca gempa yang berjalan telah meningkatkan aktivitas perekonomian selama tahun 2021 serta bantuan sosial Pemulihan Ekonomi Nasional sebagian besar telah dicairkan dan disalurkan kepada masyarakat oleh pemerintah. Walaupun persentase kemiskinan terus menurun namun belum sesuai target yang diharapkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Barat yaitu berada di bawah angka 10 persen pada tahun 2021.

Grafik 2.13 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2017–2021 (Persen)

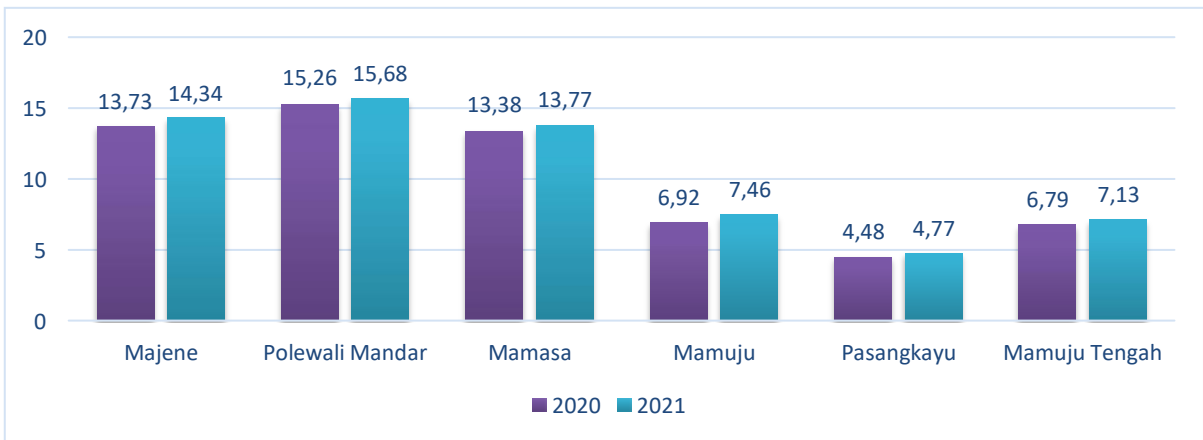


Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Kinerja penurunan kemiskinan di Sulawesi Barat sudah mengarah ke perbaikan tingkat kesejahteraan, data Tahun 2021 menunjukkan ada 3 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Barat dan nasional yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu berfokus kepada program-program yang langsung dapat mengintervensi indikator kemiskinan untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Berdasarkan data tersebut, tergambar bahwa program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat masih belum optimal dan belum terintegrasi sehingga perlu membangun model pembangunan kemiskinan secara bottom up sesuai karakteristik masing-masing wilayah di Sulawesi Barat dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan agar dilakukan secara nyata lintas sektor dan terintegrasi. Pembangunan Kemiskinan diharapkan fokus kepada wilayah perdesaan tanpa mengabaikan kemiskinan pada

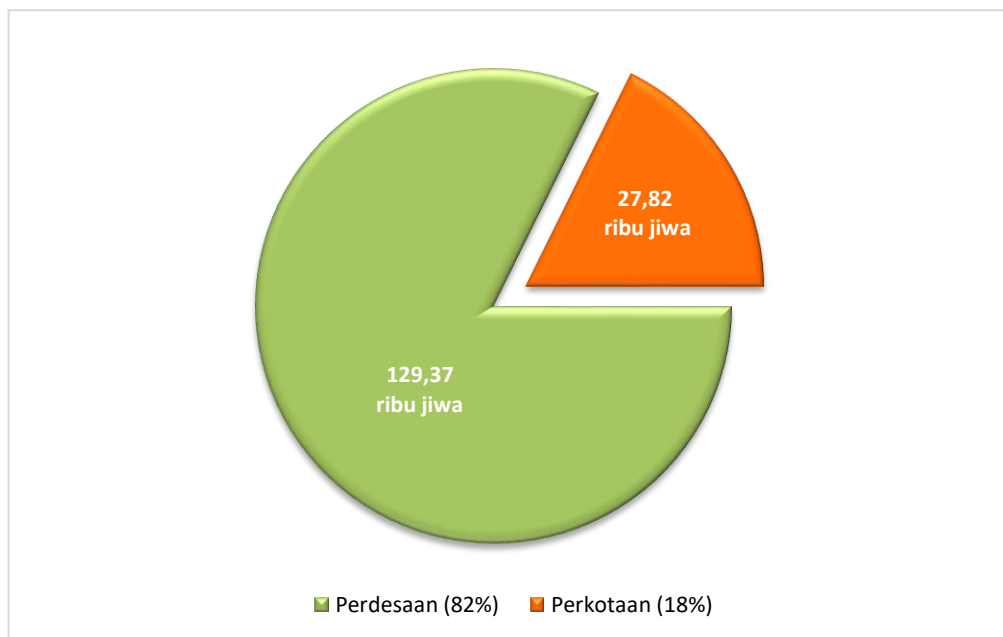
wilayah perkotaan karena 18 persen penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Barat berada pada wilayah perkotaan.

Grafik 2.14 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020–2021 (Persen)



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Diagram 2.3 Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan wilayah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Barat didominasi oleh penduduk miskin perdesaan sebesar 129,37 ribu jiwa atau sekitar 82 persen penduduk miskin berada di perdesaan dan penduduk miskin perkotaan sebesar 27,82 ribu jiwa atau sekitar 18 persen, sehingga lokus upaya pengentasan kemiskinan diharapkan berada di Perdesaan, tanpa juga mengabaikan miskin perkotaan yang mengalami penurunan tetapi diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (Ribu)

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Majene	23,48	23,53	23,76	24,12	25,01
Polewali Mandar	69,25	69,68	68,86	68,18	69,32
Mamasa	21,14	21,22	21,64	21,86	22,29
Mamuju	19,11	20,42	20,57	20,65	22,30
Pasangkayu	7,95	7,65	7,42	7,95	8,53
Mamuju Tengah	8,82	9,28	9,16	9,25	9,74
Sulawesi Barat	149,76	151,78	151,40	152,02	157,19

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Tabel 2.23 Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (persen)

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Majene	13,94	13,79	13,72	13,73	14,34
Polewali Mandar	16,05	15,97	15,60	15,26	15,68
Mamasa	13,51	13,38	13,42	13,38	13,77
Mamuju	6,88	7,18	7,06	6,92	7,46
Pasangkayu	4,84	4,53	4,28	4,48	4,77
Mamuju Tengah	6,95	7,14	6,87	6,79	7,13
Sulawesi Barat	11,30	11,25	11,02	10,87	11,29

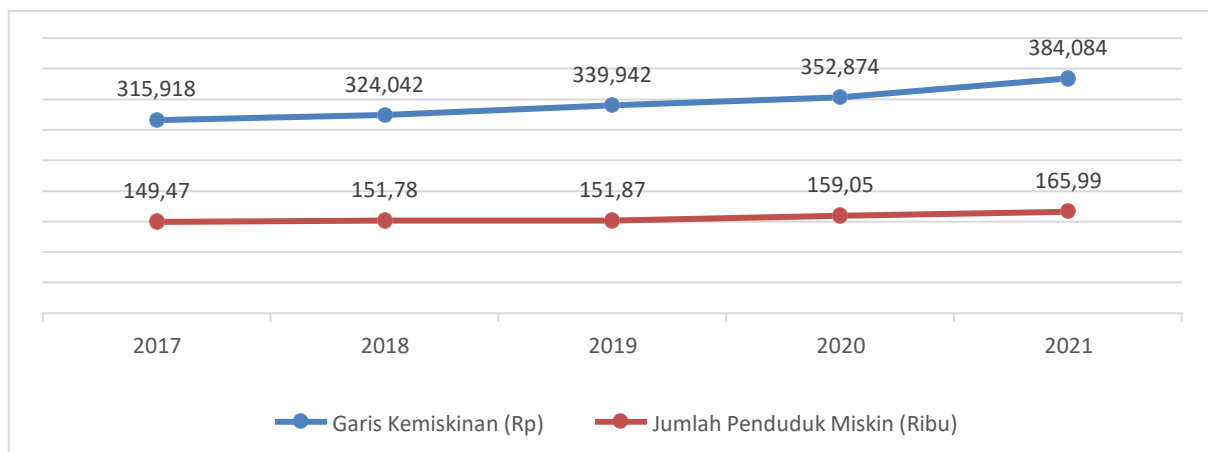
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Tabel 2.24 Garis Kemiskinan menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (Rupiah)

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	Mar 2021
Majene	335 248	330 226	332 145	384 344	399.350
Polewali Mandar	351 856	252 429	259 969	401 057	416.443
Mamasa	239 112	249 103	256 544	273 513	283.758
Mamuju	241 616	366 355	376 827	277 078	287.896
Pasangkayu	328 100	349 522	360 362	354 115	367.941
Mamuju Tengah	335 248	236 699	239 592	255 440	265.413
Sulawesi Barat	226 559	324 042	339 942	352 874	364.251

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

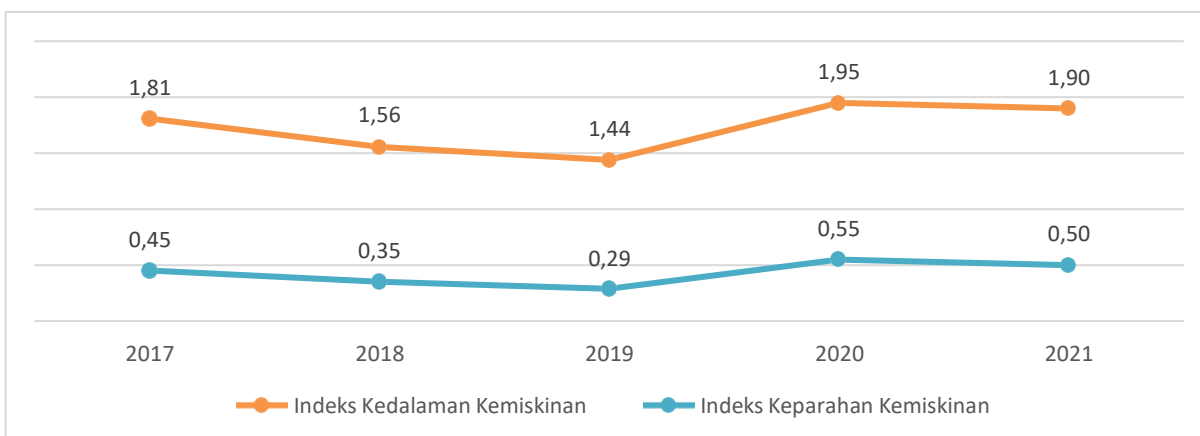
Grafik 2.15 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Garis Kemiskinan di Sulawesi Barat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 garis kemiskinan sebesar 315.918 rupiah per kapita perbulan, naik pada tahun 2021 sebesar 384.084 rupiah per kapita perbulan. Angka ini menjadi suatu capaian positif meskipun pada saat yang bersamaan jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 149,47 ribu jiwa menjadi 165,99 ribu jiwa pada tahun 2021. Kenaikan garis kemiskinan tidak dibarengi dengan penurunan jumlah penduduk miskin mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat mulai menurun yang diakibatkan pandemi covid-19.

Grafik 2.16 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Sulawesi Barat Tahun 2017–2021



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Barat sebesar 1,90 atau menurun 0,05 poin dibandingkan 2020, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Sulawesi Barat sebesar 0,50 menurun 0,05 poin dibandingkan 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa pada 2021 dengan turunnya angka P1 berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati Garis Kemiskinan, dan juga dengan turunnya angka P2 berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri semakin kecil.

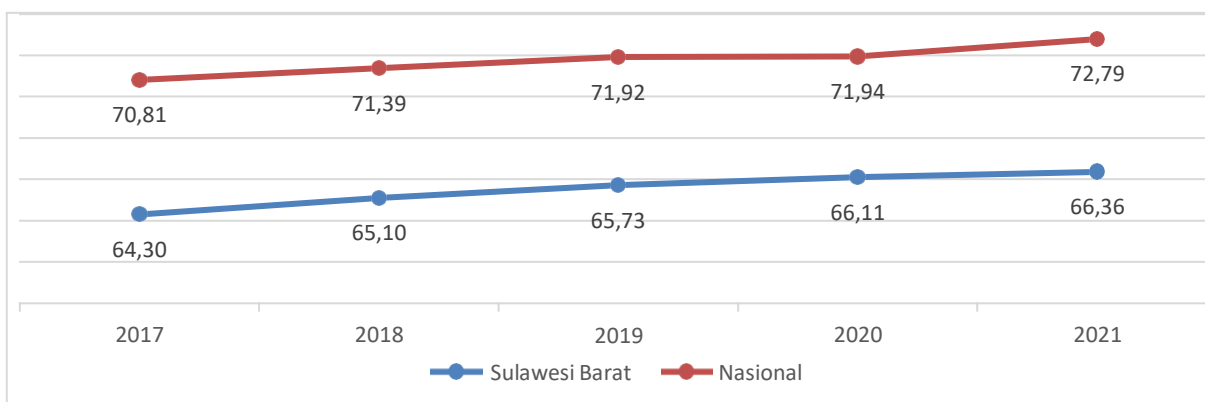
2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya manusia. Setiap tahun indeks pembangunan manusia di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). Sebagai gambaran capaian IPM Sulawesi Barat pada tahun 2017 adalah sebesar 64,30 dan pada tahun 2021 meningkat sebesar 66,36 atau naik sebesar 2,06.

Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat berada pada peringkat ke 31 dari 34 provinsi, meskipun demikian dari segi pertumbuhan IPM Sulawesi Barat berada pada peringkat kedua secara nasional, dengan pertumbuhan sebesar 0,58 persen sedangkan IPM Indonesia hanya tumbuh 0,03 persen. Salah satu faktor penyebab rendahnya IPM Sulawesi Barat adalah pada indikator angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah sedangkan untuk pengeluaran per kapita mengalami peningkatan

yang cukup baik. Secara keseluruhan semua komponen pembentuk IPM Sulawesi Barat meningkat pada tahun 2021, kecuali komponen pengeluaran per kapita.

Grafik 2.1 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017–2021



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

IPM Sulawesi Barat masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai kategori level tinggi pada tahun 2021 sebesar 72,29. Kabupaten di Sulawesi Barat dengan tingkat IPM tertinggi berada di Kabupaten Mamuju sebesar 68,32 sebagai ibukota Provinsi, disusul kabupaten Pasangkayu sebesar 68,03 sedangkan IPM terendah berada di Kabupaten Polewali Mandar yang sebesar 64,23.

Tabel 2.25 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021

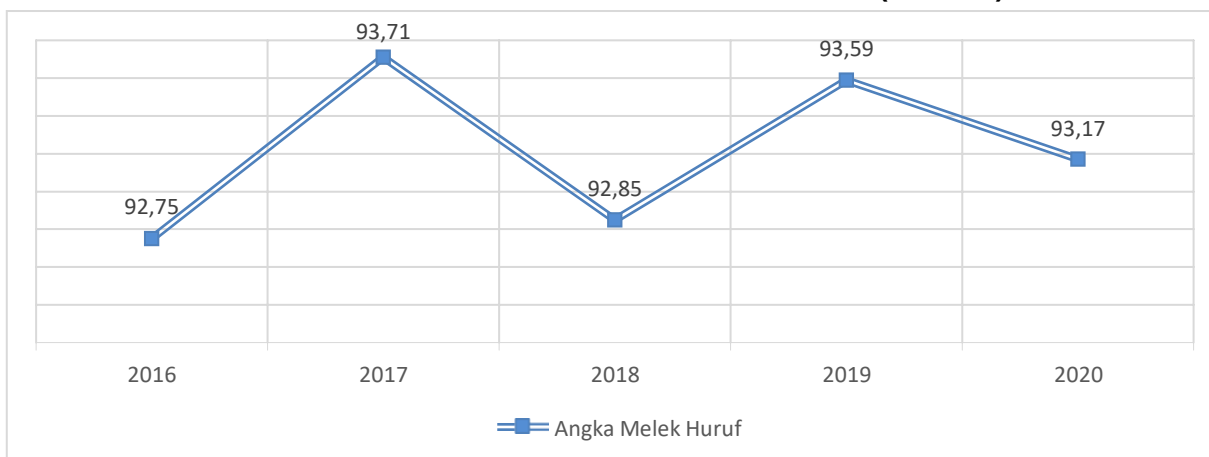
Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia				
	2017	2018	2019	2020	2021
Majene	65,40	66,01	66,59	66,91	67,29
Polewali Mandar	62,35	63,14	63,74	63,84	64,23
Mamasa	63,92	64,66	65,32	66,02	66,63
Mamuju	66,32	67,11	67,72	68,15	68,32
Pasangkayu	65,67	66,60	67,27	67,79	68,03
Mamuju Tengah	63,64	64,43	65,10	65,71	66,18
Sulawesi Barat	64,30	65,10	65,73	66,11	66,36

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

2.2.7 Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah tingkat melek huruf yang mengindikasikan kemampuan penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Dalam hal ini, angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis latin dan atau huruf lainnya.

Grafik 2.17 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 (Persen)



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Angka melek huruf di Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 angka melek huruf sebesar 92,75 persen dan terus mengalami kenaikan sampai sebesar 93,71 di tahun 2017 akan tetapi mengalami penurunan sebesar 92,85 persen di tahun 2018, naik kembali sebesar 93,59 persen di tahun 2019 dan turun kembali sebesar 93,17 persen di tahun 2020.

Tabel 2.26 Angka Melek Huruf Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (Persen)

Kabupaten	Tahun		
	2018	2019	2020
Majene	94,07	95,20	95,85
Polewali Mandar	90,39	90,98	91,16
Mamasa	94,66	94,21	92,66
Mamuju	93,15	94,65	93,13
Pasangkayu	95,60	96,46	95,13
Mamuju Tengah	93,58	93,84	94,68

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

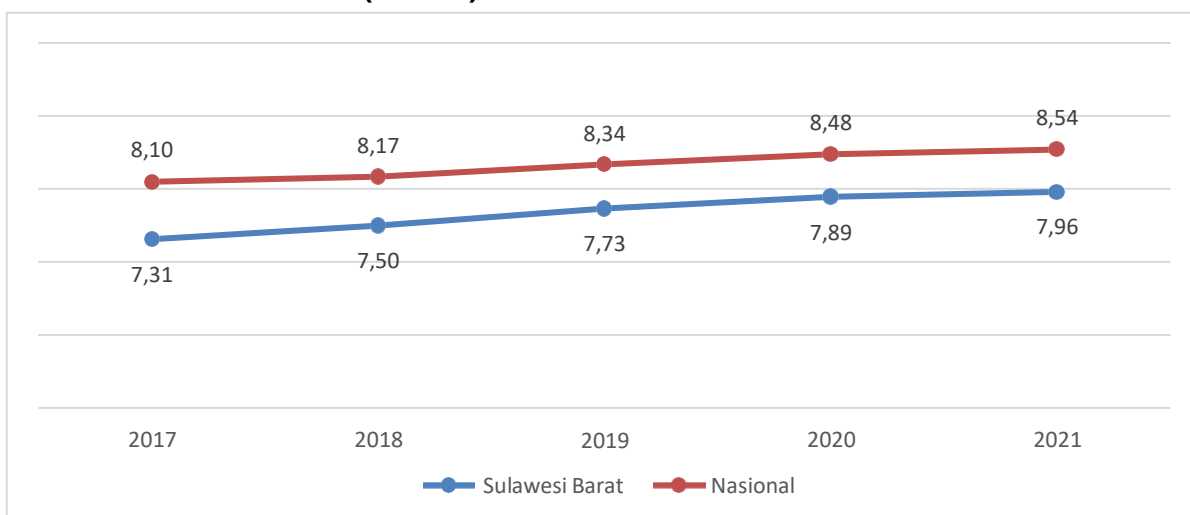
Angka melek huruf hampir merata pada semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat, setiap tahunnya masing-masing daerah mengalami peningkatan yang fluktuatif. Kenaikan terbesar terjadi di Kabupaten Majene dari 94,07 tahun 2018 menjadi 95,85 di tahun 2020, Kabupaten Mamuju Tengah dari 93,58 tahun 2018 menjadi 94,68 di tahun 2020, serta Kabupaten Polewali Mandar dari 90,39 tahun 2018 menjadi 91,16 di tahun 2020. Hal sebaliknya terjadi di Kabupaten Mamasa yang justru mengalami penurunan pada tahun 2018 dari 94,66 menjadi 92,66. Dengan demikian, pada skala provinsi mengalami peningkatan terjadi pada 2018 sebesar 92,85 menjadi 93,17 di tahun 2020 atau naik 0,32 poin.

2.2.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat pada tahun 2021 sebesar 7,96 tahun, ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk di

Sulawesi Barat hanya setara SLTP kelas 1 dan berada di bawah rata-rata nasional sebesar 8,54 tahun. Dalam kurun tahun 2016-2021 pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah di Sulawesi Barat hanya tumbuh 2,22 persen per tahun sementara nasional tumbuh 1.44 persen per tahun. Kabupaten Majene adalah kabupaten yang memiliki angka rata-rata lama sekolah tertinggi di Sulawesi Barat sebesar 8,91 pada tahun 2021. Sedangkan kabupaten Polewali Mandar adalah kabupaten yang terendah dengan capaian hanya sebesar 7,44.

Grafik 2.18 Rata-Rata Lama Sekolah Di Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017–2021 (Tahun)



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Grafik 2.19 Rata-Rata Lama Sekolah menurut Kabupaten Di Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (Tahun)

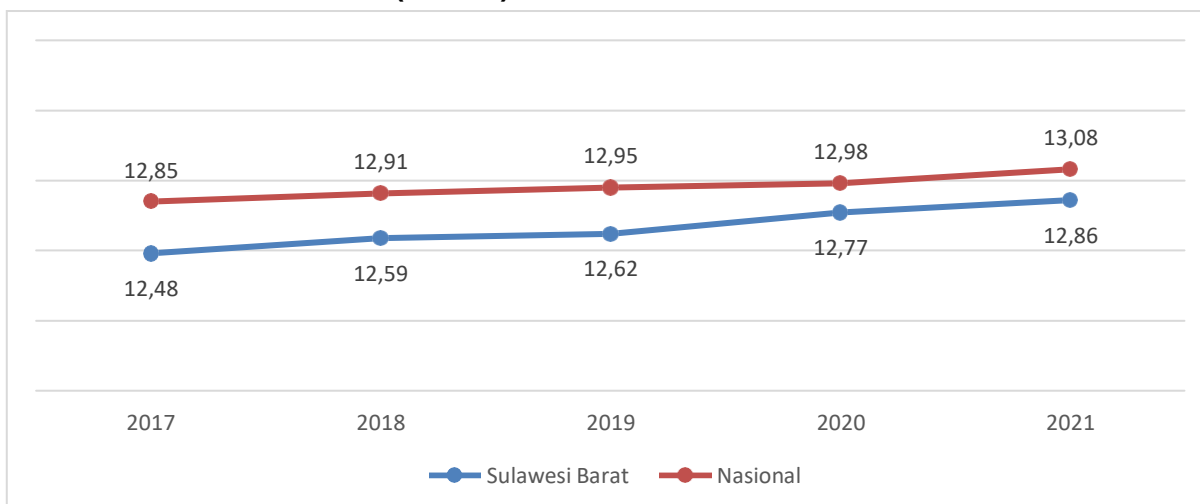
Kabupaten	Rata-rata Lama Sekolah				
	2017	2018	2019	2020	2021
Majene	8,14	8,25	8,52	8,65	8,91
Polewali Mandar	7,09	7,24	7,40	7,41	7,44
Mamasa	7,10	7,22	7,37	7,65	7,88
Mamuju	7,26	7,53	7,69	7,95	7,96
Pasangkayu	7,48	7,68	7,92	7,98	8,09
Mamuju Tengah	7,13	7,23	7,24	7,46	7,51
Sulawesi Barat	7,31	7,50	7,73	7,89	7,96

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

2.2.9 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah di Sulawesi Barat sebesar 12,86 tahun berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 13,08 tahun. Harapan Lama Sekolah Sulawesi Barat tumbuh 0,70 persen per tahun, sementara Indonesia tumbuh 2,22 persen per tahun. Kabupaten dengan harapan lama sekolah tertinggi yaitu Kabupaten Majene dengan angka sebesar 13,62 yang tergolong tinggi bahkan lebih tinggi dari harapan lama sekolah nasional, juga sejalan dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Majene yang juga tinggi.

Grafik 2.20 Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Grafik 2.21 Harapan Lama Sekolah menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2017-2021 (Tahun)

Kabupaten	Harapan Lama Sekolah				
	2017	2018	2019	2020	2021
Majene	13,57	13,58	13,60	13,61	13,62
Polewali Mandar	13,01	13,02	13,05	13,06	13,38
Mamasa	11,41	11,58	11,74	12,05	12,36
Mamuju	13,13	13,14	13,18	13,19	13,24
Pasangkayu	11,37	11,59	11,66	11,93	11,95
Mamuju Tengah	11,57	11,71	11,92	12,23	12,53
Sulawesi Barat	12,48	12,59	12,66	12,77	12,86

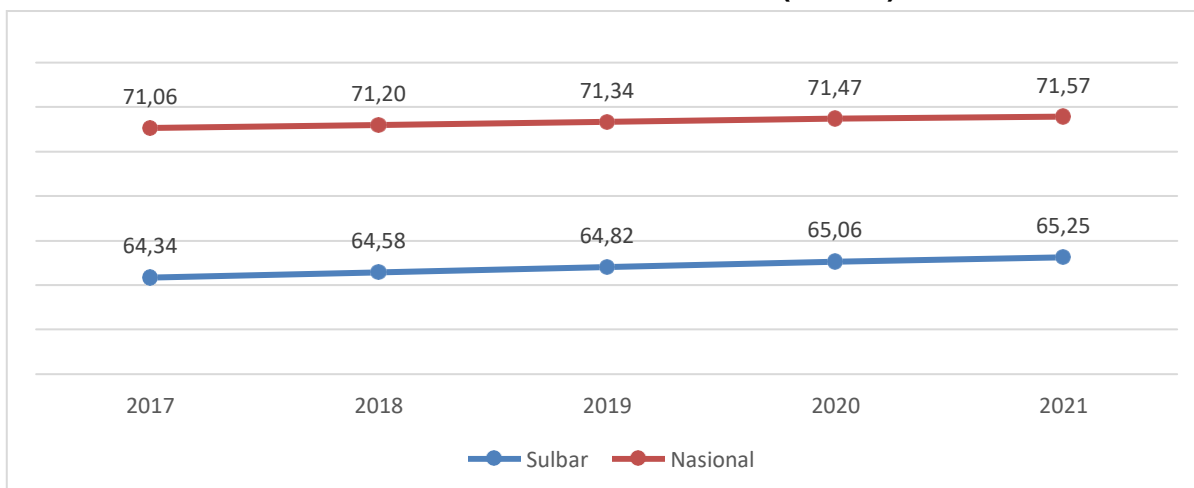
Sumber : BPS, sulbar.bps.go.id

2.2.10 Umur Harapan Hidup Saat Lahir

Umur harapan hidup saat lahir merupakan wujud dari indikator kesehatan penduduk. Umur harapan hidup adalah jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir sampai waktu tertentu. Ada banyak hal yang dapat menjadi faktor tingginya umur harapan hidup, seperti kondisi sosial ekonomi, perilaku hidup sehat dan lain sebagainya.

Komponen pembentukan IPM Provinsi Sulawesi Barat dari dimensi kesehatan tergolong masih rendah, di mana umur harapan hidup tahun pada 2021 sebesar 65,25 tahun masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 71,57 tahun. Akan tetapi tren pertumbuhan umur harapan hidup Sulawesi Barat tumbuh 0,29 persen per tahun jauh di atas rata-rata capaian nasional yang hanya tumbuh 0,19 persen per tahun. Perlahan namun pasti pergerakan umur harapan hidup Sulawesi Barat semakin mendekati umur harapan hidup Nasional.

Grafik 2.22 Angka Harapan Hidup/ Umur Harapan Hidup saat Lahir Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017-2021 (Tahun)



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Tabel 2.27 Angka Harapan Hidup/Umur Harapan Hidup saat Lahir menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2017-2021 (Tahun)

Kabupaten	Angka Harapan Hidup				
	2017	2018	2019	2020	2021
Majene	60,79	61,05	61,30	61,56	61,77
Polewali Mandar	61,76	61,97	62,18	62,38	62,53
Mamasa	70,48	70,62	70,75	70,87	70,94
Mamuju	66,65	66,94	67,23	67,52	67,77
Pasangkayu	65,33	65,62	65,91	66,20	66,45
Mamuju Tengah	67,52	67,79	68,06	68,30	68,55
Sulawesi Barat	64,34	64,58	64,82	65,06	65,25

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Berdasarkan data BPS tahun 2021 kabupaten Mamasa merupakan kabupaten dengan umur harapan hidup paling tinggi sebesar 70,94 tahun sedangkan kabupaten dengan umur harapan hidup terendah adalah kabupaten Majene dengan umur harapan hidup hanya sebesar 61,77 tahun

2.2.11 Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Gizi buruk merupakan kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama (menahun). Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak, gizi buruk pada anak seringkali disebabkan oleh kurangnya asupan makanan bergizi seimbang, di samping itu bisa juga disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terganggunya proses pencernaan makanan ataupun terganggunya penyerapan zat gizi penting yang diperlukan oleh tubuh.

Balita Gizi Kurang adalah Status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang merupakan gabungan dari istilah gizi buruk dan gizi kurang dengan Z score < -2 standar deviasi. persentase balita gizi kurang Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020, pada tabel di bawah ini digambarkan bahwa persentase balita gizi kurang paling rendah adalah Kabupaten Polewali Mandar 3,5 persen, Mamasa 3,8 persen sedangkan Kabupaten Mamuju memiliki persentase lebih tinggi daripada Kabupaten lainnya yaitu 9,1 persen.

Grafik 2.23 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang Umur 0–59 Bulan Menurut Kabupaten Sulawesi Barat Tahun 2020

KABUPATEN	JUMLAH BALITA 0-59 BULAN YANG DITIMBANG	BALITA GIZI KURANG (BB/U)	
		JUMLAH	%
Majene	12.675	810	6,4
Polewali Mandar	32.393	1.118	3,5
Mamasa	7.540	288	3,8
Mamuju	13.211	1.200	9,1
Pasangkayu	11.409	1.021	8,9
Mamuju Tengah	8.846	551	6,2
Sulawesi Barat	86.074	4.988	5,8

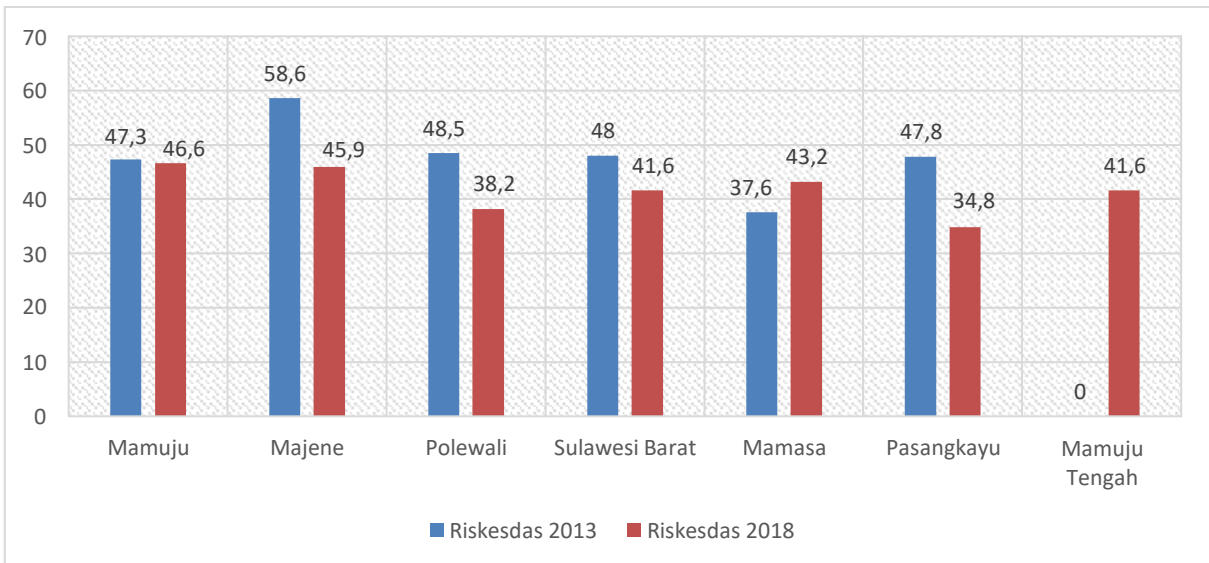
Sumber: Buku Statistik Sektor Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.2.12 Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sedangkan gizi buruk adalah keadaan kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan atau menderita sakit dalam waktu lama yang ditandai dengan berat badan menurut umur. Untuk mengetahui pengukuran Stunting dan Gizi buruk tentunya memiliki indikator yang berbeda, stunting sendiri dapat dilihat pengukurannya melalui tinggi badan menurut umur. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Tahun 2013 dan Tahun 2018, Provinsi Sulawesi Barat menduduki urutan kedua secara nasional angka stunting tertinggi di Indonesia setelah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu dengan angka prevalensi stunting sebesar 48,02 persen (Riskesdas 2013), dan 41,60 persen (Riskesdas 2018).

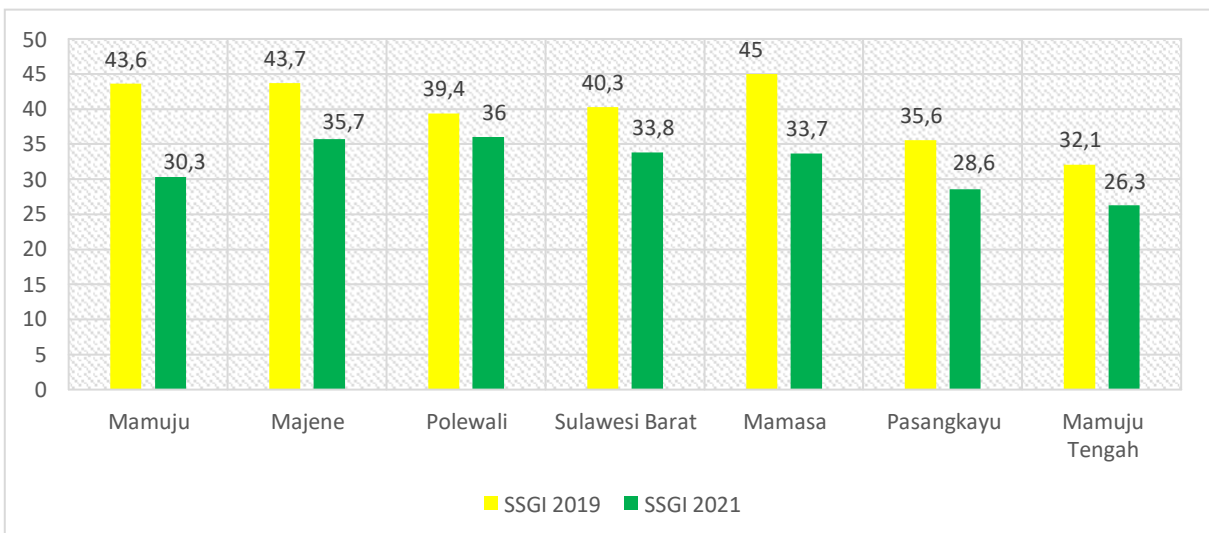
Sedangkan pada tingkat kabupaten, sesuai hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 dan Tahun 2018, untuk Kabupaten Majene angka prevalensi stunting pada tahun 2013 sebesar 58,6 persen dan tahun 2018 sebesar 45,9 persen, Kabupaten Polewali Mandar angka prevalensi stunting pada tahun 2013 sebesar 58,6 persen dan pada tahun 2018 sebesar 38,2 persen, Kabupaten Pasangkayu angka prevalensi stunting pada tahun 2013 sebesar 47,8 persen dan pada tahun 2018 sebesar 34,8 persen, Kabupaten Mamuju angka prevalensi stunting pada tahun 2013 sebesar 47,3 persen dan pada tahun 2018 sebesar 46,6 persen, Kabupaten Mamasa angka prevalensi stunting pada tahun 2013 sebesar 43,2 persen dan pada tahun 2018 sebesar 43,2 persen.

Grafik 2.24 Jumlah Permasalahan Gizi Stunting (tubuh pendek) di Sulawesi Barat Tahun 2013 dan 2018



Sumber: Riset Kesehatan Dasar 2013 & 2018

Grafik 2.25 Jumlah Permasalahan Gizi Stunting (tubuh pendek) di Sulawesi Barat Tahun 2019 dan 2021



Sumber: Survey Status Gizi Indonesia 2019 & 2021

Tren penurunan angka prevalensi stunting berlanjut pada tahun 2019 dan tahun 2021, berdasarkan Laporan Survei Status Gizi Balita (SSGBI) angka prevalensi stunting Sulawesi Barat turun sebesar 1,22 persen atau menjadi 40,38 persen pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2021 angka prevalensi stunting turun 6,5 persen atau menjadi 33,8 persen. Tren penurunan angka prevalensi stunting tertinggi berada pada kabupaten Mamuju sebesar 13,3 persen sedangkan yang terendah berada pada kabupaten polewali mandar dengan tren penurunan sebesar 3,4 persen. Tren Penurunan angka stunting ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah sudah berada pada jalur yang tepat, namun meskipun secara statistik terjadi penurunan prevalensi stunting di Sulawesi Barat, angka tersebut masih tinggi jika mengacu kepada standar WHO yakni di bawah 20 persen. Tingginya angka pernikahan dini kemudian rendahnya tingkat pendidikan masyarakat serta perilaku masyarakat yang

belum secara maksimal menerapkan hidup sehat menjadi beberapa faktor penyebab tingginya angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.28 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Bidang Kesehatan Tahun 2017–2021 (Persen)

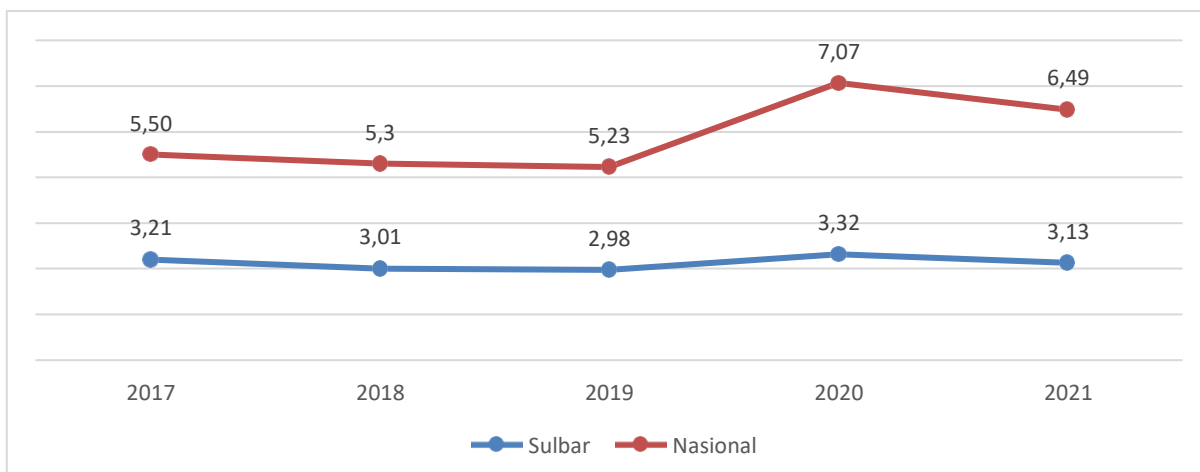
URAIAN KEGIATAN	2018	2019	2020	2021
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	19,8	N/A	N/A	N/A
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	19,8	N/A	N/A	N/A
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	9,5	N/A	N/A	N/A
Prevalensi anemia pada ibu hamil	22,1	N/A	N/A	N/A
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	76,75	N/A	N/A	N/A
Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	78,3	91,81	91,30	91,28
Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	75,8	N/A	N/A	N/A
Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	80,6	N/A	N/A	N/A
Prevalensi HIV pada populasi dewasa	7	N/A	N/A	N/A
Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk	1,179	N/A	N/A	N/A
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100	N/A	N/A	N/A
Unmet need pelayanan kesehatan	5,93	6,36	6,84	N/A

Sumber: BPS, bps.go.id

2.2.13 Pengangguran Terbuka dan Angkatan Kerja

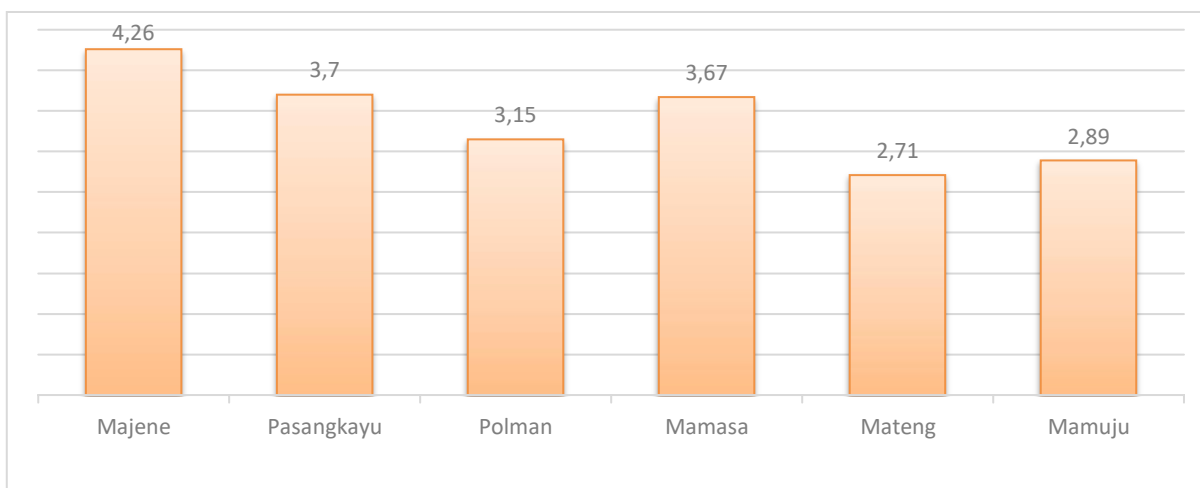
Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja atau sementara tidak bekerja. Pembangunan ketenagakerjaan Sulawesi Barat ditinjau dari indikator tingkat penganggur terbukanya (TPT) mengalami perkembangan yang fluktuatif di mana TPT terendah terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 2,98 dan tertinggi berada pada tahun 2020. Pada tahun 2019 TPT Sulawesi Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan TPT sebesar 2,98 Namun sejak pandemi yang terjadi di tahun 2020 angka TPT naik sebesar 3,32 persen meski kembali membaik di tahun 2021 sebesar 3,13 persen. Meskipun demikian Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Barat masih lebih rendah dibanding TPT Nasional yang mencapai 6,49 persen dan menjadi ketiga terendah secara nasional.

Grafik 2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Grafik 2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Sumber: BPS, *Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021*

Tabel 2.29 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2021

Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Total Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas	908 506	934 281	956 647	991 723	1 008 650
Bekerja	622 641	619 395	641 613	672 986	686 540
Pengangguran	19 132	20 227	21 054	23 132	22 210
Angkatan Kerja	641 773	639 622	662 667	692 118	708 750
Bukan Angkatan Kerja	266 283	294 659	293 980	295 605	299 900
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,21	3,16	3,18	3,32	3,13
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,96	68,46	69,27	70,19	70,27

Sumber: BPS, *Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2017-2021*

Rendahnya angka TPT di Sulawesi barat menunjukkan rendahnya angka pengangguran, akan tetapi meskipun demikian angka kemiskinan di Sulawesi Barat masih cukup tinggi bahkan masih di atas nasional yang hanya sebesar 11,50 persen di Tahun 2020 Ini menunjukkan kontribusi pekerja di Sulawesi Barat terhadap angka

kemiskinan tidak berbanding lurus terhadap menurunnya angka kemiskinan. Kondisi ini terjadi karena hampir 48 persen tenaga kerja di Sulawesi Barat bekerja disektor pertanian. Umumnya petani di Sulawesi Barat adalah petani gurem dengan kepemilikan lahan hanya 0,25 hektar sehingga produksi pertanian hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan menyebabkan pekerja di Sulawesi Barat hanya bisa terserap di pekerjaan informal yang diberi upah rendah.

2.2.14 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja diperoleh rasio penduduk yang bekerja. Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi setiap tahun. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2016 adalah 96,67 persen naik hingga di tahun 2018 sebesar 96,84 dan turun pada tahun 2020 menjadi 96,68 persen. Dari angka tersebut, terdapat 96,84 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja, sedangkan sisanya 3,22 persen masih mencari kerja atau pengangguran.

Tabel 2.30 Rasio Penduduk yang bekerja Tahun 2016–2020

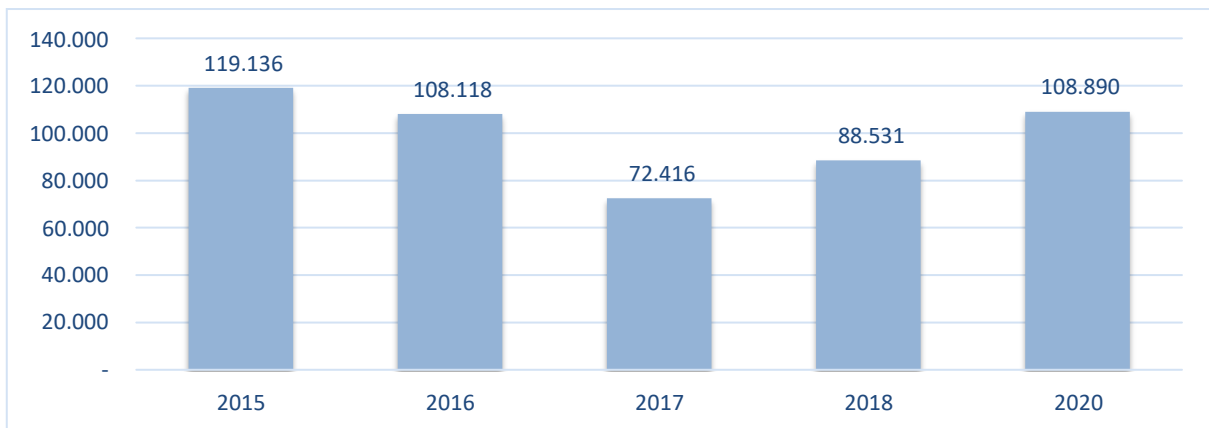
Keterangan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk yang bekerja	Jiwa	624 182	595 004	619 395	641 613	672 986
Angkatan Kerja	Jiwa	645 671	614 748	639 622	662 667	696 118
Rasio Penduduk yang bekerja	%	96,67	96,79	96,84	96,82	96,68

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2017-2021

2.2.15 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 masih menjadi salah satu tolok ukur kemiskinan di masyarakat. Tingginya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 mencerminkan masih ada persoalan kemiskinan di wilayah tersebut yang harus diselesaikan secara menyeluruh. Penurunan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I setiap tahunnya di Sulawesi Barat, Berdasarkan data di bawah ini, Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I tertinggi berada di tahun 2015 yang sebesar 119.136 jiwa, namun berhasil diturunkan pada tahun 2017 hingga menjadi 72.416 jiwa walaupun mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 108.890 jiwa. Angka pada Tahun 2020 yang terdiri dari 71.591 jiwa untuk keluarga pra sejahtera sedangkan keluarga sejahtera I sebesar 37.299 jiwa. Angka ini tentunya harus lebih ditingkatkan dalam rangka akselerasi penghapusan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.

Grafik 2.3 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020



Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.31 Capaian Indikator Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016–2020

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat	Ada/Tidak	-	Ada	Ada	Ada	Ada
Persentase PAD terhadap pendapatan	%	16,44	16,49	17,78		
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	73,31	76,80	73,00	75,00	78,80
Penguatan Cadangan Pangan	%	30,05	33,31	33,16		
Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	12,59	14,84	5,00	10,00	5,00

Sumber : E-Database, sulbarprov.sipd.kemendagri.go.id

Tabel 2.32 Kontribusi Sektoral terhadap PDRB di Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	(%)	10,76	11,07	11,14	3,62	0,26
Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	(%)	7,83	7,81	7,53	N/A	N/A
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	(%)	0,34	0,32	0,32	0,34	0,33
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	(%)	2,3	2,26	2,23	2,24	2,19
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	(%)	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	(%)	2,08	5,96	5,00	5,00	5,00
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	(%)	10,46	10,39	10,31	10,21	10,19
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	(%)	9,53	10,67	10,79	10,74	10,62
Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri	(%)	2,08	5,96	3,11	N/A	N/A
Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	(%)	N/A	0,80	0,20	0,13	0,14

Sumber : E-Database, sulbarprov.sipd.kemendagri.go.id

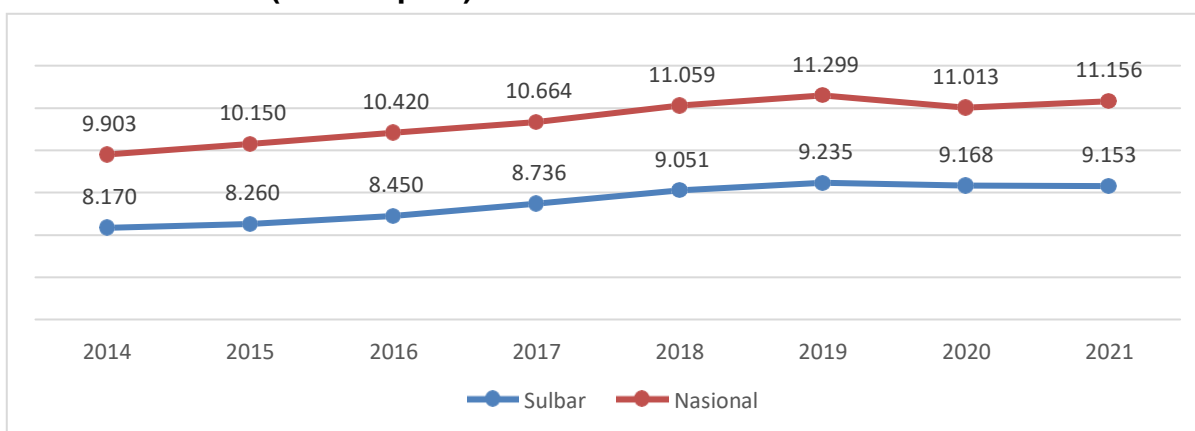
2.3 Aspek Daya Saing

Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi yang sangat strategis karena merupakan pintu gerbang segitiga yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah-Kalimantan Timur, juga berhadapan langsung dengan Selat Makassar, jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional (ALKI II). Disamping itu, Sulawesi Barat memiliki potensi yang besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang tentunya sangat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi regional Sulawesi maupun nasional.

2.3.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita

Pengeluaran per kapita merupakan kemampuan daya beli masyarakat yang menggunakan 96 komoditas di mana 66 komoditas merupakan makanan dan 30 komoditas merupakan komoditas non makanan. Pengeluaran per kapita di Sulawesi Barat sebesar 8,736 juta per kapita per tahun di tahun 2017 naik menjadi 9,153 juta per kapita per tahun pada tahun 2021 dan masih berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 11,156 juta per kapita per tahun pada tahun 2021. Pengeluaran per kapita Sulawesi Barat tumbuh 1,63 persen per tahun, sementara Indonesia tumbuh 1,40 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lambatnya pertumbuhan pengeluaran per kapita di Sulawesi Barat.

Grafik 2.4 Pengeluaran Per Kapita Di Sulawesi Barat Tahun 2017–2021 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Tabel 2.33 Pengeluaran Per Kapita menurut Kabupaten di Sulawesi Barat, Tahun 2017–2021 (Ribu Rupiah)

Kabupaten	Pengeluaran Per kapita				
	2017	2018	2019	2020	2021
Majene	9.559	9.051	10.029	10.056	10.028
Polewali Mandar	7.947	9.904	8.598	8.580	8.548
Mamasa	7.353	8.355	7.769	7.747	7.736
Mamuju	9.019	7.597	9.535	9.500	9.494
Pasangkayu	10.577	9.308	11.094	11.111	11.072
Mamuju Tengah	7.931	10.915	8.501	8.414	8.408
Sulawesi Barat	8.736	8.243	9.235	9.168	9.153

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Untuk melihat kinerja ekonomi Sulawesi Barat (dengan mengabaikan inflasi) dipergunakan PDRB ADHK. Secara umum tampak pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tahun 2021 triwulan III meningkat hingga 2,54 persen. Perkembangan PDRB Sulawesi Barat berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp 20,18 triliun pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp 45,91 triliun rupiah pada tahun 2020 sedangkan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar 20,78 triliun rupiah meningkat menjadi Rp 32,08 triliun rupiah. Pada tahun 2020, PDRB per kapita ADHB telah mencapai 33,31 juta rupiah sedangkan PDRB ADHK sebesar 23,82 juta rupiah.

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan, baik dengan provinsi atau daerah lainnya yang berdekatan maupun nasional atau internasional. Pengeluaran Konsumsi rumah tangga per kapita (angka konsumsi RT per kapita) Penduduk Sulawesi Barat memiliki pola konsumsi yang relatif beragam. Pada tahun 2020, menurut golongan pengeluaran tertinggi, terdapat 25,20 persen penduduk dengan antara Rp.500.000,- hingga Rp.749.999,- per kapita sebulan. Sedangkan persentase terendah pada golongan pengeluaran kurang dari Rp.200.000,- sebesar 0,21 persen. Pengeluaran per kapita sebulan di Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.34 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per kapita Sebulan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Golongan Pengeluaran per Kapita	Persentase (%)
<200.000	0,21
200.000-299.999	5,81
300.000-499.999	24,55
500.000-749.999	25,20
750.000-999.999	15,74
1.000.000-1.499.999	17,02
1.500.000+	11,48
Jumlah	100,00

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.35 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per kapita Tahun 2016–2020

Provinsi	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Barat	13.966,45	14.632,82	15.370,06	16.029,78	16.114,87

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok makanan dan bukan makanan Provinsi Sulawesi Barat paling tinggi berada di Kabupaten Pasangkayu. Dan yang paling rendah berada di Kabupaten Mamasa. Berikut tabel pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok makanan dan bukan makanan menurut Kabupaten.

Tabel 2.36 Pengeluaran Rata-rata Per Kapita sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2020 (Rupiah)

Kabupaten	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Majene	439 781	436 271	372 730	412 845	812 511	849 115
Polewali Mandar	446 767	438 086	403 320	396 024	850 087	834 110
Mamasa	383 632	377 680	277 562	352 928	661 194	730 608
Mamuju	432 473	475 919	375 629	481 937	808 102	957 856
Pasangkayu	516 916	551 553	499 912	515 244	1 016 828	1 066 797
Mamuju Tengah	458 438	476 725	450 459	499 786	908 897	976 512
Sulawesi Barat	445 427	457 059	395 586	436 701	841 013	893 761

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.3.2 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) dan dibayar (Ib) petani, NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Jika NTP lebih besar dari 100 maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel 2.37 Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sulawesi Barat 2016–2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks yang diterima petani (It)	127,40	131,10	139,42	142,70	122,58
Indeks yang dibayarkan petani (Ib)	118,63	122,60	125,70	127,58	106,32
Nilai Tukar Petani (NTP)	107,40	106,93	110,92	111,85	115,30

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Secara umum, terjadi peningkatan kesejahteraan petani dibandingkan periode yang sama. Nilai tukar produk pertanian tahun 2021 cenderung lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.38 Nilai Tukar Petani (NTP) (bulan) di Provinsi Sulawesi Barat 2017–2021

Bulan	Nilai Tukar Petani				
	2017	2018	2019	2020	2021
Januari	106,58	108,89	110,60	109,55	116,92
Februari	106,41	108,16	109,15	111,80	116,67
Maret	105,44	110,12	109,56	110,42	117,03
April	106,00	110,86	111,09	108,91	118,86
Mei	105,63	113,32	112,01	106,41	120,07
Juni	104,65	112,17	113,01	104,34	120,06
Juli	104,42	111,77	113,25	104,76	119,93
Agustus	106,07	111,56	112,29	107,25	121,94
September	107,57	111,43	112,19	109,78	124,79
Oktober	109,05	110,50	112,23	111,80	127,86
November	110,96	112,42	112,68	113,08	130,33
Desember	110,38	109,78	114,04	115,30	129,66

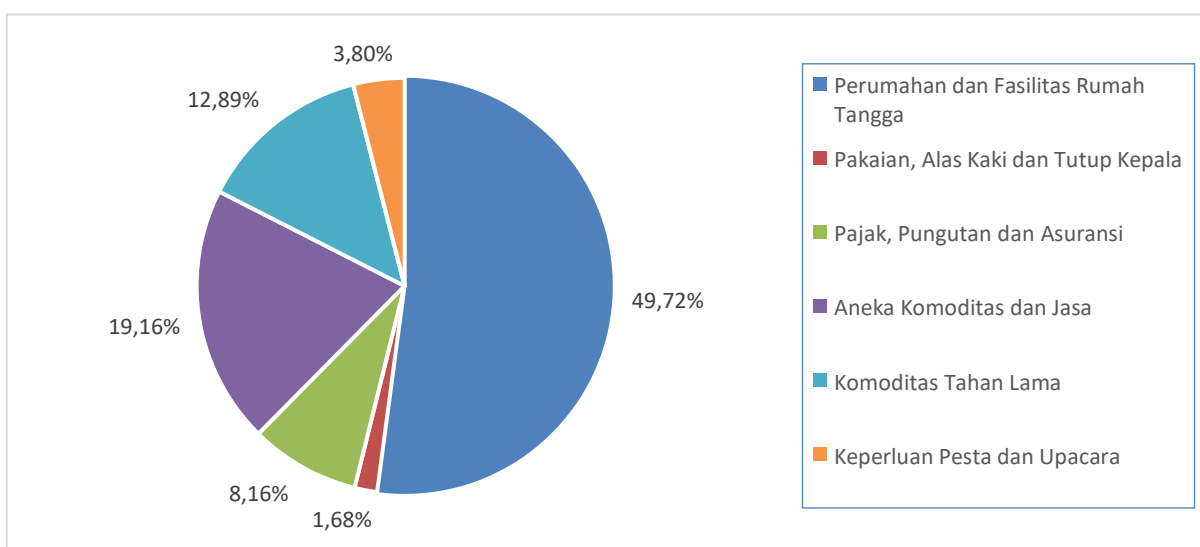
Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Selama Tahun 2017 NTP Sulawesi Barat terlihat berfluktuatif nilai NTP paling tinggi sebesar 110,96 pada November 2017 dan 130,33 pada November 2021, dan sepanjang tahun 2017 dan 2021 nilai NTP Sulawesi Barat selalu berada di atas 100 baik itu dilihat secara tahunan ataupun bulanan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan petani di Sulawesi Barat sudah baik dan tetap harus terus dikembangkan mengingat sektor pertanian merupakan salah satu sektor dengan tingkat serapan Tenaga Kerja paling tinggi.

2.3.3 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok bukan makanan yang paling tinggi adalah pengeluaran perumahan, bahan bakar, penerangan dan air, sekitar 51,18 persen dan paling rendah adalah pengeluaran untuk pesta dan upacara sekitar 3,18 persen.

Diagram 2.4 Persentase Pengeluaran Rata-rata Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.39 Pengeluaran Per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas Bukan Makanan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Kelompok Komoditas Non Pangan	2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Perumahan, dan fasilitas rumah tangga	169 575	51,64	158 994	48,37	197 395	51,18	190 471	48,15	217 122	49,72
Aneka komoditas dan jasa	66 496	20,25	70 500	21,45	75 310	19,52	77 761	19,66	83 691	19,16
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	20 615	6,28	22 175	6,75	24 926	6,46	27 418	6,93	27 350	1,68
Komoditas tahan lama	45 549	13,87	40 674	12,37	49 722	12,89	60 388	15,27	56 307	12,89
Pajak, pungutan, dan asuransi	16 534	5,04	26 724	8,13	26 118	6,77	26 732	6,76	35 616	8,16
Keperluan pesta dan upacara	9 587	2,92	9 616	2,93	12 247	3,18	12 816	3,24	16 616	3,80
Total	328 356	100	328 683	100	385 717	100	395 586	100	436 701	100

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2017-2021

Pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita dalam kurun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pengeluaran makanan lebih besar dibanding pengeluaran Bukan Makanan. Pengeluaran non-pangan per kapita di tahun 2016, sebesar Rp. 328.356,- meningkat sebesar Rp. 436.701,- pada tahun 2020.

Tabel 2.40 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan MENURUT Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2020 (rupiah)

Kabupaten	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Majene	439 781	436 271	372 730	412 845	812 511	849 115
Polewali Mandar	446 767	438 086	403 320	396 024	850 087	834 110
Mamasa	383 632	377 680	277 562	352 928	661194	730 608
Mamuju	432 473	475 919	375 629	481 937	808 102	957 856
Pasangkayu	516 916	551 553	499 912	515 244	1 016 828	1 066 797
Mamuju Tengah	458 438	476 725	450 459	499 786	908 897	976 512
Sulawesi Barat	445 427	457 059	395 586	436 701	841 013	893 761

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.41 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat 2019–2020 (rupiah)

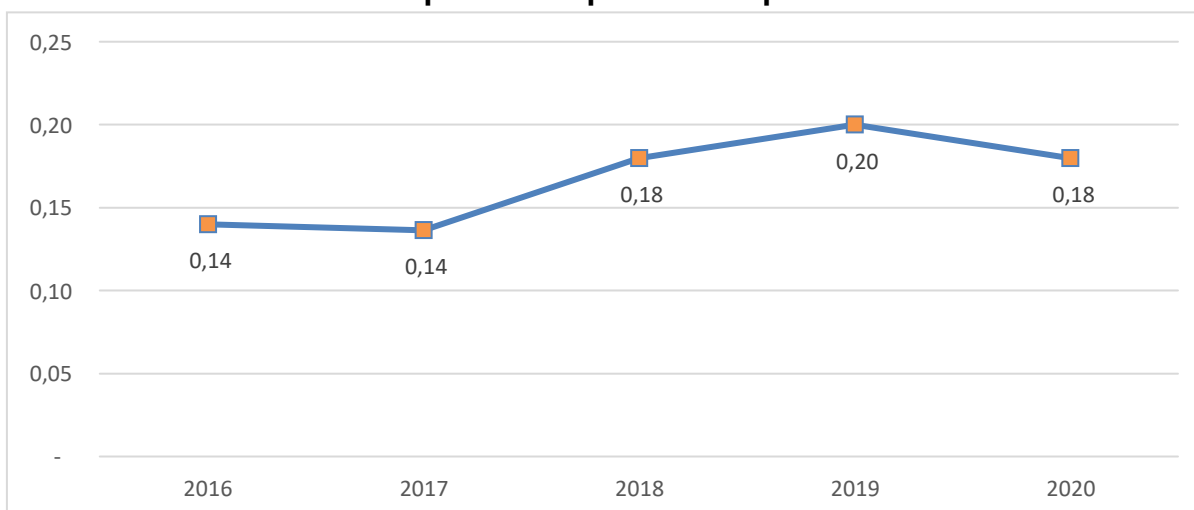
Kabupaten	Makanan		Bukan Makanan	
	2019	2020	2019	2020
Majene	54,13	51,38	45,87	48,62
Polewali Mandar	52,56	52,52	47,44	47,48
Mamasa	58,02	51,69	41,98	48,31
Mamuju	53,52	49,69	46,48	50,31
Pasangkayu	50,84	51,70	49,16	48,30
Mamuju Tengah	50,44	48,82	49,56	51,18
Sulawesi Barat	52,96	51,14	47,04	48,86

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.3.4 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB

Ekspor dan impor adalah indikator keterbukaan ekonomi yang menunjukkan keterkaitan aktivitas ekonomi suatu daerah/negara dengan daerah/negara lain. Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB dapat digunakan untuk melihat kontribusi aktivitas perekonomian suatu daerah dengan daerah lain terhadap PDRB. Selama kurun waktu 2016-2020, keterbukaan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat relatif rendah tetapi memiliki kecenderungan meningkat, yang ditunjukkan oleh rasio ekspor-impor Provinsi Sulawesi Barat terhadap PDRB, tahun 2016 sebesar 0,14 meningkat menjadi 0,18 tahun 2020.

Grafik 2.5 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDB Tahun 2016–2020



Sumber: BPS, PDRB Sulawesi Barat menurut Pengeluaran 2016-2020

2.3.5 Angka Kriminalitas

Tindak kriminalitas di suatu daerah akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat, berbagai bentuk kriminalitas seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi di Sulawesi Barat. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya menjadi terganggu. Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama menjaga iklim berinvestasi di daerah.

Tabel 2.42 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015–2019

Kepolisian Resort	2015	2016	2017	2018	2019
Majene	280	322	289	333	262
Polewali Mandar	1 151	904	714	434	794
Mamasa	164	125	104	126	137
Mamuju	498	478	390	774	348
Pasangkayu	474	467	386	447	414
Sulawesi Barat	2 290	2 410	2 286	2 139	3 698

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Selama tahun 2015-2019 jumlah tindak pidana di provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Adapun tindak pidana terbanyak adalah pada kasus penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi meningkatnya jumlah kasus pidana yang terproses menunjukkan kemampuan aparat kepolisian dalam menyelesaikan kasus dan membuktikan komitmen aparat dalam memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi warganya.

Tabel 2.43 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2019

Kepolisian Resort	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen)		
	2017	2018	2019
Majene	71	62	70
Polewali Mandar	56	52	63
Mamasa	69	71	82
Mamuju	78	53	47
Pasangkayu	64	51	94
Sulawesi Barat	58	54	68

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.44 Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Resort Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2019

Kepolisian Resort	2017	2018	2019
Majene	171	194	151
Polewali Mandar	165	99	179
Mamasa	66	79	85
Mamuju	140	270	119
Pasangkayu	234	263	237
Sulawesi Barat	172	158	268

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Semakin tahun angka kriminalitas semakin meningkat kondisi ini memberikan resiko lebih besar bagi masyarakat untuk terpapar oleh Tindakan kriminalitas. Dalam kurun beberapa tahun resiko tindak pidana meningkat dari 172 di tahun 2017 meningkat sebesar 268 di tahun 2019. Peluang terjadinya tindak kriminalitas tidak lepas dari semakin permisifnya nilai masyarakat, meningkatnya kemiskinan dan semakin tingginya angka pengangguran.

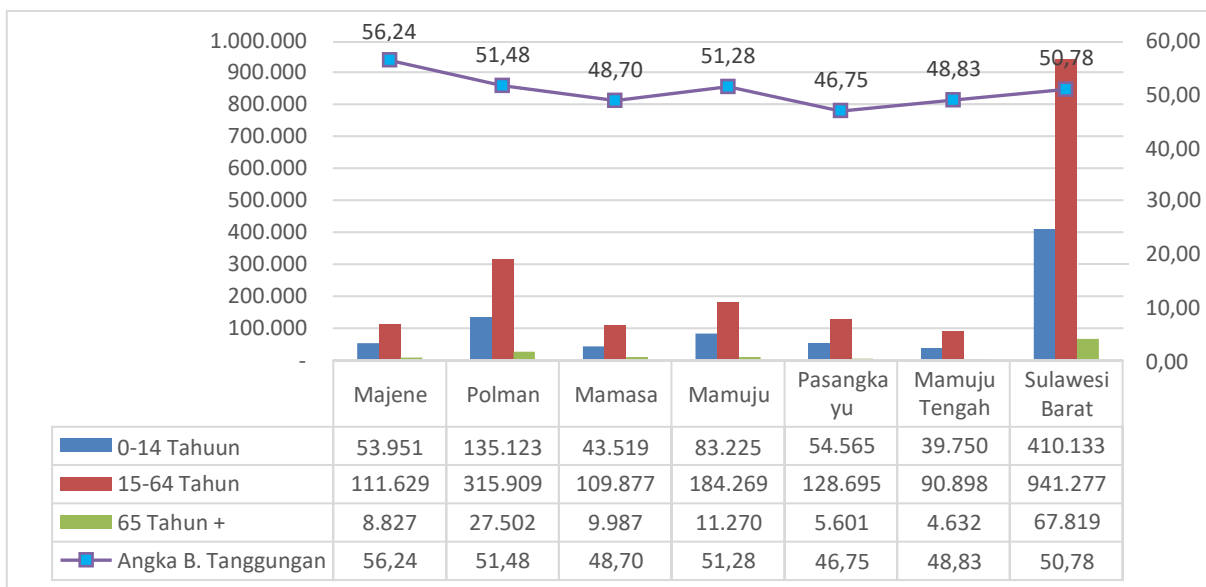
2.3.6 Tingkat Ketergantungan (rasio ketergantungan)

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0–14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15–64 tahun. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah sudah maju ataupun sebaliknya. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Melalui pengelompokkan penduduk berdasarkan usia maka dapat diketahui angkat beban tanggungan di Sulawesi Barat. Angka beban tanggungan penduduk di Sulawesi Barat sebesar 50,78 persen artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15–

64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 51 orang yang belum/tidak produktif (0–14 tahun dan >65 tahun) Tahun 2020. Beban tanggungan tertinggi di Kabupaten Majene sebesar 56,24 dan terendah di Kabupaten Pasangkayu sebesar 46,75 di Tahun 2020. Adapun grafik beban tanggungan di Sulawesi Barat seperti yang ada di bawah ini.

Grafik 2.6 Angka Beban Tanggungan Menurut Kelompok Umur Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi Barat Tahun 2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Urusan Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan sebuah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seperti yang dituangkan dalam UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam dan Undang Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana pada pasal 3 menyebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Untuk menjalankan pembangunan bidang pendidikan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 12 mengatur bahwa urusan pendidikan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan ini merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pendidikan secara garis besar adalah tercapainya struktur jumlah sekolah SD, SLTP, dan SLTA yang ideal, tercapainya rasio siswa antar tingkat pendidikan yang ideal, meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan,

meningkatnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan meningkatnya pengawasan dan manajemen sekolah, yang pada gilirannya berujung pada peningkatan sumber daya manusia Indonesia.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar adalah besaran yang menyatakan perbandingan jumlah penduduk untuk semua jenjang usia yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SMU dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Kasar yang tinggi tentu menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK di Sulawesi Barat pada jenjang Sekolah Dasar tahun 2016 s.d. 2020 yang melebihi angka seratus persen hal tersebut menunjukkan bahwa populasi murid yang bersekolah mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan SD, baik itu anak-anak usia di atas 12 tahun ataupun anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan dan juga merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.45 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	SD	SMP	SMA
2020	106,05	84,67	84,36
2019	107,32	82,71	84,10
2018	108,56	82,36	84,48
2017	110,19	83,02	80,34
2016	106,23	81,00	83,49

Sumber : BPS, sulbar.bps.go.id

Pada tahun 2016–2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Sulawesi Barat mengalami penurunan di setiap jenjang Pendidikan. Terjadinya penurunan APK pada setiap jenjang tidak berarti menunjukkan kinerja yang rendah karena APM setiap jenjang pun mengalami peningkatan.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Berdasarkan Data BPS tahun 2020 APM SD mencapai 95,80, untuk SMP/ sederajat mencapai 69,98 sedangkan untuk jenjang sekolah menengah mencapai 58,05

Adapun tabel Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan tahun 2016–2020 sebagai berikut.

Tabel 2.46 Angka Partisipasi Murni (APM) di Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	SD	SMP	SMU
2020	95,80	69,98	58,05
2019	95,86	69,36	57,64
2018	95,83	69,43	57,58
2017	95,51	69,40	57,46
2016	95,41	69,10	57,08

Sumber: BPS, bps.go.id

Angka Partisipasi Murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Persentase APM di Sulawesi Barat masih menunjukkan angka di bawah seratus persen. Hal itu berarti bahwa masih terdapat anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah tepat waktu. Dari tabel di atas, perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) setiap jenjang pendidikan menunjukkan pertumbuhan yang memuaskan sehingga dapat dipastikan anak usia sekolah di Sulawesi Barat khususnya jenjang Sekolah Dasar telah mengenyam pendidikan. Terkait APM SMP dan SMU pertumbuhannya selalu meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Peningkatan ini terjadi karena intervensi pendidikan khususnya program kembali bersekolah yang dicanangkan oleh Pemerintah, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

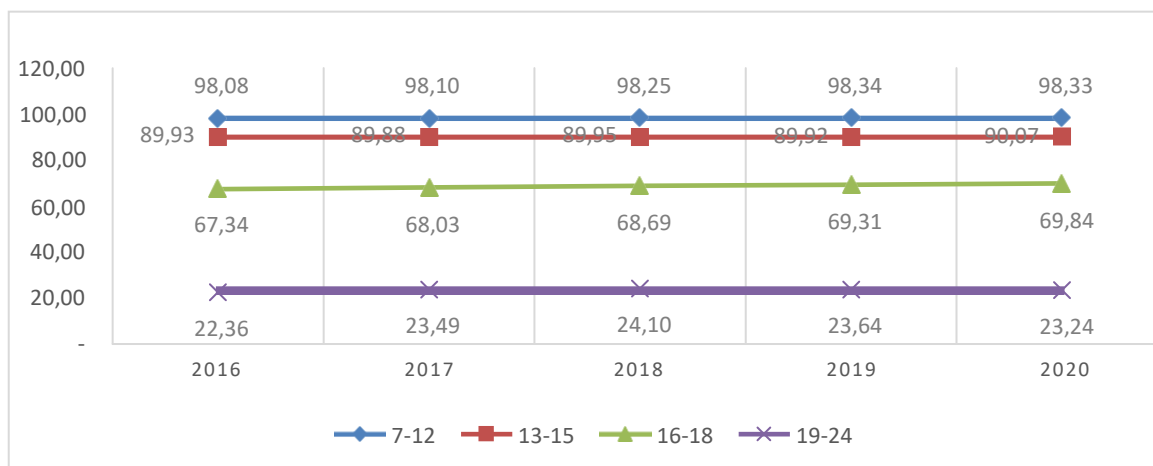
Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Angka Partisipasi sekolah ini juga memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama pada usia muda. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir angka partisipasi sekolah pada setiap jenjang usia sekolah mengalami peningkatan. Sebagai gambaran angka partisipasi sekolah tertinggi berada pada jenjang SD (7-12 tahun) dengan angka sebesar 98,33 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah dasar atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Sedangkan angka partisipasi sekolah yang paling rendah di Provinsi Sulawesi Barat yaitu pada jenjang usia 19-24 tahun atau perguruan tinggi. Ini mengindikasikan semakin tinggi jenjang Pendidikan maka Angka Partisipasi Sekolah semakin berkurang, ini terlihat dari selisih APS jenjang Pendidikan SD berbanding jenjang Perguruan tinggi yang selisih hingga 75,09 persen, berarti peluang anak usia 7 -12 tahun untuk melanjutkan Pendidikan hingga perguruan tinggi hanya sebesar 25 persen. Data dari tabel di bawah juga menunjukkan terjadi selisih yang cukup besar antara jenjang SMP dan SMA yang berarti menunjukkan tingginya anak putus sekolah di jenjang tersebut. Adapun faktor penyebab tingginya angka putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jarak sekolah yang jauh, kemiskinan dan pernikahan dini.

Tabel 2.47 Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

TAHUN	7-12	13-15	16-18	19-24
2020	98.33	90.07	69.84	23.24
2019	98.34	89.92	69.31	23.64
2018	98.25	89.95	68.69	24.10
2017	98.10	89.88	68.03	23.49
2016	98.08	89.93	67.34	22.36

Sumber: BPS, bps.go.id

Grafik 2.7 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020



Sumber: BPS, bps.go.id

d. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat Pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia Pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia Pendidikan dasar dan menengah.

Semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya semakin rendah ketersediaan sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan suatu daerah karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.

Berdasarkan Neraca pendidikan Dinas Pendidikan Sulawesi Barat tahun 2020 ketersediaan satuan Pendidikan di jenjang pendidikan dasar semakin tahun semakin meningkat. Ini ditunjukkan dari jumlah satuan Pendidikan baik jenjang SD, SMP maupun SMA.

Tabel 2.48 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Dasar (SD) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2020/2021)

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	171	20 182	1 873	10,78	118,02
Polewali Mandar	333	44 710	3 492	12,80	134,26
Mamasa	261	17 230	2 652	6,50	66,02
Mamuju	309	33 097	2 782	11,90	107,11
Pasangkayu	135	19 519	1 355	14,41	144,59
Mamuju Tengah	116	13 960	1 142	12,22	120,34
Sulawesi Barat	1 325	148 698	13 296	11,18	112,22

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel di atas menggambarkan rasio murid dengan ketersediaan sekolah SD pada lima kabupaten masih cukup tersedia kecuali di Kabupaten Mamasa. Kondisi ini disebabkan jumlah sekolah yang tersedia di jenjang SD berada hampir di setiap desa, ketersediaan sekolah yang memadai menjadi salah satu faktor tingginya angka Angka Partisipasi Sekolah di jenjang sekolah Dasar.

Tabel 2.49 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2020/2021)

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	37	7.759	606	12,80	209,70
Polewali Mandar	86	17.444	1.422	12,27	202,84
Mamasa	99	9.050	1.220	7,42	91,41
Mamuju	66	11.810	918	12,86	178,94
Pasangkayu	49	7.704	632	12,19	157,22
Mamuju Tengah	37	4.803	619	7,76	129,81
Sulawesi Barat	374	58.570	5.417	10,81	156,60

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Pada jenjang sekolah menengah pertama rasio murid dan sekolah menunjukkan rasio yang cukup tinggi yaitu sebesar 156,60 untuk tahun 2020 ini berarti jumlah sekolah berbanding murid belum mencukupi. Rendahnya APS SMP di Provinsi Sulawesi Barat dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah sekolah, sehingga dari jumlah murid SD sebanyak 148.698 yang melanjutkan ditingkat SMP hanya sebanyak 7.759. Olehnya itu pemerintah berupaya menaikkan akses masyarakat terhadap Pendidikan menengah pertama dengan membangun satuan Pendidikan dan penambahan ruang kelas baru. Dalam 5 tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah satuan pendidikan maupun ruang kelas baru pada jenjang SMP. Pada tahun 2016 jumlah SMP hanya sebanyak 369 Di tahun 2020 jumlahnya meningkat sebanyak 377, sedangkan untuk ruang kelas di tahun 2018 hanya sebanyak 4.673 tetapi pada tahun 2020 meningkat sebanyak 5021. Penambahan tersebut tentu saja berkontribusi pada peningkatan APS SMP di Sulawesi Barat.

Tabel 2.50 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2020/2021)

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	16	5.322	434	13,05	335,25
Polewali Mandar	28	9.572	672	14,86	332,97
Mamasa	38	4.619	490	9,45	117,45
Mamuju	24	5.514	391	14,61	239,21
Pasangkayu	14	2.356	192	11,34	163,64
Mamuju Tengah	13	1.515	158	10,92	124,07
Sulawesi Barat	133	28.898	2.337	12,37	217,28

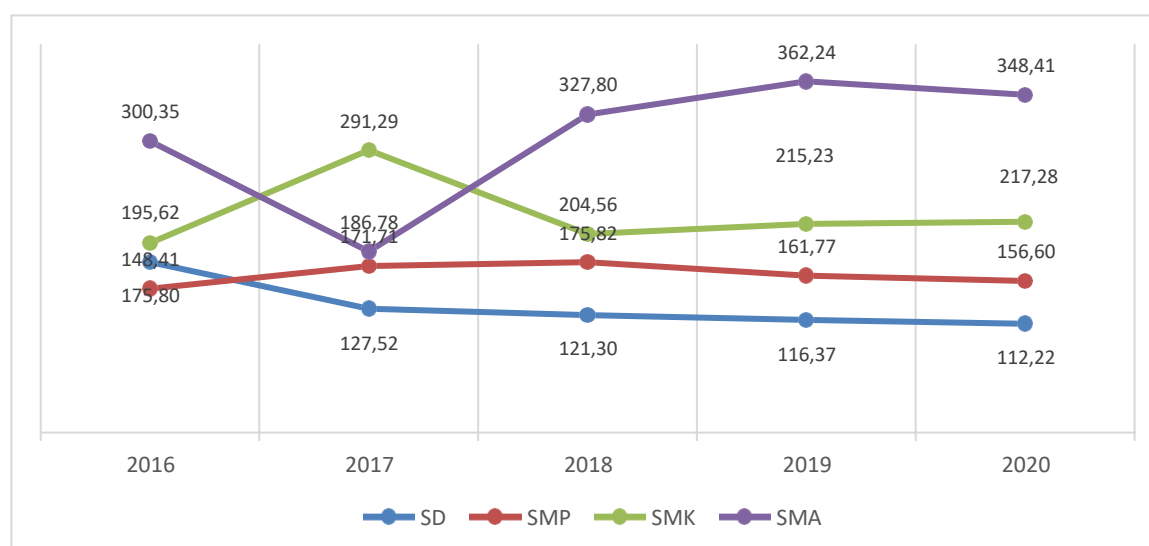
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.51 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid-Guru & Murid-Sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat Tahun (2020/2021)

Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Majene	7	3.732	270	14,53	543,71
Polewali Mandar	17	8.068	506	17,36	493,35
Mamasa	21	4.223	328	13,78	208,67
Mamuju	21	6.767	451	16,42	344,10
Pasangkayu	12	4.655	318	14,63	387,58
Mamuju Tengah	10	3.215	242	14,70	342,50
Sulawesi Barat	88	30.660	2.115	14,50	348,41

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Grafik 2.8 Rasio Murid terhadap Sekolah (SD, SMP, SMK, SMA) Tahun 2016–2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Berdasarkan grafik di atas Rasio kebutuhan sekolah berbanding murid di jenjang SMA/SMK masih perlu ditingkatkan, terutama di level SMA di mana rasio murid berbanding sekolah di atas 348,41 persen. Tingginya minat siswa bersekolah di SMA tidak berbanding dengan jumlah sekolah yang tersedia. Sebaliknya SMK dengan jumlah sekolah yang lebih banyak yaitu sebesar 133 mampu menampung siswa sebanyak 28.898.

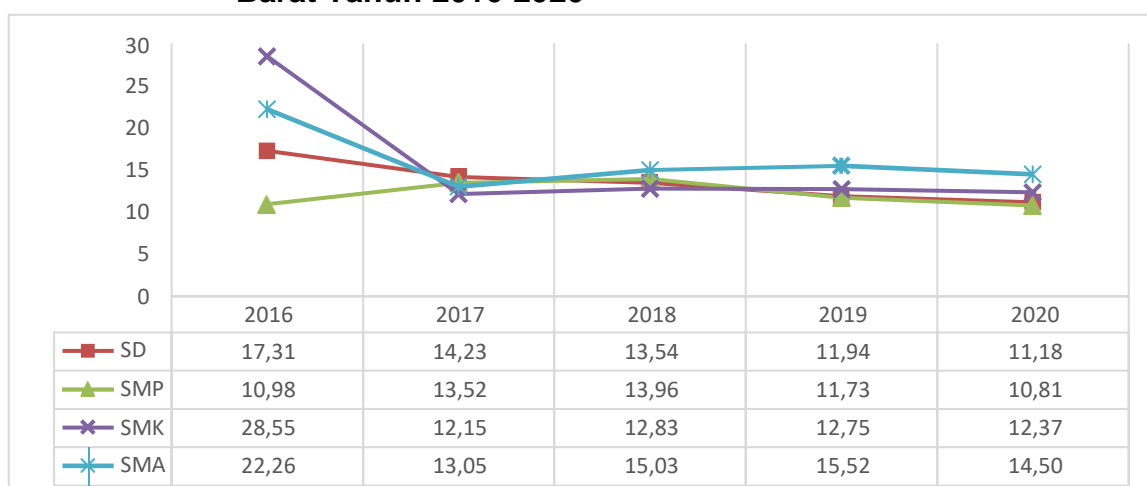
Selain SMA/SMK yang menjadi kewenangan provinsi Sulawesi Barat di sektor pendidikan, SLB juga merupakan bagian dari kewenangan provinsi. Berdasarkan data neraca Pendidikan tahun 2020 jumlah SLB sebanyak 25 sekolah menampung 1,308 peserta didik. Tingginya angka putus sekolah di Sulawesi Barat bukan hanya disebabkan oleh pernikahan dini tetapi juga banyak disumbang oleh anak disabilitas. Kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak disabilitas karena malu dan keterbatasan sarana dan prasarana SLB menjadi salah satu penyebab banyak anak disabilitas tidak mendapatkan hak Pendidikan mereka. Untuk mengantisipasi hal tersebut dinas Pendidikan provinsi melalui bantuan dana DAK menambah akses berupa penambahan ruang kelas baru sebanyak 36 RKB sehingga jumlah Ruang Kelas Baru di SLB menjadi 189 sementara rombongan belajar SLB yang di tahun 2018 hanya sebanyak 261 meningkat menjadi 278.

e. Rasio Murid Per Guru

Rasio murid terhadap guru adalah jumlah guru tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio murid-guru juga digunakan sebagai indikator pendidikan yang secara umum menggambarkan ketersediaan atau kecukupan tenaga pendidikan. Angka ini menggambarkan beban seorang tenaga pendidik untuk mengajar beberapa orang murid. Beban yang besar menggambarkan kurangnya tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar.

Berdasarkan data neraca Pendidikan tahun 2020, rasio guru terhadap murid di jenjang Pendidikan dasar dan menengah cukup berimbang. Untuk jenjang Pendidikan SD rasio guru dan murid berbanding 1 : 13, SMP 1 : 13, SMA 1 : 30, SMK 1 : 13 dan SLB 1 : 5. Data tersebut menggambarkan bahwa rasio ketersediaan guru di Sulawesi Barat cukup baik. Akan tetapi Sebagian besar guru terutama di jenjang menengah lebih banyak diajar oleh tenaga GTT. Sulawesi Barat kekurangan guru PNS terutama di jenjang menengah dengan rasio 1 : 58. Artinya dalam 1 guru PNS mengajar 58 siswa, padahal berdasarkan PP N0 74 tahun 2008 perbandingan guru yang mengajar di jenjang SMA adalah 1 : 20 dan SMK adalah 1 : 15. Untuk menutupi kekurangan guru maka Sebagian sekolah merekrut tenaga GTT. Dalam lima tahun ke depan Sulawesi Barat akan mengalami kekurangan guru di setiap jenjang disebabkan Sebagian guru yang berstatus PNS akan pensiun. Sebagai gambaran kekurangan guru di jenjang SD sebanyak 170 guru, SMP sebanyak 1867, SMA sebanyak 368 guru dan SMK sebanyak 1377 sedangkan yang akan pensiun dalam lima tahun diantaranya SD sebanyak 873, SMP sebanyak 246, SMA sebanyak 81 dan SMK sebanyak 41. Olehnya itu kebijakan pemerintah dengan merekrut tenaga PPPK akan sangat membantu menutupi kekurangan guru di Sulawesi Barat dan melalui pelatihan dan Pendidikan yang intens yang dilakukan akan membantu mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Grafik 2.9 Rasio Murid terhadap Guru (SD, SMP, SMK, SMA) Di Sulawesi Barat Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.52 Indikator Kinerja Bidang Pendidikan

Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		Keterangan / *) Sumber Data
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
Angka pendidikan yang ditamatkan	274,283	82,59	279,754	85,19		20,19		23,66	Jenjang SD, SMP, SM
Penduduk berusia > 15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	N/A	92,79	N/A	92,85					*) PDSPK Kemdikbud (penerima SUKMA/ Surat Keterangan Melek Aksara)
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		80,09		80,25		75,91		78,64	Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		91,31		92,02		89,72		92,65	Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik
Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	886	47,23	1,000	48,22					Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik
Sekolah pendidikan SLB kondisi bangunan baik	19	16,67	25	27,72	25		25		Jumlah Ruang Kelas dalam kondisi baik
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22,602	19,72	22,615	19,46					Jumlah Sekolah PAUD/TK
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	451	1,04	19,215	7,93	26,095	2,92	21,421	6,17	*) Buku Data Sektoral 2021
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	328	4,41	17,618	3,49	58,458	0,79	17,865	2,52	*) SIPD-Dikbud Sulbar
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	508	4,19	25,952	1,99	51,508	0,95	16,651	2,82	*) SIPD-Dikbud Sulbar
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	28,971	90,29	27,230	92,60		91,54		94,70	*) SIPD-Dikbud Sulbar
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	19,066	78,46	20,277	78,83		77,68		68,08	*) SIPD-Dikbud Sulbar
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	14,329	56,17	15,488	37,65		48,20		56,60	*) SIPD-Dikbud Sulbar
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		86,92		93,24		97,30		80,52	*) PDSPK Kemdikbud

Indikator Kinerja	2017		2018		2019		2020		Keterangan / *) Sumber Data
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		81,27		90,85		91,46		89,79	*) SIPD-Dikbud Sulbar
Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	15,971	75.63	14.821	59,93	16.705	46,68	16.706	41,37	*) PDSPK Kemdikbud (Jenjang SLB, SD, SMP, SM)
Guru yang bersertifikasi	7,381	33.09	6,126	29.05					*) PDSPK Kemdikbud

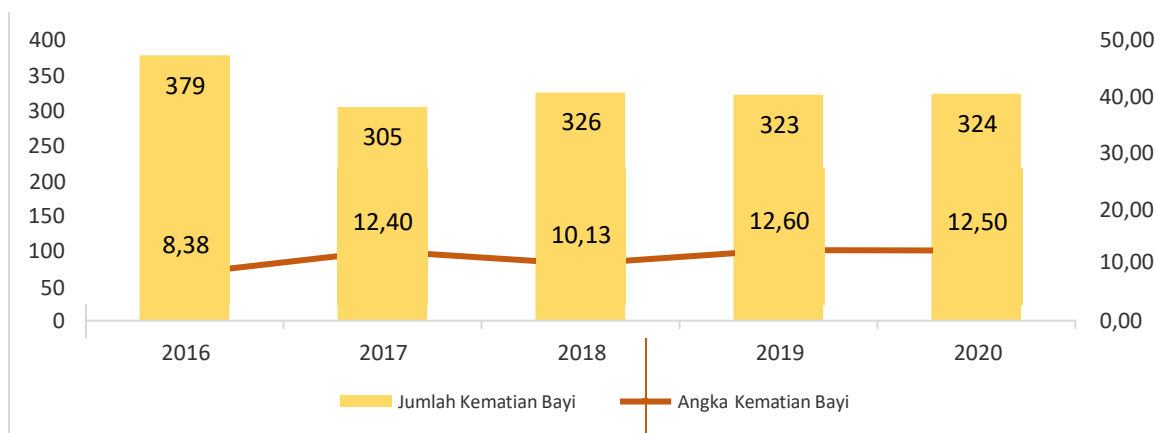
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.2 Urusan Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Indikator angka kematian bayi (AKB) merupakan tolak ukur dalam melihat kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian. Gambaran perkembangan angka kematian bayi juga mengalami fluktuasi selama kurun sepuluh tahun terakhir. Perkembangan jumlah kematian bayi dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 2.10 Jumlah dan Angka Kematian Bayi di Sulawesi Barat 2016–2020



Sumber: Buku Data Statistik Sektor Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

Angka kematian Bayi di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 sebesar 8.38/1000 kelahiran hidup dan mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 12/1000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi penurunan jumlah kematian bayi yang cukup signifikan dari 379 bayi mati menjadi 303 bayi mati pada tahun 2020.

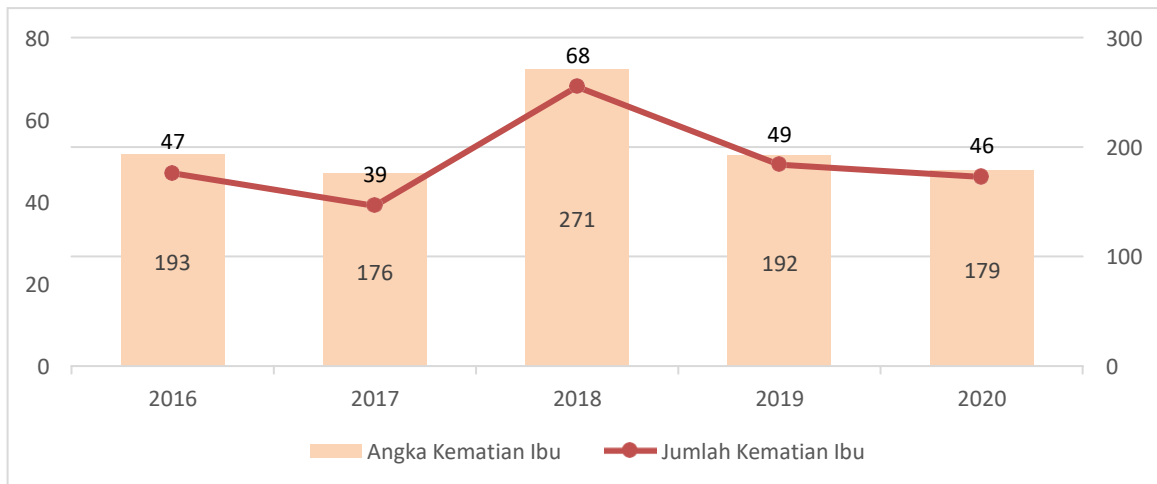
b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu merupakan salah satu indikator penting yang merefleksikan derajat kesehatan di suatu daerah, yang mencakup tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan Ibu, kondisi kesehatan lingkungan serta tingkat pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil, ibu

melahirkan dan ibu pada masa nifas.

Kesehatan Ibu hamil/bersalin dan Angka Kematian Ibu (AKI) memiliki korelasi erat dengan kesehatan bayi dan Angka Kematian Bayi. Faktor kesehatan ibu saat hamil dan bersalin berpengaruh terhadap kondisi kesehatan bayi yang dikandung serta resiko bayi yang dilahirkan dengan lahir mati (*still birth*) atau yang mengalami kematian neonatal dini (umur 0-6 hari).

Grafik 2.11 Jumlah dan Angka Kematian Ibu Provinsi Sulawesi Barat 2016–2020



Sumber: Buku Data Statistik Sektoral Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

Peran sektor kesehatan dalam meningkatkan angka harapan hidup di Provinsi Sulawesi Barat harus diakui memang belum optimal, ditunjukkan dengan belum stabilnya penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita di Sulawesi Barat. Kematian ibu telah menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir namun masih berfluktuasi setiap tahunnya dan angkanya masih cukup tinggi. Tahun 2014 angka kematian ibu di Sulawesi Barat berada pada angka 180/100.000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan menjadi 153/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 233/100.000 kelahiran hidup, hal ini tentunya harus terus menjadi perhatian serius dari pemerintah dalam melakukan upaya perbaikan di bidang kesehatan terutama menekan angka kematian ibu yang cukup besar.

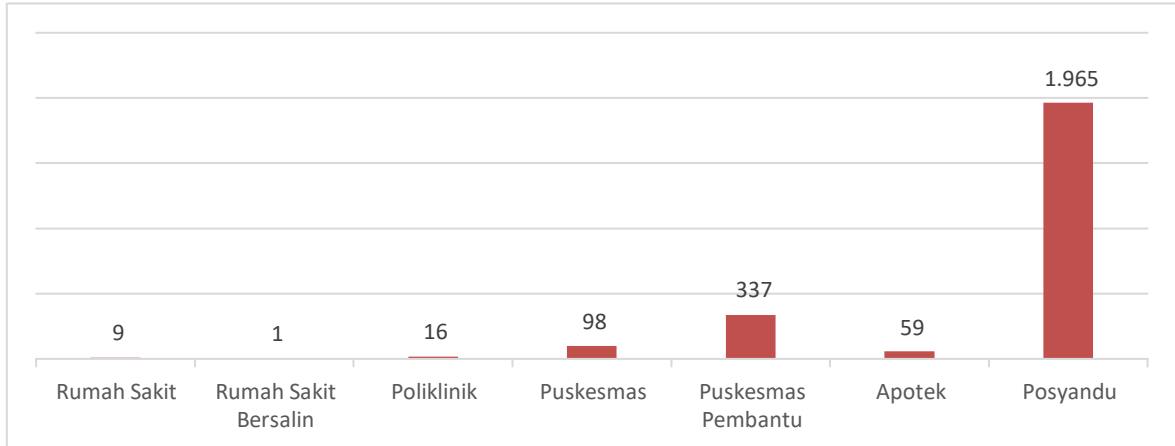
Dari sisi jumlah kematian ibu di Sulawesi Barat masih terbilang tinggi. Jumlah kematian ibu yang hamil, bersalin, maupun nifas pada tahun 2016 sebesar 47 kasus, turun menjadi 39 kasus di tahun 2017 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 68 kasus, kembali turun pada tahun 2019 menjadi sebesar 49 kasus dan kemudian turun menjadi 46 kasus di tahun 2020.

c. Jumlah dan Rasio Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional mengingat faktor kesehatan menjadi tulang punggung atau titik tolak bagi pencapaian kemajuan suatu negara, demikian halnya dengan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk,

sehingga peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud menuju terciptanya masyarakat yang sejahtera dan sumber daya manusia yang berkualitas. Capaian Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa aspek seperti perkembangan sarana dan prasarana kesehatan.

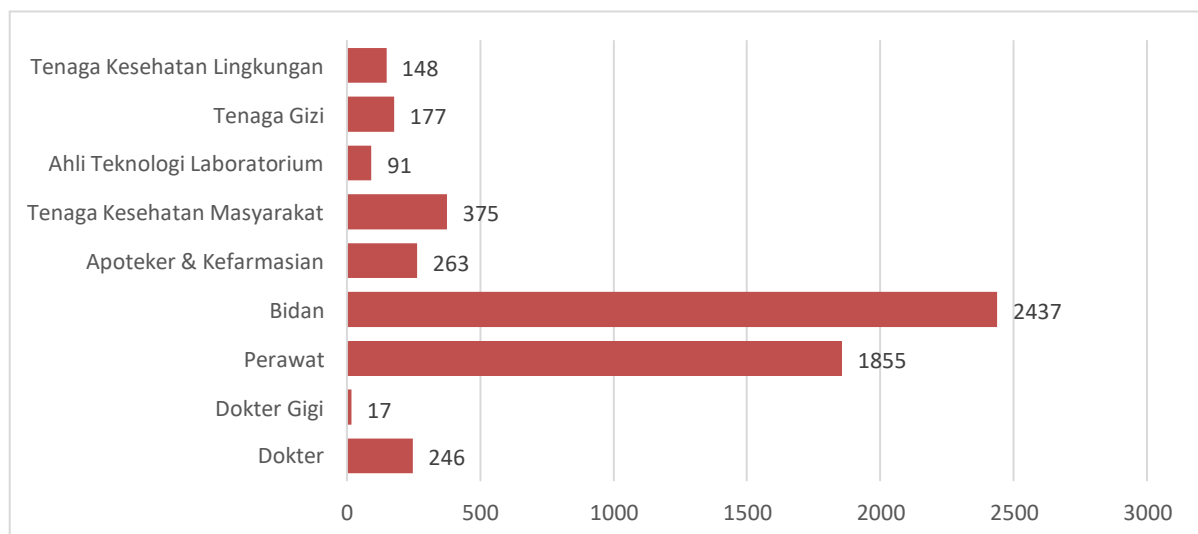
Grafik 2.12 Jumlah Sarana Kesehatan di Sulawesi Barat Tahun 2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Peningkatan kualitas kesehatan penduduk telah diarahkan untuk memperbanyak dan memperluas akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2020, sarana kesehatan yang tersedia di Sulawesi Barat terdiri dari 10 Rumah Sakit yang terdiri dari 8 (Delapan) Rumah Sakit Pemerintah dan 2 (dua) Rumah Sakit Swasta. Puskesmas yang ada di Sulawesi Barat sebanyak 98, Posyandu sebanyak 1.965. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga telah membangun Rumah Sakit Umum dengan kualifikasi Tipe B yang akan dijadikan sebagai Rumah Sakit Rujukan di Sulawesi Barat dan sekitarnya.

Grafik 2.13 Jumlah tenaga kesehatan menurut Jenis Tenaga Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Unsur kesehatan yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan diantaranya tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan. Pada tahun 2020, jumlah dokter di Sulawesi Barat tercatat sebanyak 263 orang, yang terdiri dari 246 dokter termasuk dokter spesialis dan 17 dokter gigi. Sementara itu jumlah tenaga kesehatan lain yakni Bidan sebanyak 2.437 orang, perawat sebanyak 1.855 orang serta tenaga apoteker dan kefarmasian sebanyak 263 orang. Adapun rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53 Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Per 100.000 Penduduk Tahun 2020

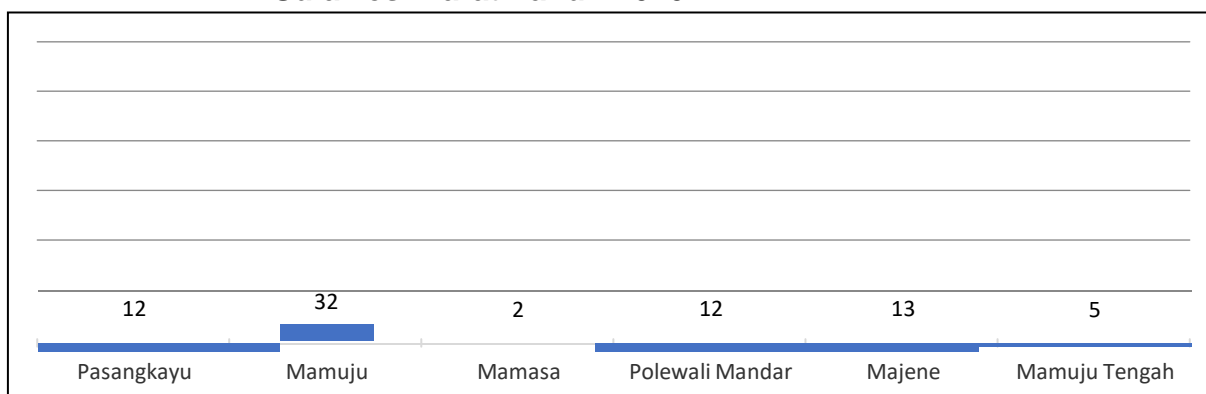
Jumlah Fasyankes	Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kes-Mas	Kes-Ling	Gizi	Ahli Teknologi Lab. Medik
153	17	1	130	171	19	26	10	12	6

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (diolah)

d. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case Detection Rate (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru TBA Positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan menetapkan target CDR minimal pada tahun 2010 sebesar 70%. Dalam upaya peningkatan efektivitas pengendalian TB, Sulawesi Barat telah melakukan upaya penguatan DOTS yang merupakan kebijakan nasional dalam pengendalian Tuberkulosis. Kunci utama dalam DOTS yaitu: komitmen, diagnosa yang benar dan baik. Ketersediaan dan lancarnya distribusi obat, pengawasan penderita menelan obat dan pencatatan dan pelaporan penderita dengan baik dan benar dengan sistem kohort.

Grafik 2.14 Jumlah Baru TB BTA Positif Menurut Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



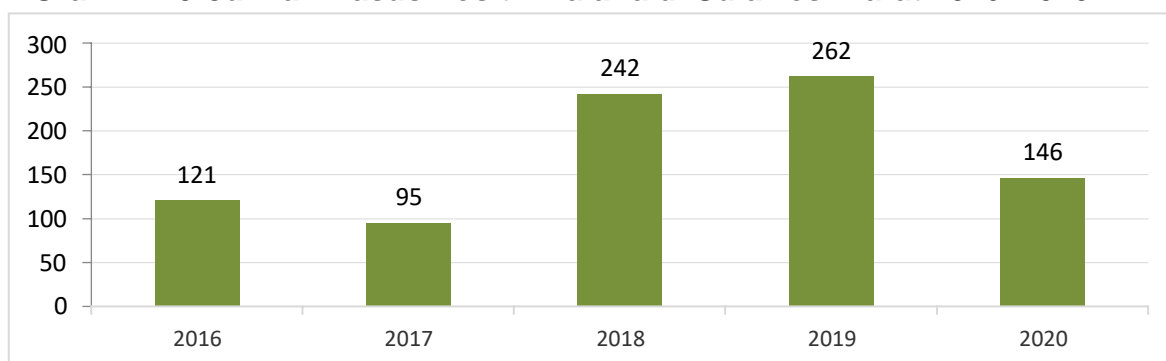
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2021

e. Angka Kejadian Malaria

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kasus positif malaria terbesar di Indonesia pada tahun 2011 angka positif malaria yang ada sebesar 3004 kasus yang merupakan angka yang cukup besar, namun

berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menekan kasus Positif Malaria salah satunya melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2015, tentang eliminasi Malaria. Peraturan Gubernur ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Sulawesi Barat dalam upaya menghentikan penularan malaria di wilayah Sulawesi Barat yang meliputi kabupaten Mamuju, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Mamasa dan Majene. Melalui berbagai upaya tersebut sehingga dari tahun ke tahun kasus positif malaria mengalami penurunan. Sejak tahun 2011 hingga pada tahun 2017 jumlah kasus positif malaria mengalami penurunan yang signifikan hingga sebesar 95 kasus. Hal ini tentunya sebuah pencapaian yang positif dalam menekan perkembangan kasus Positif Malaria yang ada.

Grafik 2.15 Jumlah Kasus Positif Malaria di Sulawesi Barat 2016–2020

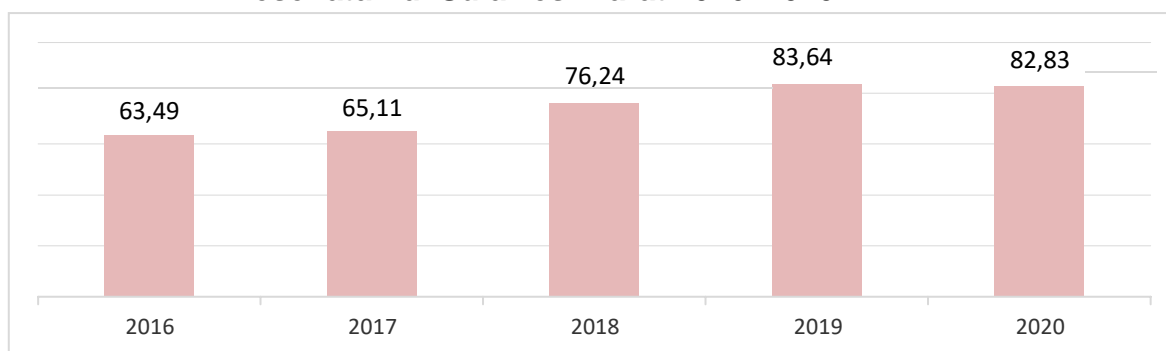


Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

f. Kepesertaan Jaminan Kesehatan

Salah satu bentuk upaya pemerintah saat ini dalam meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu melalui kepesertaan jaminan kesehatan. Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan di Sulawesi Barat pada tahun 2016 mencapai 63,49 persen mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 sebesar 82,83 persen. Hal ini diharapkan dapat dituntaskan sampai dengan tahun 2022 sebesar 100 persen sesuai target yang telah ditetapkan oleh nasional.

Grafik 2.16 Persentase jumlah penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan di Sulawesi Barat 2016–2020



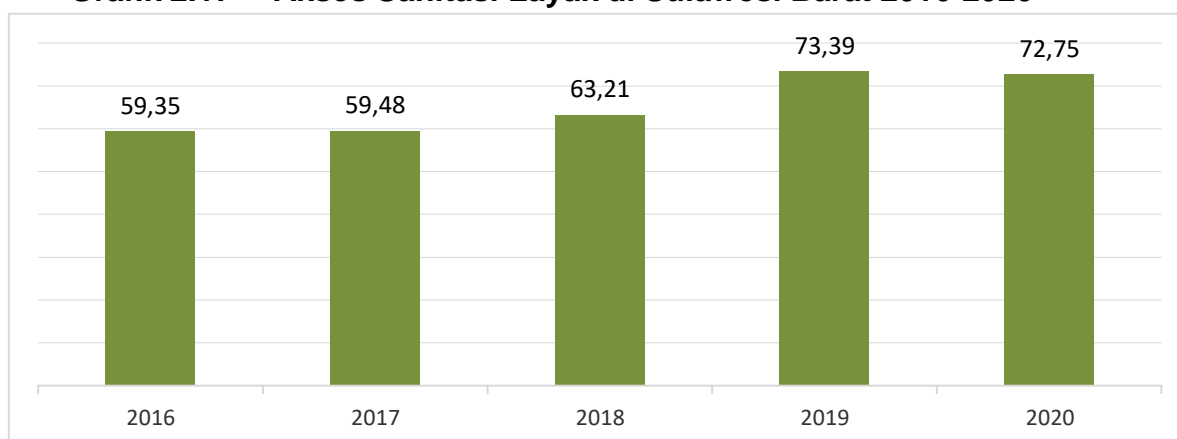
Ket: Target Nasional Pada Tahun 2019 telah UHC = 100%

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2021

g. Akses Sanitasi Layak

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi layak di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 akses sanitasi layak Provinsi Sulawesi Barat baru mencapai 59,35 persen kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2019 menjadi sebesar 73,39 persen dan di tahun 2020 meningkat sebesar 3,68 persen atau berada pada angka 72,75 persen. Meskipun demikian, pencapaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak masih perlu ditingkatkan sesuai dengan target pemerintah pusat dalam RPJMN 2020-2024 yaitu sebesar 100 persen.

Grafik 2.17 Akses Sanitasi Layak di Sulawesi Barat 2016-2020



Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.54 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2016–2020

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.1	Angka Kelangsungan Hidup bayi	985,07	990,54	990,7	987,40	988,2
2.2	Persentase balita gizi Buruk (%)	24,7	19,00	18,10		
	Rasio Posyandu Per Satuan balita (balita/posyandu)	16,36	16,36	13	13	13
2.2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu, persatuan penduduk (penduduk/puskesmas/poliklinik)	0,31	0,60	0,60	0,60	0,60
2.3	Rasio Rumah sakit Per satuan Penduduk (Penduduk/Rumah Sakit)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.4	Rasio dokter per satuan Penduduk (Penduduk/dokter)	0,23	0,31	0,16	0,16	0,16
2.5	Rasio tenaga Medis per satuan Penduduk (Penduduk/tenaga medis)	0,23	0,31	0,16	0,16	0,16
2.6	cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	71,83	72	69,9	77,5	66,9
2.7	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	80,44	81,44	78,98	81,4	76,8
2.8	Cakupan Desa/Kelurahan universal Child Immunization (UCI)	78,43	78,57	78,98	81,4	76,8
2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
2.10	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	76	76	89,17	N/A	N/A

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.11	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100
2.12	cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	25	30	27,32	N/A	N/A
2.13	Cakupan Kunjungan bayi	86,98	88	88,31	N/A	N/A
2.14	Cakupan Puskesmas	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41
2.15	Cakupan Puskesmas Pembantu	37	37	37	37	37
2.16	Angka Kematian Bayi (%)	14,93	12,4	9,3	12,6	11,8

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air, Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Keciptakarya, serta Sub Urusan Jasa Konstruksi.

a. Sub Urusan Sumber Daya Air

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Hal ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.

Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR meliputi:

- a. Daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha;
- b. Daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha; dan
- c. Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.

Pemerintah Pusat mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional. Pemerintah daerah provinsi mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha–3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.55 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Sulawesi Barat

PROVINSI SULAWESI BARAT	Luas (ha)
Kabupaten Mamasa	
DI. Aralle	2.330
DI. Mambi	2.728
DI. Messawa	1.562
DI. Pana	1.334
DI. Rantebulahan Timur	1.400
DI. Tandukkalua	2.170
Kabupaten Mamuju	
DI. Papalang - Sampaga	2.245
Kabupaten Mamuju Tengah	
DI. Tobadak	1.880
Kabupaten Pasangkayu	
DI. Bantalaka	1.200
Kabupaten Polewali Mandar	
DI. Lakejo	1.265
DI. Tandung	1.000
Sulawesi Barat 2016	19.114

Sumber: Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat 2021

Keterangan: Penjelasan tabel berdasarkan SK Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2015

Tabel 2.56 Jenis Irigasi di Sulawesi Barat Tahun 2020

Kabupaten	Jenis Lahan Sawah					
	Irigasi				Tadah Hujan	Jumlah
	Irigasi Teknis	Irigasi ½ Teknis	Irigasi Sederhana	Jumlah		
Majene	-	133	220	353	3.467	4.119
Polewali Mandar	12.396	1.255	880	14.531	5.813	20.972
Mamasa	-	1.300	12.717	14.017	2.711	14.947
Mamuju	-	659	7.095	7.754	8.596	17.338
Pasangkayu	-	900	775	1.675	4.383	6.219
Mamuju Tengah	-	0	500	500	12.990	14.929
Sulawesi Barat	12.396	4.247	22.187	38.830	37.960	78.524

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Sulawesi Barat 2021

Ket: Data 2021 belum tersedia/masih menggunakan data tahun 2017

Jumlah irigasi yang ada di Sulawesi Barat sebesar 38.380 ha yang terbagi atas irigasi teknis sebesar 12.396 yang hanya terdapat di Kabupaten Polewali Mandar, Irigasi ½ teknis sebesar 4.247 ha yang terbesar di Kabupaten Polewali Mandar serta Kabupaten Mamasa, Irigasi Sederhana sebesar 22.187 ha yang terbesar di Kabupaten Mamasa.

Tabel 2.57 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Sumber Daya Air Tahun 2016–2020

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Pekerjaan Umum					
3.1.12	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	40,82	41,27	43,31	N/A	N/A
	- Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	18.270	18.470	19.470	N/A	N/A
	- Luas irigasi kabupaten (ha)	44.757	44.756,54	44.956,54	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

b. Sub Urusan Keciptakarya

Akses rumah tangga ke sumber air minum bersih seringkali menjadi indikator kesehatan masyarakat karena fungsi air itu sendiri yang merupakan kebutuhan pokok. Tahun 2020 akses terhadap air minum bersih telah dapat dinikmati oleh lebih dari dua pertiga penduduk Sulawesi Barat. Kondisi ini semakin baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.58 Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Sumber Air Minum di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Kabupaten	Leding	Pompa	Air Dalam Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur tak Terlindung
Majene	10,95	9,62	37,72	10,95	3,94
Polewali Mandar	13,94	16,49	18,53	19,98	8,35
Mamasa	10,99	3,98	1,24	0,32	1,74
Mamuju	13,53	8,82	28,86	16,61	8,00
Pasangkayu	-	13,57	48,42	20,52	2,26
Mamuju Tengah	2,40	15,34	32,57	20,50	14,31
Sulawesi Barat	10,09	12,05	26,22	15,91	6,69

Lanjutan Tabel di atas

Kabupaten	Mata Air Terlindung	Mata Air tak Terlindung	Air Permukaan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
Majene	18,43	0,79	7,61	-	-	100,00
Polewali Mandar	12,36	3,30	6,74	-	0,31	100,00
Mamasa	8,61	23,85	48,08	1,03	0,15	100,00
Mamuju	16,47	5,33	2,19	0,19	-	100,00
Pasangkayu	3,41	0,91	8,83	1,50	0,57	100,00
Mamuju Tengah	5,34	2,78	2,28	4,48	-	100,00
Sulawesi Barat	11,53	5,60	10,91	0,81	0,20	100,00

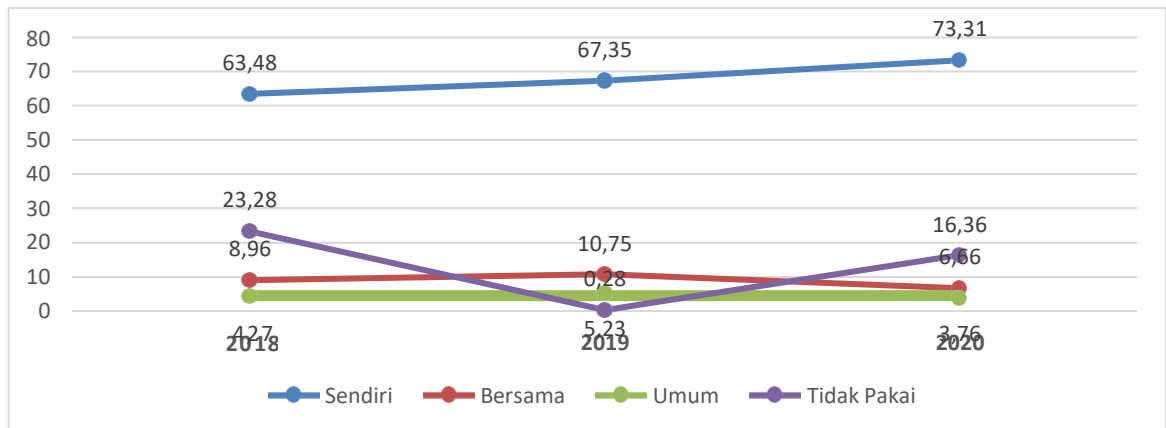
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.59 Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Kepemilikan Jamban di Sulawesi Barat Tahun 2020

Kabupaten	Sendiri	Bersama	MCK Umum	Tidak Menggunakan	Tidak Ada	Jumlah
Majene	68,65	9,22	8,14	0,29	13,70	100,00
Polewali Mandar	82,11	5,83	1,14	0,57	10,35	100,00
Mamasa	63,88	7,73	12,14	0,40	15,84	100,00
Mamuju	67,26	7,03	2,85	0,00	22,86	100,00
Pasangkayu	73,12	6,44	1,29	0,51	18,64	100,00
Mamuju Tengah	75,13	4,41	1,72	0,50	18,24	100,00
Sulawesi Barat	73,31	6,66	3,76	0,38	15,88	100,00

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Grafik 2.18 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Jamban di Sulawesi Barat Tahun 2018–2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Selain ketersediaan air minum bersih, ketersediaan sanitasi layak juga dibutuhkan untuk memenuhi syarat rumah sehat. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas jamban sendiri mengalami peningkatan. Tahun 2018 tercatat 63,48 persen rumah tangga memiliki jamban sendiri. Tahun 2020, rumah tangga pengguna jamban sendiri meningkat menjadi 73,31 persen. Kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat terjelaskan dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki jamban sendiri dan berkurangnya jumlah rumah tangga yang tidak memiliki jamban.

c. Sub Urusan Jalan

Dalam rangka menggerakkan perekonomian khususnya di Sulawesi Barat maka diperlukan penanganan infrastruktur yang berkelanjutan untuk itu kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah terutama infrastruktur dan konektivitas. Salah satu infrastruktur yang sangat penting untuk segera mendapat penanganan yaitu jalan. Kondisi jalan provinsi di Sulawesi Barat pada akhir tahun 2020 dengan panjang 349,67 km, di mana terdapat 39,58 persen dalam kondisi mantap, dan 60,42 persen dalam kondisi tidak mantap.

Kebijakan pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah Sulawesi Barat, terutama infrastruktur Jalan dan konektivitas karena suatu infrastruktur diperlukan bukan saja untuk meningkatkan daya saing dalam upaya meningkatkan investasi, produksi dan perdagangan, tetapi juga untuk mempercepat pemerataan pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan.

Tabel 2.60 Panjang Jalan Menurut Kabupaten dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (km)

Kabupaten	Panjang Jalan/Kewangan			
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Jumlah
Majene	103,30	110,21	621,20	834,71
Polewali Mandar	89,78	146,61	855,36	1 071,75
Mamasa	175,60	115,64	649,77	941,01
Mamuju	144,51	208,35	666,86	1 019,72
Pasangkayu	145,24	15,00	2 598,75	2 758,99
Mamuju Tengah	104,71	48,39	465,88	618,98
Sulawesi Barat	763,17	644,20	5 837,81	7 245,15

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.61 Ruas Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2020

NOMOR RUAS			N A M A R U A S	PANJANG (KM)	JAP (KM)	JKP-1 (KM)
001			SURUMANA (BTS. PROV. SULTENG) - PASANGKAYU	51.19		51.19
002			PASANGKAYU - BARAS	54.62		54.62
003			BARAS - KAROSSA	48.23		48.23
004			KAROSSA - TOPOYO	54.67		54.67
005			TOPOYO - TARAILU	41.27		41.27
006			TARAILU - KALUKU	43.84		43.84
007			KALUKU - BTS. KOTA MAMUJU	28.53		28.53
007	11	K	JLN. POROS KALUKU (MAMUJU)	1.25		1.25
007	12	K	JLN. HASANUDDIN (MAMUJU)	1.31		1.31
008			BTS. KAB. MAJENE - MAMUJU	37.03	37.03	
008	11	K	JLN. AHMAD YANI (MAMUJU)	0.41	0.41	
008	12	K	JLN. KS. TUBUN (MAMUJU)	0.72	0.72	
008	13	K	JLN. URIP SUMOHARJO (MAMUJU)	0.69	0.69	
008	14	K	JLN. SUDIRMAN (MAMUJU)	1.24	1.24	
008	15	K	JLN. GATOT SUBROTO (MAMUJU)	1.28	1.28	
009			TAMERODDO - BTS. KAB. MAMUJU	50.89	50.89	
010			BTS. KOTA MAJENE - TAMERODDO	42.79	42.79	
010	11	K	JLN. A. YANI (MAJENE)	3.82	3.82	
010	12	K	JLN. GATOT SUBROTO (MAJENE)	1.35	1.35	
011			BTS. KOTA POLEWALI - BTS. KOTA MAJENE	42.78	42.78	
011	11	K	JLN. SUDIRMAN (MAJENE)	2.32	2.32	
011	12	K	JLN. HASANUDDIN (MAJENE)	2.13	2.13	
011	13	K	JLN. M. YAMIN (POLEWALI)	2.80	2.80	
012			BTS. PROV. SULSEL - BTS. KOTA POLEWALI	14.07	14.07	
012	11	K	JLN. ANDI DEPU (POLEWALI)	3.38	3.38	
012	12	K	JLN. TENGKU UMAR (POLEWALI)	3.70	3.70	
012	13	K	JLN. A. YANI (POLEWALI)	1.76	1.76	
013			SALUBATU - KALUKU	28.11		28.11
014			SALUBATU - MAMBI	45.63		45.63
015			MAMBI - MALABO	27.09		27.09
016			MALABO - MAMASA	13.50		13.50
017			MAMASA - BTS. SULSEL	37.95		37.95
018			MALABO - TABONE	27.09		27.09
019			TABONE - POLEWALI	45.73		45.73
			TOTAL PANJANG JALAN NASIONAL	763.17	213.17	550.00

Sumber: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar

Ket: Sesuai dengan SK. NO. 290/KPTS/M/2015

Tabel 2.62 Ruas Jalan Provinsi (Kolektor Primer) Sulawesi Barat

NOMOR RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (Km)	KABUPATEN
Lama		Baru				
001	5	001	5	BATUISI – BATAS TORAJA	44,64	MAMUJU
003	1	002	1	LAMPA(MAPILLI) – MATANGNGA	45,68	POLMAN
003	2	002	2	MATANGNGA – KEPPE	31,10	POLMAN
004	1	003	1	SALUTAMBUNG - UREKANG	36,46	MAJENE
004	2	003	2	UREKANG – MAMBI	18,58	MAMASA
005	1	004	1	TIKKE - BTS SULTENG	9,50	PASANGKAYU
				JUMLAH	185,96	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.63 Ruas Jalan Strategis Nasional Provinsi Sulawesi Barat

NOMOR RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (Km)	KABUPATEN
Lama		Baru				
001	1	001	1	SALUBATU - BONEHAU	28,70	MAMUJU
001	2	001	2	BONEHAU - KALUMPANG	21,97	MAMUJU
001	4	001	3	KALUMPANG BATUISI	15,74	MAMUJU
		001	4	BATUISI - BTS LUWU UTARA	42,30	MAMUJU
		001	6	JL. MARTADINATA - SUMARE (RANGAS) - BTS. TAPALANG BARAT	55,00	MAMUJU
				JUMLAH	163,71	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur, salah satu fokusnya adalah jalan dan konektivitas. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dengan berbagai manfaat terhadap kelompok-kelompok dan masyarakat. Guna menjamin hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/688/Sulbar/X/2015 Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi, Jalan Strategis Provinsi dan Jalan Strategis Nasional di Provinsi Sulawesi Barat. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi sebesar 349,67 km, selain jalan provinsi, di Sulawesi Barat juga terdapat jalan negara yang menjadi kewenangan pemerintah pusat serta Jalan Kabupaten yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Berikut tabel panjang jalan dan nama ruas jalan berdasarkan tingkat kewenangan pada setiap kabupaten di Sulawesi Barat:

Ketersediaan infrastruktur tentu saja harus didukung dengan kualitas infrastruktur jalan yang baik atau mantap karena dengan demikian akan memaksimalkan fungsi dan daya ungkit terhadap pertumbuhan yang inklusif. Gambaran kondisi infrastruktur di Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64 Kondisi Jalan Nasional di Sulawesi Barat Tahun 2014-2020

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)
Kondisi Mantap	567.88	651.82	661.95	669.57	696.30	667.82	675.03
Kondisi Tidak Mantap	4.10	111.35	101.22	93.60	66.87	95.35	88.14
Jumlah	571.98	763.17	763.17	763.17	763.17	763.17	763.17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Secara umum panjang jalan nasional di Sulawesi Barat tahun 2013 sekitar 602,78 km, dengan kondisi baik 453,34 km, kondisi sedang 144,86 km, kondisi rusak 3,88 km dan rusak berat 0,7 km.

Kondisi mantap jalan nasional di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dengan total pertumbuhan mantap jalan sebesar 44,48 km atau 7 persen dengan rata-rata 14,82 km atau hanya 2 persen. Rendahnya pertumbuhan mantap jalan nasional di Sulawesi Barat semakin diperparah dengan kondisi pada tahun 2019 yang justru terkoreksi ke angka 667,82 km atau 28,48 km dari kondisi mantap jalan tahun 2018, meskipun tahun 2020 kembali mengalami kenaikan 7,21 km atau menjadi 675,03 km.

Tabel 2.65 Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Nasional Tahun 2020

No	Nama Ruas	Panjang (KM)	Kondisi Jalan Tahun 2019				Kondisi Jalan Tahun 2020			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Ruas Jalan Provinsi										
1	Batuisi – Bts Toraja	44,64	0,00	0,00	0,70	43,94	0,00	1,40	7,00	36,24
2	Lampa (Mapilli) - Matangnga	45,68	39,97	0,00	0,35	5,36	41,46	0,20	3,62	0,40
3	Matangnga – Keppe	31,10	0,10	20,40	3,60	7,00	3,85	10,70	14,60	1,96
4	Salutambung – Urekang	36,46	4,01	9,12	22,83	0,50	7,28	6,91	10,11	12,16
5	Urekang - Tambi	18,58	0,00	5,20	1,60	11,78	1,38	2,20	12,20	2,80
6	Tikke – Bts. Sulteng	9,50	7,45	0,44	1,56	0,05	8,68	0,77	0,05	0,00
Ruas Jalan Strategis Nasional										
1	Salubatu – Bonehau	28,70	3,96	5,70	19,05	0,00	5,80	3,85	19,05	0,00
2	Bonehau - Kalumpang	21,97	0,00	16,92	5,05	0,00	0,00	16,92	5,05	0,00
3	Kalumpang – Batuisi	15,74	3,75	0,90	3,50	7,59	6,25	0,00	5,40	4,09
4	Batuisi – Bts. Luwu Utara	42,30	0,00	0,00	2,00	40,30	0,00	0,00	2,00	40,30
5	Jl. Marthadinata - Sumare	55,00	8,62	3,70	37,48	5,21	12,76	8,00	29,04	5,21
Total Panjang Ruas Jalan Provinsi + Jalan Strategis Nasional		349,67	67,84	62,39	97,71	121,73	87,46	50,95	106,11	103,15
		%	19,40%	17,84%	27,94%	34,81%	25,01%	14,57%	30,92%	29,50%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel di atas menunjukkan kondisi jalan provinsi tahun 2019 dengan kondisi Mantap sebesar 37,24 persen. Kondisi mantap pada jalan provinsi meningkat menjadi 39,58 persen pada akhir tahun 2020. Hal itu menggambarkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar khususnya jalan provinsi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, meskipun pertumbuhannya hanya dikisaran 2 persen, sebaliknya dengan kondisi Jalan Tidak Mantap terus mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya persentase jalan Provinsi dengan Kondisi Mantap.

Panjang jalan provinsi tahun 2015 mengalami penurunan pada tahun 2016 yang disebabkan adanya ruas jalan provinsi yang telah ditetapkan menjadi jalan nasional yaitu ruas Polewali – Tabone – Malabo dan Ruas Salubatu – Mambi – Malabo – Mamasa – Batas Toraja Utara. Adapun status jalan yang menjadi kewenangan Provinsi antara lain Jalan Provinsi, Jalan Strategis Provinsi serta jalan Strategis Nasional.

Tabel 2.66 Kondisi Ruas Jalan Strategis Provinsi Sulawesi Barat

No	Nama Ruas Jalan Strategis Provinsi	Kecamatan yang dilalui	Panjang ruas (Km)	Kondisi Jalan Akhir Tahun 2020				KET
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	PIRIANG-MAPILLI	KEC. LAMPA	48,14	27,996	1	11,604	7,54	
2	TIBUNG-ALU	KEC. ALU	24,69	0	0,2	8	16,49	
3	ALU-TINAMBUNG	KEC. ALU	14,79	11,496	0	2,494	0,8	
4	SALEPPA-PUAWANG	KEC. SALEPPA	6,46	4	0	2,46	0	
5	PUAWANG-KATITTING	KEC. PUAWANG	6,85	3,967	0,853	2,03	0	
6	LOMBONGAN (TALAMBALAO) -PIRIANG	KEC. TIBUNG	27,29	3,3	1,5	1	21,49	
7	PALLANG PALLANG-TIBUNG	KEC. TIBUNG	13,5	2,15	2	4	5,35	
8	PAMBOANG-SUMARRANG	KEC. PAMBOANG	18,58	0	2	0	16,58	
9	SUMARRANG-GALUNG LOMBOK	KEC. SUMARRANG	14,38	5,07	2	5,88	1,43	
10	AKSES PELABUHAN PASANGKAYU	KEC.PASANGKAYU	5,5	0	0	3,1	2,4	
11	TABONE - NOSU	KEC. TABONE	27,5	7,445	0	0	20,06	
12	NOSU - PANA	KEC. NOSU	26,7	2,33	0	0	24,37	
13	PANA - MAMULLU - MANIPI BARRU	KEC. PANA	10	0	0	0	10	
14	AKSES BANDARA SUMARORONG	KEC. SUMARORONG	1,757	0,1	0	1,657	0	
15	TOBADAK (BENTENG) -TOBADAK VII	KEC. TOBADAK	21	14,74	0	6,26	0	
16	TOBADAK VII - TOBADAK VIII (BTS TOMMO)	KEC. TOBADAK	13,19	0	0	13,19	0	
17	AKSES PELABUHAN BUDONG-BUDONG	KEC. BUDONG-BUDONG	14,2	7,08	0	2	5,12	
JUMLAH PJG.JLN STRATEGIS PROVINSI			294,527	89,674	9,553	63,675	131,6	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas, yaitu dengan melakukan penanganan terhadap infrastruktur jalan. Penanganan jalan yang menjadi kewenangan provinsi di Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67 Panjang Penanganan Jalan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2020

NO	TAHUN	PANJANG (KM)
1	2012	3,600
2	2013	13,425
3	2014	12,400
4	2015	53,480
5	2016	14,740
6	2017	18,263
7	2018	13,965
8	2019	11,190
9	2020	9,700
TOTAL		150,763

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penanganan jalan provinsi terus dilakukan setiap tahunnya, meskipun besarnya fluktuatif namun hal tersebut sangat bergantung pada kemampuan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Tahun 2020 menjadi tahun terberat bagi pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat, hal ini disebabkan dengan adanya wabah global yaitu pandemik corona virus yang melanda dunia. Hal tersebut mengakibatkan beban anggaran terfokus pada penanganan pandemik dan memaksa pembangunan sektoral dalam hal infrastruktur jalan juga terdampak sangat berat. Tabel berikut kita dapat melihat capaian kinerja pembangunan daerah sub bidang jalan:

Tabel 2.68 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Jalan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Pekerjaan Umum					
3.9	Panjang jalan dilalui roda 4 (%)	0,39	0,25	0,29		
	- Jumlah panjang jalan (km)	4.984	3.913,91	4.480,91		
	- Jumlah penduduk (Orang)	1.306.478	1.330.961	1.355.554	1.380.260	1.419.229
3,10	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) (%)	91,06	91,06	91,37		
	- Jumlah kawasan permukiman penduduk yang belum dilalui kendaraan roda 4	591	591	593		
	- Jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk	649	649	649		
3,11	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/Jam) (%)	37,55	39,06	40,56		
	- Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	5.192	5.401	5.609		
	- Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (km)	13.828,71	13.828,71	13.828,71		
3,12	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%)	11,30	11,42	11,54		
	- Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km)	1.562	1.579	1.596		
	- Panjang seluruh jalan kabupaten (km)	13.828,71	13.828,71	13.828,71		
3,13	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%)	31,61	38,22	42,86		
	- panjang sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (km)	263	318	378		
	- Panjang seluruh jalan sempadan kabupaten (km)	832	832	882		
3,14	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%)	38,29	42,07	43,94		
	- Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (km)	152	167	192		
	- Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (km)	397	397	397		
3,16	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (%)	8,57	14,29	25,71		
	- Jumlah lokasi Pembangunan turap di Umum wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	3	5	9		
	- Jumlah saluran wilayah rawan longsor	35	35	35		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

d. Sub Urusan Jasa Konstruksi

Tabel 2.69 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sub Bidang Jasa Konstruksi

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Pekerjaan Umum					
3,3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (%)	0,27	0,23	0,23		
	- Jumlah tempat ibadah (Buah)	3.538	3.538	3.541		
	- Jumlah penduduk (Orang)	1.306.478	1.330.961	1.355.554	1.380.260	1.419.229
3,5	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk (%)	54,90	51,85	54,47		
	- Jumlah daya tampung tempat Umum pemakaman umum	732.356	799.584	843.571		
	- Jumlah penduduk (Jiwa)	1.306.478	1.330.961	1.355.554	1.380.260	1.419.229
3.6	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (%)	5,16	4,75	4,86		
	- Jumlah daya tampung TPS	68.792,38	73.245,38	75.245,38		
	- Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.306.478	1.330.961	1.355.554	1.380.260	1.419.229

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

e. Sub Urusan Penataan Ruang

Tabel 2.70 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pekerjaan Umum

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
5	Penataan Ruang					
5,1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB (%)	10,78	10,95	11,09		
	Luas ruang terbuka hijau	71.322,73	72.522,73	73.472,73		
	Luas wilayah ber HPL/HGB	661.801,73	662.051,73	662.401,73		
5,2	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan (%)	41,46	42,82	44,42		
	Jumlah bangunan ber - IMB	115.600	119.450	124.000		
	Jumlah bangunan	278.824	278.949	279.174		
5,3	Ruang publik yang berubah peruntukannya (%)	0,06	0,07	0,07		
	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (ha)	20	23	25		
	Jumlah ruang publik yang tersedia (ha)	34.660	34.710	34.785		
	Ketaatan terhadap RTRW					
	Luas wilayah produktif (ha)	655.562	655.689,56	655.892,93		
	Luas wilayah Industri (ha)	NA				
	Luas wilayah banjir (ha)	5.084,44	5.186,13	5.186,13		
	Luas wilayah Kekeringan (ha)	20.337,77	20.642,83	20.642,8		
	Luas wilayah perkotaan (ha)	NA				

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, dan oleh karena itu setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa, sebagai salah satu amanat dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 28 H Amandemen UUD 1945. Selanjutnya Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni “Rumah yang Layak”, terjangkau dan berkelanjutan. Bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya berupa stimulan rumah swadaya.

Saat ini kondisi pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia masih belum terealisasi sepenuhnya sebagai akibat dari penambahan penduduk setiap tahunnya tidak diimbangi dengan ketersediaan perumahan. Rendahnya Kemampuan ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan papan dan pertumbuhan kebutuhan rumah, menyebabkan terjadinya backlog di bidang perumahan terus meningkat di mana sebagian besar dari angka tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Faktor kemiskinan dan hal lainnya membuat banyak nya keluarga yang tinggal di rumah/hunian yang tidak layak huni baik dari segi fisik dan non fisiknya. Rumah atau tempat tinggal beserta lingkungan yang aman dan sehat merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan Program Prioritasnya Peningkatan akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak.

Terpenuhinya kebutuhan Rumah Layak Huni sangat bergantung pada sisi kebutuhan (*demand*) dan sisi penyediaan (*supply*). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan Pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat tinggal . sedangkan penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Adanya gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah ini yang sering kita sebut dengan Backlog rumah.

Tabel 2.71 Angka Backlog Kepemilikan Rumah Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga Milik	Jumlah Rumah Tangga Milik	Backlog Kepemilikan Rumah
	(Jiwa)	(unit)	(%)	(unit)	(unit)
2016	1.306.478	292.792	91,00	266.446	26.346
2017	1.330.961	298.688	88,45	265.811	32.877
2018	1.355.554	304.575	86,85	264.545	40.055
2019	1.380.256	310.500			
2020	1.419.229	315.443			

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.72 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Tahun	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah (Unit Rumah)	Jumlah rumah layak huni (Unit Rumah)	Rumah Tidak Layak Huni (Unit Rumah)	Persentase Rumah Layak Huni (%)
2017	1,330,961	298.688	218.828	79.860	73,26
2018	1,355,554	304.575	227.251	77.324	74,61
2019	1,380,256	310.009	236.260	73.749	76,21
2020	1,404,904	315.443	246.882	68.561	78,27

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2021

Dari tabel di atas menunjukkan persentase ketersediaan rumah layak huni di tahun 2020 mencapai 78,27 persen, sementara target Tahun 2022 sebesar 79,56 persen. Ini berarti pemenuhan target Nasional maupun target Provinsi belum dapat tercapai. Rumah Layak huni mengalami kenaikan sebesar 73,26 persen pada Tahun 2017 menjadi 78,27 persen di tahun 2020. Kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 adalah adanya dukungan infrastruktur pelayanan dasar yang diarahkan pada perumahan dan kawasan permukiman, bentuk dukungan antara lain Pembangunan Rumah susun MBR, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Tabel 2.73 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2020

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (Unit)	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak (%)
2017	298.688	181.184	60,66
2018	304.575	191.821	62,98
2019	310.009	221.656	71,50
2020	315.443	229.485	72,75

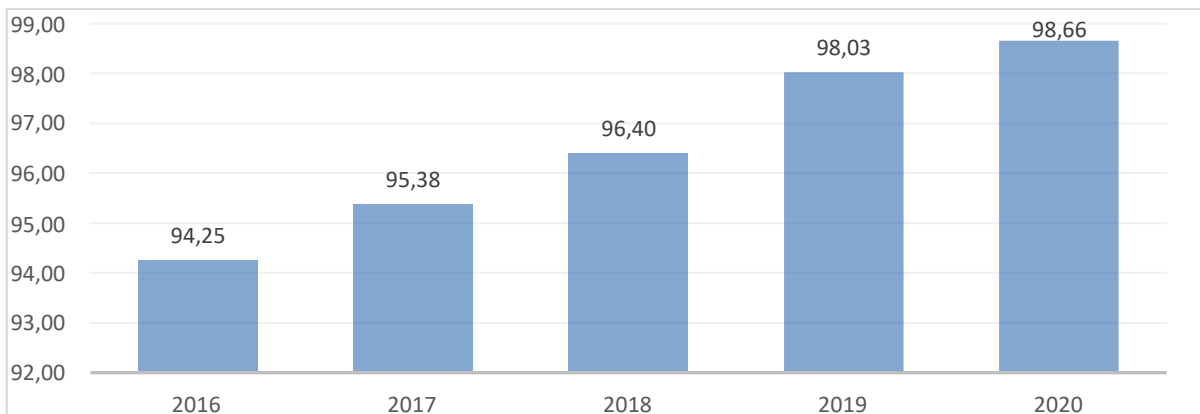
Sumber: BPS-RI, Susenas 2009-2020

Sejak tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs di mana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (*access to improved water*) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan namun masih di bawah capaian Nasional yaitu sebesar 90,21 persen pada tahun 2020 sementara capaian Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 yaitu sebesar 72,75 persen. Adapun capaian pada tahun 2017 yaitu sebesar 60,66 persen, mengalami peningkatan di tahun 2018

dengan capaian sebesar 62,98 persen. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dengan capaian sebesar 71,5 persen atau mengalami peningkatan sebesar 8,52 persen dari tahun 2018.

Grafik 2.19 Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Sumber Penerangan dari Listrik Tahun 2016–2020



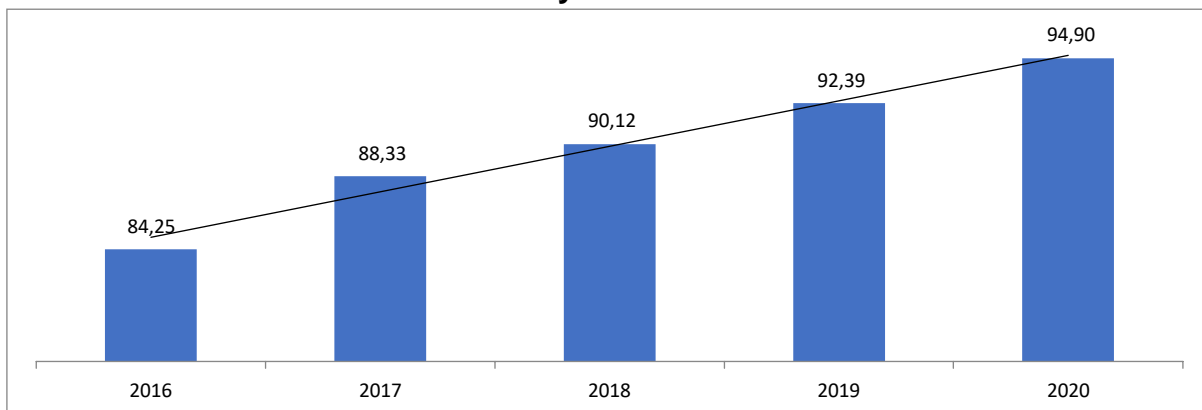
Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.74 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Majene	60,56	63,11	58,42	72,09	86,66
Polewali Mandar	67,91	66,10	71,09	82,44	79,63
Mamasa	32,87	34,63	40,15	51,24	26,00
Mamuju	58,89	60,95	59,70	68,39	80,70
Pasangkayu	62,43	62,47	75,04	75,92	75,93
Mamuju Tengah	60,60	58,56	63,36	79,95	72,05
Sulawesi Barat	59,35	59,48	63,21	73,39	72,75

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Grafik 2.20 Persentase Rumah Layak Huni di Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

Tabel 2.75 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
3.7	Rasio rumah layak huni (Jiwa/Rumah)	0,167	0,198	0,202	0,209	0,211
	- Jumlah rumah layak huni (Rumah)	220.641	263.835	274.497	286.431	299.365
	- Jumlah penduduk (Jiwa)	1.306.478	1.330.961	1.355.554	1.380.256	1.419.229
3.8	Rasio permukiman layak huni (%)	NA	0,999481	0,999483		
	-Luas permukiman layak huni (Ha)	NA	1.448.948	1.448.951		
	- Luas wilayah permukiman (Ha)	NA	1.449.700	1.449.700		
3,18	Lingkungan permukiman (%)	1,67				
	- Luas kawasan kumuh (ha)	5.276	752	752	750	748
	- Luas wilayah (ha)	316.338	16.973	16.973	16.973	16.973

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengupayakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan.

Tabel 2.76 Jumlah LINMAS Se- Sulawesi Barat 2017-2018

Kabupaten	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Jumlah (Orang)	Rasio	Jumlah (Orang)	Rasio
Majene	990	58,55	1.274	73,09
Polewali Mandar	1.595	36,86	2.458	47,12
Mamasa	1.071	68,23	1.172	56,85
Mamuju	1.231	44,06	1.514	50,11
Pasangkayu	542	32,80	790	37,28
Mamuju Tengah	367	28,76	700	48,02
Total	5.792		7.908	

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.77 Jumlah Polisi Pamong Praja Prov. Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Polisi Pamong Praja	148	143	137	140	129
Jumlah Penduduk	1.306.478	1.330.961	1.355.554	1.380.260	1.419.229
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	1 :10.000	1 :10.000	1 :10.000	1 :10.000	1 :10.000

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.78 Jumlah Tenaga yang mengikuti Diklat Dasar Satpol PP

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Diklat Satpol PP	0	0	30	0	0

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tidak ada tenaga Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar di sebabkan karena tidak adanya Penganggaran di Kantor Satpol PP.

Tabel 2.79 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) Provinsi Sulawesi Barat

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	12	15	20	22	25
Jumlah Pelanggaran K3	127	120	125	124	129
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	9.44 %	100 %	34 %	100 %	91 %

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.80 Jumlah Demonstrasi di Provinsi Sulawesi Barat

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Demo Bidang Politik	2	3	5	7	9
Jumlah Demo Ekonomi	1	3	6	5	2
Jumlah Kasus Pemogokan Kerja	3	4	7	6	4
Jumlah Demo Unjuk Rasa	5	6	12	6	4
Jumlah	11	16	30	34	29

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.81 Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Provinsi	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sulawesi Barat	4 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	4 Kegiatan	1 Kegiatan

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.82 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Provinsi	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sulawesi Barat	3 Kegiatan	5 Kegiatan	6 Kegiatan	3 Kegiatan	4 Kegiatan

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat 2019

Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah dari tahun 2014 sebanyak 3 kegiatan meningkat menjadi 5 kegiatan pada tahun 2015 sedangkan tahun 2018 sebanyak 4 kegiatan.

Tabel 2.83 Jumlah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
Satpol PP	4
Dinas Perhubungan	3
Dinas Perindagkop & UKM	3
Dinas Tenaga Kerja	1
Dinas Kelautan dan Perikanan	4
Dinas Sosial	2
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2
Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat	1
Bappeda	1
Dinas Kehutanan	3
JUMLAH	24

Sumber: SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Jumlah PPNS di Provinsi Sulawesi Barat masih sangat terbatas yang tersebar di beberapa OPD terkait sesuai dengan jenis PPNS bidang masing-masing. Rendahnya minat ASN dalam mengikuti diklat PPNS menjadi salah satu penyebab kurangnya tenaga PPNS di Provinsi Sulawesi Barat.

Peran PPNS dalam rangka penegakan Perda sangat diharapkan, hingga saat ini penegakan perda masih sangat minim dan tidak terlaksana dengan baik, hingga tahun 2018 penegakan perda yang telah dilakukan yaitu terkait dengan Perda nomor I tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.84 Indikator Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA	
		2017	2018
1	Penegakan PERDA	1	2
	- Jumlah penyelesaian penegakan perda	1	2
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	0	50

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA	
		2017	2018
	- Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan) (jam)	0	0,5
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,0000	0,0001
	- Jumlah mobil pemadam kebakaran	0	2
	- Jumlah penduduk (Jiwa)	1.330.961	1.355.554
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	0	50
	- Jumlah ketepatan waktu tindakan pemadam kebakaran (< 1 jam setelah pengaduan) (jam)	0	0,5
	- Jumlah kejadian kebakaran (kali)	0	1
5	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi		

Sumber : SATPOL PP dan DAMKAR Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.4.6 Urusan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Permasalahan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan baik fisik maupun non-fisik; dalam kawasan lokal, nasional dan global. Maka perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial dan lingkungan strategisnya. Hal-hal ini akan mengkaitkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang pembangunan yang lain; ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam konteks inilah sesungguhnya posisi pembangunan kesejahteraan sosial dapat diperhitungkan sebagai bagian integral dan bagian strategis dalam pembangunan nasional.

Pembangunan kesejahteraan sosial di Sulawesi Barat telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini diharapkan guna meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan, perluasan lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi rakyat serta peningkatan kesejahteraan sosial dengan mengedepankan inisiatif dan peran aktif masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber-sumber sosial setempat serta lingkungannya.

Tabel 2.85 Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Di Provinsi Sulawesi Barat

NO	DATA PMKS	POPULASI DATA PMKS TAHUN 2016	HASIL YANG TERTANGANI				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Balita Terlantar	1.900 Jiwa	N/A	32	N/A	56	56
2	Anak Terlantar	8.803 Jiwa	5.180	165	882	1390	1390
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	153 Jiwa	N/A	25	50	3	N/A
4	Anak Jalanan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Anak Dengan Kedisabilitas	2.667 Jiwa	8	3	N/A	100	N/A
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	138 Jiwa	N/A	N/A	2	N/A	N/A
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	10.846 Jiwa	N/A	N/A	N/A	2	104
8	Lanjut Usia Terlantar	7.986 Jiwa	460	1015	100	500	500
9	Penyandang Disabilitas	2.152 Jiwa	280	198	279	120	160
10	Tuna Susila	2100 Jiwa	20	N/A	20	13	N/A
11	Pengemis	559 Jiwa	N/A	N/A	N/A	11	N/A
12	Gelandangan	33 Jiwa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Pemulung	283 Jiwa	N/A	N/A	N/A	10	N/A
14	Kelompok Minoritas	77.927	N/A	N/A	N/A	20	N/A
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	18.903 Jiwa	25	20	100	50	N/A
16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	755 KK	N/A	N/A	N/A	50	N/A
17	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	4.280 Jiwa	N/A	N/A	N/A	6	N/A
18	Korban Penyalahgunaan NAPZA	7.214 Jiwa	18	10	90	20	N/A
19	Korban Trafficking	217 Jiwa	N/A	N/A	N/A	20	N/A
20	Korban Tindak Kekerasan	150 Jiwa	N/A	20	15	10	N/A
21	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	2020 Jiwa	18	8	50	50	N/A
22	Korban Bencana Alam	29000 Jiwa	1607	2340	5029	200	13000
23	Korban Bencana Sosial	1.537 Jiwa	1061	1800	124	253	700
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	6880 Jiwa	160	60	N/A	100	N/A
25	Fakir Miskin	140.761 KK	8154	28398	23.989	200	1860
26	Komunitas Adat Terpencil	12.628 KK	159	50	223	50	66

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2019

Ket : 1) Anak Gelandangan dan pengemis yang ada di Sulbar merupakan anak gelandangan dan pengemis dari luar Sulbar. 2) Untuk Keterangan N/A format di atas tidak ada anggaran.

Tabel 2.86 Data potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2018

NO	DATA PSKS	JUMLAH PSKS PER KABUPATEN						TOTAL PSKS
		POLMAN	MAJENE	MAMUJU	MAMASA	MATENG	MATRA	
1	Pekerja Sosial Profesional	1	1	6	1	1	1	11
2	Pekerja Sosial Masyarakat	41	96	32	62	10	13	254
3	Taruna Siaga Bencana	60	57	66	189	49	58	479
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial							
	- LKS Tuna Sosial	1	1	3	1	1	1	8
	- LKS Anak	15	9	11	7	1	2	45
	- LKS Lanjut Usia	1	1	1	1	1	1	6

NO	DATA PSKS	JUMLAH PSKS PER KABUPATEN						TOTAL PSKS
		POLMAN	MAJENE	MAMUJU	MAMASA	MATENG	MATRA	
	- LKS Orang Dengan Kecacatan (ODK)	6	5	2	2	1	5	21
	- LKS Rehabilitasi Narkotika dan Psitrofik dan Zat Adiktif (NAPZA)	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	1
	LK Askesos	3	7	5	2	1	1	19
5	Karang Taruna	98	32	120	102	15	30	397
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1	1	1	N/A	1	1	5
7	Keluarga Pioner	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	5	5	10	N/A	N/A	N/A	20
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	5	5	25	1	5	1	42
10	Penyuluh Sosial	N/A	N/A	N/A	80	N/A	N/A	80
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	16	8	11	17	5	12	69
12	Dunia Usaha (DU yang berpartisipasi dalam CSR)	65	10	75	20	25	39	234

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.87 Capaian Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial di Sulawesi Barat

No	Indikator SPM	Capaian 2014		Capaian 2015		Capaian 2016		Capaian 2017		Capaian 2018	
		Juml.	%	Juml.	%	Juml.	%	Juml.	%	Juml.	%
1	Persentase (%) PMKS skala Provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{37.660}{666.864}$	5,6	$\frac{41.454}{666.864}$	6,2	$\frac{43.248}{666.864}$	6,5	$\frac{45.321}{666.864}$	6,8	$\frac{47.465}{666.864}$	7,1
2	Persentase (%) Panti sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial	$\frac{3}{54}$	5,56	$\frac{3}{54}$	5,56	$\frac{3}{54}$	5,56	$\frac{3}{54}$	5,56	$\frac{3}{54}$	5,56
3	Persentase (%) Panti sosial skala Provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	$\frac{44}{54}$	81,48	$\frac{44}{54}$	81,48	$\frac{44}{54}$	81,48	$\frac{44}{54}$	81,48	$\frac{44}{54}$	81,48
4	Persentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial diluar panti	$\frac{9}{158}$	5,7	$\frac{9}{158}$	5,7	$\frac{9}{158}$	5,7	$\frac{9}{158}$	5,7	$\frac{9}{158}$	5,7
5	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala Provinsi	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{6}$	83,33	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{3}{6}$	50
6	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala Provinsi	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{6}$	83,33	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{3}{6}$	50
7	Persentase (%) Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan jaminan sosial penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{5}$	100	$\frac{5}{6}$	83,33	$\frac{5}{6}$	83,33

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.4.7 Urusan Ketenagakerjaan

Komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada keadaan tahun 2020 masih menempatkan sektor pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Barat. Hal ini tercermin dari banyaknya pekerja di sektor ini, yaitu sebanyak 297,36 ribu orang atau 46,35 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja. Adapun urutan berikutnya adalah sektor Perdagangan besar dan eceran yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 98,55 ribu orang atau sekitar 15,36 persen, kemudian diikuti sektor Jasa Pendidikan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 40,31 ribu orang atau sekitar 6,28 persen.

Tabel 2.88 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan Utama di Sulawesi Barat Tahun 2020

Kabupaten	Lapangan Pekerjaan Utama			
	Pertanian	Industri	Jasa	Jumlah
Majene	25 536	15 241	35 989	76 766
Polewali Mandar	84 800	39 026	84 059	207 885
Mamasa	50 963	9 333	21 433	81 729
Mamuju	57 890	21 962	51 027	130 879
Pasangkayu	43 677	9 807	28 329	81 813
Mamuju Tengah	34 500	9 029	26 113	69 642
Total	297 366	104 398	23 9849	641 613

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.89 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020
Laki-Laki	446 429	456 632	464 088	476 557	478 595
Perempuan	451 535	461 468	470 193	480 090	462 682
Jumlah	897 964	918 100	934 281	956 647	941 277

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Komposisi penduduk usia kerja jika dilihat dari jenis kelamin berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa di tahun 2018 dan 2019 didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan besaran proporsi yang cenderung menurun dari 50,33 persen tahun 2018 menjadi 50,18 persen pada tahun 2019. Sedangkan jenis kelamin laki-laki proporsinya cenderung menurun dari 49,67 persen tahun 2018 menjadi 49,82 persen pada tahun 2019 dengan dibarengi bertambahnya penduduk usia kerja. Sementara di tahun 2020 didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu 50,85 persen dibandingkan jenis kelamin perempuan sebesar 49,15 persen.

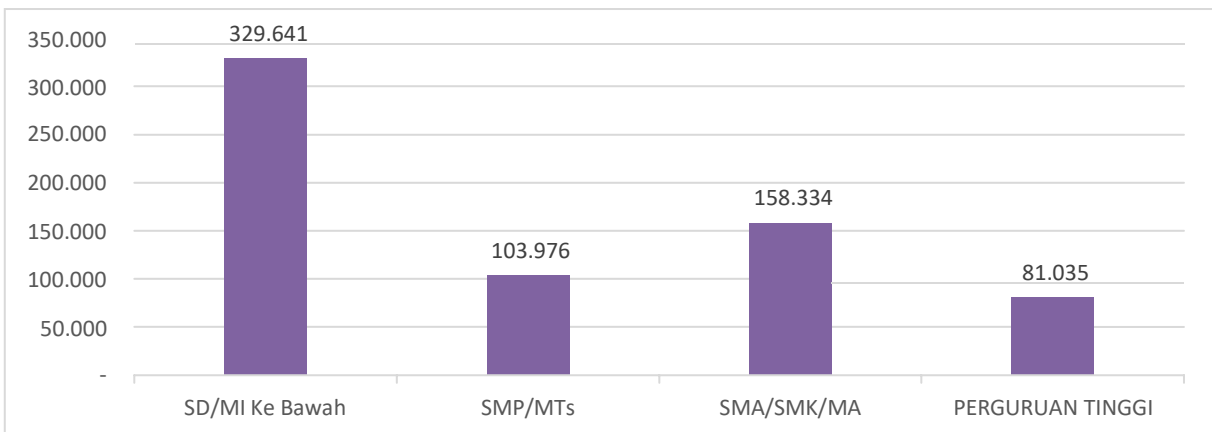
Tabel 2.90 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2016–2020

Pendidikan	Angkatan Kerja yang Bekerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI ke bawah	342.124	321.065	330.490	317.862	329.641
SMP/MTs	92.302	85.747	91.913	88.641	103.976
SMA/SMK/MA	124.477	122.065	133.929	156.914	158.334
Perguruan Tinggi	65.279	66.127	63.063	78.196	81.035
Total	624.182	595.004	619.395	641.613	672.986

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

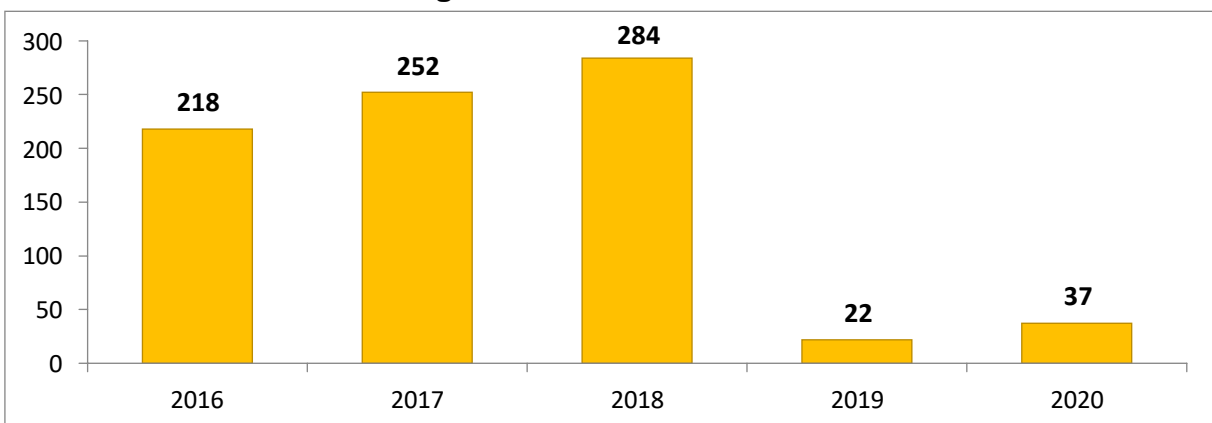
Pada Tahun 2020, pekerja di Sulawesi Barat masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) yaitu sekitar 433,62 ribu orang atau sebesar 64,43 persen, yang terdiri dari pekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 329,64 ribu orang atau sebesar 76,02 persen dan pekerja berpendidikan SLTP sebanyak 103,98 ribu orang atau sebesar 23,98 persen.

Grafik 2.21 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

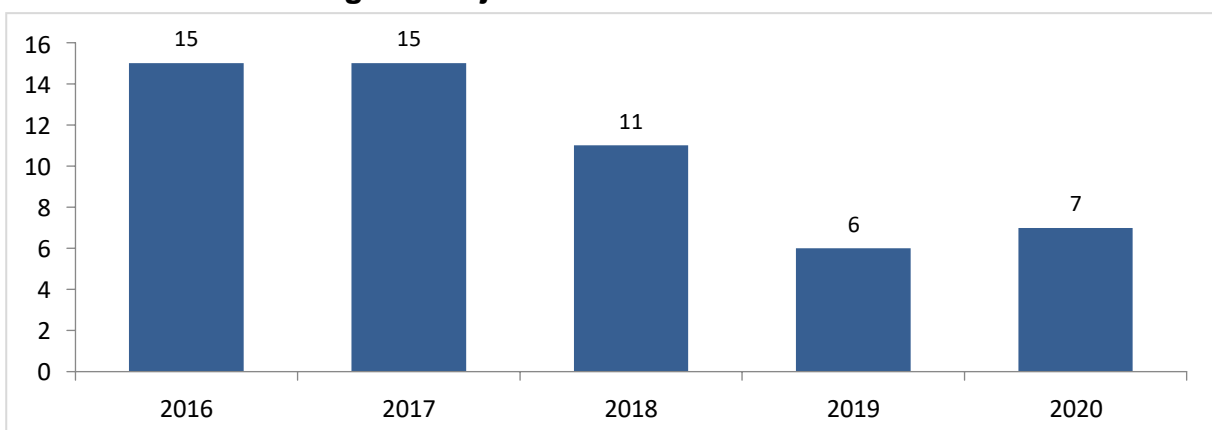
Grafik 2.22 Jumlah Perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2016–2020



Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat 2021

Jumlah Keselamatan dan Perlindungan dari tahun 2016 sebanyak 218 Perusahaan menurun menjadi 37 Perusahaan pada tahun 2020.

Grafik 2.23 Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan Kebijakan Pemda Tahun 2016–2020

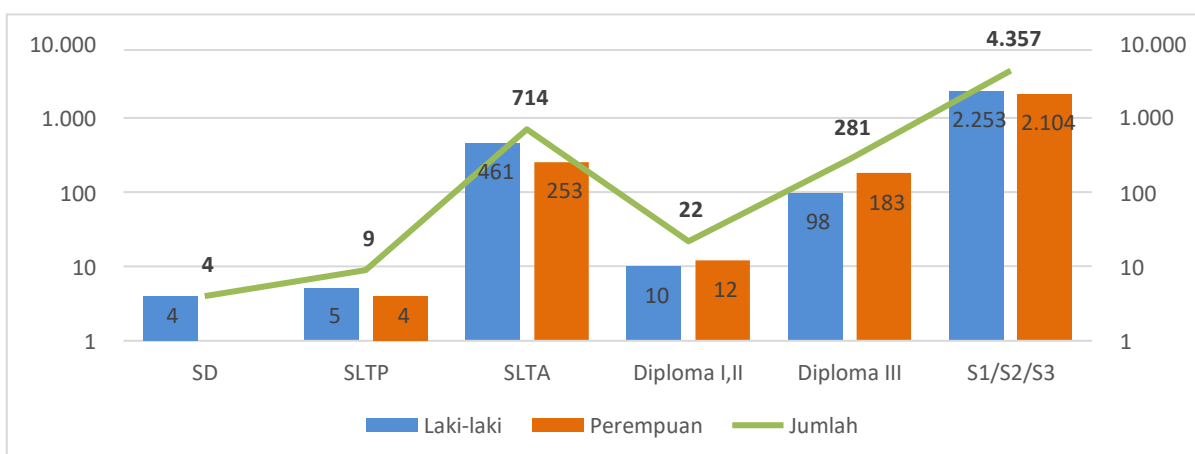


Sumber: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat 2021

Jumlah Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha dengan kebijakan Pemda pada tahun N dari tahun 2016 sebanyak 15 Kasus menurun menjadi 7 kasus pada tahun 2020, meski demikian jumlah kasus yang terselesaikan sebesar 100 persen.

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Grafik 2.24 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

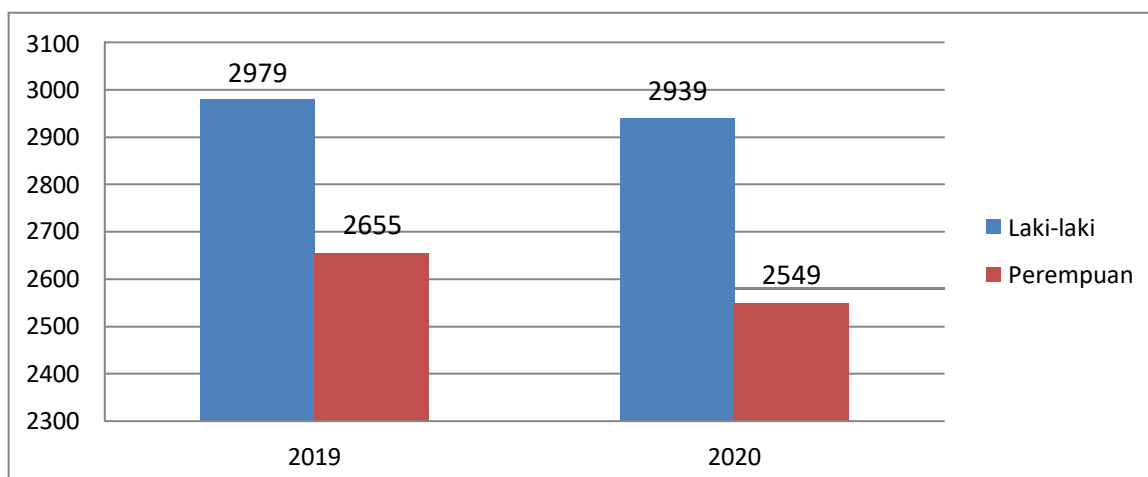
Jumlah Laki-Laki sebesar 2.831 dan Perempuan Sebesar 2.556 dari total Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Sulawesi Barat 5.387. Mayoritas PNS di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 merupakan lulusan universitas sebanyak 86,50 persen dari jumlah keseluruhan PNS.

2.4.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tidak memberikan batasan akan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik telah meningkat namun partisipasi dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif tingkat nasional maupun provinsi, dan di seluruh lembaga pemerintahan masih rendah. Gerakan Perempuan di Indonesia memiliki keterlibatan aktif di bidang politik namun masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi dan keterwakilan perempuan di struktur politik formal. Untuk Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan adanya perbedaan jumlah 0,04 persen pada Tahun 2019 dan 2020. Untuk lebih jelasnya seperti Tabel di bawah ini.

Grafik 2.25 Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut Jenis Kelamin pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2020

Berdasarkan Tabel di atas, Jumlah Pegawai Negeri Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2020 sebesar 5.634 orang dengan rekapitulasi per jenis kelamin yaitu Laki-laki sebanyak 2.979 dan Perempuan sebanyak 2.655. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 5.488 dengan rekapitulasi per jenis kelamin yaitu Laki-laki sebanyak 2.939 dan Perempuan sebanyak 2.549 orang pada Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adanya perbedaan sebesar 0,04 persen dari Tahun 2019 ke Tahun 2020. Jika melihat tren perkembangannya bahwa partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintahan terjadi Penurunan yang tidak signifikan. Tren Perkembangan dimaksud adalah masyarakat pada umumnya sudah melihat partisipasi perempuan di kancah publik sudah mayoritas ada dan mampu melakukan perubahan yang memadai. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, perlu keseimbangan peran gender dalam proses pengambilan keputusan khususnya peningkatan peranan perempuan dalam lembaga pemerintahan dengan melibatkan secara penuh baik holistic dan integrative dan dalam kesetaraan pembangunan.

b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Tabel 2.91 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Provinsi	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018
Sulawesi Barat	92 %	92 %	32,42 %	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2019

c. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Terlepas dari Peranan Perempuan dalam Penataan kesejahteraan sosial merupakan cara sistematis yang membahas isu kesejahteraan dan upaya-upaya mencapai kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan yaitu pemenuhan pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara Perempuan dan Laki-laki dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah angka komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam bidang ekonomi dan politik. Adapun Progres terkait Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Provinsi Sulawesi Barat dalam mengukur IPG dan IDG adalah sebagai berikut:

Tabel 2.92 Komponen Pembentuk IPM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Kabupaten	Rata-rata Lama Sekolah		Harapan Lama Sekolah		Angka Harapan Hidup		Pengeluaran per Kapita		IPM	
	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020		Tahun 2020	
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
Majene	8.77	8.39	13,50	13,61	59.66	63.35	12.318	9.152	69,43	65,33
Polewali Mandar	7.61	7.01	12,88	13,42	60.45	64.20	11.948	7.297	67,45	61,76
Mamasa	7.96	7.24	11,65	12,67	68.85	72.78	8.435	7.005	67,43	65,94
Mamuju	7.97	7.50	12,58	13,66	65.49	69.44	12.405	6.603	70,85	64,17
Pasangkayu	8.23	7.77	11,93	11,93	64.22	68.06	17.066	6.177	72,22	61,33
Mamuju Tengah	7.55	7.03	12,09	12,89	66.28	70.27	12.759	5.252	70,23	60,64
Sulbar	8.00	7.50	12,73	12,99	63.20	67.02	13.177	6.910	70,21	62,79

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id

Berdasarkan Data BPS Tahun 2021 bahwa Pencapaian Komponen IPM Tahun 2020 tercatat mengalami Peningkatan kecuali Komponen Pengeluaran per Kapita hanya disesuaikan. Untuk Angka Harapan Hidup yakni yang baru lahir di Tahun 2020 tercatat memiliki peluang Hidup hingga 65,06 Tahun lebih lama 0,24 Tahun dibandingkan Tahun 2019. Sementara Angka Harapan Lama Sekolah yaitu Anak-anak yang pada Tahun 2020 berusia 7 Tahun memiliki peluang untuk memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,7 Tahun lebih lama 0,15 Tahun dibandingkan Tahun 2019. Demikian juga Rata-rata Lama Sekolah yaitu Penduduk yang berusia 25 Tahun keatas pada Tahun 2020 secara rata-rata telah manempuh pendidikan selama 7,89 tahun lebih lama 0,16 tahun dibandingkan tahun 2019. Untuk tahun 2020 masyarakat Provinsi Sulawesi Barat tercatat memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan sebesar 9,17 juta rupiah per tahun, menurun 67 ribu dibandingkan tahun 2019.

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan angka komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang menunjukkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam bidang ekonomi dan politik. Perkembangan IDG di Provinsi Sulawesi Barat mengalami Stagnan (tidak bergerak) tetapi masih mengalami perkembangan yang memadai antara Tahun

2019-2020 persentasenya adalah 65,92 persen. Pencapaian IDG ini dapat dilihat dari 3 indikator yaitu 1). Keterlibatan Perempuan di Parlemen, 2). Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan 3). Sumbangan Pendapatan Perempuan. Di tahun 2019, keterlibatan perempuan di parlemen/Dewan perwakilan Rakyat Daerah sebesar 11,71 persen yang tidak sesuai target sebesar 30 persen. Perempuan sebagai tenaga profesional di Tahun 2020 sebesar 53,26 persen sedangkan sumbangan pendapatan perempuan di tahun 2020 sebesar 36,57 persen (sumber data BPS,2020). Untuk lebih jelasnya seperti Tabel di bawah ini.

Grafik 2.26 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)

Uraian	Tahun	
	2019	2020
Majene	20	20
Polewali Mandar	18	18
Mamasa	13	13
Mamuju	10	10
Pasangkayu	10	13
Mamuju Tengah	24	24
Sulawesi Barat	11	11
Indonesia	21	21

Sumber: BPS, bps.go.id

Tabel 2.93 Persentase Perempuan sebagai Tenaga Profesional Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Kabupaten	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Majene	N/A	53.72	50.97	53,41	53,55
Polewali Mandar	N/A	61.86	55.16	50,93	57,01
Mamasa	N/A	47.66	45.92	50,88	47,60
Mamuju	N/A	53.15	54.42	52,97	56,42
Pasangkayu	N/A	56.82	51.73	47,20	46,54
Mamuju Tengah	N/A	50.60	61.67	54,81	52,05
Sulawesi Barat	52.67	54.93	52.99	51,67	53,26

Sumber: BPS, sulbar.bps.go.id 2021

Tabel 2.94 Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2019–2020

KABUPATEN	TAHUN	
	2019	2020
MAJENE	39,18	39,47
POLEWALI MANDAR	37,31	37,63
MAMASA	25,87	26,15
MAMUJU	28,40	28,59
PASANGKAYU	19,26	19,42
MAMUJU TENGAH	22,24	22,72
Sulawesi Barat	36,32	36,57
Indonesia	37,10	37,26

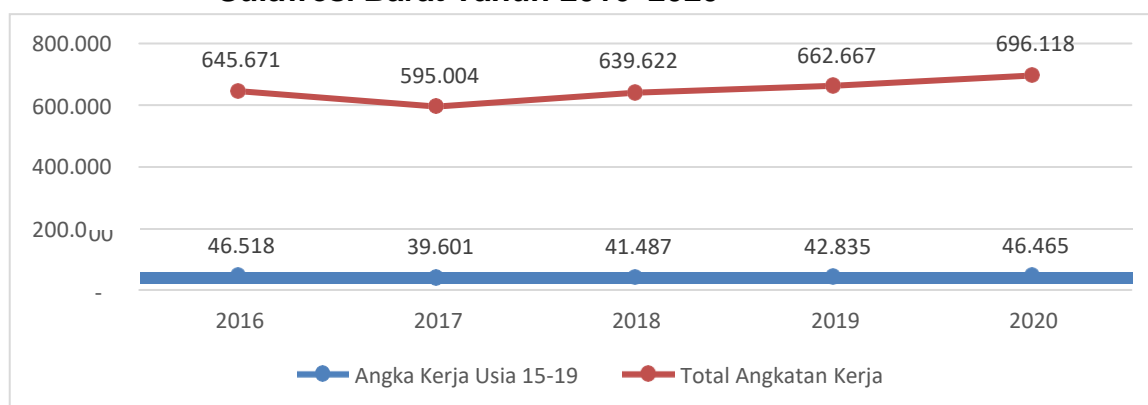
Sumber: BPS, bps.go.id

d. Angkatan Kerja Di bawah Umur

Angkatan kerja di bawah umur Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja di bawah umur sebesar 42.835 jiwa mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 46.465 jiwa

dari total angkatan kerja yang ada. Angka tersebut memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak di bawah umur yang terpaksa bekerja yang disebabkan karena faktor ekonomi keluarga atau pengetahuan orang tua yang relatif rendah tentang hak tumbuh kembang anak, sehingga penguatan ketahanan keluarga menjadi sangat penting dalam upaya pengurangan jumlah anak di bawah umur yang bekerja.

Grafik 2.27 Angkatan Kerja Menurut Umur 15-19 Tahun Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020



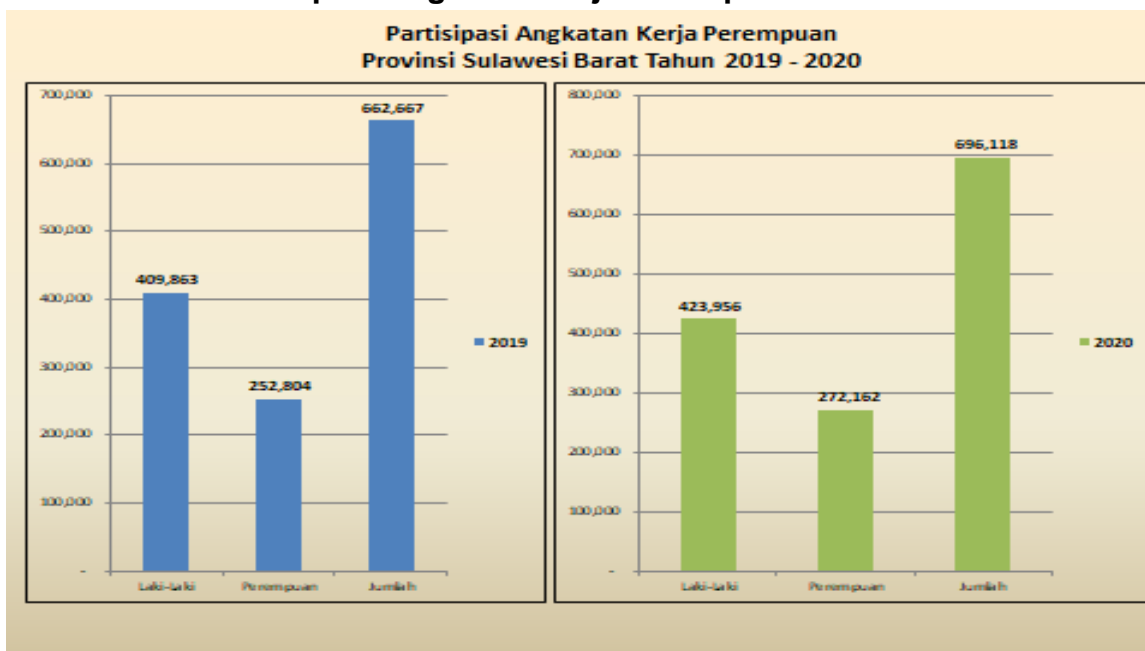
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

e. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Angkatan Kerja merupakan Penduduk usia kerja (15 Tahun) keatas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Melihat dari jumlah Penduduk provinsi Sulawesi barat berdasarkan Data Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021 menyebutkan bahwa Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.419,229 ribu jiwa dengan perbandingan antara Laki-laki sebanyak 720.187 ribu jiwa atau 50,74 persen, Perempuan sebanyak 699,042 ribu jiwa atau 49,26 persen. Untuk mengetahui gambaran penduduk secara ekonomi, maka digunakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK merupakan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif baik yang bekerja, mencari pekerjaan ataupun mempersiapkan usaha. Sedangkan gambaran TPAK Perempuan merupakan ukuran untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan dan bertujuan untuk membantu perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan data Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat dari data yang menunjukkan adanya Peningkatan Angkatan Kerja Perempuan seperti pada Tabel berikut ini.

Grafik 2.28 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2019 – 2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Berdasarkan data yang ada jumlah Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, di Tahun 2019 berjumlah 252.804 orang sedangkan di Tahun 2020 berjumlah 272.162 orang, ada selisih Penambahan Angkatan Kerja Perempuan sejumlah 19.358 orang. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan UMKM Mandiri berbasis Rumah Tangga. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Keluarga oleh Perempuan yang menyebabkan terjadinya Peningkatan Angkatan Kerja Perempuan.

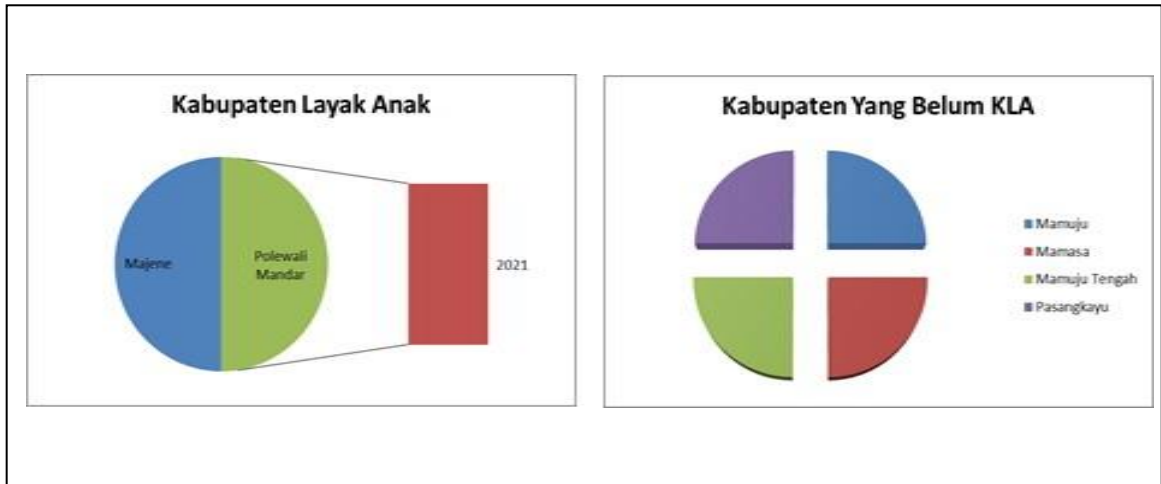
f. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Dalam rangka pengembangan dan mempercepat pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Provinsi Sulawesi Barat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 juga menyebutkan dalam Misi II Gubernur Sulawesi Barat akan menjadikan 6 (Enam) Kabupaten menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA). Adapun beberapa tahap percepatan KLA telah dilakukan diantaranya mulai dari Deklarasi (komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk percepatan KLA di 6 Kabupaten), Pembentukan Tim Gugus Tugas KLA baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten, Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Percepatan KLA. Pencapaian Untuk Kabupaten yang sudah menjadi Kabupaten Layak Anak di Tahun 2021 ada 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene dengan progres sebesar 33,3 persen dengan Predikat Pratama dan diharapkan sesuai

Janji Kerja Gubernur agar 4 Kabupaten lainnya melakukan percepatan Penyusunan KLA seperti Tabel di bawah ini.

Diagram 2.5 Kabupaten Yang Sudah Menjadi KLA Tahun 2021



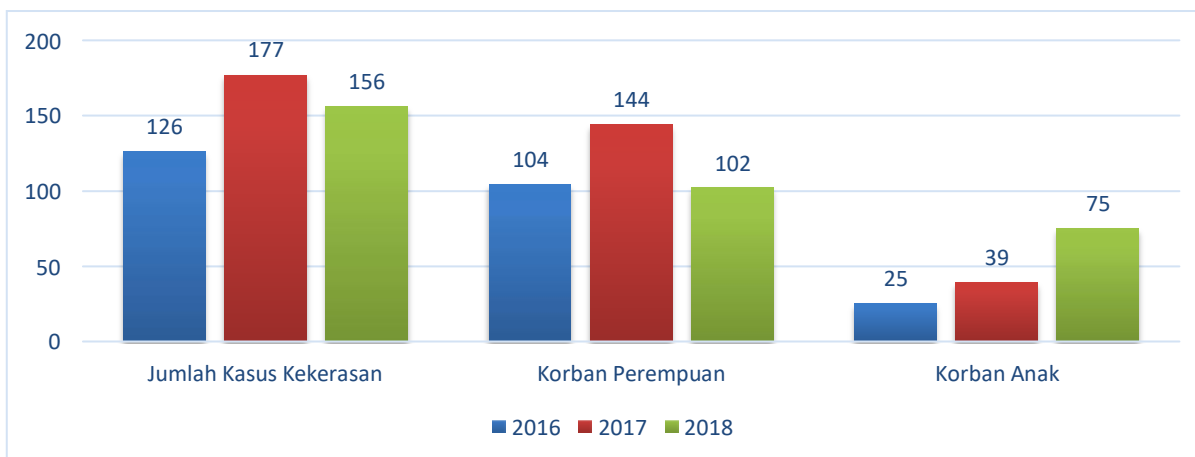
Sumber: DP3AP2KB Provinsi Sulawesi Barat 2021

g. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang Nomor No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sedangkan kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

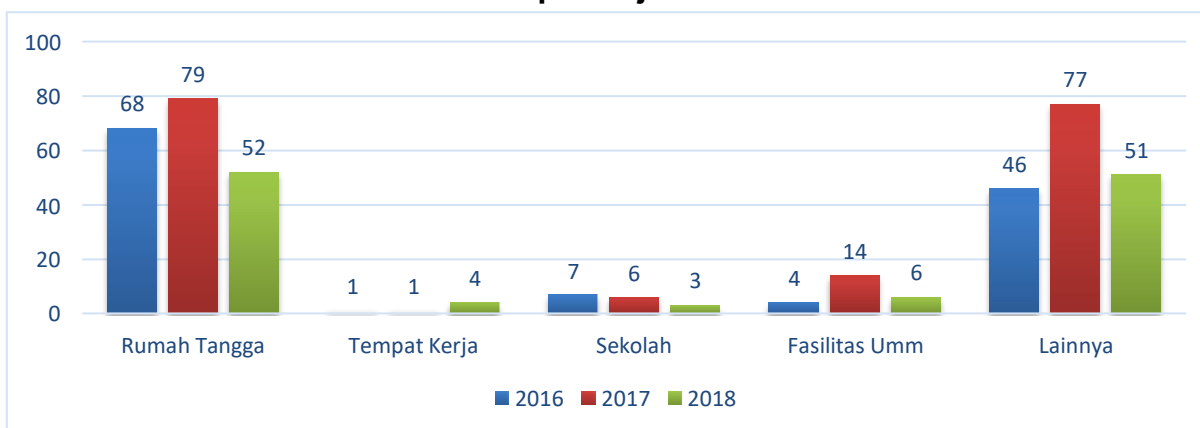
Kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 di mana jumlah kasus kekerasan pada tahun 2016 sebesar 126 kasus meningkat menjadi 156 kasus pada tahun 2018 atau mengalami kenaikan sebesar 24 persen. Demikian halnya dengan jumlah korban anak juga mengalami kenaikan namun berbeda dengan jumlah korban perempuan yang mengalami penurunan serta berdasarkan tempat kejadian paling banyak dilakukan dalam rumah tangga seperti yang tampak pada tabel di bawah ini.

Grafik 2.29 Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan anak Tahun 2016-2018



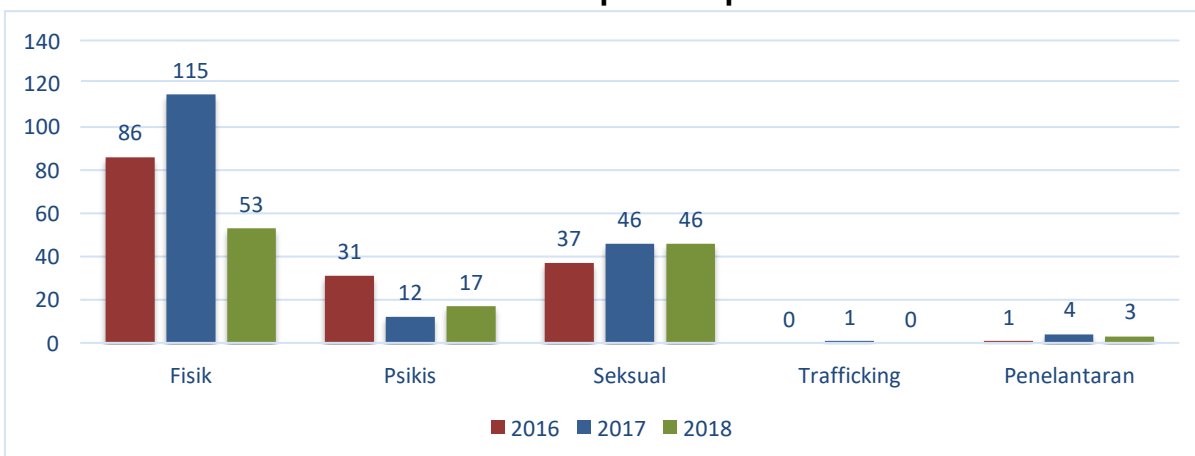
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2019

Grafik 2.30 Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Berdasarkan Tempat Kejadian Tahun 2016-2018



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2019

Grafik 2.31 Jenis kekerasan terhadap Perempuan dan anak Tahun 2016-2018



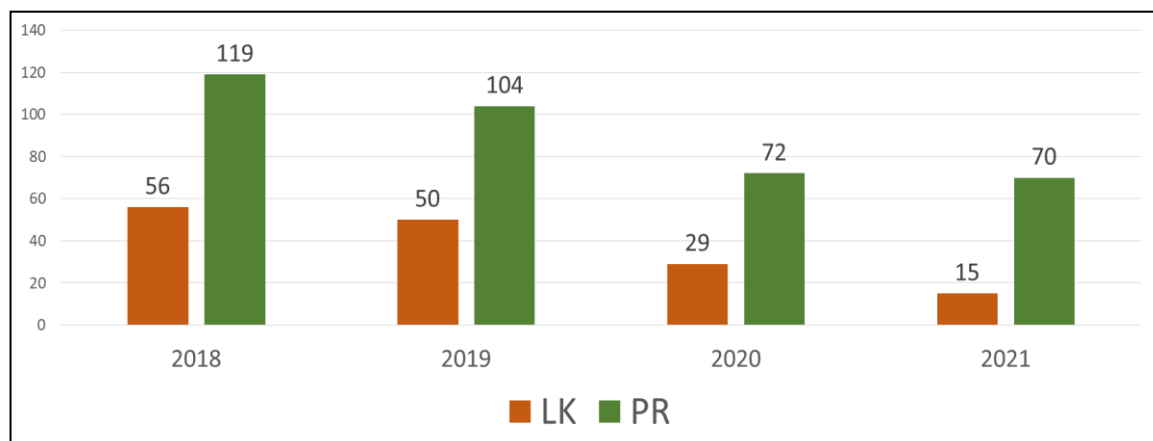
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2019

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan jenisnya terbesar adalah kekerasan fisik, seksual dan psikis. Ketiga jenis kekerasan tersebut harus menjadi perhatian dan dibutuhkan peran aktif seluruh stakeholder dan masyarakat dalam menghilangkan ataupun mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus mengalami peningkatan.

h. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Trafficking

Pada aspek penanganan terhadap Kekerasan terhadap perempuan, anak serta perdagangan manusia, hal-hal yang memerlukan perbaikan antara lain melakukan perbaikan layanan dengan meningkatkan efektivitas, prosedur yang jelas dalam menangani kasus sehingga korban tidak merasa didiskriminasi. Adapun Jumlah Kekerasan menurut jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 berdasarkan Data Simfoni PPA seperti Tabel di bawah ini.

Grafik 2.32 Kekerasan menurut jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021



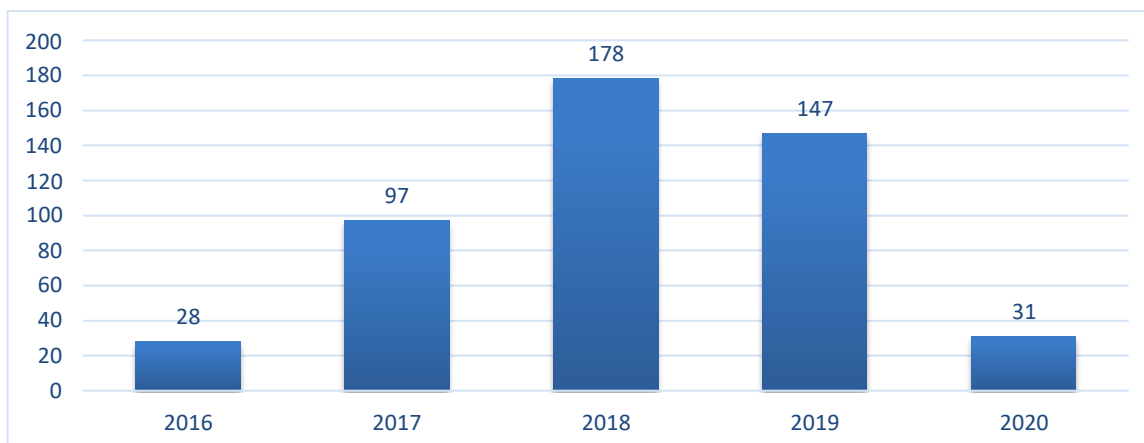
Sumber: Simfoni PPA, 2021

Data menunjukkan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Barat terus mengalami penurunan. Pada tahun 2018 jumlah kekerasan yang terdata di data simfoni adalah sebanyak 175 kasus namun pada tahun 2021 jumlah kekerasan menurun sebanyak 85 kasus.

i. Jumlah Penanganan Laporan KDRT

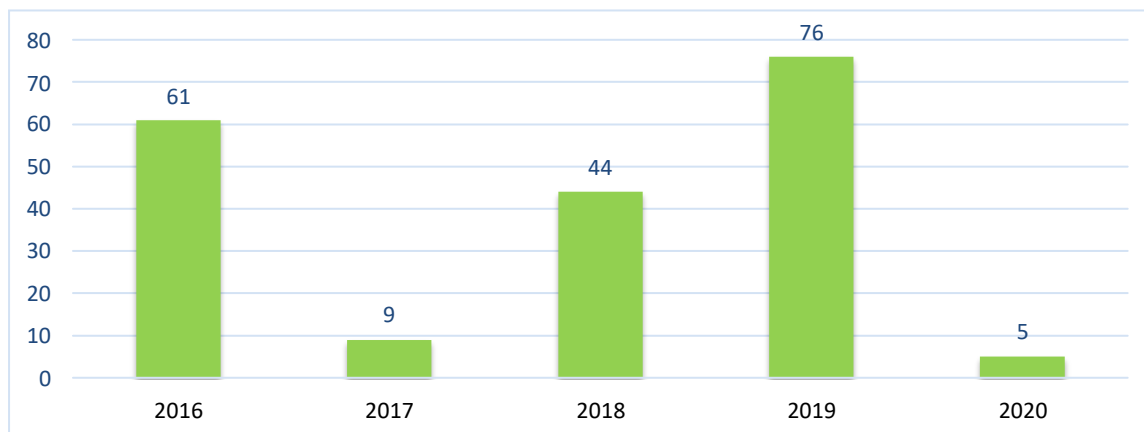
Kasus kekerasan dalam rumah tinggi di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2017 yang hanya sebesar 97 kasus menjadi 41 kasus pada tahun 2018. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2018 hal ini masih mengindikasikan bahwa kasus kekerasan menjadi tantangan nyata yang menuntut keseriusan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terkait perlindungan perempuan dan anak.

Grafik 2.33 Jumlah Laporan Penanganan Kasus KDRT Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2021

Grafik 2.34 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Tahun 2016–2020



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2021

j. Indeks Pembangunan Gender

Isu-isu tentang penyeteraan gender memang akan selalu menjadi perdebatan sepanjang kaum perempuan benar-benar merasakan hak-haknya dan tidak ada bias gender. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang kemudian membawa pada permasalahan yang akan menghambat pembangunan. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Dalam beberapa bidang pembangunan, keadaan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki yang tercermin dalam IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender). Indeks pembangunan gender ini

menggambarkan capaian indikator IPM yang dilihat dalam perspektif gender. Berikut ini disajikan tabel indeks pembangunan gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

Tabel 2.95 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Majene	94.55	94.89	95.17	94.42	94,09
Polewali Mandar	90.89	91.22	91.87	91.57	91,56
Mamasa	97.85	98.21	98.53	97.75	97,79
Mamuju	89.15	89.93	90.24	90.64	90,57
Pasangkayu	83.12	83.76	84.15	84.42	84,92
Mamuju Tengah	87.13	87.44	87.90	86.70	86,34
Sulawesi Barat	89.35	89.44	90.05	89.76	89,43

Sumber: BPS, bps.go.id 2021

Tabel 2.96 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Majene	N/A	74,51	74,87	75,30	75,56
Polewali Mandar	N/A	71,81	75,19	72,21	71,94
Mamasa	N/A	52,52	52,59	60,28	60,40
Mamuju	N/A	65,34	62,75	58,96	58,58
Pasangkayu	N/A	49,23	50,12	50,46	54,13
Mamuju Tengah	N/A	62,73	60,88	65,86	66,56
Sulawesi Barat	71,71	73,37	71,95	65,92	65,92

Sumber: BPS, bps.go.id 2021

Indeks Pembangunan Gender Sulawesi Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan Pada tahun 2016 nilai IPG sebesar 89,35 persen, meningkat hingga tahun 2019 sebesar 89,76 persen kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 89,43 persen. Hal itu menunjukkan bahwa walaupun masih terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan namun ketimpangan tersebut semakin mengecil. Untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nilai IDG Sulawesi Barat tahun 2020 sebesar 65,92 persen, salah satu komponen pembentuk IDG yaitu keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional seperti yang ditunjukkan pada tabel di Bawah ini. Capaian dua indikator utama pembangunan gender di Sulawesi Barat tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan kesetaraan dan keadilan gender di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi yang menuntut peran aktif seluruh stakeholders baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Sulawesi Barat.

2.4.9 Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat subsistem yaitu: (a) Ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan. Ketahanan pangan di Sulawesi Barat secara umum, semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:

- Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif;
- Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Sulawesi Barat;
- Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan;
- Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat.

Untuk menjaga ketersediaan pangan telah dilakukan upaya untuk mempertahankan luas lahan sawah sebagaimana yang tertera pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.97 Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2018

Kabupaten	Luas Lahan Sawah					Luas (Ha) penurunan/kenaikan lahan sawah	Persentase penurunan/kenaikan lahan sawah
	2014	2015	2016	2017	2018		
Mamuju	15.826	15.395	15.395	N/A	N/A	0	0
Majene	1.247	1.620	1.620	N/A	N/A	0	0
Polewali Mandar	17.119	17.628	18.546	N/A	N/A	981 (-)	0,05
Pasangkayu	6.353	3.338	4.437	N/A	N/A	1.099 (+)	0,33
Mamuju Tengah	11.026	11.189	11.189	N/A	N/A	0	0
Mamasa	13.974	12.876	12.876	N/A	N/A	0	0
Sulawesi Barat	65.730	62.046	64.063			2.017	0,3

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Sulbar 2019

Keterangan: Data 2017 dan 2018 Tidak tersedia

Seiring dengan peningkatan produksi bahan pangan, pertumbuhan ketersediaan komoditas pangan nabati selama Tahun 2014–2018 mengalami peningkatan seperti pada Tabel di bawah. Ketersediaan pangan tersebut merupakan produksi pangan Sulawesi Barat setelah dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan dan susut hasil dari setiap komoditas yang nilai konversinya berbeda untuk masing-masing komoditas.

Tabel 2.98 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Padi (Ton GKG)	548.536	668.362	676.362	300.142,22	319.165,97
Produksi Beras (Kg)	301.695.000	267.674.250	267.674.250	171.491.240	182.360.830
Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.306.478	1.330.961	1.355.554	1.380.256	1.419.229
Konsumsi Per kapita (Kg/Thn)	113,70	112,60	112,60		
Kebutuhan Beras (Kg)	148.697.429	145.967.169	145.967.169		
Surplus Beras (Kg)	152.997.571	160.332.625	179.575.506		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar

Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

Tabel 2.99 Ketersediaan Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Ubi Jalar dan Gula Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018 (juta ton)

URAIAN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Kedelai	3,008	-	4,943	4.216	4.356
Kacang Hijau	0.455	0	4,243	4.360	4.524
Kacang Tanah	0,406	0	0,287	0,329	0,442
Ubi Jalar	8,177	6,005	4,547	8.749	9.987
Gula	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar

Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

Ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat Sulawesi Barat ditunjukkan oleh Neraca Bahan Makanan (NBM). Tahun 2014, yaitu ketersediaan energi 2.388 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 87 gram/kap/hari. Dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan yaitu ketersediaan energi 4.983 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 113,45 gram/kap/hari. Perkembangan ketersediaan energi dan protein per kapita dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.100 Ketersediaan Pangan Daging, Susu dan Telur Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018

URAIAN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Daging	1.378	7.529	10.260	11.025	11.254
Susu	-	-	-	-	-
Telur	-	-	-	-	-
Ketersediaan Energi per Kapita Tahun 2014 – 2018 (k.kal/kap/hr)	2.388	3.447	4.447	4.740	4.983
Ketersediaan Protein per Kapita Tahun 2014– 2018 (gram/kap/hari)	87	97	122,47	113,70	113,45

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar

Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Sulawesi Barat dari Tahun 2014 - 2018 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Sulawesi Barat dari aspek konsumsi. Capaian skor PPH dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2.101 Skor PPH Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

Kelompok Pangan	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Padi-padian	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Umbi-umbian	1,6	1,7	0,6	1,0	1
Pangan Hewani	11,9	13,5	18,9	15,1	14
Minyak & lemak	5,0	5,0	4,4	4,5	5
Buah/biji berminyak	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70
Kacang-kacangan	2,4	3,4	4,7	4,3	3
Gula	2,0	2,1	2,5	2,5	2
Sayur & buah	22,0	21,4	17,0	23,4	22
Lain-lain	-	-	0,0	-	0
Skor PPH Sulbar	70,9	73,14	74,0	76,8	73
Skor PPH Nasional					

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar

Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Sulawesi Barat sangat tinggi, sedangkan konsumsi umbi-umbian masih rendah. Namun demikian ada perkembangan penurunan konsumsi beras, dan sebaliknya terdapat kenaikan konsumsi umbi-umbian. Konsumsi pangan hewani juga menunjukkan peningkatan, namun ada kecenderungan penurunan konsumsi sayur dan buah walaupun tergolong kecil. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2.102 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018

URAIAN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Beras (Kg/Kap/Th)	N/A	114,76	112,59	109,2	115,1
Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	N/A	8,46	7,31	11,3	11,1
Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	N/A	36,9	45,74	41,8	35,2
Sayur dan buah (Kg/Kap/Th)	N/A	68,13	72,61	59,0	72,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar

Ket: *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

Tabel 2.103 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

URAIAN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Padi-padian	N/A	1.297,7	1.345,5	1.302,2	1.133,6
Umbi-umbian	N/A	28,9	28,4	41,3	42,4
Pangan Hewani	N/A	146,4	160	150,7	135,7
Minyak & lemak	N/A	171,4	191,1	178,5	194,8
Buah/biji berminyak	N/A	53,6	54,6	44,5	27,1
Kacang-kacangan	N/A	30,6	36,5	43,0	32,6
Gula	N/A	111,3	116,0	106,3	88,9

URAIAN	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Sayur & buah	N/A	88,0	78,7	93,7	89,4
Lain-lain	N/A	28,7	27,8	24,0	37,4

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulbar

Ket : *) Angka Sementara, **) Angka Prognosa

2.4.10 Urusan Pertanahan

Sebagai Provinsi yang masih sangat muda tentunya ketersediaan lahan yang ada di Sulawesi Barat masih sangat besar untuk dapat dimanfaatkan, baik untuk bidang pertanian, perkebunan maupun untuk kawasan perumahan penduduk. Persentase penduduk yang memiliki lahan baru sekitar 78,65 persen, dengan persentase luas lahan bersertifikat sebesar 64,54 persen dari luar Areal Penggunaan Lain (APL). Seperti yang tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.104 Indikator Pembangunan Bidang Pertanahan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

Indikator	Capaian
Persentase Penduduk yang memiliki lahan	78,65 %
Persentase luas lahan bersertifikat	64,54 % dari luas APL
Penyelesaian kasus tanah negara	3 Kasus

Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sulbar

2.4.11 Urusan Lingkungan Hidup

a. Mangrove

Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan Potensi dan sumber daya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dikembangkan, baik dari segi peningkatan perekonomian maupun untuk pengembangan pariwisata. Namun jika hal itu tidak dapat dimanfaatkan ataupun dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan dampak yang negatif. Perilaku dan pola hidup masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memperhatikan kearifan lokal dalam mengelola lingkungannya akan berdampak terhadap rusaknya ekosistem.

Tabel 2.105 Kondisi Hutan Mangrove di Sulawesi Barat Tahun 2021

Kabupaten	Kondisi Hutan Mangrove (Ha)			
	Jarang	Lebat	Sedang	Total
Majene	45,98	87,31	10,51	143,80
Polewali Mandar	95,99	181,25	2,65	279,88
Mamuju	130,36	778,14	16,02	924,52
Pasangkayu	33,78	564,51	4,41	602,70
Mamuju Tengah	107,15	649,58	24,32	781,04
Jumlah	412,25	2.260,79	57,91	2.731,95

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

Kondisi hutan mangrove di Sulawesi Barat berdasarkan data di atas terancam mengalami kerusakan. Total hutan mangrove yang mengalami kerusakan sebesar 184,08 ribu ha atau mencapai 26,61 persen dan dalam kondisi sedang sebesar 286,84 ribu ha atau sebesar 41,48 persen sedangkan kondisi baik

hanya sebesar 220,63 ribu ha mencapai 31,90 persen. Jika total 41,48 persen hutan mangrove dalam kondisi sedang tidak dijaga kelestariannya, maka tidak menutup kemungkinan akan mengalami kerusakan.

b. Terumbu Karang

Tabel 2.106 Kondisi Terumbu Karang di Sulawesi Barat Tahun 2021

Kabupaten	Kondisi Terumbu Karang (Ha)				Luas Total
	Sangat baik	Baik	Cukup	Kurang	
Mamuju	600,00	1.066,00	1.934,00	3.600,00	7.735,00
Majene	0	0	120,58	287,95	408,53
Polewali Mandar	0	477,48	0	371,75	849,23
Pasangkayu	200,07	346,23	250,48	287,95	1.084,73
Mamuju Tengah	0	0	36,00	15,00	51,00
Jumlah	800,07	1.889,71	2.220,48	4.274,70	9.719,96

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2019

Ket.: Kondisi Terumbu karang di Sulawesi Barat untuk 2018 tidak tersedia data dikarenakan Penyusunan Profil di DLH tidak dilaksanakan

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang dalam kondisi sangat baik hanya mencapai 8,23 persen, dalam kondisi baik sebesar 19,44 persen dan kondisi cukup sebesar 22,84 persen serta kondisi kurang sebesar 43,98 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa populasi terumbu karang di wilayah Sulawesi Barat pada kondisi sangat baik, baik dan cukup hampir sebanding dengan kondisi kurang. Hal ini menandakan bahwa potensi kekayaan alam dari terumbu karang di Sulawesi Barat sangat kurang. Jika dilihat secara wilayah, kondisi terumbu karang yang sangat kurang berada di Kabupaten Majene dan Mamuju Tengah. Sedangkan wilayah dengan kondisi terumbu karang yang masih relatif bagus adalah di Kabupaten Pasangkayu dan yang sangat kurang yaitu Kabupaten Mamuju.

c. Lahan Kritis

Lahan kritis merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Lahan kritis umumnya terdapat di daerah pegunungan atau di daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu, dengan ciri utama antara lain lahan berlereng terjal, tanpa atau sedikit vegetasi penutup tanah (gundul), adanya tanda-tanda lahan telah tererosi, dan tanah berwarna merah karena lapisan atasnya telah tererosi. Dampak yang ditimbulkan oleh adanya lahan kritis yaitu kerusakan fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga perlu adanya upaya dan solusi untuk mengurangi lahan kritis pada masing-masing daerah yaitu melakukan reklamasi dengan membuat tanaman penghijauan serta penanaman tanaman semusim.

Lahan kritis di Provinsi Sulawesi Barat jika ditotal baik dalam kawasan hutan maupun bukan kawasan hutan mencapai 682,927,51 hektar atau sekitar 38 persen dari total kawasan hutan dan perairan di Sulawesi Barat. Potensi kerusakan hutan dan lahan kritis secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketersediaan sumber-sumber air.

Tabel 2.107 Luas Lahan Kritis pada Kawasan Hutan dan Bukan Kawasan Hutan menurut Kabupaten dan Kekritisan Lahan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (Hektar)

Daerah	Kawasan Hutan				
	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis
Majene	848,04	3.515,79	41.438,86	5.873,80	0,00
Polewali Mandar	2.895,52	7.459,89	66.974,18	16.914,34	144,38
Mamasa	11.781,11	40.570,77	135.615,07	5.102,30	7.399,22
Mamuju	21.819,37	103.639,93	200.924,90	9.266,29	642,55
Pasangkayu	10.125,55	73.183,77	72.324,18	5.571,59	742,64
Mamuju Tengah	26.390,41	101.576,22	83.686,86	544,17	57,94
Sulawesi Barat	73.860,00	329.946,38	600.964,05	43.272,49	8.986,73

Lanjutan Tabel di atas

Daerah	Bukan Kawasan Hutan				
	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis
Majene	3.976,90	6.287,85	25.721,20	1.912,38	30,68
Polewali Mandar	33.659,93	17.255,18	54.354,78	7.897,74	264,46
Mamasa	9.294,99	7.404,28	66.480,91	10.281,38	3.808,74
Mamuju	25.693,50	18.352,14	66.814,94	8.269,24	63,49
Pasangkayu	36.756,90	63.034,45	24.943,75	536,62	538,36
Mamuju Tengah	34.772,37	21.364,34	40.589,34	1.107,95	119,87
Sulawesi Barat	144.154,57	133.698,24	278.904,92	30.005,31	4.825,60

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2021

d. Kualitas Lingkungan Hidup di Sulawesi Barat

Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sulawesi Barat dihitung melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 3 sektor, yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan, adanya penurunan indeks kualitas lingkungan hidup setiap tahun dipengaruhi oleh indeks kualitas air dan tutupan lahan.

Tabel 2.108 Indeks Kualitas Air menurut Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Provinsi/Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Majene	50,00	N/A	70,00	N/A	N/A
Kab. Polewali Mandar	42,00	59,33	33,33	46,67	50,00
Kab. Mamasa	48,86	53,43	67,14	47,14	51,82
Kab. Mamuju	N/A	N/A	N/A	50,00	N/A
Kab. Pasangkayu	40,00	33,67	55,56	47,50	N/A
Kab. Mamuju Tengah	N/A	N/A	N/A	50,00	N/A
Prov. Sulawesi Barat	45,84	54,11	52,01	53,20	53,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2021

Ket: Tahun 2018 pemantauan hanya dilakukan pada 3 sungai di 3 kabupaten yaitu Pasangkayu, Polman dan Mamasa, Tahun 2017 Pemantauan hanya dilakukan terhadap 3 sungai yaitu Pasangkayu, Polman dan Mamsa, Ika kab. Majene data pemantauan berasal dari Hasil Pemantauan kabupaten Mamasa.

Tabel 2.109 Indeks Kualitas Udara Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Provinsi/Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Majene	99,35	98,92	81,91	84,14	86,87
Kab. Polewali Mandar	99,23	99,33	88,66	87,68	85,51
Kab. Mamasa	99,41	99,61	87,32	92,63	91,48
Kab. Mamuju	99,21	99,57	92,29	92,11	92,88
Kab. Pasangkayu	99,26	99,64	94,53	94,96	92,94
Kab. Mamuju Tengah	-	99,64	90,83	88,48	88,62
Prov. Sulawesi Barat	99,29	99,45	89,26	90,00	89,72

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2021

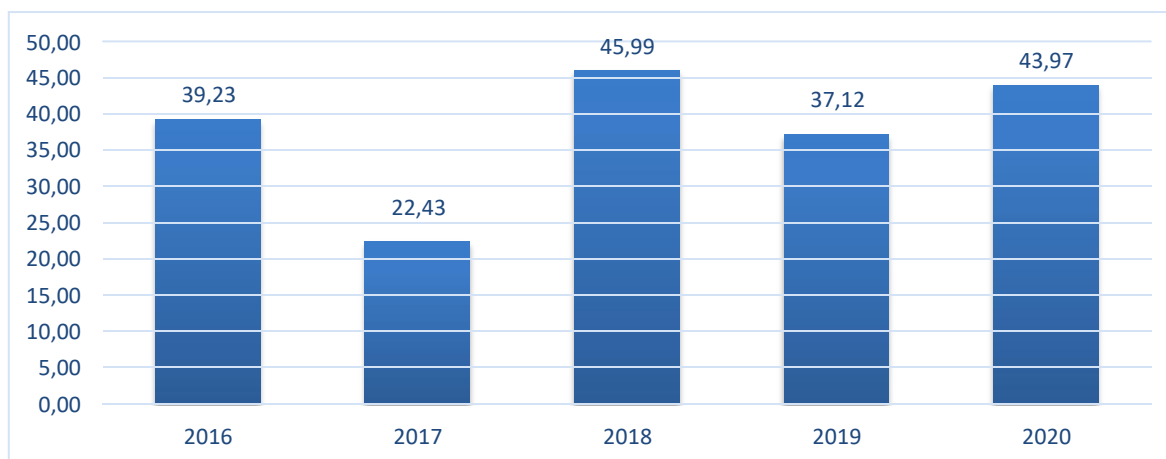
Tabel 2.110 Indeks Tutupan Lahan Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Provinsi/Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020
Majene	50,81	52,48	51,60	51,52	58,90
Polewali Mandar	40,62	40,94	39,37	37,25	40,77
Mamasa	67,29	68,48	66,76	68,20	70,50
Mamuju	76,58	70,27	73,66	73,62	82,61
Pasangkayu	63,48	62,50	62,21	62,53	63,17
Mamuju Tengah	-	82,23	79,41	79,38	80,13
Sulawesi Barat	67,28	62,82	62,17	62,08	70,52

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2021

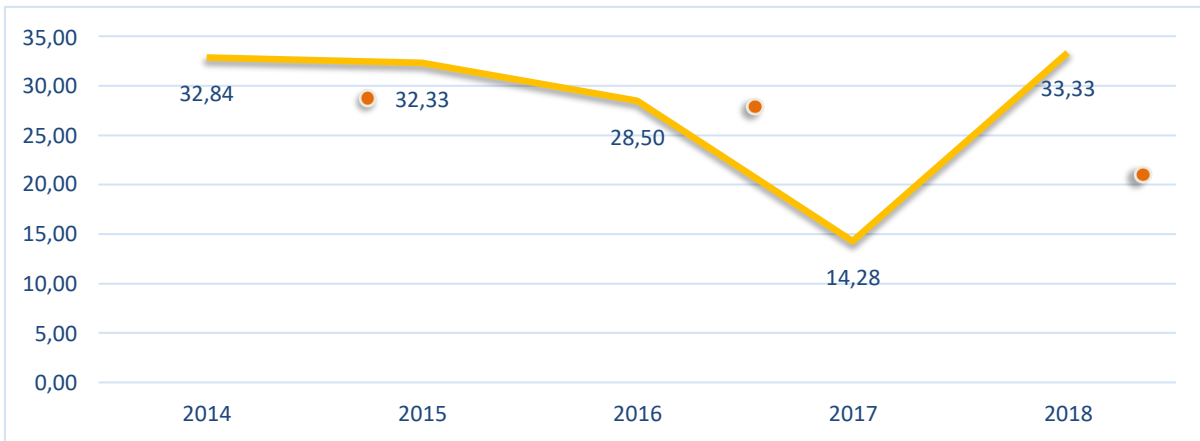
Jumlah tutupan lahan khususnya kawasan pesisir yang semakin berkurang akibat adanya faktor alam yaitu abrasi, untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan pengendalian kerusakan khususnya wilayah pesisir.

Indikator kinerja penanganan sampah di Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2016-2020 telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase penanganan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap tahunnya. Tahun 2016 persentase penanganan sampah tercatat 39,23 persen, akan tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 22,43 persen. Namun kemudian di tahun 2020, persentase penanganan sampah mengalami meningkat menjadi 43,97 persen. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik di bawah ini.

Tabel 2.111 Persentase Penanganan Sampah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

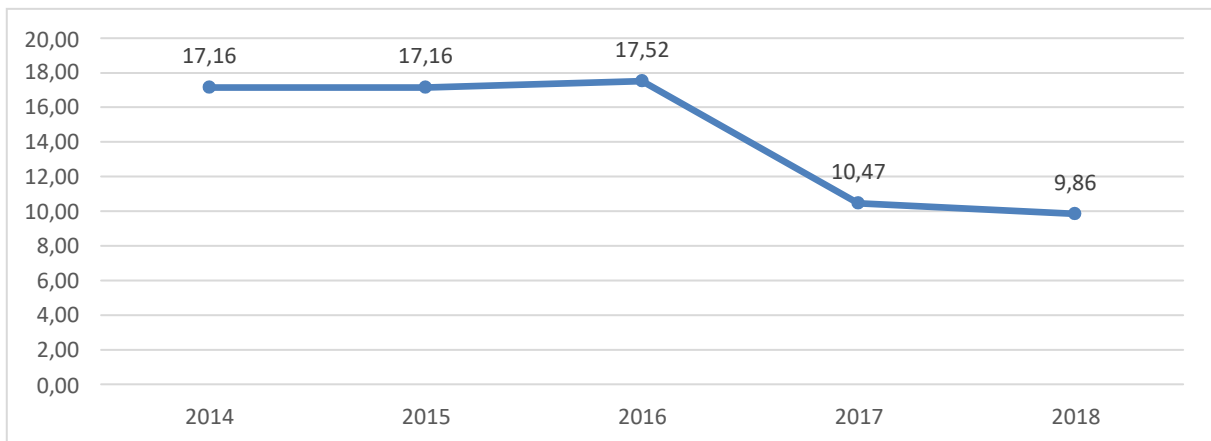
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.112 Persentase Cakupan pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal di Sulawesi Barat Tahun 2014–2018



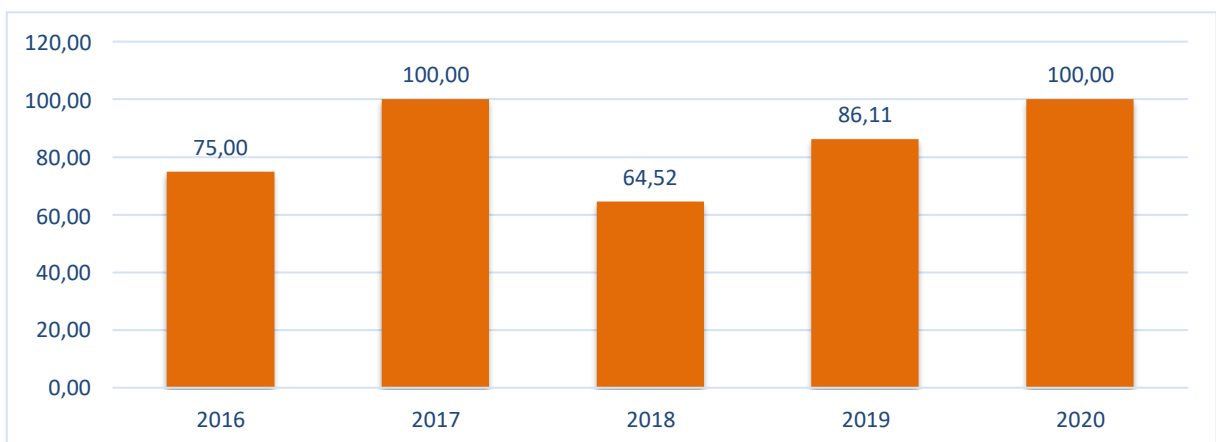
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.113 Persentase Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (TPS) di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.114 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.115 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016–2020

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk berakses air minum	40,90	n/a	n/a	71,50	72,75
Persentase Luas permukiman yang tertata	0,00	n/a	n/a	n/a	n/a
Persentase Pencemaran status mutu air	8,33	n/a	n/a	n/a	n/a
Persentase Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	21,83	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.4.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kinerja pembangunan daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain Rasio Penduduk Ber KTP per Satuan Penduduk, Rasio Bayi Berakte Kelahiran, Rasio Pasangan Berakte Nikah, dan Kepemilikan KTP. Adapun capaian indikator tersebut dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

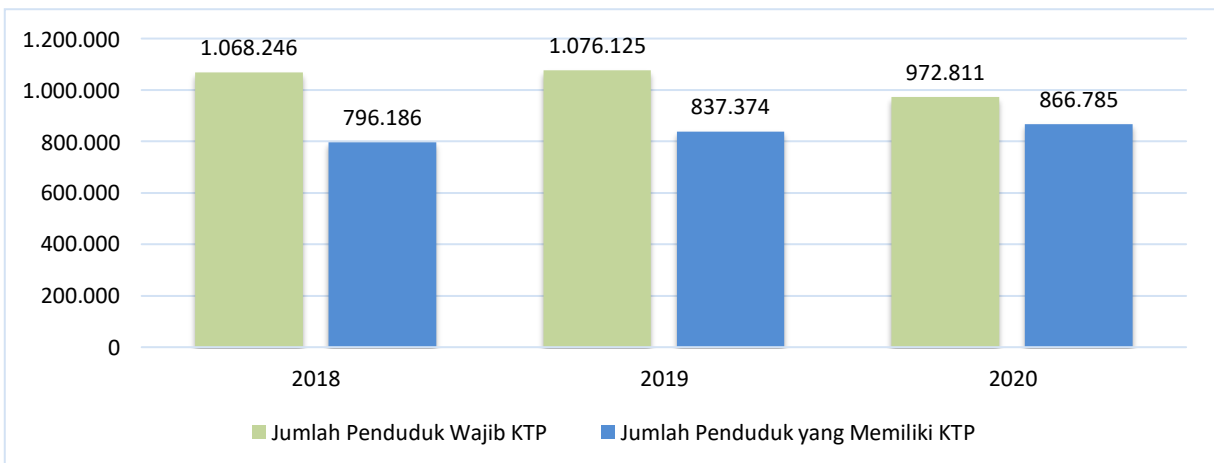
Tabel 2.116 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016–2020

INDIKATOR	2016		2017		2018		2019		2020	
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
Rasio Penduduk Ber KTP per Satuan Penduduk	686.611	65	713.936	67	796.186	75	837.374	78	866.785	89
Rasio Bayi Berakte Kelahiran	78.325	56	78.926	81	91.635	87	9.109	92	10.322	93
Rasio Pasangan Berakte Nikah	35.345	6	55.854	9	87.562	14	117.036	21	172.776	28
Kepemilikan KTP	1.048.658	65	1.068.957	67	1.068.246	75	1.076.125	78	972.811	89
Kepemilikan Akte Kelahiran/1000 Penduduk	N/A		N/A		535.753	34,34	594.954	38,14	626.493	43,55
Kependudukan Skala Provinsi	N/A		N/A		Ada		Ada		Ada	
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK					Sudah		Sudah		Sudah	

Sumber: Disas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tertibnya administrasi kependudukan bagi penduduk yang wajib ber-KTP adalah salah satunya dalam bentuk kepemilikan KTP. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk PAD secara Nasional, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 KTP non elektronik tidak berlaku lagi dan hanya berlaku KTP elektronik. Data penduduk wajib KTP yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada grafik berikut.

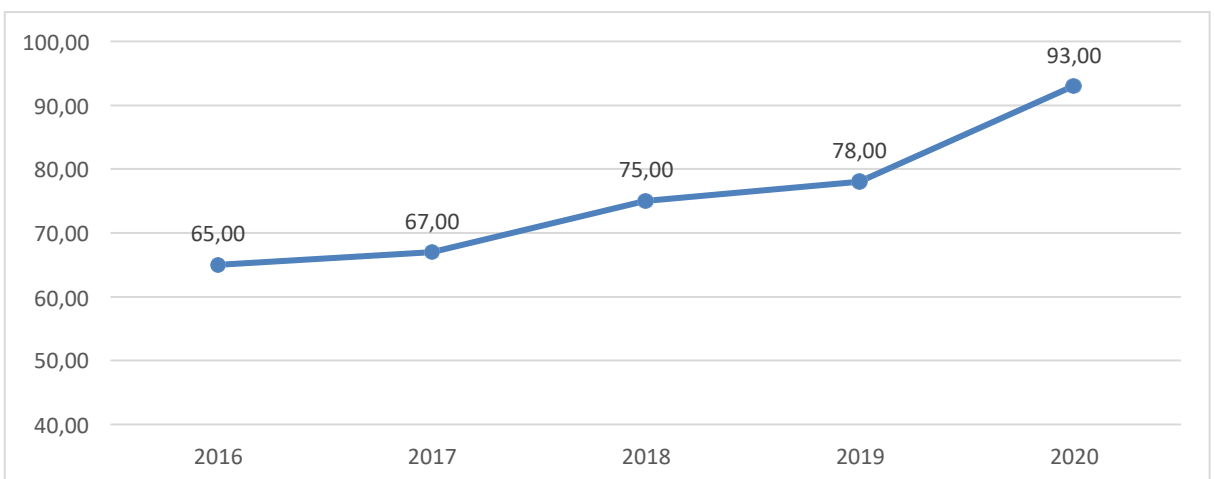
Grafik 2.35 Jumlah Penduduk yang Memiliki e-KTP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2020



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2021

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu tahun 2016-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 65 persen pada tahun 2016 menjadi 89 persen pada tahun 2020, terjadi peningkatan sebesar 24 persen. menjadi 93,4 persen. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan pentingnya KTP, selain adanya sosialisasi dari pemerintah yang cukup intensif.

Grafik 2.36 Persentase Kepemilikan KTP Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

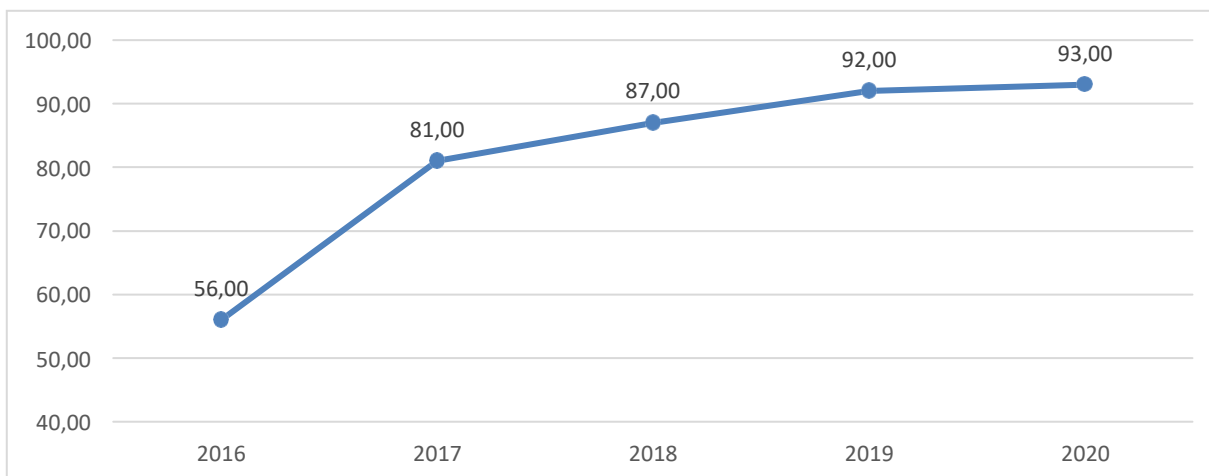


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2021

Selain KTP, kepemilikan akta kelahiran juga sangat penting. Kepemilikan akta kelahiran menjadi hal yang vital karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Akta kelahiran menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran pembangunan, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, mencegah

pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Secara yuridis, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Grafik 2.37 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

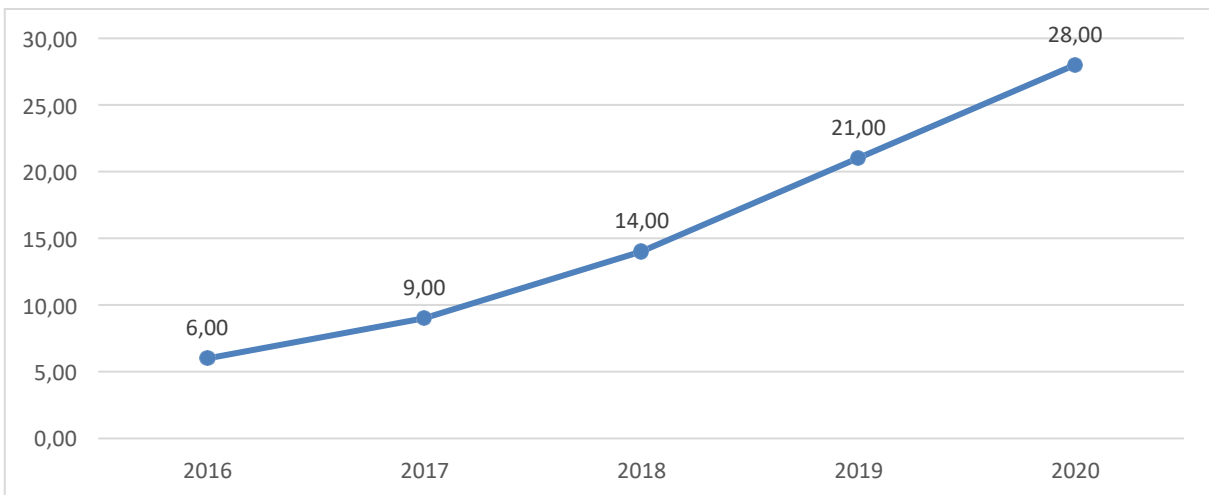


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2021

Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Sulawesi Barat dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari 56 persen menjadi 93 persen. Peningkatan yang sangat signifikan ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain: (1) diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya terkait peran aktif pemerintah dan masyarakat (semula menganut stelsel aktif masyarakat); (2) pendaftaran akta berdasarkan azas domisili; (3) dihapuskannya mekanisme sidang pengadilan untuk keterlambatan lebih dari satu tahun; (4) pelayanan gratis (dikenakan denda keterlambatan mengurus sesuai dengan peraturan daerah di masing-masing kabupaten/kota); (5) serta kerja sama lintas sektor (dengan rumah sakit bersalin, bidan dan pelayanan kesehatan lainnya).

Indikator lain yang capaiannya masih sangat rendah pada bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu rendahnya rasio Pasangan Berakte Nikah. Akta perkawinan merupakan salah satu dokumen penting karena sebagai dasar jaminan hukum atas perkawinan (bukti otentik) apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam keluarga. Pencatatan perkawinan pada hakikatnya untuk mewujudkan tertib administrasi perkawinan. Berdasarkan pencatatan tersebut dapat dipenuhi jaminan memperoleh hak-hak administratif tertentu seperti hak memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain. Pencatatan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap status perkawinan, memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

Grafik 2.38 Rasio Bayi Berakte Kelahiran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat 2021

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa di Sulawesi Barat kepemilikan akte perkawinan masih sangat rendah. Walaupun mengalami tren peningkatan yang cukup baik namun capaiannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Faktor penyebabnya antara lain karena perkawinan penduduk muslim tercatat di Kementerian Agama yang pada umumnya tidak melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya perkawinan penduduk non muslim.

2.4.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan desa perlu mendapat perhatian serius pemerintah mengingat keberadaan pemerintahan desa memiliki arti strategis sebagai lini terdepan dalam memberikan pelayanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kemajuan desa sangat ditentukan oleh kondisi pemerintahan dan kelembagaan yang berkembang di desa dan kelurahan yang bersangkutan. Kondisi pemerintahan desa dan kelurahan yang responsif serta kelembagaan masyarakat yang proaktif dan partisipatif merupakan modal utama pendukung kemajuan desa menuju kemandirian. Di Sulawesi Barat, sebagian besar desa merupakan desa tertinggal. Desa tertinggal tersebar di seluruh kabupaten baik wilayah dataran tinggi berciri desa perladangan/kebun, wilayah dataran rendah berupa desa padi sawah dan perkebunan rakyat, maupun wilayah pesisir berupa desa pantai/perikanan tangkap. Karena itu, dalam penanggulangan kemiskinan, pendekatannya tidak hanya meniscayakan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga pendekatan pemandirian desa. Dengan sinergi pemberdayaan masyarakat dan pemandirian desa, yang di dalamnya berinterkoneksi unsur manusia, kelembagaan dan sumber daya alam, dapat diharapkan terkembangkannya teknostruktur desa dalam mengelola potensi lokalitasnya.

Salah satu program prioritas pemberdayaan masyarakat dan desa saat ini adalah Program Pembangunan Desa Mandiri Berbasis Masyarakat atau yang dikenal dengan nama MARASA yang telah menjadi Peraturan Daerah No 42 Tahun 2018 tentang MANDIRI, CERDAS SEHAT. Tujuan dari MANDIRI, CERDAS SEHAT adalah semakin efektifnya upaya penanggulangan kemiskinan berbasis kemandirian desa

dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan lintas sektor yang berbasis pada desa.

Tabel 2.117 Capaian Indikator Pembangunan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

INDIKATOR	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	37,39	42,95	45,39	54,26	61,56
- Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	215	247	261	312	354
- Jumlah seluruh kantor pemerintahan desa	575	575	575	575	575
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	71	75	83	84	87
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1.999	1.999	1.999	1.999	1.999
-Jumlah kelompok binaan PKK	9.993	9.993	9.993	9.993	9.993
-Jumlah PKK	138.556	138.556	138.556	138.556	138.556
LPM berprestasi					
- Jumlah LPM berprestasi	354	372	412	N/A	N/A
PKK aktif					
- Jumlah PKK Aktif	714	714	714	926	926
Posyandu aktif					
- Jumlah Posyandu aktif	1651	1723	1795	1775	1775
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	575 Desa	575 Desa	575 Desa	575 Desa	575 Desa
pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	79 Desa	69 Desa	59 Desa	N/A	N/A
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

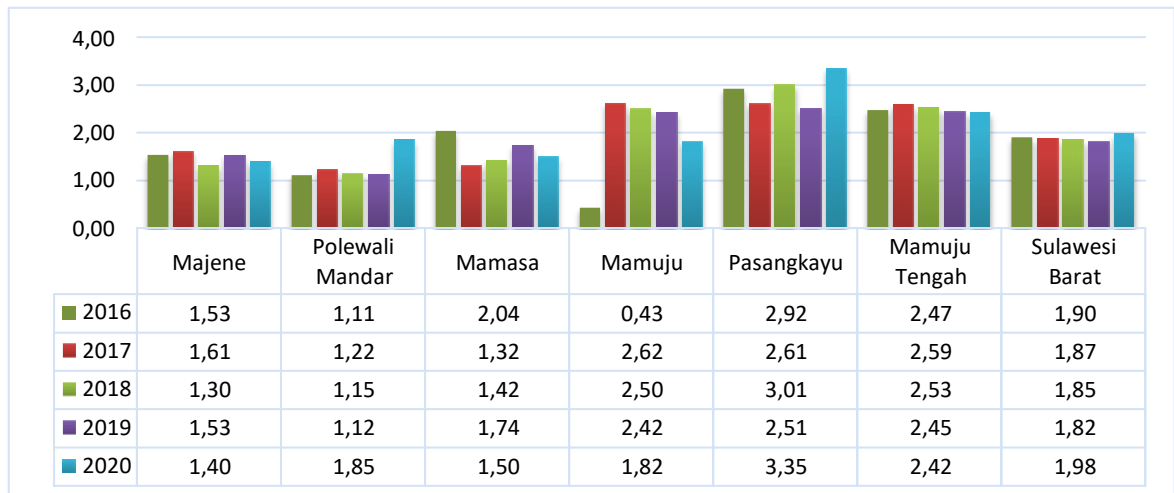
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Barat

2.4.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Sejak dibentuk pada tahun 2004 jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan, sebagai daerah otonom yang mempunyai potensi pengembangan ke depan, tentunya menjadi daya tarik penduduk daerah lainnya untuk berpindah ke Sulawesi Barat. Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Barat, laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat sebesar 1,90 persen turun menjadi 1,82 persen pada tahun 2019. Dan di tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Barat naik sebesar 1,98 persen.

Grafik 2.39 Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

Kabupaten Pasangkayu dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi dikarenakan Kabupaten Mamuju sebagai daerah sasaran migrasi masuknya penduduk dari luar, terlebih dengan ketersediaan lahan yang masih sangat luas untuk digarap. Sebaliknya Kabupaten Majene dengan pusat pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat mengalami laju pertumbuhan penduduk yang rendah dan melambat disebabkan oleh keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk yang besar yaitu 184 jiwa/km².

Upaya pengendalian kuantitas penduduk dapat dilakukan melalui program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga guna terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi sebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.419.229 jiwa terdiri dari penduduk laki - laki sebanyak 720.187 jiwa dan perempuan sebanyak 699.042 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.98 persen.

Salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah Angka fertilitas pasangan usia subur atau TFR (Total Fertility Rate/Angka Kelahiran Total) adalah banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh wanita selama masa reproduksinya, di mana untuk Sulawesi Barat angka TFR tahun 2021 sebesar 2,69 merupakan angka yang tinggi dan menempati urutan ke 6 (enam) dari seluruh provinsi. Selanjutnya dari segi angka kelahiran menurut kelompok umur atau ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) yang merupakan banyaknya kelahiran dari perempuan pada suatu kelompok umur pada suatu tahun tertentu per 1.000 wanita dari kelompok umur tertentu, di mana ASFR untuk kelompok usia muda di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 37 anak per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun dan merupakan angka tertinggi ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia dan angka terendah terdapat pada D.I Yogyakarta (9 anak per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun).

Tinggi rendahnya angka TFR ini dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama penentu fertilitas, yaitu usia kawin pertama (UKP), pemakaian kontrasepsi, lama menyusui eksklusif, aborsi, dan sterilitas. Disamping itu faktor sosial budaya juga berpengaruh. Namun dalam operasionalnya, pencapaian TFR sangat ditentukan oleh kinerja pengelola program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) baik di tingkat Pusat dan Provinsi, maupun OPD KB di Kabupaten/Kota, khususnya dalam hal pembinaan kesertaan ber-KB kepada Pasangan Usia Subur (PUS).

Tabel 2.118 Total Fertility Rate, Age Specific Fertility Rate dan Usia Kawin Pertama (UKP) Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

Provinsi	ASFR (Age Specific Fertility Rate)							TFR	Rata-Rata UKP
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49		
Sulawesi Barat	37.5	117.6	144.8	120.8	79.6	31.0	6.8	2.69	N/A

Sumber: BKKBN Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat 2022

Peningkatan jumlah penduduk di sebuah wilayah, pada umumnya akan berdampak pada meningkatnya masalah-masalah sosial masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karenanya, perlu ada upaya terintegrasi dari seluruh sektor dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Sulawesi Barat. Pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan jumlah anak di keluarga menjadi hal yang sangat penting.

b. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB menunjukkan perbandingan jumlah akseptor dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2012 sampai 2018 menunjukkan peningkatan rasio akseptor KB, meskipun dari tahun 2012 ke tahun 2014 terjadi penurunan persentase. Namun demikian pada tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan yang signifikan meskipun secara umum angka rasio ini masih harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre (generasi berencana), yang diharapkan mampu merubah pandangan generasi tentang pentingnya KB. Adapun tabel rasio akseptor KB seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.119 Rasio Akseptor KB Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH AKSEPTOR KB	15 486	25 509	24 683	24 034	18 803
JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR	216 025	205 805	203 677	210 044	196 227
RASIO AKSEPTOR KB	7,17	12,39	12,12	11,44	9,58

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

c. Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif di Sulawesi Barat mengalami fluktuasi di mana pada tahun 2016 sebesar 74,77 persen mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 64,42 persen dan 70,92 persen. Namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 75,06 persen, dan di tahun 2020 naik menjadi 77,92 persen sebagaimana tabel di bawah ini. Penurunan pada tahun 2017 terkait dengan keterbatasan jumlah tenaga penyuluh lapangan yang diharapkan dapat mendorong motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif. Selain itu, kepesertaan KB pria yang rendah menjadi persoalan yang mempengaruhi angka cakupan. Oleh karenanya, kepesertaan KB pria hendaknya menjadi agenda utama dalam rangka peningkatan cakupan peserta KB aktif, disamping peningkatan ketersediaan tenaga penyuluh lapangan.

Tabel 2.120 Cakupan Peserta KB Aktif Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Peserta KB Aktif	161,532	132,579	144,442	157.656	152.895
Jumlah Pasangan Usia Subur	216,025	205,805	203,677	210.044	196.227
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	74.77	64.42	70.92	75,06	77,92

Sumber : BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

2.4.15 Urusan Perhubungan

a. Perhubungan Darat

Jumlah terminal yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 12 unit, di mana terdapat terminal tipe A sebanyak 2 unit di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar serta tipe B maupun tipe C yang tersebar di beberapa kabupaten di Sulawesi Barat.

Tabel 2.121 Jumlah Terminal menurut Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi Barat 2016–2020

Tipe Terminal	2016	2017	2018	2019	2020
Terminal Tipe A	2	2	2	2	2
Terminal Tipe B	2	-	1	-	-
Terminal Tipe C	3	6	6	3	3
Terminal Pembantu	3	2	3	3	3
Jumlah	10	10	12	8	8

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.122 Jumlah Terminal menurut Kabupaten dan Tipe Terminal Di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020

NO	NAMA TERMINAL	TYPE	KETERANGAN
I	KABUPATEN MAMUJU		
a.	Simbuang	A	Berfungsi
b.	Pasar Sentral Mamuju	C	Tidak Berfungsi
c.	Tarailu	C	Berfungsi
d.	Tasiu	TP	Berfungsi
II	KABUPATEN MAJENE		
a.	Lutang	TP	Berfungsi
b.	Ammana Wewang	C	Berfungsi

NO	NAMA TERMINAL	TYPE	KETERANGAN
III	KABUPATEN POLMAN		
a.	Tipalayo	A	Berfungsi
b.	Polewali	TP	Berfungsi

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2021

b. Perhubungan Udara

Dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah di Pulau Sulawesi dan mendukung peningkatan daya saing di Sulawesi Barat, telah dikembangkan 2 (dua) bandara untuk peningkatan konektivitas tersebut yaitu bandara Tamba Padang dan bandara Sumarorong untuk mendukung destinasi pariwisata di Kabupaten Mamasa.

Tabel 2.123 Kondisi Bandara Tamba Padang Sulawesi Barat Tahun 2020

URAIAN	DIMENSI
Landas Pacu (Runway)	2500 m x 45 m
Landas Hubung (Taxiway)	75 m x 18 m
Landas Parkir (Apron)	20.400 m ²
Overrun	2 x 30 m x 30 m
Bahu (Shoulder)	2 x 60 m x 2.500 m

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa fasilitas Bandara Tamba Padang Mamuju selalu mendapat perhatian serius dari Pemerintah. Dari segi fisik telah terjadi penambahan Landasan Pacu dari 790 meter pada tahun 2005 menjadi 2,500 meter pada Tahun 2020. Dengan penambahan panjang tersebut maka Bandara Tamba Padang hingga kini telah dapat didarati oleh pesawat boeing sekelas Garuda.

Tabel 2.124 Kondisi Bandara Sumarorong Sulawesi Barat Tahun 2020

URAIAN	DIMENSI
Landas Pacu (Runway)	1.200 m x 30 m
Landas Hubung (Taxiway)	80 m x 15 m
Landas Parkir (Apron)	60 m x 40 m

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Mobilitas penduduk melalui bandara Tamba Padang selama tahun 2015-2018 mengalami peningkatan akan tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini. Untuk mendukung daerah destinasi wisata di Kabupaten Mamasa maka Pemerintah Provinsi juga membangun Bandara Sumarorong yang berfungsi sebagai penghubung daerah wisata dari Bali, Sumarorong, Tana Toraja. Bandara ini telah beroperasi dan saat ini melayani rute Makassar- Sumarorong tiga kali seminggu.

Tabel 2.125 Aktivitas Bandara Tamba Padang Mamuju Tahun 2016–2020

Tahun	Pesawat (Unit)		Penumpang (Orang)		Bagasi (Ton)	
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
2016	1 123	1 123	65 249	58 361	269 429	352 468
2017	1 497	1 497	88 218	82 686	441 914	507 642
2018	1 657	1 657	90 379	81 472	469 664	514 300
2019	1300	1300	67 432	61 488	307 736	208 239
2020	669	669	26 976	26 641	85 730	133 301

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.126 Lalu Lintas Pesawat, Penumpang dan Bagasi Angkutan Udara di Bandar Udara Tamba Padang Mamuju dan Sumarorong Mamasa Tahun 2020

Bulan	Pesawat (Unit)		Penumpang (Orang)		Bagasi (Kg)	
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang
Januari	115	155	5 130	5 087	15 665	21 333
Februari	118	118	5 650	5 270	15 228	19 516
Maret	102	102	3 962	4 558	9 698	21 496
April	34	34	756	880	1 537	5 029
Mei	5	5	-	-	-	312
Juni	6	6	-	-	-	-
Juli	27	27	822	755	2 999	5 316
Agustus	51	51	1 630	1 751	6 799	10 333
September	50	50	1 760	1 584	6 692	10 598
Oktober	53	53	2 333	2 003	8 170	11 687
November	53	53	2 513	2 534	9 016	14 691
Desember	55	55	2 420	2 219	9 926	12 990
Sulawesi Barat	669	669	26 976	26 641	85 730	133 301

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Pada tahun 2020, arus penerbangan di Bandara Tamba Padang dan Sumarorong Mamasa tercatat pesawat yang datang dan berangkat masing-masing 669 penerbangan. Jumlah penerbangan ini membawa penumpang sebanyak 26.976 orang yang berangkat dan penumpang datang 26.641 orang.

c. Perhubungan Laut

Pemerintah juga mengembangkan Pelabuhan Laut sebagai upaya mendukung jalur poros maritim yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat. Berikut ini adalah aktivitas pelayaran yang telah berlangsung di Sulawesi Barat.

Tabel 2.127 Kondisi Pelabuhan Belang-Belang Tahun 2020

URAIAN	Dimensi
DERMAGA – 1 (Deep = -9 M)	62 X 15 M ²
DERMAGA – 2 (Deep = -11,25 M)	101 X 15 M ²
DERMAGA – 3 (2015)	100 X 15 M ²
LAPANGAN PENUMPUKAN	108 M2
GUDANG	850 M2

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Secara umum, jenis pelayaran laut yang diselenggarakan diantaranya adalah pelayaran nasional, pelayaran rakyat, non pelayaran dan pelayaran luar

negeri. Pada periode 2012–2014, aktivitas pelabuhan di Sulawesi Barat juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2014, pelayaran ke luar negeri memiliki jumlah paling banyak yakni 41 pelayaran. Pelayaran luar negeri yang ada di Sulawesi Barat masih sebatas pada pengangkutan hasil olahan CPO.

Tabel 2.128 Aktivitas Muat Pelabuhan Menurut Jenis Muatan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Jenis Muatan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Minyak Sawit	Ton	300 774	212 993,14	206 965,13	493 966,94	582 041,50
Biji Sawit	Ton	162 723	54 209,41	116 981,07	76 688,48	58 414,61
Karang	M3	-	-	-	-	-
PKO	Ton	-	17 401,00	2 814,81	11 000,00	23 432,05
Jagung	Ton	8 951	9 035,00	7 817,54	9 072,50	8 048,50
Mobil	Unit	1 491	1 694,00	1 844,00	1 512,00	1 082,83
Motor	Unit	1 471	1 073,00	1 430,00	1 543,00	83,73
Hewan	Ekor	8 112	32 290,00	20 425,00	21 680,00	3 520,00
Barang Campuran	Ton	3 515	12 991,30	15 897,00	21 611,00	20 440,00
Pisang	Ton	1 132	948,00	1 175,00	2 804,33	8 323,00

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

Aktivitas Bongkar Muat Barang di dominasi oleh jenis muatan produk sawit yang terdiri dari minyak sawit dan biji sawit, namun berdasarkan data di atas terlihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 aktivitas bongkar muat untuk minyak sawit mengalami kenaikan di tahun 2020. Berbeda dengan jenis biji sawit yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih banyak biji sawit yang telah dilakukan pengolahan pada beberapa turunan sawit kemudian dilakukan pengiriman. Jenis muatan yang terbesar selanjutnya yaitu Hewan yang biasanya banyak dikirim ke beberapa daerah seperti kalimantan untuk untuk keperluan hari-hari besar.

Tabel 2.129 Aktivitas Bongkar Pelabuhan Menurut Jenis Muatan Di Provinsi Sulawesi Barat 2016–2020

Jenis Muatan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Semen	Ton	168 564	158 773	195 486,30	543 618,00	137 237,90
Kayu	M3	155	125	20,00	20,00	5,00
Ikan	Ton	191	56	562,86	640,76	153,23
Tali Bekas	Ton	-	50	15,00	15,00	82,00
Mobil	Unit	1 146	1 180	1 061,00	1 061,00	909,23
Motor	Unit	1 430	1 407	1 341,00	1 341,00	118,80
Hewan	Ekor	1 641	-	-	-	-
Barang Campuran	Ton	16 779	18 143	10 443,00	11 133,00	-
Pupuk	Ton	20 662	13 725	22 755,80	23 155,80	21 026,50

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Untuk Kategori aktivitas bongkar di pelabuhan didominasi oleh jenis muatan semen, yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi terjadi geliat pembangunan infrastruktur di

Sulawesi Barat. Jenis muatan yang kedua yaitu pupuk yang banyak didatangkan dari daerah lainnya untuk menunjang tanaman pertanian dan perkebunan yang ada di Sulawesi Barat.

Tabel 2.130 Aktivitas Pelayaran dan Jumlah Penumpang Menurut Bulan Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Bulan	Pelayaran	Penumpang (Orang)	
		Berangkat	Datang
Januari	277	3 818	2 743
Februari	252	3 249	2 286
Maret	309	3 391	2 961
April	250	-	-
Mei	154	-	-
Juni	269	382	367
Juli	230	1 128	1 227
Agustus	215	1 908	1 420
September	268	1 919	1 715
Oktober	270	1 816	2 247
November	270	1 816	2 247
Desember	234	2 000	2 100
Jumlah	2 768	19 919	17 357

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.131 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan Tahun 2016–2020

NO	Indikator Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan	2016	2017	2018	2019	2020
	Perhubungan					
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum					
	Jumlah penumpang yang tiba (masuk)	17.646.005	1.267.705	758.544	698.333	448.699
	Jumlah penumpang yang berangkat (keluar)	8.892.781	1.254.998	960.765	700.861	433.688
	Persentase pergerakan kendaraan dan penumpang pada terminal tipe A, B dan C	33,10	17,95	28,46	N/A	N/A
2	Rasio Izin Trayek					
	- Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	177	37	20	N/A	N/A
3	Jumlah angkutan Darat					
	Jumlah angkutan Darat yang tiba (Masuk)	219.990	246.061	99.897	112.465	79.360
	Jumlah angkutan Darat yang berangkat (Keluar)	199.044	238.930	97.735	109.478	80.260

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

Upaya memperkecil kesenjangan digital dan informasi di kalangan masyarakat perdesaan ditempuh dengan penyediaan infrastruktur dan akses TIK di daerah rural melalui program Universal Service Obligation (USO) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Salah satunya melalui Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). PLIK Bertujuan menyediakan layanan akses internet di wilayah kecamatan dengan prinsip minim subsidi, terjangkau, dan berkelanjutan dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan (knowledge society).

Kehadiran PLIK sebagai fasilitas TIK untuk publik diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas masyarakat dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Adapun jumlah Pusat Layanan Internet Kecamatan yang ada di Sulawesi Barat, baru sekitar 93 (Sembilan puluh tiga) yang tersebar di seluruh Kabupaten.

Tabel 2.132 Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Pusat Layanan Informasi Internet Kecamatan (PLIK) Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Kabupaten	Pusat Layanan Internet Kecamatan
Majene	11
Polewali Mandar	26
Mamasa	19
Mamuju	22
Pasangkayu	10
Mamuju Tengah	5
Sulawesi Barat	93

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Tabel 2.133 Jumlah Internet Desa Menurut Kabupaten Se-Sulawesi Barat

NO	Kabupaten	Jumlah Desa	
		2019	2020
1	Mamuju	5	5
2	Majene	5	5
3	Polewali Mandar	8	6
4	Mamasa	5	5
5	Pasangkayu	4	4
6	Mamuju Tengah	5	5

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2021

KIM adalah Kelompok yang dibentuk oleh Masyarakat, dari Masyarakat dan untuk Masyarakat, yang secara mandiri dan kreatif melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah taraf kehidupannya sebagai lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan Informasi.

Tabel 2.134 Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2019

NO	Kabupaten	Jumlah KIM	
		2018	2019
1	Mamuju	14	14
2	Majene	99	99
3	Polewali Mandar	1	1
4	Mamasa	50	50
5	Pasangkayu	1	4
6	Mamuju Tengah	3	3

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2021

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berdasarkan Kabupaten menunjukkan bahwa kabupaten Mamuju Tengah mengalami Peningkatan sebanyak 3 Kelompok Informasi Masyarakat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya Masyarakat pada daerah tertentu secara khusus mengelola kelompok informasi yang

bertujuan untuk memperlancar informasi dalam rangka meningkatkan literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi.

Untuk Pengguna Pemprov dan OPD jumlah Portal/Website yang Aktif sebanyak 40 Portal/Website sedangkan yang Belum aktif sebanyak 2 Portal/Website dan untuk Non OPD yang Aktif sebanyak 11 Portal/Website sedangkan yang Belum aktif sebanyak 3 Portal/Website.

Tabel 2.135 Jumlah Portal/Website dan Status Keaktifan pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Provinsi	Realisasi Capaian Tahun Ke-		Jumlah
	Aktif	Belum Aktif	
Pemprov dan OPD	40	2	42
Non OPD	11	3	14

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.136 WebSite Milik Pemerintah Daerah Tahun 2016–2020

Provinsi	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sulawesi Barat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.17 Urusan Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Meningkatnya perekonomian suatu daerah tidak terlepas dari peran serta dari lembaga keuangan non bank seperti koperasi. Sesuai dengan prinsipnya bahwa koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian. Secara institusi, pada tahun 2019 jumlah koperasi di Sulawesi Barat sebanyak 941 unit. Terdiri dari 614 koperasi aktif dan 301 koperasi tidak aktif.

Tabel 2.137 Jumlah Koperasi Menurut status Keaktifan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Kabupaten	Keaktifan		Jumlah
	Aktif	Tidak Aktif	
Majene	105	4	109
Polewali Mandar	250	0	250
Mamasa	77	66	143
Mamuju	0	0	0
Pasangkayu	40	59	99
Mamuju Tengah	49	94	143
Sulawesi Barat	521	223	744

Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Prov. Sulbar 2021

Jumlah Koperasi di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 sebesar 744 unit yang terdiri dari 521 koperasi aktif dan 223 koperasi yang tidak aktif. Banyaknya koperasi yang tidak aktif selain disebabkan oleh bahan baku yang sulit didapatkan, Sumber informasi yang terbatas, akses pasar dan pembiayaan, juga disebabkan Sumber Daya Manusia para pelaku koperasi yang masih sangat minim.

Tabel 2.138 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Besar Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Kabupaten	Kategori Usaha					Persentase UMKM (%)
	Mikro	Kecil	Menengah	Tidak diketahui	Jumlah	
Majene	312	1	0	0	313	100,00
Polewali Mandar	5.614	0	0	101	5.715	98,23
Mamasa	117	62	0	3.747	3.926	4,56
Mamuju	4.973	3.765	774	0	9.512	91,86
Pasangkayu	6.891	90	0	1.538	8.519	81,95
Mamuju Tengah	0	287	0	0	287	100,00
Jumlah	17.907	4.205	774	5.386	28.272	78,21

Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.139 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Skala Usaha dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

Lapangan Usaha	UMK	UMB	Jumlah	Distribusi (%)
Majene	41.955	2.609	44.564	15,30
Polewali Mandar	94.580	4.432	99.012	33,99
Mamasa	27.263	835	28.098	9,65
Mamuju	52.734	6.202	58.936	20,23
Pasangkayu	35.106	2.475	37.581	12,90
Mamuju Tengah	22.124	963	23.087	7,93
Jumlah	273.762 (93,99)	17.516 (6,01)	291.278 (100,00)	100,00

Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.140 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Koperasi Aktif (unit)	70,85%	73,50%	75,15%	N/A	70,03%
Jumlah BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM	2 BPR/LKM
Jumlah UKM Non BPR/LKM	38150	20330	22150		
Usaha Mikro dan Kecil (Keg.Expo)	5 UKM	5 UKM	5 UKM		

Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.18 Urusan Penanaman Modal

Potensi sumber daya alam yang berada di Provinsi Sulawesi Barat menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk melakukan investasi di Sulawesi Barat. Pemerintah harus menangkap peluang tersebut salah satunya dengan membuka regulasi yang mudah dalam proses pengurusan investasi. Investor yang berminat terhadap pengembangan perekonomian Sulawesi Barat, tidak hanya berasal dari dalam negeri akan tetapi diminati juga oleh investor asing.

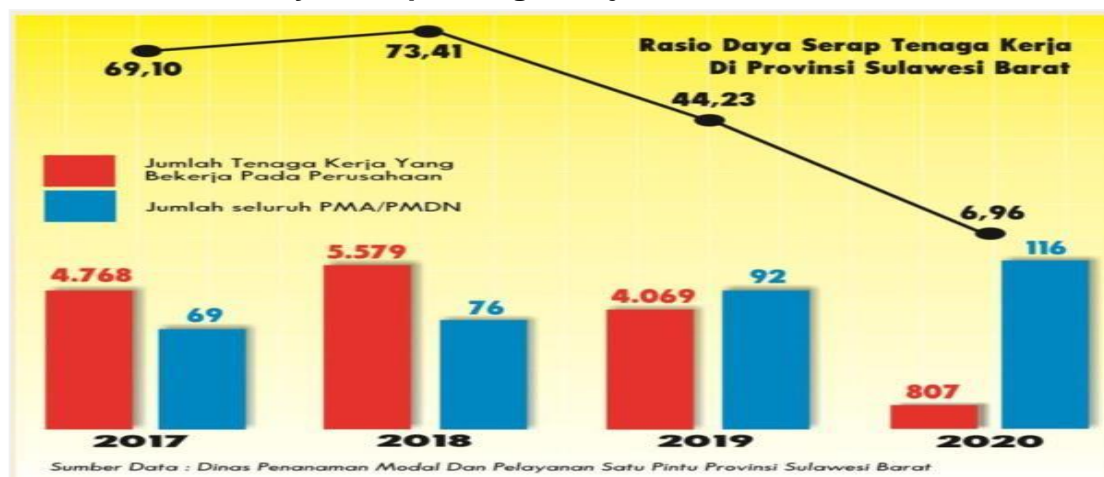
Pada kurun waktu 2016-2020, jumlah investor mengalami kenaikan dari tahun ke tahun khususnya dari pada tahun 2020 bertambah sebanyak 24 investor sedangkan tahun 2019 sebanyak 16 investor dari tahun 2018, sedangkan nilai investasi 2018 lebih banyak di tahun 2017. Jika dilihat dari jumlah investor pada tahun yang sama terlihat bahwa pada Tahun 2018 mengalami kenaikan yang signifikan karena pada tahun tersebut perusahaan yang berinvestasi adalah yang berskala besar dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 walaupun jumlah investor lebih banyak tetapi jumlah investasi rata-rata berskala kecil.

Tabel 2.141 Indikator Kinerja Bidang Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Uraian	Realisasi Capaian Tahun Ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN / PMA)	50 Investor	69 Investor	76 Investor	92 Investor	116 Investor
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	10.52 Triliun	812 M	3.475 M	1.339 M	347 M
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	191 Izin/NonIzin	145 Izin	214 Izin	219 Izin	218 Izin
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	30	69,10	73,41	44,23	7,91
Lama Proses Perizinan (Rata-rata)	1 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
Jumlah PERDA yang Mendukung iklim Usaha	Masih sebatas Pergub	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2021

Grafik 2.40 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Barat



Sumber: DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2021

Rasio tenaga kerja menunjukkan berapa rata-rata pekerja yang bekerja pada perusahaan. Dari grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 rasio tenaga kerja tertinggi. Jika dilihat dari jumlah Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja maka pada tahun 2018 hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut orientasinya adalah bidang yang membutuhkan banyak tenaga kerja sedangkan tahun 2017 dan khususnya tahun 2019 dan 2020 sebagian pekerjaannya dibantu oleh mesin.

Kenaikan dan penurunan realisasi investasi PMDN dari tahun 2017 ke 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan, dimana berturut-turut dari tahun 2017 hingga tahun 2019 sebesar 685.04, 376.24, -62.24 dan -70.78. Laporan tersebut berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang menjadi kewajiban setiap perusahaan secara berkala. Beberapa perusahaan masih belum mempunyai kesadaran untuk memberikan LKPM karena selain enggan untuk memberikan data realisasinya secara riil juga karena belum ada penerapan pemberian sanksi yang tegas. Penyebab penurunan lainnya adalah tidak ada perusahaan yang menambah modal ataupun aset yang juga turut dilaporkan dalam LKPM.

Tabel 2.142 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMA (Juta Rupiah) Di Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	Realisasi PMA Tahun Evaluasi	Realisasi PMA Tahun sebelum evaluasi	Persentase Realisasi PMA (%)
(1)	(2)	(3)	(4 = (2-3)/2*100)
2017	152.064,00	278.100,00	-45,32
2018	330.947,79	152.017,49	117,70
2019	152.017,49	330.947,79	-54,07
2020	93.980,18	152.017,49	-38,18

Sumber: DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.143 Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Juta Rupiah) Di Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2.144 ahun	Realisasi PMA Tahun Evaluasi	Realisasi PMA Tahun sebelum evaluasi	Persentase Realisasi PMA (%)
(1)	(2)	(3)	(4 = (2-3)/2*100)
2017	660.221,60	84.100,00	685,04
2018	3.144.242,90	660.221,60	376,24
2019	1.187.236,90	3.144.242,90	-62,24
2020	346.925,28	1.187.236,90	-70,78

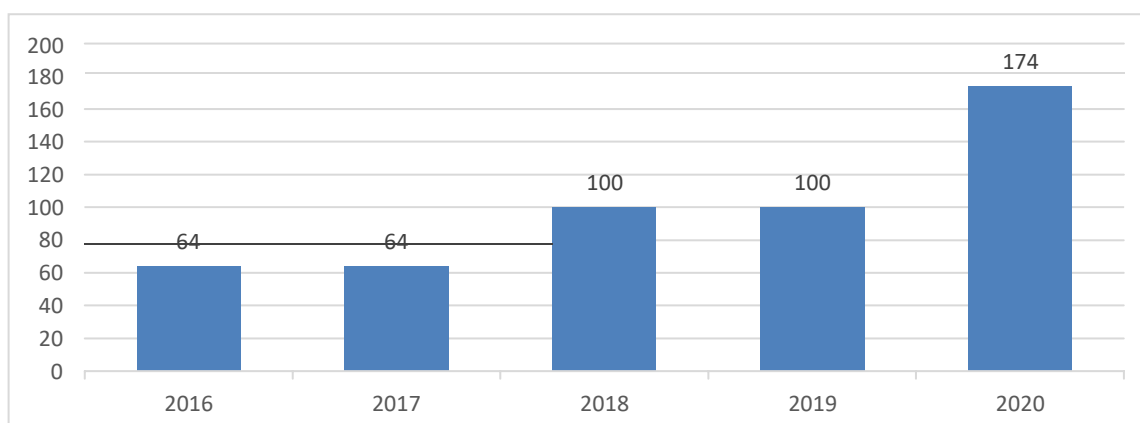
Sumber: DPMPTSP Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Persentase Kepemudaan yang Aktif

Jumlah organisasi pemuda dari tahun 2016 sebesar 64 Organisasi Kepemudaan meningkat menjadi 100 Organisasi Kepemudaan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 meningkat menjadi 174. Perkembangan Organisasi Kepemudaan tersebut tentunya harus mendapat dukungan pemerintah terutama dalam pengembangan partisipasi dan potensi pemuda sehingga majunya organisasi kepemudaan dapat memainkan peran strategis sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.

Grafik 2.41 Perkembangan Jumlah Organisasi Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.145 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2020

No	Kabupaten	2019			
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%)
1	Mamuju	27	0	27	100
2	Majene	32	0	32	100
3	Polewali Mandar	17	0	17	100
4	Mamasa	12	0	12	100
5	Pasangkayu	7	0	7	100
6	Mamuju Tengah	5	0	5	100
Sulawesi Barat		100	0	100	100

Lanjutan tabel

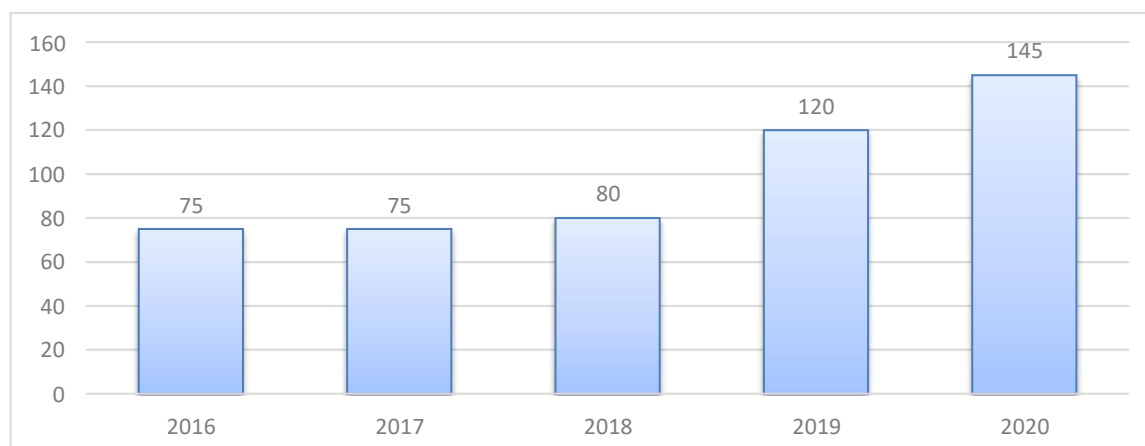
No	Kabupaten	2020			
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (%)
1	Mamuju	27	0	27	100
2	Majene	32	0	32	100
3	Polewali Mandar	17	0	17	100
4	Mamasa	12	0	12	100
5	Pasangkayu	7	0	7	100
6	Mamuju Tengah	77	2	79	97
Sulawesi Barat		172	2	174	98,85

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021

b. Jumlah Kader Kewirausahaan Pemuda

Jumlah Kader Kewirausahaan Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 sebesar 120 dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 145. Untuk meningkatkan kader kewirausahaan pemuda diperlukan Penanganan Program kewirausahaan secara berkelanjutan serta berbagai upaya seperti memberikan pendampingan, promosi serta bantuan permodalan kepada para kader.

Grafik 2.42 Perkembangan Kader Kewirausahaan Pemuda di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021

c. Cakupan Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Barat

Cakupan Pembinaan Olahraga Pada tabel di atas menunjukkan jumlah cabang olahraga yang dibina sejak Tahun 2016-2020 sebanyak 3 Cabang Olahraga dibandingkan dengan jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar sebanyak 33 Cabang Olahraga di Tahun 2020. Terdapat peningkatan cabang olahraga yang terdaftar hal ini dikarenakan bertambahnya cabang olahraga yang terdaftar pada KONI Sulawesi Barat sedangkan jumlah cabang yang dibina tidak mengalami penambahan karena adanya kebijakan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Tabel 2.146 Cakupan Pembinaan Olahraga di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Tahun	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Persentase (%)
2016	3	31	9,68
2017	3	32	9,38
2018	3	32	9,38
2019	3	33	9,09
2020	3	33	9,09

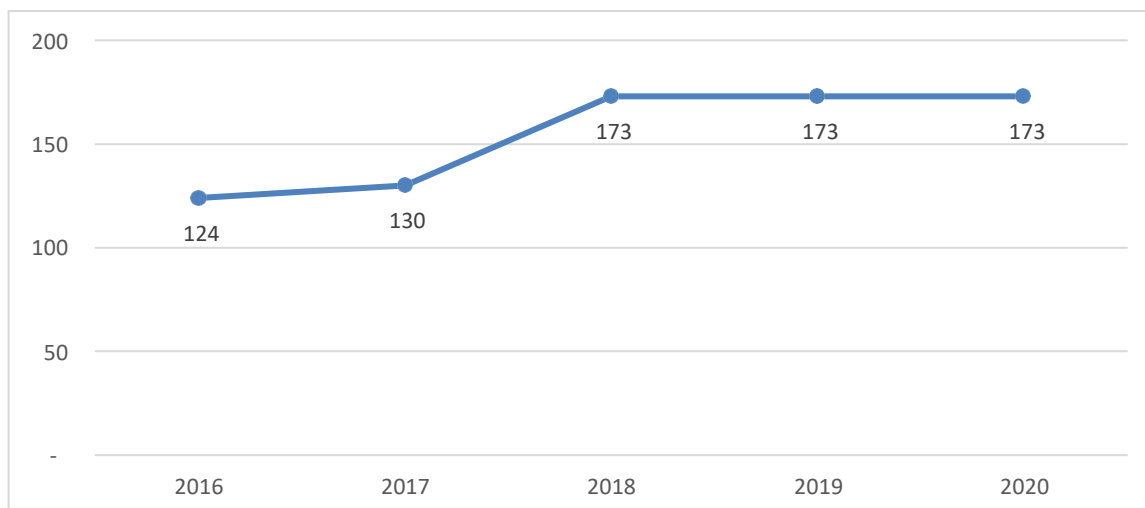
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021

Perkembangan klub dan sarana olahraga di Sulawesi Barat masih sangat minim, jumlah klub olahraga dari tahun 2012 hingga tahun 2018 sebesar 20 (dua puluh) klub olahraga dan tidak ada perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya pembibitan olahraga menjadi hal yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menekuni dunia olahraga di Sulawesi Barat. Pada tahun 2012 jumlah sarana olahraga sebesar 17 unit dan meningkat pada tahun 2013 sebesar 23 unit, sampai tahun 2018 menurun dan hanya 1 unit sarana olahraga melalui PPLP Sulawesi Barat yang terdiri dari 3 lapangan takraw, 1 lapangan pencak silat, serta sarana cabang olahraga dayung.

d. Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Di Provinsi Sulawesi Barat

Pada grafik di bawah ini menunjukkan jumlah pelatih bersertifikasi mengalami kenaikan pada Tahun 2016-2018 dan tidak terjadi perubahan sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan sertifikasi pelatih cabang olahraga sebagai akibat dari kondisi pandemi covid-19.

Grafik 2.43 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021

e. Cakupan Pembinaan Atlet Muda Di Provinsi Sulawesi Barat

Jumlah keseluruhan atlet yang dibina di Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Sulawesi Barat yaitu sebanyak 30 atlet. Minimnya pembinaan cabang olahraga unggulan mengakibatkan minimnya partisipasi Sulawesi Barat dalam Kejuaraan Nasional PPLP sesuai dengan cabang olahraga binaan. Hal ini tentunya mempengaruhi capaian prestasi keolahragaan pada tingkat nasional. Dalam pertandingan Kejurnas PPLP sejak tahun 2012-2016, untuk cabang olahraga takraw Sulawesi Barat telah meraih 2 emas; 3 perak; dan 4 Perunggu. Cabang Olahraga silat meraih 2 perunggu dan Cabang Olahraga Dayung telah meraih 4 emas; 1 perak; dan 4 perunggu. Untuk prestasi pada ajang olahraga nasional (PON) Sulawesi Barat hanya meraih 1 perunggu untuk cabang olahraga catur. Hal ini menunjukkan bahwa pembibitan dan regenerasi pada bidang keolahragaan masih sangat minim.

Jumlah atlet pelajar yang dibina tidak mengalami perubahan sejak Tahun 2015-2029. Hal ini dikarenakan jumlah kuota atlet pelajar merupakan kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yakni sebanyak 38 orang.

Tabel 2.147 Cakupan Pembinaan Atlet Muda Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Tahun	Jumlah atlet pelajar yang dibina (Orang)
2015	38
2016	38
2017	38
2018	38
2019	38

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021

f. Jumlah Atlet Berprestasi Dan Prestasi Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat

Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tertinggi pada Tahun 2017 yaitu Tingkat Nasional sebanyak 30 Orang dan Internasional sebanyak 2 Orang. sedangkan jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan terbanyak pada

Tahun 2017 yaitu 10 medali. Akan tetapi tidak ada atlet yang memenangi kejuaraan dan prestasi selama Tahun 2020. Hal ini diakibatkan tidak adanya atlet yang mengikuti kejuaraan karena kondisi pandemi covid-19.

Tabel 2.148 Jumlah Atlet Berprestasi Dan Prestasi Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Tahun	Jumlah Atlet Yang Memenangi Kejuaraan			Jumlah Prestasi Cabang Olahraga Yang Dimenangkan		
	Tingkat Nasional	Tingkat Internasional	Jumlah	Tingkat Nasional	Tingkat Internasional	Jumlah
2016	20	2	22	6	2	8
2017	30	2	32	8	2	10
2018	7	-	7	5	1	6
2019	13	-	13	2	-	2
2020	0	-	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.149 Jumlah Alumni Pertukaran Pemuda Antar Negara Dan Alumni Kapal Pemuda Nusantara Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020

Kabupaten	Jumlah Pemuda yang telah mengikuti Program Pertukaran Pemuda Antar Negara			Jumlah Pemuda yang telah mengikuti Kegiatan Kapal Pemuda Nusantara		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Mamuju	0	0	0	0	0	0
Majene	1	0	0	1	0	0
Polewali Mandar	2	2	0	2	2	0
Mamasa	0	0	0	0	0	0
Pasangkayu	0	0	0	0	0	0
Mamuju Tengah	0	0	0	0	0	0
Sulawesi Barat	3	2	0	3	2	0

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021

Pemuda Pelopor Sulawesi Barat yang mengikuti program kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibagi dalam 7 kategori, Sejak Tahun 2016-2019 kategori sosial budaya menjadi kategori yang paling sering dimenangkan yaitu sebanyak 4 orang lalun kategori pendidikan sebanyak 3 orang dan kategori pengelolaan sumber daya alam sebanyak 1 orang.

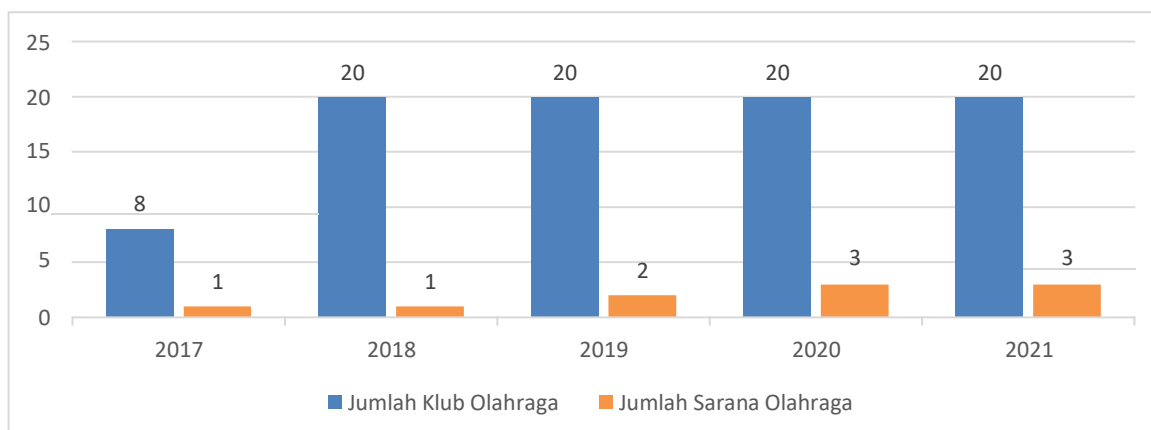
Tabel 2.150 Jumlah Kader Pemuda Pelopor Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Tahun	Pemuda Pelopor di Bidang							Jumlah
	Pendidikan	Agama	Sosial dan Budaya	Pengelolaan Sumber Daya Alam	Lingkungan dan Pariwisata	Pangan	Teknologi Tepat Guna	
2016	0	0	2	0	0	0	0	2
2017	1	0	3	0	0	0	0	4
2018	2	0	0	0	0	0	0	2
2019	3	0	4	1	0	0	0	8
2020	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2021

g. Sarana dan Prasarana Olahraga

Grafik 2.44 Jumlah Klub dan Sarana Olahraga Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat 2022

Sarana prasarana olahraga yang ada di Sulawesi Barat tergolong sangat minim. GOR dan Stadion belum tersedia bahkan untuk aset lapangan masih sebatas lapangan yang tersedia di PPLP Sulawesi Barat yaitu 2 (dua) lapangan takraw, 1 (satu) lapangan pencak silat, serta sarana cabang olahraga dayung (perahu kano) dan olahraga takraw.

2.4.20 Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Pengembangan statistik untuk menyediakan data/informasi yang reliable, up to date, dan relevan diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai salah satu bahan analisis pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat. Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tengah mengembangkan program Satu Data Provinsi Sulawesi Barat melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral perangkat daerah dalam aplikasi SAPOTA yang merupakan System dan Open Data yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas. Aplikasi Sapota ini akan diluncurkan di awal Tahun 2022.

Penyusunan data dan informasi pembangunan Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), perangkat daerah, instansi dan lembaga terkait di Provinsi Sulawesi Barat. Selain data yang bersifat numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang bersifat spasial antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah. Capaian kinerja sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala provinsi melalui penerbitan buku data sektoral Provinsi Sulawesi Barat.

Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi di provinsi Sulawesi Barat serta buku PDRB yang dituangkan dalam buku seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.151 Tersedianya Data Statistik yang Terintegrasi (Buku Daerah Dalam Angka) Tahun 2017–2020

No	Kabupaten	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Mamuju	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Majene	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Polewali Mandar	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Mamasa	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Mamuju Tengah	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Pasangkayu	Ada	Ada	Ada	Ada
	Provinsi Sulawesi Barat	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.152 Tersedianya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

No	Kabupaten	Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Ada/Tidak)			
		2017	2018	2019	2020
1	Mamuju	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Majene	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Polewali Mandar	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Mamasa	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Mamuju Tengah	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Pasangkayu	Ada	Ada	Ada	Ada
	Provinsi Sulawesi Barat	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.153 Jumlah Tabel Data Statistik Sektorial Yang Dipublikasikan Menurut OPD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019–2020

No	Kabupaten	Jumlah Tabel Data	
		2019	2020
1	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	0	1
2	Biro Hukum Sekretariat Daerah	0	1
3	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	0	1
4	Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	0	2
5	Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	0	4
6	Biro Umum, Perlengkapan dan Protokol Sekretariat Daerah	0	1
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	2
8	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	1	9
9	Badan Kepegawaian Daerah	1	7
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	3
11	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	3
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	3
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	2
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	0
15	Dinas Kesehatan	3	25
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	5
17	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	3
18	Dinas Sosial	4	3
19	Dinas Tenaga Kerja	2	3
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	7
21	Dinas Ketahanan Pangan	0	3
22	Dinas Lingkungan Hidup	0	9
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	33
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	6
25	Dinas Perhubungan	1	4
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	3	14

No	Kabupaten	Jumlah Tabel Data	
		2019	2020
27	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	3	11
28	Dinas Perkebunan	0	3
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0	3
30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0	5
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	2
32	Dinas Pariwisata	3	3
33	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	3	15
34	Dinas Kehutanan	1	6
35	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	2	6
36	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	0	3
37	Dinas Transmigrasi	0	3
38	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3	1
39	Inspektorat	0	5
40	Rumah Sakit Umum Daerah Prov. Sulawesi Barat	0	6
41	Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat	2	5
JUMLAH		37	231

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.154 Pengelolaan Data Statistik Sektoral Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	Jumlah Seluruh OPD	Jumlah OPD Yang Memiliki Data Sektoral	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2019	41	16	39.02	39.02
2020	41	40	97.56	97.56
2021	41	39	95.12	95.12

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.21 Urusan Persandian

Sesuai dengan UU 23/2014 Tentang pemerintahan daerah bahwa urusan persandian merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar.

Sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat berkembang. Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait dengan kuantitas dan kualitas personil, serta sistem dan sarana prasarana untuk menangkal dan menjaga keamanan sistem.

2.4.22 Urusan Kebudayaan

Pemerintah daerah memiliki peran yang cukup strategis dalam melestarikan dan mengembangkan nilai - nilai budaya di masyarakat. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi yang sedikit banyak akan menimbulkan efek negatif bagi perkembangan budaya lokal yang ada, pemerintah mempunyai kewajiban membuat kebijakan - kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian kebudayaan daerah. Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan potensi budaya, dengan keberanekaragaman suku di Sulawesi Barat menjadikan warna tersendiri bagi pengembangan budaya yang ada. Suku-suku tersebut terdiri dari Makassar (1,59 persen), Toraja (13,95 persen), Bugis (10,79 persen), Jawa (5,38 persen), Suku Mandar (49,15 persen), dan suku lainnya (19,15 persen).

Pentingnya pembangunan bidang kebudayaan sehingga pelaksanaannya termuat dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Urusan Kebudayaan menjadi urusan Wajib bagi pemerintah, baik itu Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Dalam Pembangunan bidang kebudayaan, Provinsi Sulawesi Barat memprioritaskan pada program pengembangan nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya pengenalan kebudayaan daerah kepada generasi muda diwujudkan melalui memberikan ruang bagi penampilan kebudayaan lokal dalam event - event baik yang berskala provinsi maupun nasional. Pemberian ruang bagi penampilan kebudayaan lokal pada event - event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun di tingkat nasional memberikan dampak positif bagi tumbuhnya sanggar- sanggar kesenian baru baik sanggar anak maupun remaja.

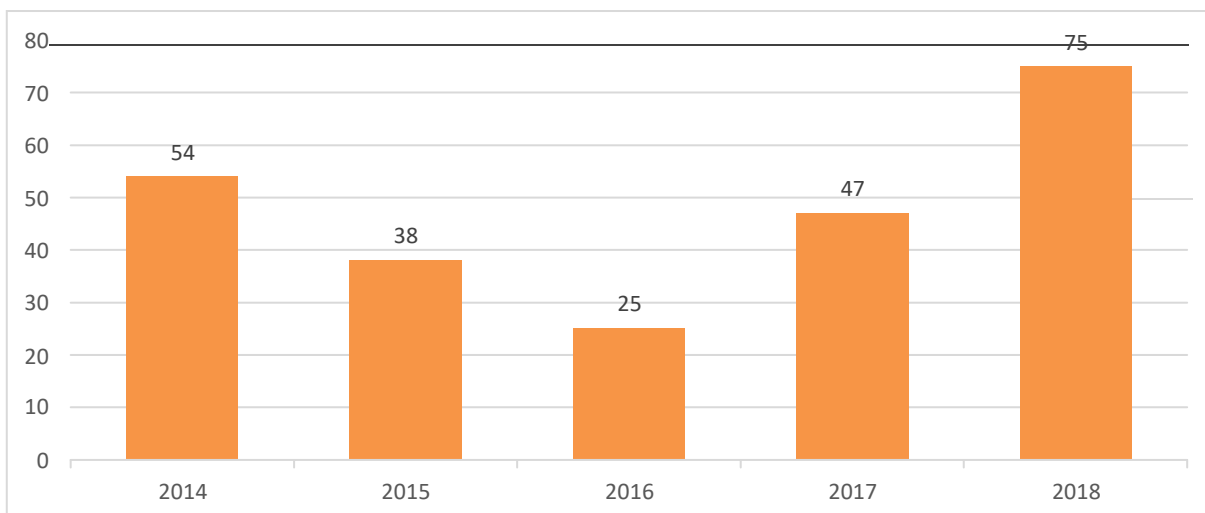
Tabel 2.155 Perkembangan Seni Budaya di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2018

Keterangan	Tahun	
	2017	2018
Jumlah grup kesenian (Grup)	176	185
Jumlah Gedung (Buah)	3	3
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	6	11
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya.	10	34
Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	75

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Pelestarian benda cagar budaya merupakan hal yang penting berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh benda cagar budaya dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya di Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 45 (empat puluh lima) hingga pada tahun 2015 sebesar 69 (enam puluh sembilan). Upaya pelestarian benda cagar budaya membutuhkan keterlibatan banyak pihak yaitu pemerintah dan yang terpenting adalah keterlibatan masyarakat.

Grafik 2.45 Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Provinsi Sulawesi Barat sangat kaya akan seni dan budaya, berbagai upaya telah dilakukan untuk melestarikan budaya tersebut, salah satunya dengan cara rutin melaksanakan Karnaval budaya tingkat Provinsi maupun mengikuti perlombaan seni dan budaya tingkat nasional. Sebagai wujud dari besarnya perhatian tersebut provinsi Sulawesi Barat telah beberapa kali berhasil menjuarai karnaval budaya tingkat nasional. Beberapa pertunjukan seni dan budaya yang ada di Sulawesi Barat telah masuk dalam daftar warisan budaya tak benda (WBTB) yang telah disertifikasi nasional oleh pemerintah pusat. Adapun berbagai warisan budaya tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.156 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Tersertifikasi Nasional di Provinsi Sulawesi Barat

TAHUN	NO. PENETAPAN	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN	KET
2011		SANDEQ KATINTING	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta	Ditetapkan
2013	201300046	SAIYYANG PATTU'DU	Seni Pertunjukan	Ditetapkan
2014	201400156	PASSAYANG-SAYANG	Tradisi dan Ekspresi Lisan	Ditetapkan
2014	201400157	SANDEQ	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam dan Semesta	Ditetapkan
2015	201500278	LOKA SATTAI /LOKA RO'DO /LOKA ANJOROI	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2015	201500279	KAIN TENUN SUKOMANDI	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2016	201600413	MANGARO	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2016	201600414	PERKAWINAN ADAT MANDAR	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2016	201600417	MASOSSOR MANURUNG /MANOSSOR	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan

TAHUN	NO. PENETAPAN	NAMA KARYA BUDAYA	DOMAIN	KET
		MANURUNG		
2016	201600415	KEKE/ PAKEKE	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2016	201600416	CALONG	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2017	201700568	LIPA SAQBE MANDAR	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan
2018	201800794	MAPPATAMMAQ AL-QURAN	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2018	201800795	MAULIDAN SALABOSE	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	Ditetapkan
2018	201800796	PUPU	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	Ditetapkan

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.23 Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam kehidupan terutama masyarakat pelajar, mahasiswa dan kelompok-kelompok tertentu untuk menunjang aktivitasnya. Dengan kata lain perpustakaan sudah memasyarakat, namun kita juga menyadari bahwa sebagian masyarakat yang lain belum mendapatkan fasilitas dan layanan perpustakaan sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan perpustakaan yang baik dan benar meliputi koleksi perpustakaan, pengolahan koleksi dan pustaka, pelayanan perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan yang ada. Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat di Sulawesi Barat sangat minim terutama pada Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Daerah di Kabupaten Mamasa dan Perpustakaan daerah di Kabupaten Majene, hal itu berdasarkan kurangnya jumlah pengunjung pada masing-masing perpustakaan tersebut. Salah satu penyebab kurangnya pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat saat ini adalah masih minimnya koleksi buku yang tersedia, terlebih lagi kurang update-nya koleksi buku-buku yang ada. Beberapa hal itu tentunya harus menjadi perhatian pemerintah sehingga upaya untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap pemanfaatan perpustakaan dapat dioptimalkan.

Tabel 2.157 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2020

No	Kabupaten	Tahun 2018		
		Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani
1	Majene	18.720	65	0
2	Polewali Mandar	65.341	5.445	350,53
3	Mamasa	2.191	8	220.012
4	Mamuju	24.892	103	120.862
5	Pasangkayu	4.007	334	7.980
6	Mamuju Tengah	500	42	143.272
Sulawesi Barat		115.651	5.997	492.477

Lanjutan Tabel di atas

No	Kabupaten	Tahun 2019		
		Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani
1	Majene	20.160	70	N/A
2	Polewali Mandar	76.103	317,09	10.702,00
3	Mamasa	2.340	9	189.997
4	Mamuju	117.604	490	0
5	Pasangkayu	2.863	239	7.980
6	Mamuju Tengah	1.616	135	143.272
Sulawesi Barat		220.686	1.259,67	351.951

Lanjutan Tabel di atas

No	Kabupaten	Tahun 2020		
		Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani
1	Majene	N/A	N/A	174
2	Polewali Mandar	3.528	14,70	478,53
3	Mamasa	2.200	9	163
4	Mamuju	0	0	279
5	Pasangkayu	103	9	189
6	Mamuju Tengah	261	22	135
Sulawesi Barat		6.092	54,30	1.419,22

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Jumlah kunjungan paling banyak di perpustakaan daerah Kabupaten Polewali Mandar yang mencapai 3.528 orang pada tahun 2020, namun jumlah tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan jumlah kunjungan pada tahun 2019 yang mencapai 76.103 orang, sedangkan di Kabupaten Mamuju tidak memiliki pengunjung perpustakaan selama tahun 2020.

Tabel 2.158 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2020

Kabupaten	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah			Jumlah Koleksi Jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Majene	4.725	-	-	9.750	-	-
Polewali Mandar	7.771	8.057	351	21.342	22.841	730
Mamasa	388	388	388	7.177	7.177	7.177
Mamuju	6.355	783	783	15.840	1.979	1.979
Pasangkayu	3.320	564	-	13.127	4.517	-
Mamuju Tengah	426	178	146	2.261	2.585	1.535
Sulawesi Barat	22.985	9.970	1.668	69.497	39.099	11.421

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah se-Sulawesi Barat pada tahun 2020 mencapai 1.668 judul buku dan jumlah koleksi buku sebanyak 11.421 buku, jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dari data tahun sebelumnya.

Jumlah judul buku paling banyak ketersediaannya di Kabupaten Mamuju yang mencapai 783 judul buku pada tahun 2020, sedangkan di Kabupaten Mamuju Tengah menjadi jumlah judul buku paling sedikit yakni 146 judul buku, sedangkan jumlah

koleksi buku yang tersedia paling banyak di Kabupaten Mamasa yang mencapai 7.177 buku dan di Kabupaten Polewali Mandar jumlah koleksi buku paling sedikit sebanyak 730 buku yang mengalami penurunan cukup signifikan dari data tahun 2019 yang mencapai 22.841 buku. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengadaan buku di tahun 2020 untuk tiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan dua Kabupaten yaitu Kabupaten Majene dan Kabupaten Pasangkayu sampai saat ini belum melaporkan data jumlah koleksi buku dan jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah tahun 2020.

Tabel 2.159 Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2020

No	Tahun	Jumlah Perpustakaan	Jumlah Penduduk	Rasio (x1000)
1	2018	2.805	1.355.554	2,07
2	2019	2.826	1.380.256	2,05
3	2020	1.807	1.419.229	1,27

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2021 dan BPS (diolah)

Jumlah perpustakaan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 mencapai 1.807 unit, sedangkan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 1.419.229 orang. Dengan demikian, menunjukkan rasio perpustakaan persatuan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 1,27.

Tabel 2.160 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Kabupaten	Pustakawan		Tenaga Teknis		Penilai	
	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat
Mamuju	1	-	37	-	-	-
Majene	-	-	235	-	-	-
Polewali Mandar	2	-	30	-	-	-
Mamasa	3	12	-	5	-	5
Pasangkayu	-	-	148	-	-	-
Mamuju Tengah	-	-	37	-	-	-
Sulawesi Barat	6	12	487	5	0	5

Lanjutan tabel di atas

Kabupaten	Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai			Persentase Bersertifikat (%)
	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	Jumlah	
Mamuju	38	-	38	100
Majene	235	-	235	100
Polewali Mandar	32	-	32	100
Mamasa	3	22	25	12
Pasangkayu	148	0	148	100
Mamuju Tengah	37	0	37	100
Sulawesi Barat	493	22	515	96

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwa pustakawan ialah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Berdasarkan data di atas, hanya Kabupaten Mamasa yang tingkat persentase tenaga perpustakaan yang bersertifikat baru mencapai 12 persen. Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar dan Mamasa sudah memiliki tenaga pustakawan yang bersertifikat sedangkan Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah hanya memiliki tenaga teknis bersertifikat. Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Mamasa memiliki jumlah pustakawan bersertifikat terbanyak yaitu 3 Pustakawan dan kabupaten Majene memiliki tenaga teknis bersertifikat terbanyak yaitu 235 di Provinsi Sulawesi Barat. Tetapi semua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki tim penilai yang bersertifikat.

2.4.24 Urusan Kearsipan

Kearsipan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pokok Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bahwa tujuan dari penatausahaan dan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggung jawaban tersebut bagi pemerintah. Hal ini seiring dengan perkembangan dunia, khususnya bidang informasi yang didorong dengan tuntutan masyarakat terhadap transparansi kinerja aparatur pemerintah sekaligus sebagai upaya peningkatan pengelolaan, penyelamatan bahan bukti penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang nyata, lengkap sekaligus benar adalah melalui penanganan arsip. Apalagi dalam konteks transparansi informasi publik, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang didalamnya menunjukkan esensi dasar sebuah arsip yang dimaknai tidak sekedar secara fisik namun arsip adalah informasi. Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan keselamatan dan keamanan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah dan sebagai bahan pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip merupakan bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai akuntabilitas kinerja, alat bukti hukum dan memori organisasi baik dalam bentuk media kertas maupun non kertas. Dengan demikian arsip mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi utamanya dalam melindungi hak kepentingan organisasi. Untuk itu arsip harus dikelola dan dilindungi secara khusus terutama dari kemungkinan musnah, hilang atau rusak baik karena bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Pengelolaan arsip yang terprogram dan mandiri diharapkan akan terwujud optimalisasi dalam penatausahaan, perlindungan, pengamanan, penyelamatan, pemeliharaan dan pemanfaatan arsip yang akuntabel, efektif dan efisien.

a. Tenaga Kearsipan

Penyelenggaraan kegiatan kearsipan agar dapat berjalan secara optimal, tentunya harus didukung oleh jumlah dan kualitas tenaga kearsipan yang memadai. Tenaga arsiparis di seluruh kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat masih sangat minim dan sangat terbatas, di mana dari seluruh kabupaten maupun Provinsi Sulawesi Barat, tenaga arsiparis hanya terdapat di Kabupaten Pasangkayu yaitu sebanyak 2 (dua) arsiparis dengan kategori terampil seperti yang dapat dilihat pada tabel Tabel Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Di Provinsi Sulawesi Barat di atas.

b. Sarana dan Prasarana Kearsipan

Pencipta arsip dan lembaga kearsipan perlu menyediakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan, hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 32, dan pasal 33. Sarana dan prasarana kearsipan di Provinsi Sulawesi Barat sangat memerlukan perhatian yang cukup besar. Setiap Lembaga Kearsipan akan membutuhkan Depot Arsip untuk menyimpan, menyelamatkan dan melestarikan arsip, begitu pula setiap Unit Kearsipan membutuhkan Sentral Arsip Inaktif (Records Center). Jika keduanya tidak ada atau tidak memadai, siklus kearsipan tidak akan berjalan seperti yang diharapkan.

Tabel 2.161 Jumlah Ketersediaan Dibandingkan Kebutuhan Depot Arsip pada Lembaga Kearsipan Daerah Tahun 2020

Lembaga Kearsipan	Jumlah Ketersediaan	Jumlah Kebutuhan	Tingkat Ketersediaan %
LKD Provinsi Sulawesi Barat	0	1	0
LKD Kabupaten Mamuju	0	1	0
LKD Kabupaten Majene	0	1	0
LKD Kabupaten Polewali Mandar	0	1	0
LKD Kabupaten Mamasa	0	1	0
LKD Kabupaten Pasangkayu	0	1	0
LKD Kabupaten Mamuju Tengah	0	1	0
Jumlah	0	7	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021

Berdasarkan data Tabel di atas menunjukkan bahwa disparitas ketersediaan Depot Arsip masih sangat tinggi, belum adanya lembaga kearsipan daerah yang memiliki Depot Arsip di Provinsi Sulawesi Barat. Demikian pula dengan ketersediaan *record center*, dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, *record center* hanya terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

Tabel 2.162 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Tahun	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	Jumlah PD	Persentase (%)	KET
2018	1	41	2,44	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2019	3	41	7,32	Biro Umum dan Perlengkapan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Badan Kepegawaian Daerah
2020	3	41	7,32	Biro Umum dan Perlengkapan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Badan Kepegawaian Daerah

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 5 OPD pada tahun 2019 yaitu Biro Umum dan Perlengkapan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, BKD, Dinas Perpustakaan dan kearsipan, Dinas Pariwisata. Tetapi diantara 5 OPD ini ada beberapa yang menerapkan arsip baku dan berdasarkan TND. Dinas Perpustakaan dan Dinas Pariwisata telah menerapkan keduanya yaitu menata penyimpanan arsip dengan baku dan juga telah menerapkan TND. Sedangkan OPD yang lain ada beberapa bidang yang menerapkan TND dan ada yang hanya menerapkan penyimpanan arsip secara baku. Tahun 2020 hanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menerapkan arsip baku dan TND karena bidang kearsipan belum mengadakan audit jumlah OPD yang menerapkan arsip baku disebabkan kegiatan mengaudit untuk Tahun 2020 ditiadakan.

Tabel 2.163 Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2020

No	Tahun	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
1	2018	1
2	2019	2
3	2020	0

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021

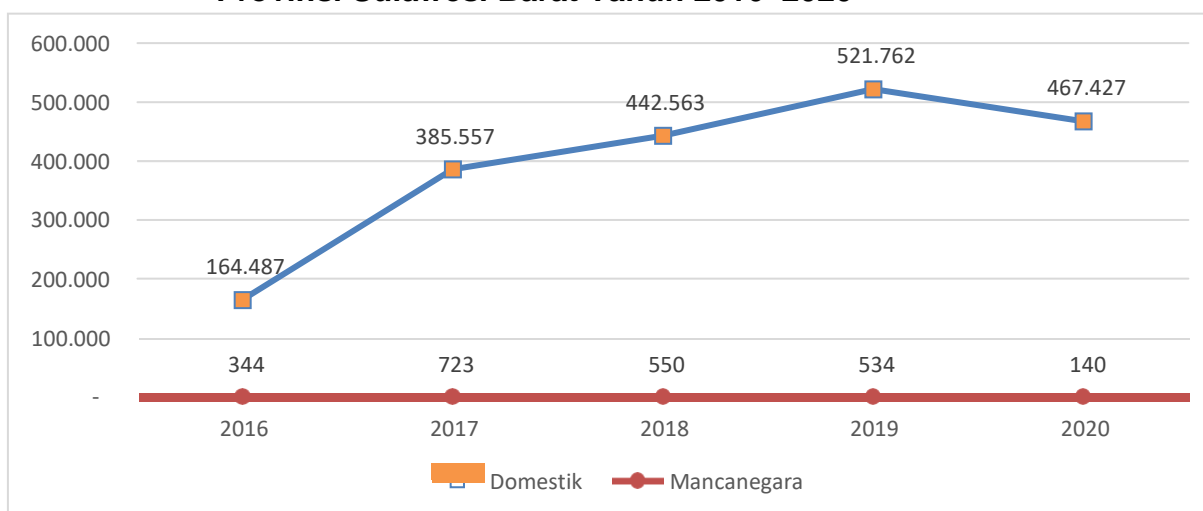
Kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 belum dilaksanakan dikarenakan anggaran pelaksanaan kegiatan dikenakan refocusing akibat pandemi. Sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 sudah dilaksanakan satu kali kegiatan dan tahun 2019 dilaksanakan dua kali kegiatan.

2.4.25 Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat dikembangkan di Sulawesi Barat. Disamping karena potensi pariwisata yang besar, pariwisata juga menjadi salah satu penghasil pendapatan daerah. Di samping sebagai mesin penggerak ekonomi, pariwisata adalah wahana yang menarik untuk mengurangi

angka pengangguran terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan atau lokasi yang menjadi tujuan wisatawan.

Grafik 2.46 Perkembangan Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat 2021

Jumlah wisatawan Domestik maupun Mancanegara mengalami perkembangan setiap tahunnya pada tahun 2016, jumlah wisatawan domestik sebesar 164.487 meningkat hingga tahun 2019 sebesar 521.762 orang meskipun turun di tahun 2020 menjadi 467.427 orang. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara mengalami kenaikan yang fluktuatif dari hanya sebesar 344 orang pada tahun 2016 menjadi 534 orang di tahun 2019 kemudian turun drastis menjadi 140 orang di tahun 2020. Turunnya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara di tahun 2020 disebabkan diterapkannya pembatasan pergerakan masyarakat dalam melakukan kegiatan karena pandemi yang terjadi di seluruh wilayah.

Tabel 2.164 Jumlah Hotel, Kamar Tempat Tidur dan Tingkat Penghuni Kamar di Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Uraian	Jumlah Hotel	Tingkat Penghuni Kamar	
		Hotel Bintang	Hotel Non Bintang
2016	147	39,57	28,65
2017	155	28,64	13,27
2018	150	36,70	17,85
2019	149	46,79	17,72
2020	163	22,78	13,19

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Keberadaan objek-objek wisata di Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh ketersediaan hotel atau penginapan dan rumah makan untuk menarik perhatian para wisatawan yang berkunjung ke Sulawesi Barat. Sementara sarana pendukung pariwisata adalah ketersediaan hotel atau penginapan yang cukup menggeliat di Sulawesi Barat. Pada tahun 2016, jumlah hotel/penginapan di Sulawesi Barat sekitar 147 unit menjadi 163 unit pada tahun 2020. Hal itu menjadi indikator bahwa pertumbuhan dunia pariwisata di Sulawesi Barat mengalami kenaikan.

Tabel 2.165 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2016-2019

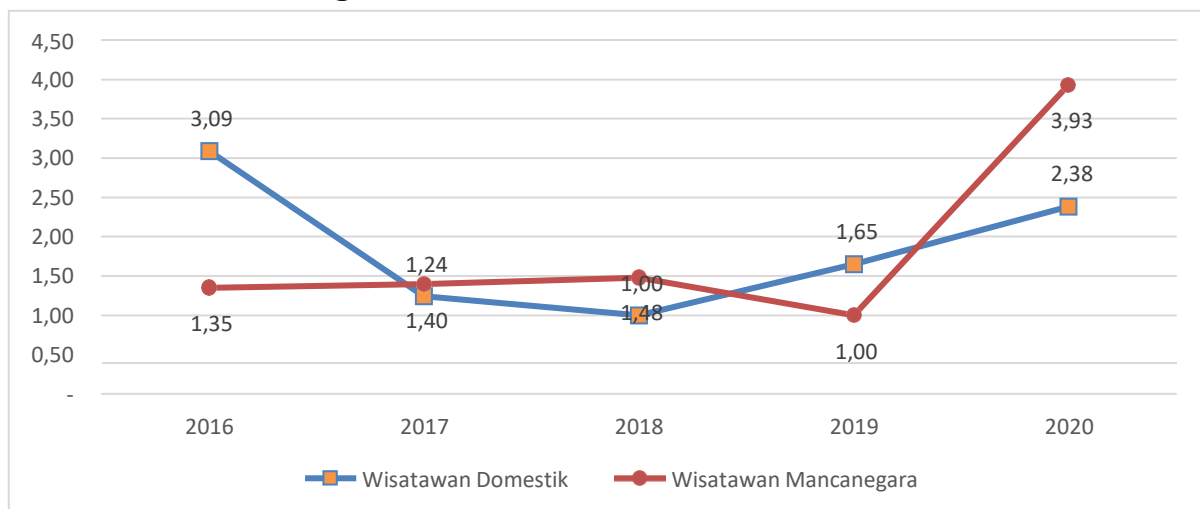
Kabupaten	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Majene	13	17	45	47
Polewali Mandar	37	40	51	64
Mamasa	27	28	33	35
Mamuju	171	171	62	62
Pasangkayu	53	53	25	33
Mamuju Tengah	60	60	33	35
Sulawesi Barat/Total	361	369	249	276

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Potensi wisata di Provinsi Sulawesi Barat dapat dibagi ke dalam beberapa kategori antara lain; Wisata Alam, Wisata Arkeologi, Wisata Kebudayaan, Wisata Kesenian, dan beberapa wisata yang lain. Lokasi wisata tersebut tersebar ke semua kabupaten di Sulawesi Barat. Di wilayah pegunungan tak kalah menariknya, seperti adat dan budaya suku pribumi Kabupaten Mamasa, telah menjadikan wilayah pegunungan ini sebagai daerah tujuan wisata bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

Selain meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, pemerintah daerah juga gencar melakukan promosi pariwisata melalui kegiatan-kegiatan pertunjukan. Salah satu kegiatan rutin Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diharapkan dapat menarik wisatawan adalah diselenggarakannya *event Sandeq Race* dari Mamuju ke Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang 2 tahun belakangan jalurnya dialihkan dari Kabupaten Polewali Mandar ke Kabupaten Mamuju.

Grafik 2.47 Perkembangan Rata-rata Lama menginap Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Barat masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimiliki. Wisatawan asing

maupun domestik yang berkunjung ke Sulawesi Barat belum begitu besar. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Sulawesi Barat meningkat setiap tahunnya dan peningkatan jumlah kunjungan tersebut sangat signifikan. kunjungan wisata asing mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebanyak 723 orang pada tahun 2017 menurun sebesar 543 orang pada tahun 2019 dengan rata-rata lama menginap hanya sehari. Kurang berkembangnya pariwisata di Sulawesi Barat karena belum adanya pengembangan kepariwisataan yang ditata dengan baik. adapun Kendala pengembangan pariwisata meliputi akses seperti jalan menuju objek wisata serta sarana dan fasilitas untuk para wisatawan yang berkunjung.

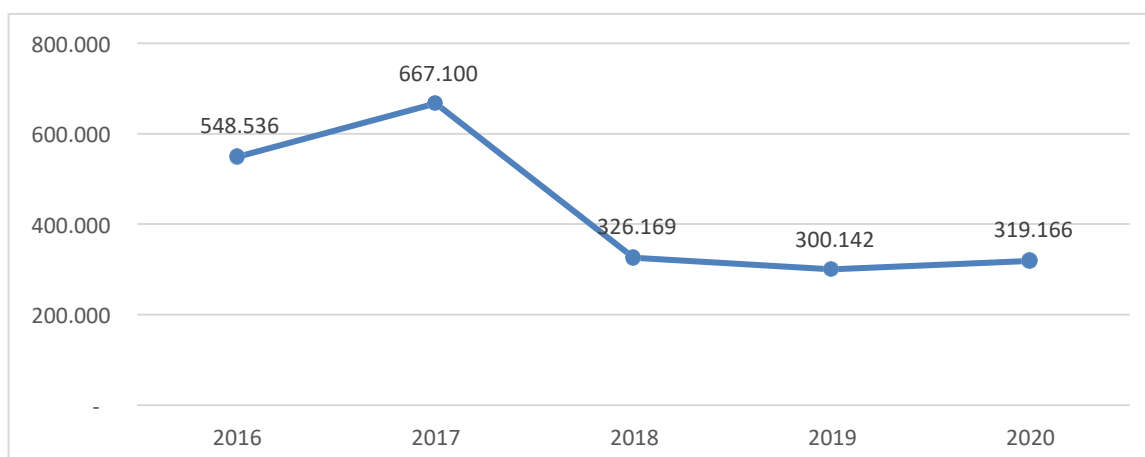
2.4.26 Urusan Pertanian

Provinsi Sulawesi Barat berada pada iklim tropis, di mana kondisi ini menjadikan Sulawesi Barat sangat potensial terhadap pengembangan sektor pertanian. Sektor pertanian juga merupakan tulang punggung perekonomian di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat merupakan daerah dengan basis aktivitas perekonomian pada sektor agraris. Hal ini terlihat dari nilai tambah dari aktivitas sektor pertanian yang sangat berkontribusi terhadap nilai PDRB Sulawesi Barat. Dominasi kategori pertanian selain dari penciptaan nilai tambah, juga nampak dari penyerapan tenaga kerja yang dominan pada kategori pertanian. Pada tahun 2019, tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian mencapai 337,77 ribu orang atau sekitar 50,19 persen penduduk angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Olehnya itu, keberadaan kategori pertanian di Sulawesi Barat sebagai penggerak roda perekonomian harus senantiasa tetap mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak-pihak terkait agar ke depannya kategori ini tidak sebatas pada penciptaan nilai tambah saja.

a. Tanaman Pangan

Beberapa tahun terakhir produksi tanaman pangan Provinsi Sulawesi Barat terus menurun. Produksi padi khususnya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terus mengalami penurunan akan tetapi mengalami penurunan kurang lebih sebesar 9 persen di tahun 2017 ke tahun 2020 seperti yang terlihat pada grafik di bawah.

Grafik 2.48 Perkembangan Produksi Padi di Sulawesi Barat (Ton) Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

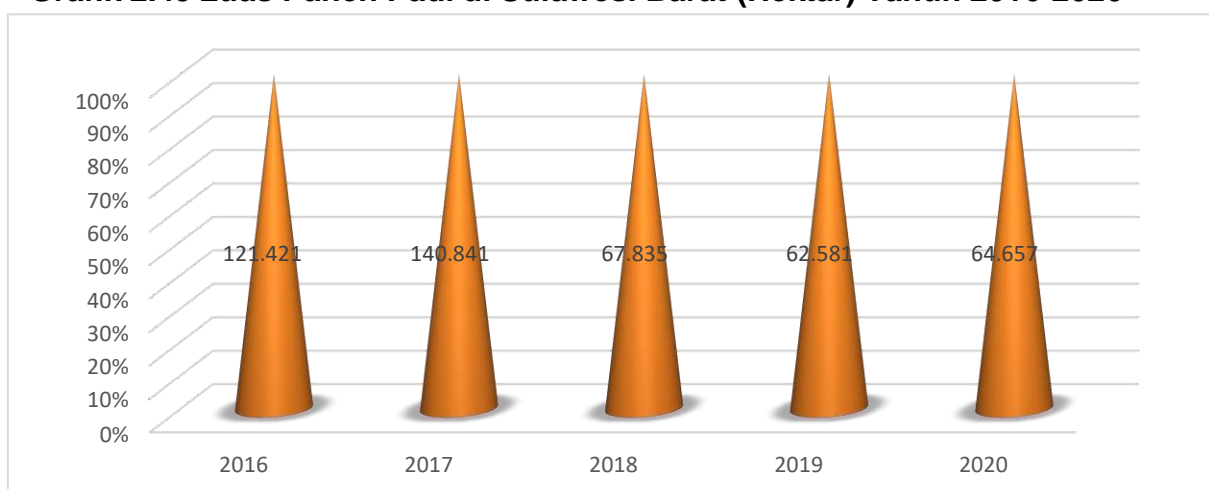
Selain padi, perkembangan beberapa sub sektor tanaman pangan lainnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun ada juga yang mengalami fluktuasi pada beberapa komoditi seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.166 Produksi dan Pengembangan Subsektor Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

Komoditas	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Padi					
Luas Panen (ha)	121.421,00	140.81,00	67.835.00	62.581.47	64.656.69
Produksi (ton)	548.536,00	667.100,00	326.169.00	300.142.22	319.165.97
Produktivitas (ku/ha)	45,26	47,37	42.86	45.69	46.07
2. Jagung					
Luas Panen (ha)	51.346,00	154.173,50	126.695.20	136.166.00	94.396,90
Produksi (ton)	284.213,00	724.222,00	605.163,23	624.811.37	461.254.11
Produktivitas (ku/ha)	55,35	46,97	264.75	264.75	264.75
3. Ubi Kayu					
Luas Panen (ha)	1.161,00	1.269,50	821.50	816.00	1.121.00
Produksi (ton)	25.700,00	34.662,00	22.887,65	25.416.03	32.885.62
Produktivitas (ku/ha)	221,36	273,04	1.748.44	1.748.44	1.748.44
4. Ubi Jalar					
Luas Panen (ha)	566,00	467,00	376.50	405.40	394.70
Produksi (ton)	6.751,00	5.483,00	5.755.04	6.179.71	7.148.36
Produktivitas (ku/ha)	119,38	117,53	891.63	891.63	891.63
5. Kacang Tanah					
Luas Panen (ha)	353,00	342,50	232.40	251.40	201.50
Produksi (ton)	433,00	385,00	391,61	402.64	419.98
Produktivitas (ku/ha)	12,27	11,24	91.75	91.75	91.75
6. Kedelai					
Luas Panen (ha)	3.802,00	3.103,20	10.814.60	16.344.30	3.658.90
Produksi (ton)	6.480,00	4.853,00	13.361.48	20.610.32	4.470.96
Produktivitas (ku/ha)	17,04	15,64	78.01	78.01	78.01
7. Kacang Hijau					
Luas Panen (ha)	253.00	523.00	304.80.	255.50	465.70
Produksi (ton)	342.00	701.00	518.92	488.82	954.21
Produktivitas (ku/ha)	67.56	68.12	87.85	87.85	87.85

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Grafik 2.49 Luas Panen Padi di Sulawesi Barat (Hektar) Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2017-2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya cakupan luas panen

padi di Sulawesi Barat terus mengalami kenaikan, hal ini sejalan dengan produksi padi yang terus mengalami kenaikan terutama dari tahun 2018. Hal berbeda terjadi pada tahun 2019, di mana luas area panen padi pada tahun tersebut justru mengalami penurunan diikuti dengan turunnya produksi padi di Sulawesi Barat yang sangat signifikan. Salah satu faktor yang diharapkan menjadi pemicu hal tersebut adalah adanya Modernisasi di sektor pertanian, di mana produksi padi tidak lagi bergantung pada luasan lahan tetapi lebih pada penerapan teknologi terkini mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, sampai pada proses panen. Modernisasi ini diharapkan dapat terus meningkatkan nilai tukar petani dan pada akhirnya akan berdampak pada naiknya tingkat kesejahteraan petani di Sulawesi Barat. Namun yang perlu diwaspadai adalah maraknya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian ke lahan komoditas perkebunan seperti sawit, lahan untuk peruntukan perumahan ataupun peruntukan lainnya.

b. Peternakan

Komoditas peternakan Sulawesi Barat cukup beragam mulai dari ternak kecil, besar, unggas dan lainnya. Ternak besar masih menjadi salah satu komoditas yang banyak diusahakan oleh petani di Sulawesi Barat. Sapi Potong adalah salah satu yang paling besar jumlahnya yakni mencapai 95.287 ekor, populasi kambing sekitar 193.944 ekor dan unggas yang umumnya adalah ayam kampung sekitar 4.575.252 ekor.

Tabel 2.167 Populasi dan Produksi Peternakan se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2021

Komoditas	2017	2018	2019	2020	2021
1. Populasi (ekor)					
Sapi Potong	94 015	95 287	96 639	113 380	115 199
Sapi Perah	-	-	-	-	-
Kerbau	7 978	10 167	10 370	8 948	9 412
Kambing	190 708	193 944	194 772	196 680	197 162
Kuda	2 432	1 560	1 578	1 367	1 425
Babi	134 566	134 931	137 106	169 308	174 757
Ayam Ras	1 936 130	2 628 919	2 656 590	2 620 077	2 703 572
Ayam Kampung	4 487 632	4 575 252	4 856 281	4 986 648	4 994 718
Itik	384 671	390 025	396 484	361 543	391 201
2. Produksi (kg)					
Daging Sapi Potong	2 854 429	2 266 145	2 287 824	1 704 881	1 748 112
Daging Kerbau	-	150 604	205 834	201 942	205 875
Daging Kambing	210 662	212 741	167 780	160 453	158 859
Daging Kuda	-	-	-	-	-
Daging Babi	709 775	716 899	682 541	917 065	805 606
Daging Ayam Ras Pedaging	1 755 973	2 384 298	2 733 481	2 160 337	2 192 652
Daging Ayam Kampung	4 837 559	4 932 122	5 380 048	5 75 604	5 384 303
Daging Itik	244 245	245 671	249 742	227 539	246 191

Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2022

b. Perkebunan

Potensi lahan yang cukup baik sangat menunjang usaha perkebunan di Sulawesi Barat, terdapat beberapa komoditi perkebunan yang ada dan sangat potensial. Adapun produksi dan Produktivitas berbagai tanaman perkebunan seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.168 Produksi Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (Ton)

Kabupaten	Kelapa Dalam	Kelapa Hibrida	Kelapa sawit (Rakyat)	Kopi Robusta	Kopi Arabika	Kakao
Majene	8.113,00	509,85	-	177,00	42,00	8.554,93
Polewali Mandar	17.493,17	2.586,17	-	699,18	123,14	36.451,62
Mamasa	9,00	-	-	1.351,00	1.852,00	7.224,00
Mamuju	2.592,26	361,35	12 568,00	100,32	35,52	11.653,40
Pasangkayu	4.381,00	-	142.320,00	1,53	0,35	5.688,94
Mamuju Tengah	895,50	-	34.700,00	14,00	-	6.703,00
Sulawesi Barat	33.483,93	3.457,37	189.588,00	2.343,03	2.053,01	76.275,89

Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.169 Produktivitas Tanaman Perkebunan menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (ton/ha)

Kabupaten	Kelapa (dlm)	Kelapa Hibrida	Kelapa sawit (Rakyat)	Kopi Robusta	Kopi Arabika	Kakao
Majene	1.193,09	1.143,16	-	501,42	700,00	905,86
Polewali Mandar	1.123,81	1.512,24	-	782,95	866,57	876,05
Mamasa	600,00	-	-	619,72	762,45	664,09
Mamuju	956,43	1.231,76	1.859,00	840,76	248,76	671,91
Pasangkayu	977,79	-	3.784,00	765,00	350,00	726,32
Mamuju Tengah	1.013,01	-	3.200,00	608,70	-	703,36
Sulawesi Barat	1.099,43	1.411,45	3.433,57	656,25	739,85	789,30

Sumber: Dinas TPHP Provinsi Sulawesi Barat 2021

Salah satu komoditi potensial perkebunan yang menjadi andalan di Sulawesi Barat adalah kelapa sawit. Pada tahun 2020, produksi Kelapa Sawit Sulawesi Barat mencapai 189.588 ton. Jika dilihat menurut kabupaten, nampak jika Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah menjadi sentra dari komoditi ini dengan produksi masing-masing mencapai 142.320 ton dan 34.700 ton. Produksi di kedua kabupaten ini hampir mencapai seluruh produksi di Sulawesi Barat. Namun secara statistik terjadi penurunan produksi Kelapa Sawit dari tahun sebelumnya, yang berakibat menurunnya harga Kelapa Sawit, sehingga dibutuhkan kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menstabilkan harga.

Komoditi lain yang memiliki produksi yang cukup banyak adalah Kakao. Pada tahun 2020, produksi kakao di Sulawesi Barat mencapai 76.275 ton. Persebaran kakao paling banyak terdapat di Kabupaten Polewali Mandar hingga 36.451 ton, kemudian diikuti oleh Kabupaten Mamuju yang sebesar 11.653 ton. Kakao yang cukup potensial di Sulawesi Barat memberikan peluang untuk pengembangan industri hasil olahan Kakao. Berbagai komoditi di atas tentunya ditunjang oleh luas lahan yang cukup dan pengembangannya masih dapat

dilakukan. Luas lahan masing-masing komoditi tersebut seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.170 Luas Lahan Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten dan Jenis Tanaman Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (Ha)

Kabupaten	Kelapa	Kelapa sawit	Kopi	Kakao
Majene	7 246	-	413	8 984
Polewali Mandar	17 273	-	1 035	37 109
Mamasa	15	-	4 275	10 949
Mamuju	3 068	5 765	262	15 764
Pasangkayu	4 501	43 925	3	7 732
Mamuju Tengah	995	29 549	23	9 325
Sulawesi Barat	33 101	79 239	6 011	89 863

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Ket: Masih menggunakan data tahun 2019

c. Hortikultura

Pengembangan tanaman hortikultura di Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi yang sangat besar, karena didukung kondisi alam di sebagian wilayah di Sulawesi Barat sangat cocok untuk pengembangannya. Dari tahun 2017 - 2018, beberapa komoditas tanaman hortikultura mengalami peningkatan produksi, sebagaimana pada tabel berikut.

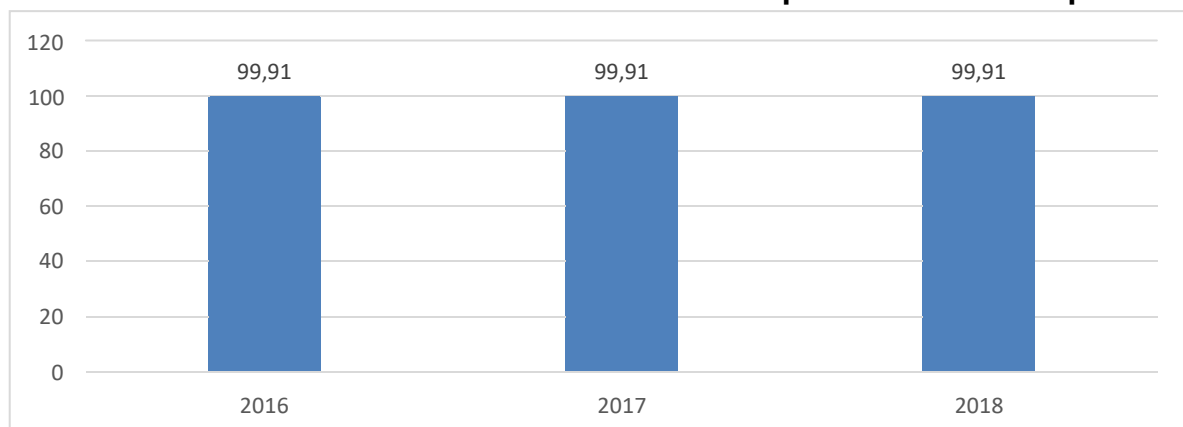
Tabel 2.171 Komoditas Tanaman Sayuran di Sulawesi Barat Tahun 2018-2020

Kabupaten	2018		2019		2020	
	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Majene:						
Bawang Merah	110	3 575	56	2 701	73	2 237
Cabai Besar	57	1 320	49	814	50	518
Cabai Rawit	155	4 116	144	3 673	107	1 219
Kentang	-	-	-	-	-	-
Petsai	5	13	7	28	-	-
Kubis			-	-	2	7
Tomat	56	1 959	53	682	71	521
Bawang Putih	-	-	-	-	151	7 410
Kangkung	56	793	41	647	42	244
Kacang Panjang	68	731	40	373	51	350
Polewali Mandar						
Bawang Merah	44	1 319	43	1 234	97	3 130
Cabai Besar	217	3 146	137	3 076	150	2 138
Cabai Rawit	159	2 363	91	2 252	97	1 557
Kentang	-	-	-	-	-	-
Petsai	53	2 079	35	580	-	-
Kubis	-	-	-	-	-	-
Tomat	83	1 678	72	1 525	76	1 273
Bawang Putih	-	-	-	-	151	55
Kangkung	83	3 379	115	2 053	97	1 540
Kacang Panjang	77	1 416	105	1 411	133	1 721
Mamasa						
Bawang Merah	6	125	3	64	16	450
Cabai Besar	9	107	1	100	2	20
Cabai Rawit	30	352	21	237	39	376
Kentang	29	3 310	30	2 888	24	2 580
Petsai	65	753	48	568	-	-

Kabupaten	2018		2019		2020	
	Luas panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Kubis			-		2	15
Tomat	33	230	29	854	42	718
Bawang Putih			-		33	1 342
Kangkung	33	487	28	592	68	1 057
Kacang Panjang	30	304	17	373	37	585
Mamuju						
Bawang Merah	6	360	22	880	7	14
Cabai Besar	126	6 592	145	7 324	265	857
Cabai Rawit	169	7 738	203	9 778	277	880
Kentang	-	-	-	-	-	-
Petsai	44	2 090	81	3 157	-	-
Kubis	-	-	-	-	-	-
Tomat	64	5 810	113	7 567	287	837
Bawang Putih	-	-	-	-	-	-
Kangkung	64	7 205	211	6 035	292	851
Kacang Panjang	116	2 500	152	5 421	261	806
Pasangkayu						
Bawang Merah	2	63	4	160	2	86
Cabai Besar	71	9 131	90	8 878	77	6 137
Cabai Rawit	82	10 306	87	9 072	77	5 971
Kentang	-	-	-	-	-	-
Petsai	1	47	1	48	-	-
Kubis	-	-	-	-	-	-
Tomat	25	2 819	33	4 000	24	1 671
Bawang Putih			-		-	-
Kangkung	25	279	51	608	39	552
Kacang Panjang	31	3 632	64	6 736	59	4 122
Mamuju Tengah						
Bawang Merah	1	2	1	27	7	184
Cabai Besar	108	2 368	58	1 788	39	1 315
Cabai Rawit	91	1 706	54	1 618	58	2 044
Kentang	-	-	-	-	-	-
Petsai	58	594	37	411	-	-
Kubis	-	-	-	-	-	-
Tomat	73	1 286	62	1 989	40	1 468
Bawang Putih	-	-	-	-	-	-
Kangkung	73	1 129	69	1 059	68	1 349
Kacang Panjang	93	1 843	74	2 266	62	2 157

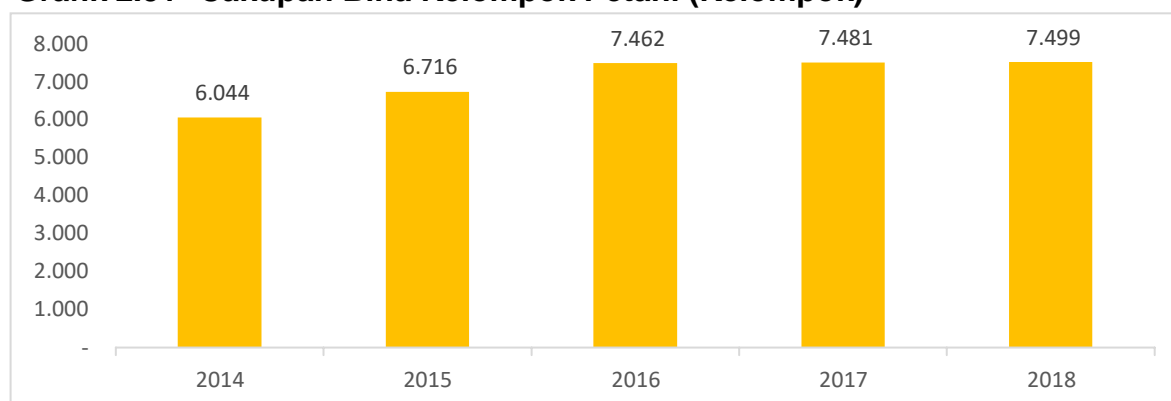
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Grafik 2.50 Persentase Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB



Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Sulbar 2019

Grafik 2.51 Cakupan Bina Kelompok Petani (Kelompok)



Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Prov. Sulbar 2019

2.4.27 Urusan Kehutanan

Wilayah Sulawesi Barat sebagian besar masih berupa kawasan hutan. Kondisi ini memberi gambaran bahwa, Provinsi Sulawesi Barat memiliki potensi hutan yang cukup melimpah. Pada tahun 2020, luas kawasan hutan di Sulawesi Barat sekitar 1.069.989 ha.

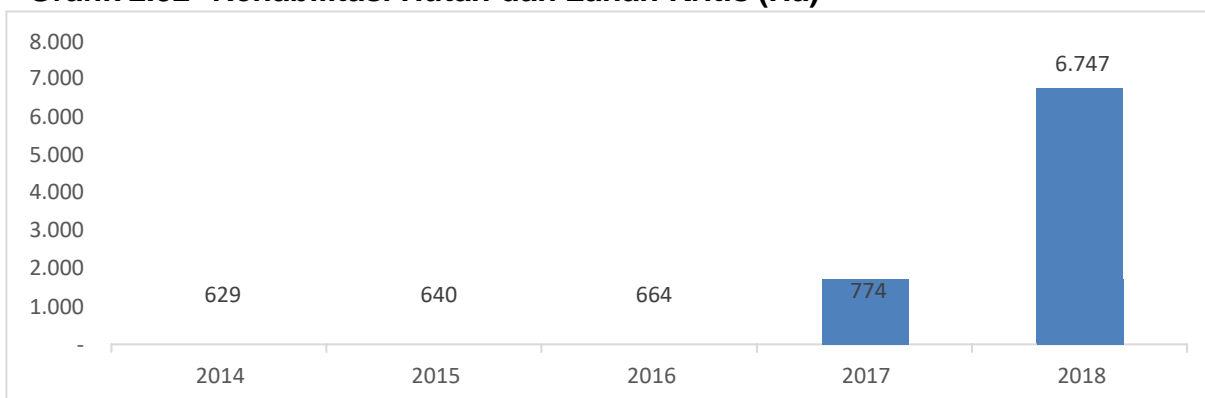
Kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat 60 persennya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan Suaka Alam, sementara sisanya merupakan kawasan hutan produksi dengan jenis produksi kayu hutan yang dibagi ke dalam dua jenis yaitu kayu bulat dengan kayu gergajian. Pembagian luas kawasan hutan serta produksinya pada tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel 2.172 Luas Kawasan Hutan (hektar) Menurut Fungsi di Sulawesi Barat Tahun 2016-2020

Kabupaten	Kawasan Suaka Alam	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi	Hutan Produksi Konversi	Jumlah
Majene	0	45.052	7.627	0	0	52.679
Polewali Mandar	986	65.814	23.036	0	0	89.836
Mamasa	63.261	90.151	49.539	0	368	203.319
Mamuju	71.883	128.691	85.242	41.027	10.851	337.694
Pasangkayu	612	99.530	54.603	2.264	8.988	165.997
Mamuju Tengah	53.604	26.795	111.202	27.639	1.224	220.464
2020	190.346	456.033	331.249	70.930	21.431	1.069.989
2019	190.346	456.033	331.249	70.930	21.431	1.069.989
2018	190.346	456.033	331.249	70.930	21.431	1.069.989
2017	190.346	456.033	331.249	70.930	21.431	1.069.989
2016	190.256	456.108	331.154	70.932	21.431	1.069.881

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021

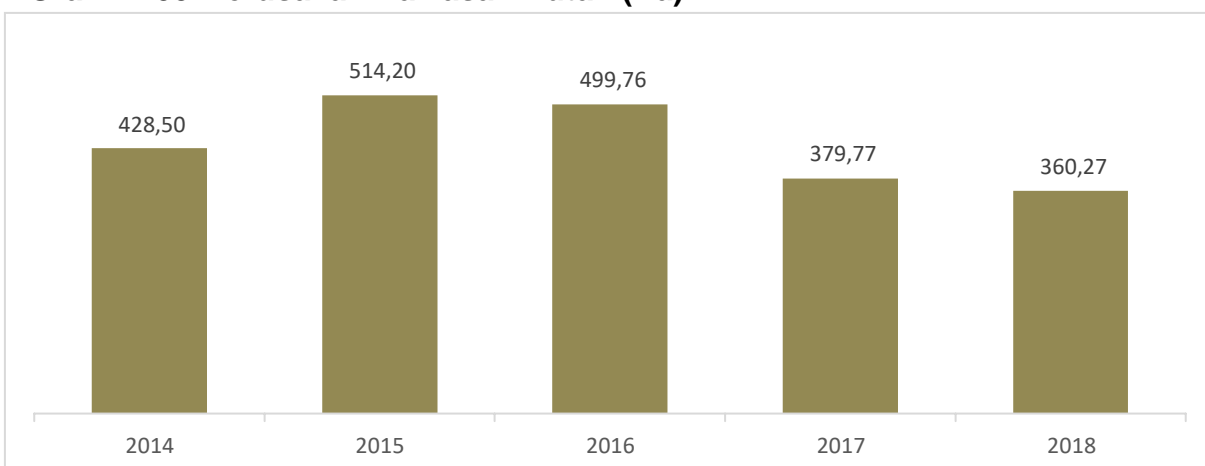
Grafik 2.52 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha)



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019

Jumlah Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2014 sebanyak 629 Ha meningkat menjadi 6.747 Ha pada tahun 2018.

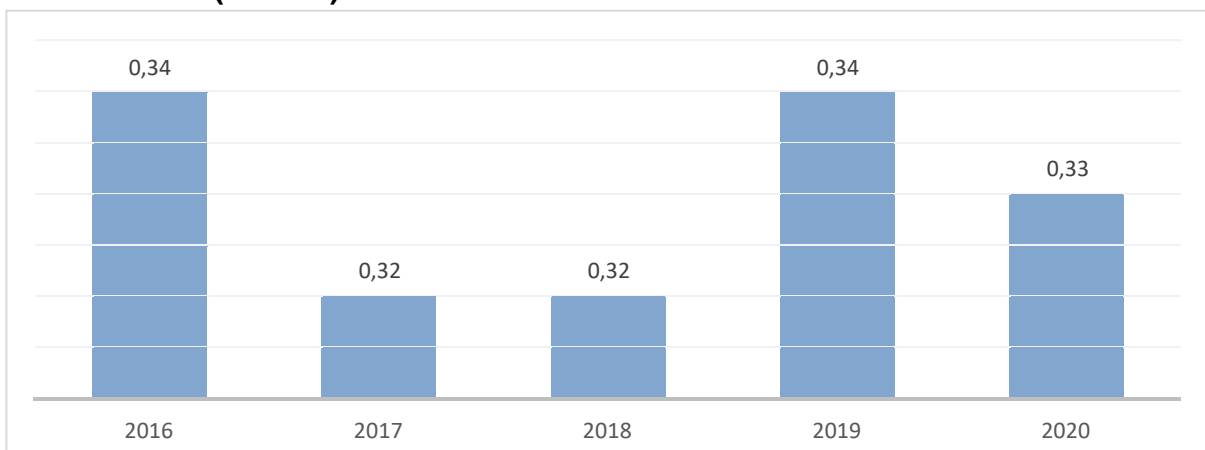
Grafik 2.53 Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Jumlah Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2014 sebanyak 428,50 Ha menurun menjadi 360,27 Ha pada tahun 2018.

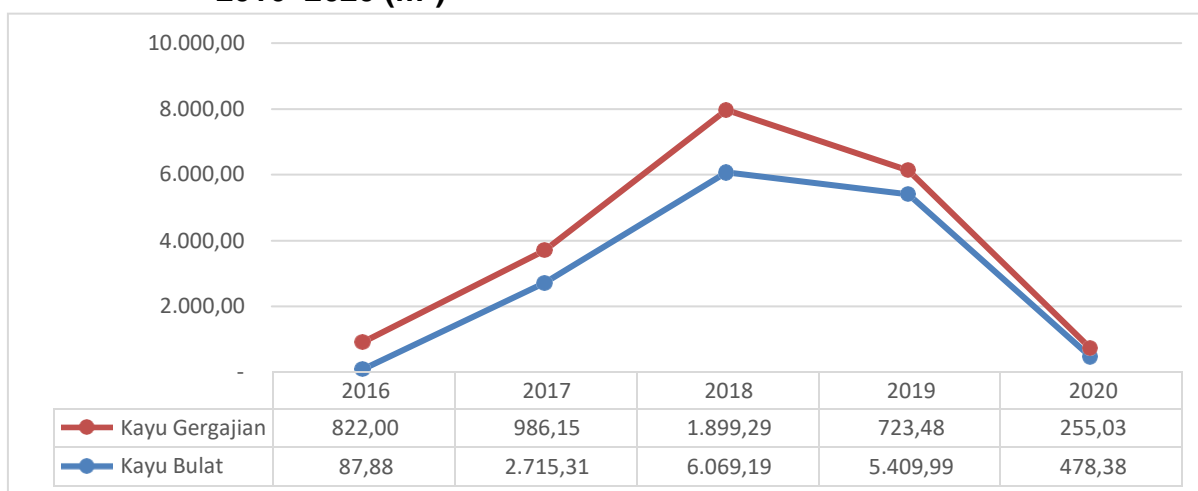
Grafik 2.54 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Tahun 2016–2020 (Persen)



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021

Kontribusi sektor kehutanan Provinsi Sulawesi Barat terhadap PDRB dari tahun 2016 sebesar 0,34 persen menurun menjadi 0,33 persen pada tahun 2020.

Grafik 2.55 Produksi Kayu Hutan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 (m³)



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) hingga saat ini setidaknya telah membentuk 13 unit KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dalam rangka mewujudkan pencapaian pengelolaan serta pengawasan kawasan hutan menjadi lebih efektif. Tujuan pengelolaan hutan, baik mempertahankan hutan alam yang tersisa maupun membangun hutan tanaman baru dan diharapkan berhasil, diperlukan prioritas kebijakan antara lain : (1) Penyelesaian masalah kawasan hutan yang telah terjadi dan menghindari terjadinya masalah baru di masa depan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan hutan konservasi dan hutan lindung, (2) Mempermudah akses bagi penerima manfaat atau dapat menekan terjadinya ekonomi biaya tinggi serta terdapat landasan kuat untuk mengalokasikan manfaat hutan secara adil (3) Menyediakan infrastruktur sosial maupun ekonomi bagi penguatan kelembagaan lokal terutama yang mendapat akses pemanfaatan sumber daya hutan, peningkatan efisiensi ekonomi maupun pengembangan nilai tambah hasil hutan.

Ketiga hal tersebut harus dilakukan dan berorientasi pada perencanaan secara spasial dengan memperhatikan situasi sosial ekonomi lokal serta menyatukan arah pelaksanaan kegiatan Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi solusi strategis dalam mengatasi permasalahan terkait dengan sumber daya hutan yang ada. Berikut ini disajikan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di Sulawesi Barat beserta dengan potensi yang ada dalam kawasan hutan tersebut.

Tabel 2.173 Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Sulawesi Barat

No	Nama KPH	Unit	Jenis	SK Menteri	SK Kelembagaan	SK Penetapan Provinsi	SK RPHJP	Jenis Kelembagaan	Luas (Ha)	Potensi non kayu	potensi Jasa Lingkungan
1	MAPILI	UNIT XI	KPH L	SK.799/ME NHUT-II/2009	Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor. 91 Tahun 2010	SK. 651/Menhut-II/2010	SK. 6404/MENLHK-KPHL/ PKPHL/DAS.3/11/2016	SKPD	77,196	Rotan, murbei, aren, damar	Wisata Bahari Palippis dan Labuang, Wisata Tirta bendungan Sekka-Sekka, air terjun Kunyi, Air terjun Limbong, Agrowisata, calon Tahura Indorannuang
2	MAMASA TENGAH	Unit VIII	KPH L	SK.799/ME NHUT-II/2009	Peraturan Bupati Mamasa Nomor. 8 Tahun 2010	SK. 340/Menhut-II/2011	SK. 7584/Menhut-II/Reg.4- 1/2014	UPTD	37,962	Getah Pinus, Rotan, Bambu, Tanaman Seong, Aren, Alpukat, Markisa, Terong Belanda	Air Panas Belerang Kanan, Air Terjun Solokan, Air Terjun Mambuliling, Wisata Rohani Pena, Wisata Budaya Kuburan TedongTedong, Wisata Budaya Batu Kumila, Gua Kelelawar di Desa Pasapa Mambu
3	MAMASA BARAT	Unit VII	KPH P	SK.799/ME NHUT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK. 341/Menhut-II/2011	SK. 5581/Menhut-II/Reg.4- 1/2014	UPTD	53,555	Getah Pinus, Rotan, Bamboo, Nilam, Siong	Air Terjun Sambabo, Permandian Air Panas di Desa Uhelanu, Aliran Sungai Deras Untuk Arum Jeram
4	GANDA DEWATA	Unit XII	KPH L	SK.799/ME NHUT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7e Tahun 2013	SK. 441/Menhut-II/2012	SK. 7579/Menhut-II/Reg.4- 1/2014	UPTD	157,598	Rotan, Damar, Madu, Getah, Nilam	Perdagangan Karbon, Wisata Air Terjun Di Hulu Sungai Kinatang, Wisata Alam Pendakian Di Desa Tabulahan, Wisata Religi Dan Wisata Budaya Pada Situs Budaya Tabulahan Di Kabupaten Mamasa, Situs Kamasi Di Kalumpang Dan Situs Palembang Di Kalumpang, Pemanfaatan Air Untuk Produksi Air Kemasan Di Desa Kinatang
5	MALUNDA	Unit X	KPH L	SK.799/ME NHUT-II/2009	Peraturan Bupati Majene Nomor. 1 Tahun 2012	SK. 753/Menhut-II/2012		UPTD	52,071	Rotan, Gaharu, Lebah Madu	Permandian Air Panas Tallum Banua, Wisata Alam Arung Jeram Bambangan, Wisata Alam Air Terjun Sambabo, Hutan Pendidikan

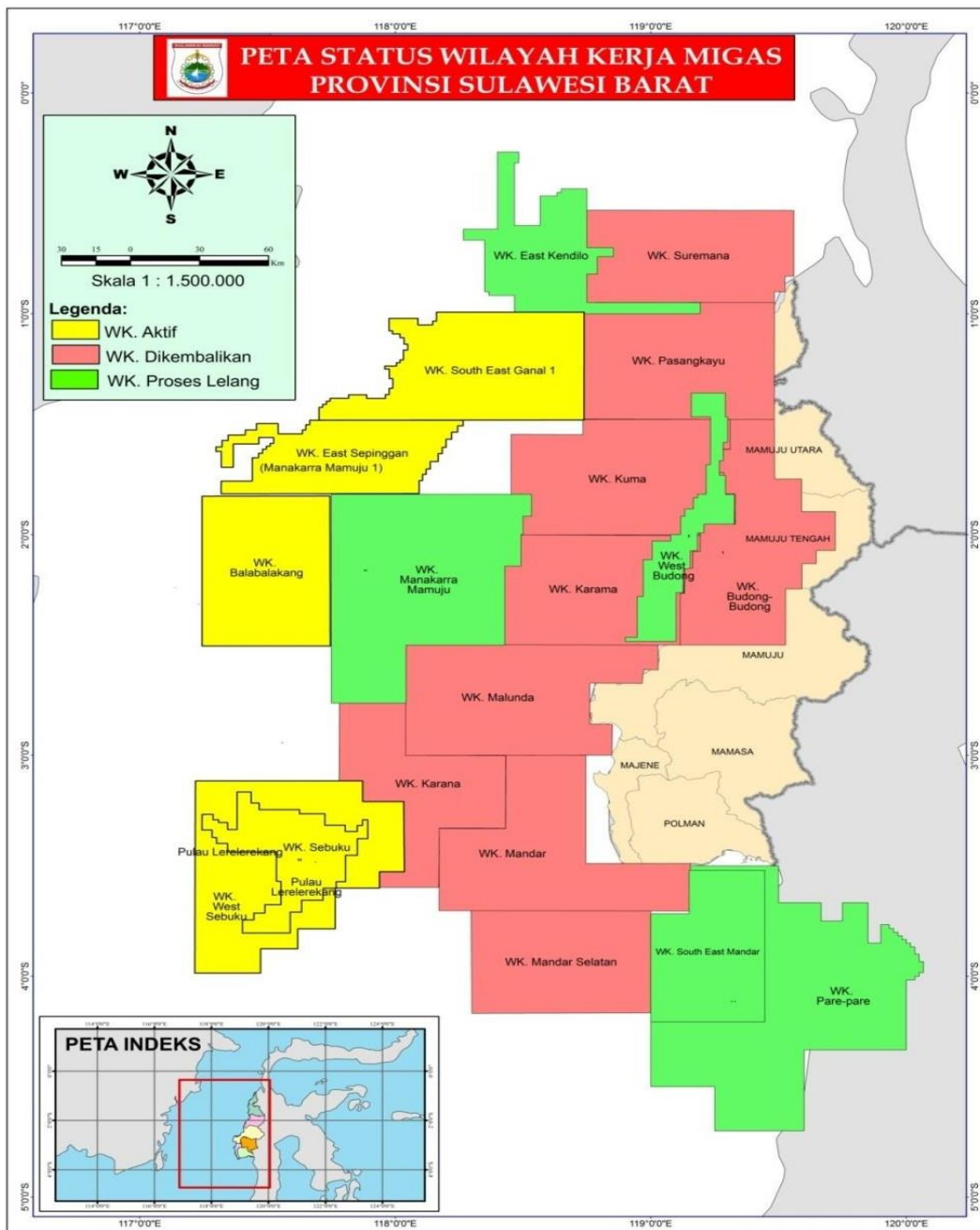
No	Nama KPH	Unit	Jenis	SK Menteri	SK Kelembagaan	SK Penetapan Provinsi	SK RPHJP	Jenis Kelembagaan	Luas (Ha)	Potensi non kayu	potensi Jasa Lingkungan
											Baruga Dua, Pengembangan Kegiatan Religi Tallum Banua
6	BUDONG-BUDONG	Unit V	KPH P	SK.799/ME NHUT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK. 996/Menhut-II/2013	SK. 817/Menhut-II/Reg.4-1/ 2015	UPTD	167,243	Rotan, Damar, Madu	Pemandangan Alam, Air Terjun, Sungai
7	LARIANG	Unit II	KPH L	SK.799/ME NHUT-II/2009	Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor. 542 Tahun 2010 dan Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor. 15 Tahun 2011	SK. 60/Menhut-II/2011	SK. 7317/Menhut-II/Reg.4- 1/2014	UPTD	57,916	Rotan, Coklat, Sawit	
8	KAROSSA	UNIT IV	KPH P	SK.799/ME NHUT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.636/Menlhk-Setjen/2015		UPTD	63,110	rotan, getah, buah buahan, madu lebah	wisata alam air terjun, pembangunan agrowisata, potensi pemanfaatan air domestik, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, perdagangan karbon
9	KARAMA	UNIT VI	KPH P	SK.799/ME NHUT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.636/Menlhk-Setjen/2015	SK. 3/PHPL-KPHP/PKPHP/HPL.0/12/2016	UPTD	156,918	rotan, damar, madu	pemandangan alam, air terjun, sungai
10	MAMASA TIMUR	UNIT IX	KPH L	SK.799/ME NHUT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.840/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2016	SK. 4809/MENLHK-KPHL/PKPHL/DAS.3/2019	UPTD	51,086		
11	PASANGKAYU	UNIT I	KPH L	SK.799/ME NHUT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.730/MENLHK/SETJEN/PLA.0/12/2017		UPTD	25,662		
12	SARUDU	UNIT III	KPH L	SK.799/ME NHUT-II/2009	Peraturan Gubernur Sulbar No. 46.a Tahun 2016	SK.80/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2019	SK. 3575/MENLHK - KPHL/PKPHL/DAS.3/4/2019	UPTD	68,384		
13	TAMAN NASIONAL GANDANG DEWATA	UNIT XIII	KPH K	SK.799/ME NHUT-II/2009	-	SK.773/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2016	-	UPTD KLHK	189,208		

2.4.28 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada sektor pertambangan, Provinsi Sulawesi Barat mempunyai potensi Bahan Galian / Materi Logam seperti emas, batubara, mangan, logam, bijih besi, sulfida, serta potensi Blok Migas yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional, disamping itu potensi yang sangat besar adalah Uranium, di mana menurut hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) bekerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Republik Indonesia telah dipastikan bahwa di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat terdapat potensi radioaktif atau uranium berskala besar di atas rata-rata dunia. Potensi Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi di mana Terdapat 20 WK Migas terdiri dari 5 (lima) Blok Migas Aktif, 6 (enam) Blok Lelang dan 9 (sembilan) Blok Terminasi yang dikelola oleh K3S Nasional dan Internasional, baik off shore maupun on shore dan dalam tahap eksplorasi.

Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki potensi pengembangan Uranium, hasil pengukuran Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) tahun 2007, dan ditindaklanjuti pada tahun 2013 – 2016, mineral radioaktif uranium dan thorium dengan nilai yang cukup tinggi, yaitu antara 100–2.800 nSv/jam atau sekitar 20 mSv/tahun. Menurut standar Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), nilai laju dosis maksimum yang boleh diterima oleh masyarakat umum adalah sebesar 1 mSv/tahun dan untuk para pekerja adalah 20 mSv/tahun. Potensi mineral radioaktif ini tersebar antara lain di Kec Tapalang, Tapalang Barat, Kaluku dan Mamuju.

Gambar 2.8 Peta Status Wilayah Kerja Migas di Sulawesi Barat



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat

Sumber daya Minyak dan Gas yang ada di Sulawesi Barat dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional. Adapun kontraktor tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.174 Sumber Daya Minyak dan Gas yang ada di Sulawesi Barat dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Nasional dan Internasional

KKKS	WILAYAH KERJA	KAB/ KOTA	LUAS WILAYAH KERJA	PERKEMBANGAN TERKINI	KET
MUBADALA PETROLIUM	SEBUKU	Majene	2,344.9 km ²	Produksi Gas Alam mulai Oktober 2013 Kegiatan Proses Penyertaan Modal/Participating Interest antara Kassel dan Sulbar	Aktif (Produksi) Periode Efektif: 22 Sept 1997 – 21 Sept 2027
MUBADALA PETROLIUM	WEST SEBUKU	Majene	4,933 km ²	PSC Kontrak tahun 2012 Study Geology	Aktif (Eksplorasi) Tanggal efektif KKS: 19 Des 2011
KRISENERGY BV. (BALA BALAKANG)	BALA-BALAKANG	Mamuju	4.190,96 km ²	Akuisisi & Processing Seismik 3D 500 km ² 2014 Pergantian nama blok sesuai dengan SK Kem ESDM No.15.K/13/DJM.E/ 2015	Aktif (Eksplorasi)
ENI INDONESIA LTD	EAST SEPINGGAN (MANAKARR A MAMUJU 1)	Mateng, Pasangkayu		Pemprov Sulbar telah diusulkan penggantian nama WK menjadi Blok Manakarra Mamuju 1	Aktif (Eksplorasi)
NIKO RECOURCES LIMITED	SOUTH EAST GANAL 1	Matra & Mateng	Luas Wilayah:		Aktif (Eksplorasi)
	PARE PARE	Polewali, Pinrang, Pare-pare	8.373 km ²		Proses Lelang
	MANAKARR A MAMUJU	Mamuju, Mateng	6.995 km ²		Lelang Reguler 2016
	WEST BUDONG	Mamuju, Mateng, Matra	1.723 km ²		Proses Lelang
	EAST KENDILO	Matra		Pemprov Sulbar mengusulkan penggantian Nama WK menjadi Blok Sendana 1	Proses Lelang
	SOUTH EAST MANDAR	Polewali		Konsulda WK Baru Migas berlangsung pd 17 Maret 2016	Lelang Reguler 2016
	SUREMANA 1	Matra		Lelang Reguler Tahun 2016	Lelang Reguler 2016
Pearl Oil	KARANA	Majene	5.389,68 Km ²	Survey 2D (2008)	Telah dikembalikan ke Pemerintah tahun 2013
STATOIL	KARAMA	Mamuju, Mateng	4.287,37 Km ²	Sumur Eksplorasi Karama-1&Karama-2	Telah dikembalikan ke Pemerintah tahun 2013
CONOCO PHILIPS	KUMA	Mateng, Matra	5086 Km ²	SumurEksplorasi Kalukku-1	sda
EXXON	MANDAR	Majene, Polewali Mandar	4.196,25 Km ²	Kris-1 32,30 mill laut Putera-1 26,04 mil laut Sultan-1 25,35 mill	sda

KKKS	WILAYAH KERJA	KAB/ KOTA	LUAS WILAYAH KERJA	PERKEMBANGAN TERKINI	KET
MARATHON	PASANG KAYU	Pasangkayu	4.707,63 Km ²	Sumur Eklorasi Bravo-1 Romeo-1	sda
EXXON	SUREMANA	Pasangkayu	5.339,63 Km ²	Sumur Eksplorasi Rangkong-1	Sda
HARVEST BUDONG-BUDONG B.V.	BUDONG-BUDONG	Mamuju, Mateng & Matra	Tanggal efektif KKS: 16 Jan 2007 Luas Wilayah Kerja: 2.476,45 km ²	Proses Terminasi/ Pengembalian Blok Migas Ke pemerintah Surat Nomor Hbb.Jk.14.117 Yang Diterima Tanggal 5 Juni 2014.	Telah dikembalikan ke Pemerintah tahun 2014

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2021

Selain pertambangan minyak dan gas potensi lainnya adalah bahan galian, Sebaran lokasi pertambangan bahan galian yang ada di Sulawesi Barat tersebar pada 6 (enam) kabupaten dengan potensi bahan galian yang berbeda-beda. Adapun sebaran lokasi pertambangan menurut kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 2.175 Sebaran Lokasi Pertambangan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat

Sebaran Lokasi di Kabupaten	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (ha)
Majene			
1. Ulumanda			
- Desa Sambabo	Bijih Besi (Fe)	-	-
- Sungai Ure kang	Panas Bumi	-	-
2. Pamboang			
- Pamboang	Logam Emas (Au)	-	-
- Desa Siang	Panas Bumi	-	-
- Desa S. Loppa	Panas Bumi	-	-
3. Sendana			
- Desa Limboro	Panas Bumi	64.531.353 ton	4.287
- Desa Ulidang	Batu Bara	(Hipotesa)	
Polewali Mandar			
1. Tapango			
- Desa Tapango	Bijih Besi (Fe)	163.823,83 ton	5,
- Desa Lapejang	Bijih Besi (Fe)	-	707
- Desa Simbalutung	Bijih Besi (Fe)	-	300
- Desa Bussu	Bijih Besi (Fe)	-	-
- Desa Takaturung	Bijih Besi (Fe)	-	1.500
- Desa Riso/Kalimbua	Panas Bumi	41 MWe	-
	Bijih Besi (Fe)	328.525 ton	8
2. Anreapi			
- Desa Pasiang dan Desa Papandangan	Bijih Besi (Fe)	-	1.750
- Desa Ulugalung	Logam Galena (Pb)	1.500 ton	199
- Desa Basseang, Kunyi, Duampanua, Papandangan			
3. Binuang			
- Desa Mammi	Bijih Besi (Fe)	6.044,04 ton	2.445
- Desa Kurma	Logam Emas (Au)	-	3000
- Desa Batetangnga	Logam Galena (Pb)	-	2.000
4. Matakali			
	Bijih Besi (Fe)	-	912

Sebaran Lokasi di Kabupaten	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (ha)
5. Campalagian - Desa Barumbung	Logam Emas (Au)	-	-
6. Mapilli - Desa Sumarrang	Logam Emas (Au)	-	5.000
- Desa Taalangga, Beroangin, Pulliwa	Panas Bumi	-	-
- Desa Batupanga Daala	Panas Bumi	-	-
- Desa Andau			
7. Bulu	Panas Bumi	292 Mwe	-
- Desa Sapporakki			
8. Matangnga	Panas Bumi	115 Mwe	-
- Desa Matangnga			
9. Balanipa	Panas Bumi	-	-
- Desa Bala			
10. Alu	Panas Bumi		-
- Desa Pao-Pao			
Mamasa			
1. Messawa - Desa Batubusa	Logam Tembaga (Cu)	-	-
2. Pana - Desa Karaka, Ulusalu, Sapan, Saloan, Paken	Logam Tembaga (Cu)	-	-
- Desa Karaka, Ulusalu, Sapan, Saloan, Paken	Logam Seng (Zn)	-	-
3. Tabulahan - Desa Talopak	Bijih Besi (Fe)	Hipotesa	888
- Desa Tarinding, Talopak	Logam Emas Primer (Au)	-	-
4. Sumarorong - Desa Ratta Bo'te	Bijih Besi (Fe)	Hipotesa	-
5. Aralle - Desa Salu Kaiyyang	Bijih Besi (Fe)	-	-
	Logam Mangan (Mn)	-	-
6. Mamasa - Desa Makuang Pebassian	Logam Mangan (Mn)	Hipotesa	-
- Desa Sipai Pebassian	Logam Pasir Besi	900	-
- Desa Usango, Rambusaratu, Makau, Salu Mokanan Utara, Lindu Hahangan, Uhailano, Rantetangnga, Salu Kanan, Mungin, Rantekatoang, Indobanua, Rantekamiri, Tamalatik, Timbu Kanan, Malimbong	Panas Bumi	-	-
7. Tabang - Desa Baka Disura'	Logam Emas Primer (Au)	-	5.327
Mamuju			
1. Bonehau - Bonehau	Batu Bara	3.593.642 ton	1,6
- Desa Buttu Ada	Logam Emas (Au)	-	-
	Logam Mangan (Mn)	-	-
- Desa Tamalea	Logam Emas Primer (Au)	1.073.570 ton	-
2. Kalumpang - Desa Karataun	Logam Emas Placer	-	-
	Logam Emas Primer (Au)	-	-
- Desa Bulu	Logam Tembaga (Cu)	-	-
3. Tapalang			

Sebaran Lokasi di Kabupaten	Jenis Bahan Galian	Sumber Daya	Luas Area (ha)
- Tapalang	Batu Bara	Indikasi	-
4. Tapalang Barat			
- Desa Tapalang	Panas Bumi	30 Mwe	-
5. Simboro			
- Desa Karema	Panas Bumi	10 Mwe	-
6. Kalukku			
- Ampallas	Panas Bumi	40 Mwe	-
- Desa Kona Kaiyyang	Panas Bumi	10 MWe	-
Pasangkayu			
1. Tikke			
- Desa S. Lariang	Logam Emas Placer	103.896	-
2. Dapurang			
- Desa Masabo, Tarakedo	Logam Emas (Au)	-	-
	Logam Tembaga (Cu)	-	-
3. Baras	Batu Bara	-	-
4. Sarudu	Batu Bara	-	-
- Doda	Panas Bumi	-	-
Mamuju Tengah			
1. Topoyo			
- Desa Tabolang	Logam Seng (Zn)	-	-
	Logam Mangan (Mn)	-	-
- Desa Salulekbo	Logam Emas (Au)	-	-
2. Karossa			
- Desa Sanjango	Logam Emas Primer (Au)	-	-
	Bijih Besi (Fe)	-	-
	Logam Tembaga (Cu)	-	-
	Logam Mangan (Mn)	-	-
	Logam Seng (Zn)	-	-
	Logam Galena (PbS)	-	-
3. Tobadak			
- Desa S. Andeang	Logam Dasar (Cu, Pb, Zn)	-	-
- Desa Salulekbo	Logam Emas (Au)	-	-
- Desa Panasuan	Panas Bumi	-	-

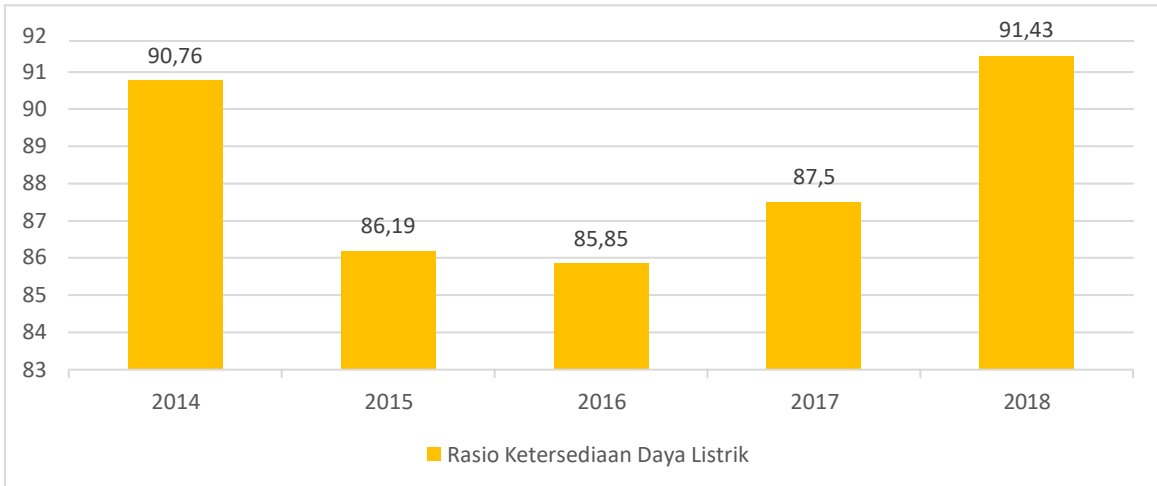
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2021

Grafik 2.56 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik



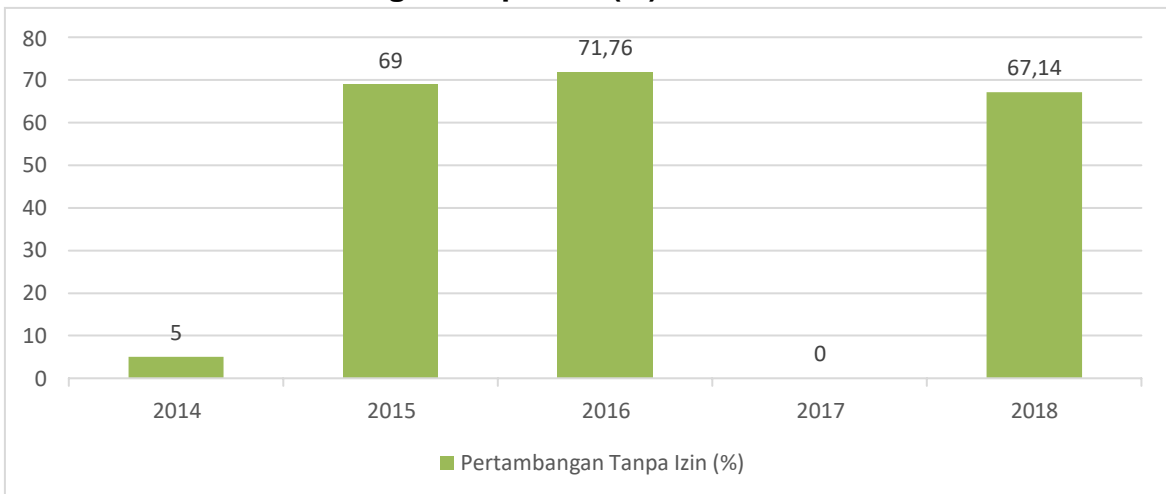
Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2021

Grafik 2.57 Rasio Ketersediaan Daya Listrik (%)



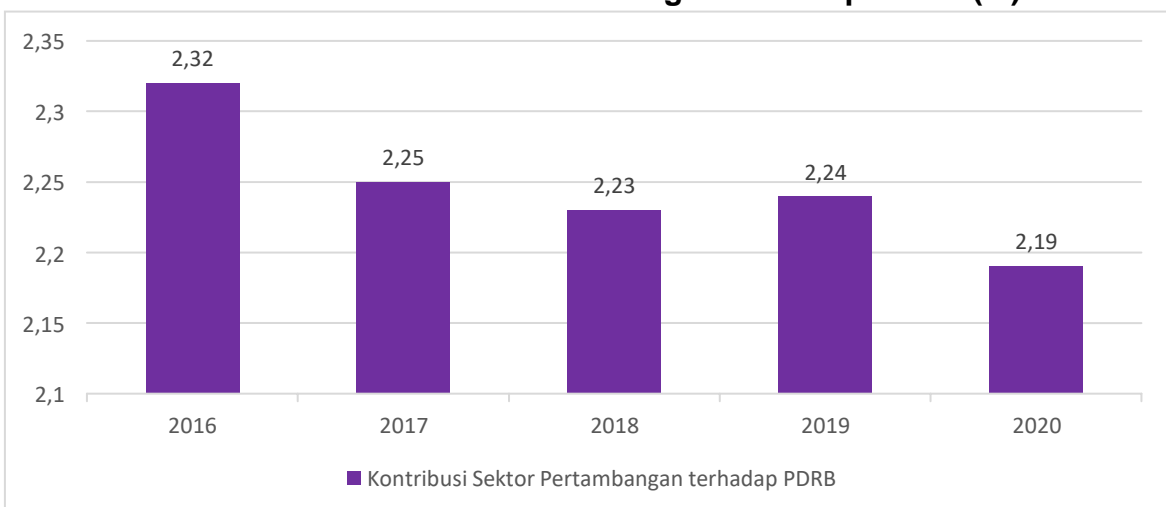
Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2019

Grafik 2.58 Pertambangan tanpa Izin (%)



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2019

Grafik 2.59 Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB (%)

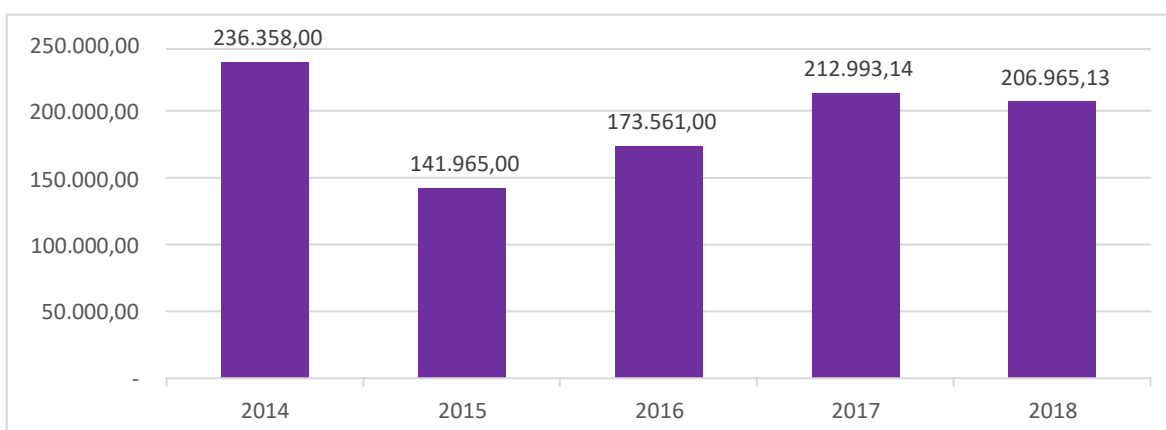


Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.29 Urusan Perdagangan

Kondisi geografis Sulawesi Barat cukup strategis sebagai jalur perdagangan baik nasional maupun internasional. Posisi tersebut berpotensi pengembangan kerja sama perdagangan antar pulau antara Sulawesi dan Kalimantan. Posisi Sulawesi Barat yang strategis karena berada tepat di tengah jalur lintas Sulawesi memiliki akses terhadap pelabuhan dan perdagangan internasional dan domestik. Sampai saat ini Sulawesi Barat belum memiliki pelabuhan ekspor, sehingga data ekport yang saat ini bisa digunakan melalui BPS hanya merupakan catatan-catatan bongkar muat di pelabuhan dan di bandar udara. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sulawesi Barat mencatat bahwa selama tahun 2014-2018 komoditi yang diekspor dari Sulawesi Barat diantaranya adalah produk hortikultura, produk perikanan, dan perkebunan. Crude Palm Oil (CPO) yang merupakan salah satu produk dari hasil pengolahan sawit.

Grafik 2.60 Perkembangan Ekspor CPO Melalui Pelabuhan di Sulawesi Barat tahun 2014-2018



Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2019

CPO Sulawesi Barat sudah diekspor ke luar negeri. Catatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 nilai ekspor CPO mencapai 236.358 ton. Namun beberapa tahun terakhir jumlahnya menurun, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya faktor cuaca dan faktor harga yang masih tidak stabil. Selain CPO, barang lain yang juga diangkut melalui pelabuhan antara lain biji sawit, karang dan jagung. Berat biji sawit yang dimuat melalui pelabuhan selama tahun 2018 sebanyak 116.981,07 ton. Informasi bongkar muat menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan yang sangat signifikan pada jumlah bongkar semen di Sulawesi Barat. Artinya bahwa aktivitas pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat masih sangat agresif.

Tabel 2.176 Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha Informal

Indikator	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
	2014	2015	2016	2017	2018
Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha Informal	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha	80 Pelaku Usaha

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Prov. Sulbar 2019

2.4.30 Urusan Perindustrian

a. Jumlah Industri dan tenaga kerja

Sektor industri Sulawesi Barat berkontribusi sebesar 10 persen terhadap pembentukan PDRB provinsi. Keberadaan industri di suatu daerah menjadi indikator kemajuan suatu daerah. Pembangunan sektor industri di Sulawesi Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari banyaknya investor di bidang jasa, manufaktur, dan pertanian dan perkebunan untuk mengembangkan jenis usaha tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui usaha kecil rakyat, antara lain kualitas SDM bidang usaha kecil dan mikro yang masih rendah, tingkat kesejahteraan masyarakat lokal yang rendah, modal usaha yang belum tersedia, serta strategi pemasaran terhadap jenis usaha belum tersedia. Peran pemerintah terhadap industri kecil dan mikro adalah bagaimana menumbuhkan iklim usaha dengan menerapkan peraturan perundangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, serta dukungan kelembagaan.

Tabel 2.177 Jumlah Industri/Perusahaan dan Tenaga Kerja di Sulawesi Barat tahun 2014-2018

Kabupaten	Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja									
	Perusahaan					Tenaga Kerja				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Majene	210	265	428	428	428	492	2,033	2,424	2,815	2,770
Polewali Mandar	1,563	4,186	5305	6276	6264	5,470	8,512	10,856	13,200	13,741
Mamasa	591	459	459	459	459	1,727	1,500	1,500	1,500	1,500
Mamuju	585	548	598	692	730	1,795	1,701	1,483	2,965	2,767
Pasangkayu	415	474	479	527	676	1,171	2,386	1,951	1,515	1,912
Mamuju Tengah	273	273	307	307	262	508	508	473	438	438
Sulawesi Barat	3,364	6,205	7576	8644	9236	10,655	16,640	18,687	22,433	23,128

Sumber: BPS, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2019

b. Kawasan Industri

Sektor industri di Sulawesi Barat saat ini masih didominasi oleh industri kecil yang jumlahnya masih sedikit sehingga kontribusinya tidak dominan dalam perekonomian. Namun ke depan telah direncanakan untuk membangun kawasan industri yang berada di Kabupaten Mamuju tepatnya di Kecamatan Kalukku, rencana pembangunan kawasan industri tersebut telah sesuai dengan

RTRW Provinsi dan Kabupaten dan telah melalui berbagai kajian baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun dari Kementerian Perindustrian dan telah dibuat Masterplan dan Rencana Strategis Kawasan Industri tersebut oleh pihak Kementerian Perindustrian. Dengan dikembangkannya industri nantinya dapat memperkuat struktur ekonomi daerah maupun nasional dan pemerataan industri yang selama ini hanya terpusat di Pulau Jawa.

Tabel 2.178 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perindustrian

URAIAN KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi industri Rumah Tangga terhadap PDRB Sektor Industri	8.73	6.46	2.08	5.96	3.11
Cakupan Bina kelompok Pengrajin (keg)	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM	60 IKM

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Provinsi Sulbar 2019

2.4.31 Urusan Transmigrasi

Sejak telah diresmikan menjadi DOB Baru, dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012 telah dibangun dan ditempatkan 6 (enam) Unit Pemukiman Transmigrasi yakni UPT. Botteng Kab. Mamuju (2006-2008), UPT. Patambanua Kab. Polman (2007), UPT Lakahang Kab. Mamasa (2007), dan UPT Sinyonyoi Kab. Mamuju (2009), UPT Botteng Pasembuk Kab. Mamasa (2011-2012) dan UPT Ulumanda (2011-2013) dan 1 (satu) TSM Ralleanak Kab. Mamasa (2008). Selain itu juga dilakukan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak Kab. Mamuju (2008), serta Perencanaan KTM Sarudu Baras Tahun 2009.

Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, telah direncanakan sejak tahun 2012, di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki pandangan jauh ke depan untuk pembentukan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan baru, sebagai cikal bakal pembentukan Desa, Kecamatan dan Kabupaten baru. Untuk Itu Disnakertrans Provinsi Sulawesi Barat telah merencanakan Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, sebagai berikut:

1. Kawasan Mambi, Kab. Mamasa Luas Penetapan kawasan 24.135 Ha;
2. Kawasan Tubbi Taramanuk, Kab. Polman, Penetapan kawasan 14.301 Ha;
3. Kawasan Kalukku, Kab. Mamuju, Penetapan Kawasan 90.092 Ha;
4. Kawasan KTM Tobadak Kab. Mamuju Tengah, Penetapan kawasan 109.000 Ha;
5. Kawasan KTM Sarudu Baras, Kab. Pasangkayu, Penetapan kawasan, sementara dalam proses perhitungan ulang;
6. Kawasan Ulumanda, Kab. Majene, Penetapan kawasan 20.000 Ha.

Tabel 2.179 Data Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih Dibina Tahun 2017 – 2018

KABUPATEN/ NAMA UPT	POLA/JENIS TRANSMIGRASI	TAHUN PENEMPATAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
KAB. POLMAN				
UPT. Piriang Tapiko	TU/TPLK	2016 & 2017	78 KK	179 JIWA
KAB. MAMASA				
UPT. Rano	TU/TPLK	2015-2018	215 KK	430 JIWA
KAB. MAJENE				
UPT. Tamajannang	TU/TPLK	2018	25 KK	78 JIWA
UPT. Ulumanda Tandiallo	TU/TPLK	2012 - 2013	250 KK	739 JIWA
KAB. MAMUJU TENGAH				
UPT. Saluandeang	TU/TPLK	2018	40 KK	104 JIWA
KAB. PASANGKAYU				
UPT. Tanjung Cina	Pola Perikanan Tambak	2018	25 KK	84 JIWA
KAB. MAMUJU				
UPT. Sinyonyoi	TU/TPLK	2016	50 KK	142 JIWA

Sumber : Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.180 Data Pembangunan Transmigrasi Baru di Sulawesi Barat Tahun 2018

KABUPATEN/ NAMA UPT	POLA/JENIS TRANSMIGRASI	TAHUN PENEMPATAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA
KAB. MAMASA				
UPT. Rano	TU/TPLK	2018	40 KK	
KAB. MAJENE				
UPT. Tamajannang	TU/TPLK	2018	25 KK	
KAB. MAMUJU TENGAH				
UPT. Saluandeang	TU/TPLK	2018	40 KK	
KAB. PASANGKAYU				
UPT. Tanjung Cina	Pola Perikanan Tambak	2018	25 KK	

Sumber : Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.4.32 Urusan Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sulawesi Barat berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP.713). Alur Pelayaran Internasional (ALKI-II), dengan luas Wilayah Laut ± 20.342 Km². Secara geografis, Sulawesi Barat berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat. Potensi Perikanan Tangkap sebesar 929.700 ton/tahun dan hanya sekitar 10 persen saja yang telah dimanfaatkan. Potensi Lahan Perikanan Budidaya sebesar 74.300 Ha (Budidaya Laut 20.300 Ha, Budidaya Tambak 30.000 Ha dan Budidaya Air Tawar 24.000 Ha. Lahan Perikanan Budidaya Termanfaatkan Seluas 24.748,9 Ha terdiri dari 13.769 Ha budidaya tambak, 8.478 Ha Budidaya air tawar dan 2.501,5 Ha Budidaya laut (DKP Prov. Sulbar 2016). Kondisi ini memberi peluang yang cukup potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan.

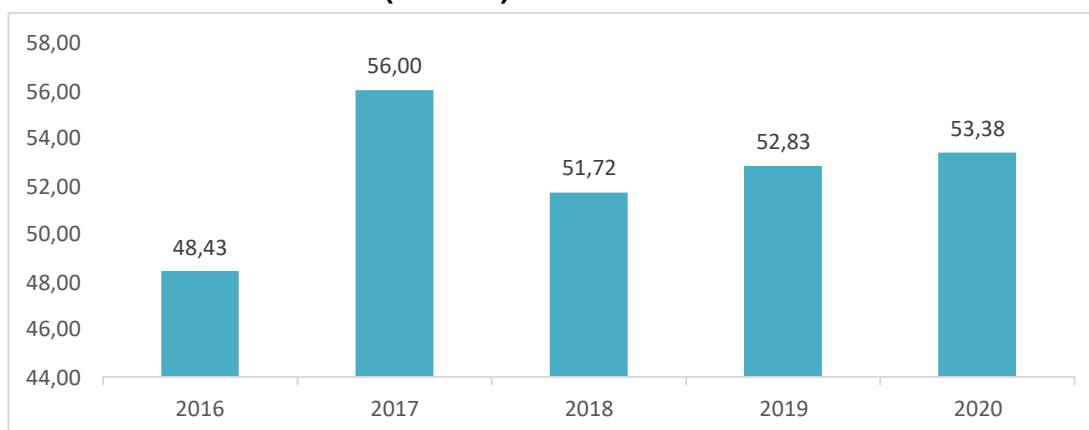
Tabel 2.181 Produksi Perikanan Budidaya Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

Kabupaten	Laut	Tambak	Kolam
Majene	-	668,9	134,86
Polewali mandar	11.537,35	12.998,07	1.148,50
Mamasa	-	-	357,55
Mamuju	58.459,25	1.699,27	93,33
Pasangayu	-	5.976,92	571,09
Mamuju Tengah	76,33	5.622,40	61,74
Sulawesi Barat	70.072,936	26.965,56	2.367,07

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2019

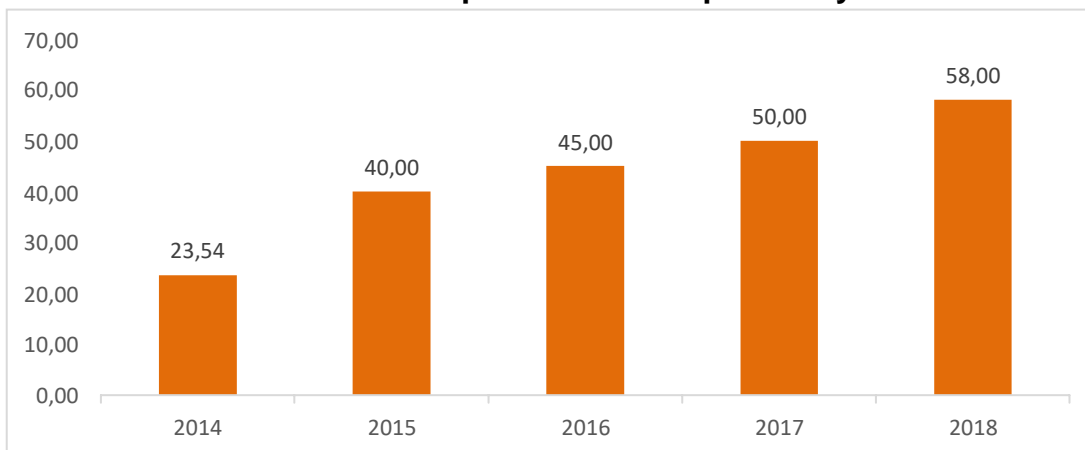
Pada tahun 2018, produksi perikanan budidaya Sulawesi Barat sebanyak 99.405,56 ton. Produksi tersebut berasal dari hasil pembudidayaan di laut sekitar 70 ribu ton, air payau 27 ribu ton dan di air tawar 2 ribu ton. Produksi perikanan ini mengalami peningkatan pada semua jenis budidaya, peningkatan jumlah yang paling banyak terjadi pada perikanan laut yang produksinya mencapai 70 ribu ton.

Grafik 2.61 Persentase Konsumsi Ikan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020 (Persen)



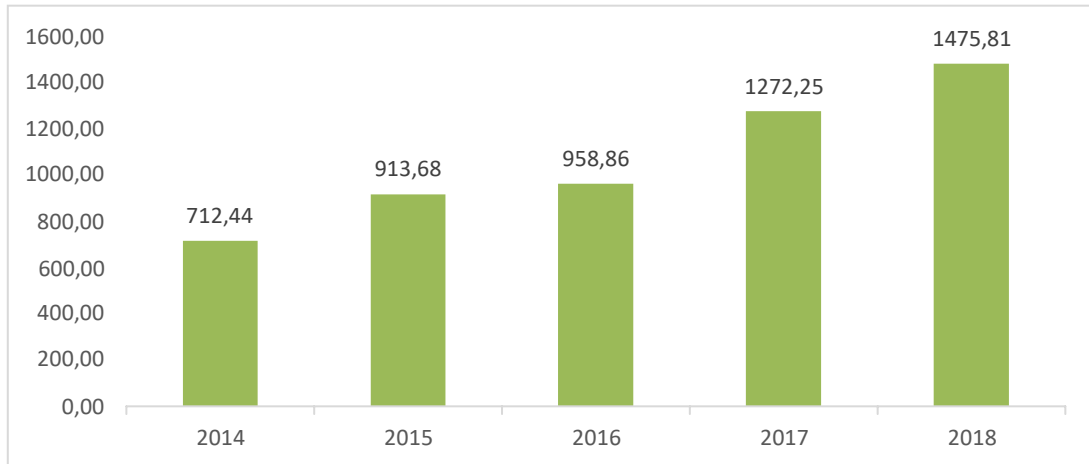
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2021

Grafik 2.62 Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Grafik 2.63 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2019

Tabel 2.182 Capaian Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014-2018

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2014	CAPAIAN 2015	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	46,717.40	55,759.30	64,334.90	56,100.28	56,328.18
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	67,548.70	89,729.96	121,650.40	104,320.78	102,501.16
Produksi Olahan (Ton)	1,325.00	3,338.00	4.302.00	10,557.18	5,698.45
Komoditi Ekspor Hasil Perikanan (Ton)	1,890.00	2,438.00	2.763.00	-	-
Konsumsi Ikan (Kg)	46.80	47.57	48,43	56.00	50.02
Jumlah UPI bersertifikat SKP (Unit)	1.00	1.00	1.00	1,00	1,00
Pendapatan Rata-rata Nelayan (Rp/bln/org)	1,100,000.00	1,300,000.00	1,390,000.00	109.49 (NTN)	114.77 (NTN)
Pendapatan Rata-rata Pembudidaya Ikan (Rp/bln/org)	1,400,000.00	1,600,000.00	1,700,000.00	94.92 (NTPi)	94.86 (NTPi)
Pendapatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan (Rp/bln/org)	878,000.00	1,200,000.00	1,362,480.00	1,376,104.80	1,389,831.79
Kawasan Konservasi (Ha)	147,307.00	147,307.00	154,00	147,307.393	147,307.393
Jumlah Pulau-pulau Kecil yang Dikelola (pulau)	3.00	2.00	3.00	5.00	5.00
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana KP Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (%)	16.60	16.60	16,60	16.00	16.00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat 2019

2.4.33 Urusan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan

pembangunan. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan topdown process. Artinya perencanaan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, kepemilikan rencana (sense of ownership) juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dimulai dari 2017 pemerintah menggunakan pendekatan money follow function menjadi *money follow program* adalah pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional maupun prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

RPJMD Perubahan 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Tabel 2.183 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Perencanaan Pembangunan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan pembangunan					
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA					
	ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA					
	ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA					
	ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4	Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%)	74,28	98,25	89,89	90,25	90,97
	Jumlah program RKPD tahun berkenaan	205	281	249	250	252
	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	276	286	277	277	277
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	205	230	249	250	252
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	182	230	219	203	209
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021

2.4.34 Urusan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar -benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Pengelolaan Barang Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Tabel 2.184 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Keuangan

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Keuangan						
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulbar 2021

2.4.35 Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Administrasi ASN sekedar merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi (drafting and recording data plus information) pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN. Sementara Manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumber daya, aset, faktor determinan dalam sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan human capital ASN. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

diharapkan dapat menjadi pioneer dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemda.

Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis (*strategic human resource management*).

Tabel 2.185 Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2021

Jenis Jabatan	Bezetting	ABK	Selisih
Jabatan Pimpinan Tertinggi	43	47	4
Jabatan Administrator	223	225	2
Jabatan Pengawas	634	646	12
Jabatan Pelaksana	2.524	0	2.524
Jabatan Fungsional	2.069	0	2.069
Jumlah	5.493	918	4.611

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai ASN perlu dibangun sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi (*unified system*). Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas “merit” yang menekankan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh calon pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Manajemen ASN meliputi tahapan berikut ini.

Tabel 2.186 Jumlah Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pelatihan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2020

TAHUN	JUMLAH ASN PEMPROV SULBAR (Orang)	JUMLAH TOTAL JP (Jam)	JUMLAH RATA-RATA JAM PELAJARAN
2017	5.635	121.392	22
2018	5.400	61.608	11
2019	5.488	186.564	34
2020	5.387	33.200	6

Sumber: BPSDM Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 2.187 Jumlah Peserta dan Jam Pelatihan Menurut Jenis Pengembangan Kompetensi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2020

NO	JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	TAHUN					
		2017			2018		
		PESERTA	JP/ PESERTA	JUMLAH JP	PESERTA	JP/ PESERTA	JUMLAH JP
1	KOMPETENSI MANAJERIAL	126	867	109.242	53	867	45.951
	DIKLATPIM	126	867	109.242	53	867	45.951
	PRAJABATAN/LATSAR CPNS			-			-
2	KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL	61	100	1.650	181	627	13.860
	DIKLAT TOC			-	30	87	2.610
	DIKLAT PENGADAAN BJ			-			-
	DIKLAT P2UPD			-	30	120	3.600
	DIKLAT SATPOL-PP			-	30	150	4.500
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	25	30	750	25	30	750
	DIKLAT PENYUSUNAN RENJA OPD	30	20	600			-
	DIKLAT PENJENJANGAN WI MUDA			-			-
	PENGEMBANGAN WIDYAISWARA	6	50	300	6	200	1.200
	DIKLAT PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH			-	30	20	600
	DIKLAT PENYUSUNAN LAP KEU BASIS AKRUAL			-			-
	DIKLAT MANAJEMEN PERSIDANGAN			-			-
	DIKLAT BENDAHARA KEUANGAN DAERAH			-	30	20	600
3	KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL	350	30	10.500	30	50	1.500
	DIKLAT REVOLUSI MENTAL			-	30	50	1.500
	PENINGKATAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL	350	30	10.500			-
4	KOMPETENSI PEMERINTAHAN	-	-	-	1	297	297
	PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI			-	1	297	297
	JUMLAH	537	997	121.392	265	1.841	61.608

Lanjutan Tabel di atas

NO	JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	TAHUN					
		2019			2020		
		PESERTA	JP/ PESERTA	JUMLAH JP	PESERTA	JP/ PESERTA	JUMLAH JP
1	KOMPETENSI MANAJERIAL	324	1.378	183.364	40	830	33.200
	DIKLATPIM	50	867	43.350	40	830	33.200
	PRAJABATAN/LATSAR CPNS	274	511	140.014			
2	KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL	17	230	1.700			
	DIKLAT TOC			-			
	DIKLAT PENGADAAN BJ			-			
	DIKLAT P2UPD			-			
	DIKLAT SATPOL-PP			-			
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	10	30	300			
	DIKLAT PENYUSUNAN RENJA OPD			-			
	DIKLAT PENJENJANGAN WI MUDA			-			

NO	JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI	TAHUN					
		2019			2020		
		PESERTA	JP/ PESERTA	JUMLAH JP	PESERTA	JP/ PESERTA	JUMLAH JP
	PENGEMBANGAN WIDYAIKWARA	7	200	1.400			
	DIKLAT PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH			-			
	DIKLAT PENYUSUNAN LAP KEU BASIS AKRUAL			-			
	DIKLAT MANAJEMEN PERSIDANGAN			-			
	DIKLAT BENDAHARA KEUANGAN DAERAH			-			
3	KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL	30	50	1.500			
	DIKLAT REVOLUSI MENTAL	30	50	1.500			
	PENINGKATAN KOMPETENSI SOSIAL KULTURAL			-			
4	KOMPETENSI PEMERINTAHAN	-	-	-			
	PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI			-			
	JUMLAH	537	371	1.658	186.564	40	830

Sumber: BPSDM Provinsi Sulawesi Barat 2021

Jumlah jabatan struktural berdasarkan kondisi struktur organisasi dan tata kerja yang ada dengan jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan pelaksana yang terisi pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Berdasarkan data kelembagaan pada tahun 2020 jumlah total Eselon I, II, III dan IV sebanyak 919 jabatan, sedangkan menurut kelompok Jabatan ASN sebanyak 858 jabatan. Kemudian Jumlah ASN berdasarkan jabatan fungsional sebanyak 4.529 jabatan yang terdiri dari 2.133 fungsional umum dan 2.396 fungsional teknis.

Tabel 2.188 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Dan Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Tahun	Data Kelembagaan (Eselon)					Jabatan Menurut Kelompok Jabatan (Eselon)					Jabatan Fungsional		
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	Umum	Teknis	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2018	1	46	222	637	906	1	38	202	616	857	4.543	-	4.543
2019	1	47	225	646	919	1	42	178	596	817	2.607	2.065	4.672
2020	1	47	225	646	919	1	44	202	611	858	2.133	2.396	4.529

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021

Para pejabat ASN, khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai penentu arah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan menjadi garda terdepan yang menjadi panutan, dan penentu arah dalam memberikan service kepada publik. Oleh karena itu menempatkan pegawai ASN pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus selektif yang betul-betul bisa mendapatkan pejabat yang kompeten dibidangnya. Sistem manajemen ASN diarahkan untuk mendapatkan pejabat ASN yang profesional. Sistem rekrutmen JPT (sebelumnya dikenal dengan istilah

Eselon/Struktural) polanya diubah dengan sistem melalui pelamaran, seleksi, dan kontrak kinerja jabatan yang jelas, obyektif, dan transparan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU ASN.

Tabel 2.189 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2017–2021

Tahun	Jumlah PNSD	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Rasio Riil terhadap Kebutuhan
2017	5.635	8.220	Kurang	31,45%
2018	5.400	8.220	Kurang	34,31%
2019	5.488	8.220	Kurang	33,24%
2020	5.387	8.220	Kurang	34,47%
2021	5.493	8.220	Kurang	33,18%

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2022

Tabel 2.190 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Kepegawaian serta Diklat Tahun 2017–2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan					
3.1	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi melalui pendidikan formal dan non formal (orang)	45	63			
3.2	Proporsi ASN yang mengikuti Diklat Peningkatan Kapasitas (%)	3,7	2,84	6,76	1,47	11,39

Sumber : BKD dan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat 2022

2.4.36 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 070/3521/SJ tanggal 4 Agustus 2017 Tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah ditegaskan bahwa tugas pokok Badan Litbang adalah (1) penyiapan Naskah Akademis/pokok pikiran yang bersinergi dengan propemperda (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2) melakukan evaluasi kebijakan sebagai input dalam penyusunan pembangunan daerah (3) menyiapkan rekomendasi kebijakan sebagai respon atas isu-isu strategis dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu untuk penguatan kelitbangan ditegaskan bahwa penyelenggaraan kelitbangan yang sebelumnya tersebar di berbagai perangkat daerah, dilaksanakan secara satu pintu oleh perangkat Litbang Daerah, termasuk kegiatan penyiapan naskah Akademis/pokok pikiran dalam menindaklanjuti program legislasi daerah.

Tabel 2.191 Capaian Indikator Pembangunan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016–2020

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	REALISASI CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Penelitian dan Pengembangan					
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	55	60	83,3	66,67	50

Sumber : Bappeda Litbang (2014-2017) dan Balitbangda (2018-2021) Provinsi Sulbar

2.4.37 Urusan Pengawasan

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah serta kegiatan pengawasan lainnya.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu, Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

2.4.38 Urusan Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja wakil rakyat, mulai dari Perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang kerap difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Terbitnya Peraturan Daerah (Perda) tidak terlepas dari keberadaan fasilitas sekretariat DPRD. Di mana, pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sekretariat DPRD memfasilitasi proses pembuatan draf Raperda melalui

penganggaran dan penyusunan Naskah Akademik (NA). Sebagaimana yang termuat dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 206 lembaran ke-113 paragraf ke-2 sistem pendukung DPRD.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai payung hukum Sekretariat DPRD menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD adalah sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yaitu unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memasukkan Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung atau subsistem dalam keutuhan sistem kinerja organisasi DPRD. Artinya bahwa kinerja sekretariat dewan terintegrasi dengan wakil rakyat.

Sekretariat dewan tidak berhenti sampai pada fungsi dukungan teknis administrasi saja, namun terpersonalisasi di dalam posisi Sekretaris DPRD itu sendiri. Berdasarkan amanat undang-undang, penyelenggaraan tugas administrasi kesekretariatan dilaksanakan Sekretaris DPRD. Tugas itu, tidak hanya dipahami melalui pendekatan formalistis-birokratis. Namun, pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Sehubungan dengan itu, sebuah konsep baru mulai diperkenalkan yaitu konsep (good Governance).

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, dimana Kepada Daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan otonomi daerah. Sehingga daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur semua urusan pemerintah di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan otonomi daerah ini tentu akan berdampak pada pembebanan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang semakin besar, maka dibutuhkan anggaran yang lebih besar pula untuk dapat memenuhi kebutuhan terutama untuk membiayai urusan yang menjadi kewajiban pemerintah.

Oleh karena itu, desentralisasi kewenangan tersebut diikuti dengan desentralisasi fiskal yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah pusat memberikan bagian dana bagi hasil yang lebih besar kepada Pemerintah daerah dari sumber-sumber penerimaan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, selain itu Pemerintah juga melakukan penguatan fiskal daerah dengan penetapan Undang-undang 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga diharapkan terdapat peningkatan pendapatan daerah yang signifikan. Hal ini bertujuan agar daerah memiliki kemampuan keuangan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Berkaitan dengan aturan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud, diwujudkan dalam APBD yang merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah melalui suatu sistem yang terintegrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan. Struktur APBD Sulawesi Barat terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; dan (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kondisi keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah. Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018–2022 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri atas: (1) Penerimaan Pajak Daerah; (2) Penerimaan Retribusi Daerah; (3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun Penerimaan Dana Perimbangan bersumber dari: (1) Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak; (2) Dana Alokasi Umum; dan (3) Dana Alokasi Khusus. Sedangkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah bersumber dari: (1) Bantuan/Hibah; (2) Dana Penyesuaian; dan (3) Dana Darurat

Perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalami progress yang baik dengan ditandai peningkatan dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun anggaran 2018–2021, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang baik yaitu dari Rp. 1,819 Triliun lebih pada tahun 2018 menjadi Rp. 1,855 Triliun lebih pada tahun 2021 atau mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 1 persen. Perkembangan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat kurun waktu Tahun Anggaran 2018–2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2018–2022

No.	Uraian	2018 Rp	2019 Rp	2020 Rp	2021 (Per tgl 22 Des) Rp	APBD 2022*) Rp	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Pendapatan Daerah	1.819.085.595.566,52	2.034.819.568.402,74	2.028.512.932.815,55	1.855.994.070.402,41		1%
1	Pendapatan Asli Daerah	301.499.588.174,52	345.208.054.041,74	351.282.034.348,55	349.318.511.432,59		5%
1 . 1 . 1	Pajak Daerah	272.232.842.792,30	291.493.654.113,00	289.998.674.686,00	304.889.181.135,00		4%
1 . 1 . 2	Retribusi Daerah	7.280.352.395,00	24.203.115.569,00	1.049.116.700,00	2.790.002.960,00		26%
1 . 1 . 3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	6.084.937.047,00	9.215.164.239,00	12.867.247.793,00	11.919.270.227,00		28%
1 . 1 . 4	Lain-Lain PAD yang sah	15.901.455.940,22	20.296.120.120,74	47.366.995.169,55	29.720.057.110,59		41%
1 . 2	Dana Perimbangan	1.515.760.142.209,00	1.688.130.947.611,00	1.672.948.374.262,00	1.499.741.105.708,00		0,04%
1 . 2 . 1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	18.969.754.669,00	13.152.404.952,00	16.257.305.716,00	17.135.120.990,00		-0,55%
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	1.025.033.063.000,00	1.064.068.728.000,00	968.832.936.000,00	970.759.131.301,00		-1,65%
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus (Fisik)	110.699.226.616,00	179.522.660.610,00	245.374.654.244,00	144.715.492.092,00		19%
1 . 2 . 4	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	342.808.097.924,00	395.302.993.049,00	434.066.232.302,00	350.689.697.325,00		2%
	DID	18.250.000.000,00	36.084.161.000,00	8.417.246.000,00	16.441.664.000,00		39%
1 . 3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	1.825.865.183,00	1.480.566.750,00	4.282.524.205,00	6.934.453.261,82		77%
1 . 3 . 1	Hibah	324.000.000,00	336.000.000,00	3.440.452.000,00	6.934.453.261,82		343%
	Pendapatan Lainnya	1.501.865.183,00	1.144.566.750,00	842.072.205,00	-		-25%
1 . 3 . 2	Dana darurat	-	-	-	-		-
1 . 3 . 3	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya**)	-	-	-	-		-
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus***)	-	-	-	-		-
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-		-

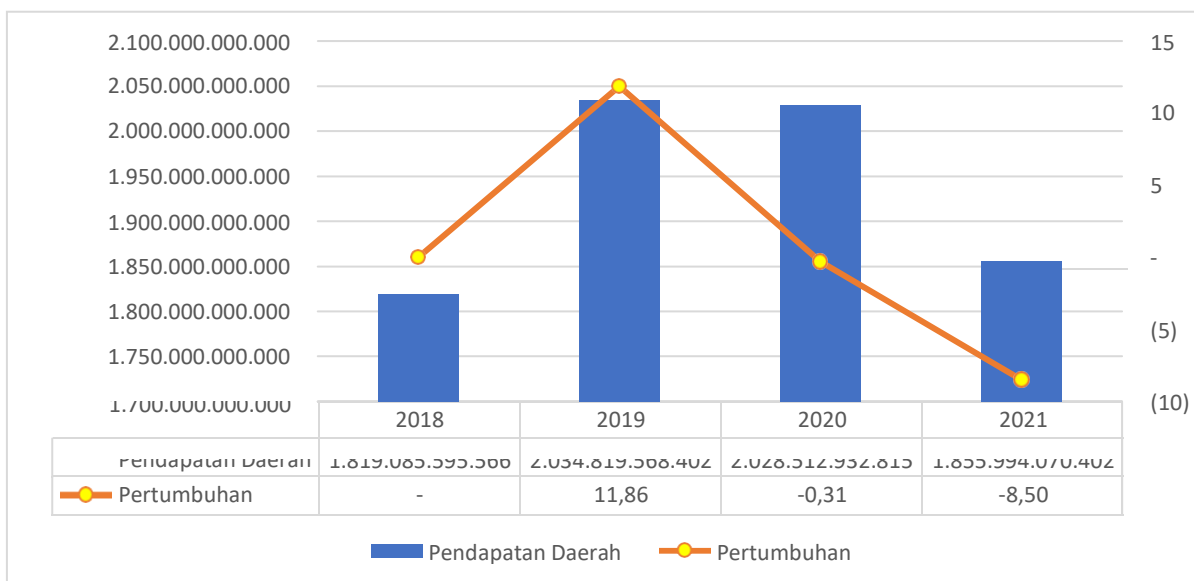
Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022

Lanjutan Tabel 3.1

Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022

Jika kita melihat pada realisasi Pendapatan Daerah berdasarkan data di tabel 3.1, perkembangan dan pertumbuhan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2021 cenderung mengalami penurunan. Penurunan pendapatan daerah terjadi pada kurun waktu tahun 2019–2020 sebesar 0,31 persen dan kembali terjadi penurunan pada kurun waktu tahun 2020–2021 sebesar -8,50 persen. Penurunan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan dampak kondisi pandemi Covid 19.

Grafik 3.1
Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2018–2021



Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022 (diolah)

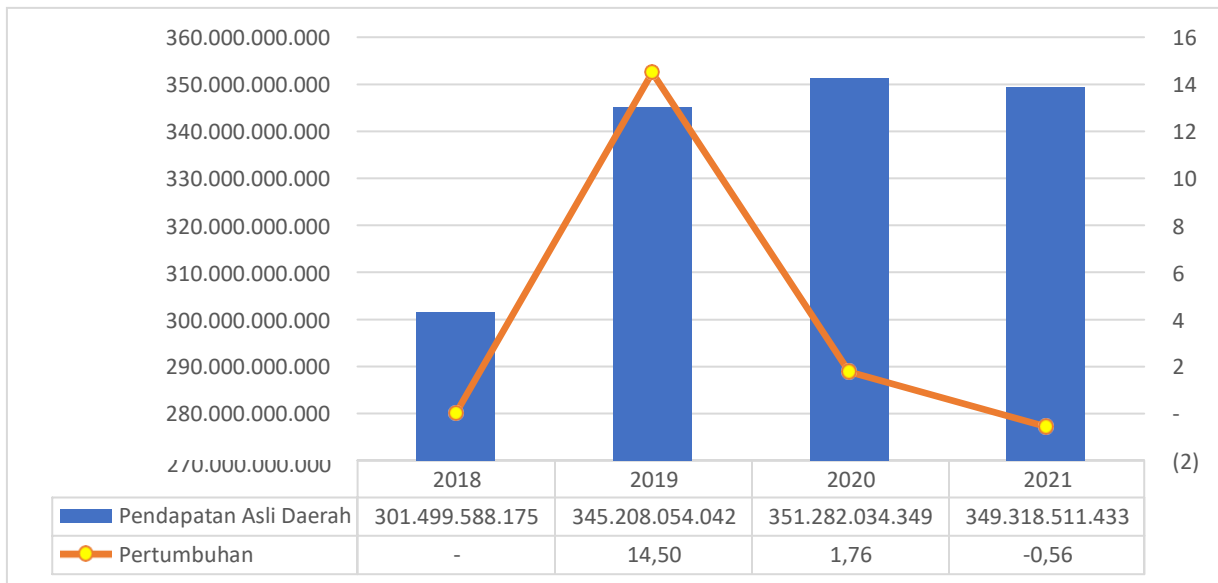
1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah, oleh karenanya Pendapatan Asli Daerah sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya.

Berdasarkan data pada tabel 3.1 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2018–2021 menunjukkan tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5 persen dari sebesar Rp.301.499.588.174,52,- pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.349.318.511.432,59 pada tahun 2021. Pendapatan Asli Daerah Provinsi

Sulawesi Barat bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat kurun waktu Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.2
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2018–2021

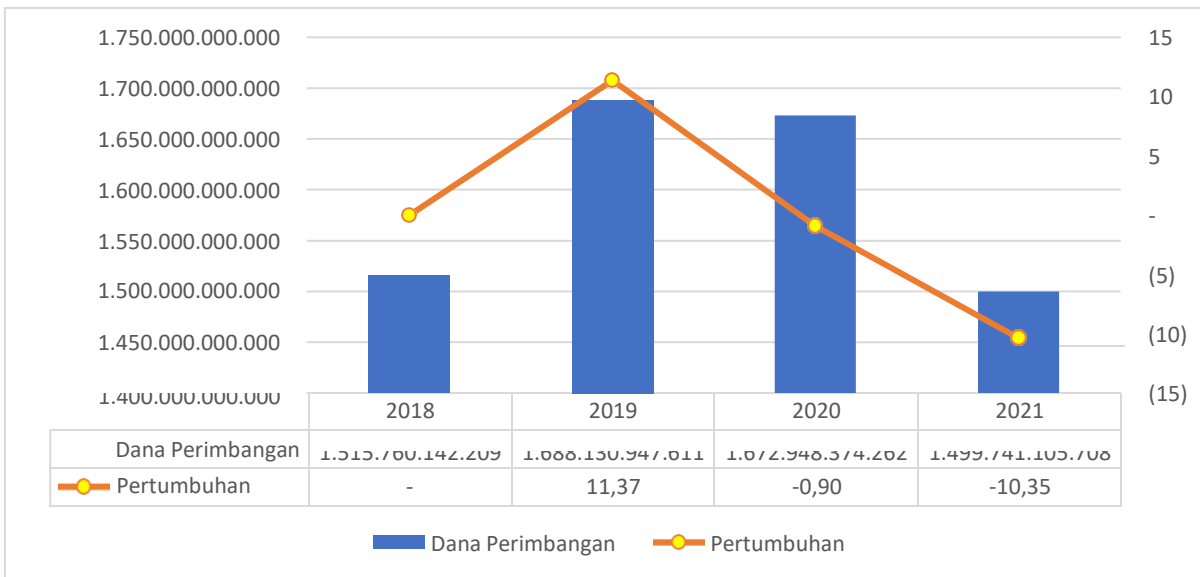


Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022 (diolah)

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain bertujuan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya juga dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan data pertumbuhan realisasi APBD Tahun Anggaran 2018–2022 pada Tabel 3.1, menunjukkan bahwa dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,04 persen dimana pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,515 Triliun menjadi sebesar Rp. 1.499 Triliun pada tahun 2021. Pertumbuhan Dana Perimbangan selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini

Grafik 3.3
Pertumbuhan Dana Perimbangan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2018–2021



Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022 (diolah)

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diperoleh dalam APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022 bersumber dari Hibah dan pendapatan lainnya. Berdasarkan data pertumbuhan realisasi Pertumbuhan APBD Tahun Anggaran 2018–2022 pada tabel 3.1, penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Lain-Lain yang Sah menggambarkan fluktuatif karena penerimaan ini bukan bersumber dari potensi yang dimiliki oleh Daerah, melainkan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah. Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2018–2021 dapat dilihat pada Grafik 3.4 berikut.

Grafik 3.4
Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 - 2021



Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022 (diolah)

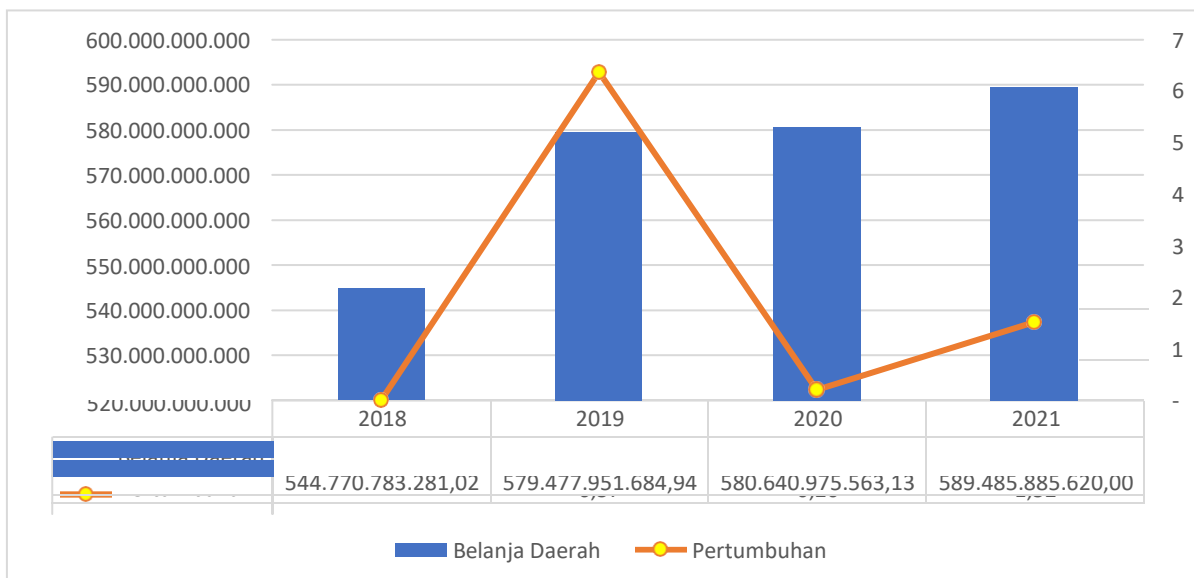
B. Belanja Daerah

Belanja daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018–2022, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan, dengan memperhatikan kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan pengaturan pengelolaan keuangan daerah khususnya pada struktur belanja daerah. Jika didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah diklasifikasikan menjadi dua jenis belanja yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada SKPD seperti belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa dan belanja modal sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Untuk kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Untuk mengukur kinerja keuangan masa lalu, masih dilakukan pengukuran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan data tabel 3.1 Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang diperuntukkan pada pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama cenderung mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,70 persen. dari sebesar Rp. 544.770.783.281,02 - pada tahun 2018 menurun menjadi Rp.589.485.885.620,00- pada tahun 2021. Perkembangan Belanja Provinsi Sulawesi Barat kurun waktu Tahun 2018–2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.9
Pertumbuhan Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat
serta Prioritas Utama Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2018–2021



Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022 (diolah)

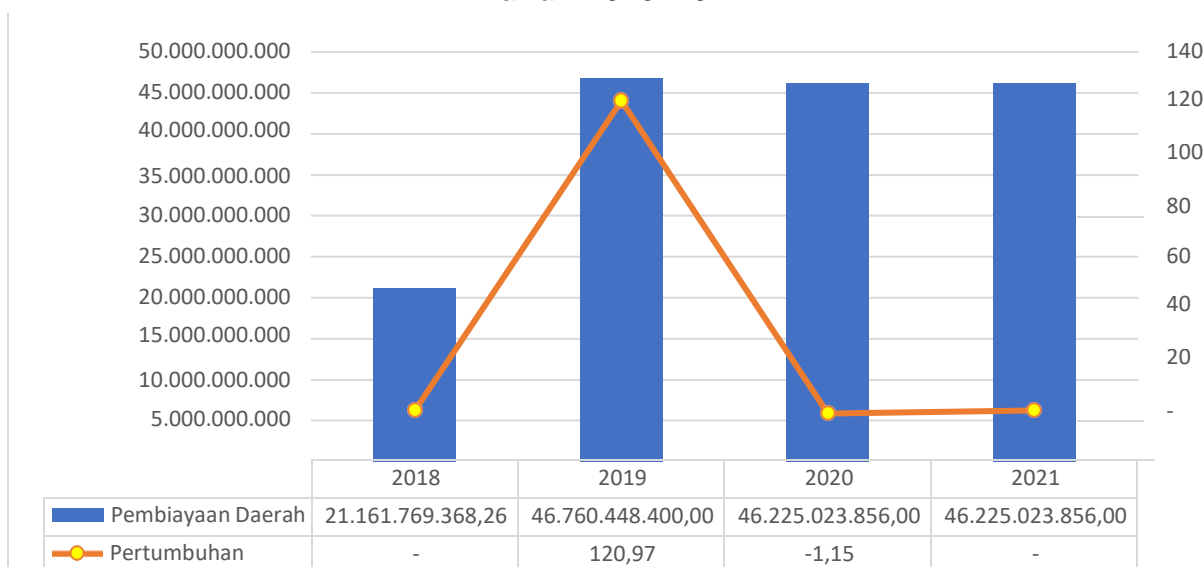
C. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pembiayaan daerah terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA).

Berdasarkan data tabel 3.1, Pembiayaan Provinsi Sulawesi Barat. menunjukkan tren meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 39,94 persen dari sebesar Rp.21.161.769.368,26- pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.46.225.023.856,- pada tahun 2021. Perkembangan pembiayaan daerah Provinsi Sulawesi Barat kurun waktu Tahun 2018–2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik
Pertumbuhan Pembiayaan Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2018–2021



Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022 (diolah)

3.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama kurun waktu 2016–2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

URAIAN		2016	2017	2018	2019	2020
ASET						
ASET LANCAR		55.278.508.070,13	56.011.389.972,26	185.618.953.338,30	118.193.238.105,78	126.907.671.826,56
	Kas di Kas Daerah	44.797.384.371,47	40.560.235.360,35	128.352.382.471,09	83.881.386.031,63	91.643.605.740,52
	Kas di Bendahara Penerimaan	1.561.554.300,00	129.197.811,00	38.714.100,00	4.687.500,00	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	262.182.469,00	1.007.164.169,00	802.308.171,80	13.966.241.259,40	3.105.284.886,77
	Kas di Dana Kapitasi JKN	45.219.700,00	121.311.585,00	156.153.112,00	40.544.577,00	83.047.708,00
	Kas di Bendahara BOS					360.957.261,40
	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD					6.408.286.916,00
	Investasi Jangka Pendek					
	Piutang Pajak					
	Piutang Retribusi		2.478.761.900,00	3.356.361.069,00	2.726.690.985,00	
	Penyisihan Piutang Pajak					
	Beban di Bayar di Muka	150.618.398,66	255.808.677,91	393.080.575,41	387.578.723,75	103.534.053,67
	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara					
	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah					
	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pusat					
	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya					
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran					
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi					
	Piutang Lainnya			1.766.255.800,00	1.766.255.800,00	1.766.255.800,00
	Persediaan	8.461.548.831,00	11.458.910.469,00	50.753.698.039,00	15.419.853.229,00	23.436.699.460,20
Jumlah Aset Lancar		55.278.508.070,13	56.011.389.972,26	185.618.953.338,30	118.193.238.105,78	126.907.671.826,56
INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Non-Permanen					
	Pinjaman Jangka Panjang					
	Investasi dalam Surat Utang Negara					
	Investasi dalam Proyek Pembangunan					

URAIAN		2016	2017	2018	2019	2020
	Investasi Non-Permanen Lainnya					
	Investasi Dana Bergulir	1.832.449.250,00	1.832.449.250,00	1.832.449.250,00	1.832.449.250,00	1.832.449.250,00
	Cadangan Penyisihan Piutang Dana Bergulir	(1.832.449.250,00)	(1.832.449.250,00)	(1.832.449.250,00)	(1.832.449.250,00)	(1.832.449.250,00)
	Investasi Dana Bergulir Netto					
	Jumlah Investasi Non Permanen					
	Investasi Permanen					
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	18.000.000.000,00	28.000.000.000,00	41.874.949.647,00	42.512.827.173,00
	Investasi Permanen Lainnya					
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	10.000.000.000,00	18.000.000.000,00	28.000.000.000,00	41.874.949.647,00	42.512.827.173,00
	ASET TETAP					
	Tanah	283.904.629.878,00	354.647.598.378,00	399.524.182.934,00	444.116.291.341,00	456.742.505.268,00
	Peralatan dan Mesin	390.380.083.588,02	561.848.017.714,48	640.865.548.318,36	705.599.707.922,74	855.122.957.014,55
	Gedung dan Bangunan	607.232.656.020,84	1.028.300.283.603,98	1.321.788.645.978,31	1.470.230.349.796,53	1.570.635.915.133,07
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	730.991.826.600,18	921.040.506.702,18	984.166.875.489,18	1.157.352.984.498,75	1.250.033.419.757,82
	Aset Tetap Lainnya	108.796.571.465,68	16.026.368.662,86	17.950.482.582,86	17.197.420.432,10	21.074.002.243,10
	Konstruksi dalam Pengerjaan	141.744.120.417,59	238.591.728.435,19	77.008.229.771,67	24.510.018.051,31	16.823.526.986,31
	Akumulasi Penyusutan	(480.626.174.274,72)	(774.329.645.186,31)	(970.743.486.283,79)	(1.140.211.111.249,17)	(1.432.639.303.308,81)
	Jumlah Aset Tetap	1.782.423.713.695,59	2.346.124.858.310,37	2.470.560.478.790,59	2.678.795.660.793,26	2.737.793.023.094,04
	DANA CADANGAN					
	Dana Cadangan					
	Jumlah Dana Cadangan					
	ASET LAINNYA					
	Tagihan Penjualan Angsuran	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00		
	Tuntutan Perbendaharaan				180.000.000,00	180.000.000,00
	Tuntutan Ganti Rugi	753.824.155,00	753.824.155,00	753.824.155,00	753.824.155,00	753.824.155,00
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga					
	Aset Tak Berwujud	21.042.910.225,20	16.163.039.407,40	15.805.855.806,40	17.335.770.955,40	13.048.700.261,60
	Kas yang dibatasi penggunaannya			763.172.500,00	174.350.000,00	6.215.586.282,50
	Aset Lainnya	29.631.998.865,61	60.292.655.503,11	56.346.216.049,91	55.614.241.901,93	48.256.812.825,73
	Jumlah Aset Lainnya	51.608.733.245,81	77.389.519.065,51	73.849.068.511,31	74.058.187.012,33	68.454.923.524,83
	JUMLAH ASET	1.899.310.955.011,53	2.497.525.767.348,14	2.758.028.500.640,20	2.912.922.035.558,37	2.975.668.445.618,43

URAIAN		2016	2017	2018	2019	2020
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
	Utang Pegawai			2.261.179.177,00		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	198.534.589,00	291.902,00			3.298.557.273,17
	Utang Bunga	715.077.398,59	1.649.124.092,18		1.343.735.763,00	1.197.051.563,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		27.441.629.217,00	46.225.023.856,00	46.225.023.856,00	46.225.023.856,00
	Pendapatan diterima dimuka					
	Utang Belanja	1.427.334.947,00	9.026.120.797,90			
	Utang transfer			270.274.821,08	1.437.832.643,38	
	Utang Kepada Pihak Ketiga			20.418.021.910,74		
	Utang Jangka Pendek Lainnya	30.734.209.837,00	53.726.762.497,00		20.003.748.800,07	23.948.170.612,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	33.075.156.771,59	91.843.928.506,08	69.174.499.764,82	69.010.341.062,45	74.668.803.304,17
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank				115.562.559.629,00	106.396.847.385,00
	Utang Dalam Negeri - Obligasi					
	Utang Jangka Panjang Lainnya	84.202.633.618,00	155.502.565.563,00	161.787.583.485,00	151.000.000,00	1.325.513.678,50
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	84.202.633.618,00	155.502.565.563,00	161.787.583.485,00	115.713.559.629,00	107.722.361.063,50
	JUMLAH KEWAJIBAN	117.277.790.389,59	247.346.494.069,08	230.962.083.249,82	184.723.900.691,45	182.391.164.367,67
EKUITAS DANA						
	JUMLAH EKUITAS DANA	1.782.033.164.621,94	2.250.179.273.279,06	2.527.066.417.390,38	2.728.198.134.866,92	2.793.277.281.250,76
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.899.310.955.011,53	2.497.525.767.348,14	2.758.028.500.640,20	2.912.922.035.558,37	2.975.668.445.618,43

Perkembangan jumlah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016-2020, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 12,42 persen dari sebesar Rp.1.899.310.955.011,53 pada tahun 2016 dan meningkat menjadi sebesar Rp 2.975.668.445.618,43 pada tahun 2020. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya) semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan. Berikut data pencapaian selama kurun waktu tahun 2016–2020:

- a) Aset Lancar mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 50,94 persen dengan nilai aset tahun 2020 sebesar Rp.126.907.671.826,56;
- b) Investasi Jangka Panjang mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 46,66 persen dengan nilai tahun 2020 sebesar Rp.42.512.827.173,00;
- c) Aset tetap meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 11,89 persen dengan nilai tahun 2020 sebesar Rp.2.737.793.023.094,04; dan
- d) Aset Lainnya meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,20 persen dengan nilai tahun 2020 sebesar Rp.68.454.923.524,83.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Perkembangan jumlah Kewajiban Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016–2020, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 20,75 persen dari sebesar Rp.117.277.790.389,59 meningkat menjadi sebesar Rp.182.391.164.367,67

- a) Kewajiban Jangka Pendek mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 40,24 persen dengan nilai kewajiban pendek pada tahun 2020 sebesar Rp.74.668.803.304,17;
- b) Kewajiban Jangka Panjang mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 13,33 persen dengan nilai kewajiban jangka panjang pada tahun 2020 sebesar Rp.107.722.361.063,50;

3.1.2.1 Analisis Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Berikut rasio neraca daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Analisis Rasio Neraca Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016–2020

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Rasio Likuiditas					
	Rasio Lancar	1,67	0,61	2,68	1,71	1,70
	Rasio Quick	1,42	0,49	1,95	1,49	1,39
2	Rasio Solvabilitas					
	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,06	0,10	0,08	0,06	0,06
	Rasio Hutang terhadap Modal	0,07	0,11	0,09	0,07	0,07
3	Rasio Aktivitas					
	Rata-rata umur piutang	0,37	0,34	0,34	0,31	0,31

Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel 3.3, pada rasio likuiditas sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menunjukkan baik nilai rasio lancar maupun rasio quick masih berada diatas angka 1, kondisi ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk rasio solvabilitas sebagai instrumen untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya, baik nilai rasio total hutang terhadap total asset dan rasio hutang terhadap modal cenderung berfluktuatif, meningkat pada kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2017, namun kembali menurun pada tahun 2018 dan konstan pada kurun waktu tahun 2019–2020, kondisi pertumbuhan rasio solvabilitas yang cenderung konstan menunjukkan peranan hutang terhadap perkembangan aset dan modal belum cukup berpengaruh.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Kemampuan fiskal daerah (*fiscal capacity*) menjadi faktor yang penting dalam memastikan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan umum serta pembangunan daerah. Dalam kurun waktu Tahun 2018–2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diarahkan pada upaya mengoptimalkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga berhasil mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Terbukti hingga saat ini yakni mulai tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah memperoleh penilaian atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini merupakan bukti nyata pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas yang tergambar dalam informasi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah diarahkan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah menyusul ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Beberapa kegiatan strategis yang berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah antara lain:

- a. Pada tahapan ekstensifikasi, telah dilakukan penyusunan Peraturan Daerah di bidang pendapatan, masing-masing:
 1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak ketiga dalam Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Pada tahapan intensifikasi, upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan dengan mengintensifkan dan mengefektifkan kegiatan:
 1. Pelaksanaan Program ABM (Anugrah Buat Masyarakat) dalam bentuk pembebasan denda Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan;

2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak dan retribusi daerah (perbaikan/renovasi tempat pelayanan, penambahan akses pelayanan pajak dan retribusi daerah);
3. Melakukan penyesuaian regulasi terkait Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak BBNKB serta regulasi Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha;
4. Peningkatan kualitas SDM;
5. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah, lintas Pemerintah Daerah/ sektor/SKPD.
6. Peningkatan monitoring dan evaluasi Pendapatan Daerah;
7. Penegakan Sanksi;
8. Peningkatan inovasi pelayanan kepada masyarakat diantaranya penerapan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat Drive Thru, Samsat Keliling dan Serambi;
9. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik (SMS info pembayaran pajak kendaraan bermotor, pelayanan pembayaran retribusi);
10. Pemutakhiran data objek dan subjek pajak;
11. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Belanja Daerah, atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, belanja daerah dikenal sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah (pemerintah daerah), di samping pos pendapatan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Selama kurun waktu tahun 2018–2021, kebijakan belanja daerah APBD Provinsi Sulawesi Barat diutamakan untuk:

1. Memenuhi Belanja Mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
2. Memenuhi Belanja Wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
3. Menerbitkan regulasi tentang Hibah, Bantuan Sosial dan bantuan keuangan.
4. Menambah Alokasi Belanja Tidak terduga (BTT) untuk penanggulangan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

5. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan
6. Melaksanakan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD 2017–2022.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja Daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditargetkan pada dokumen RPJMN Tahun 2017–2022. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah merupakan instrumen dalam pencapaian visi dan misi pembangunan serta memenuhi kewajiban daerah dalam peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan belanja daerah yang dimulai sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, pemerintah daerah wajib memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Dalam kurun waktu 2017–2022 Pemerintah Sulawesi Barat telah berupaya memperbaiki komposisi belanja ke arah belanja yang mendukung pada penyelenggaraan urusan pemerintah wajib dan pilihan serta belanja prioritas yang mendukung pemenuhan target pembangunan pada rencana pembangunan RPJMD Tahun 2017–2022.

3.2.1.1 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dilakukan untuk mengetahui seberapa besar beban APBD untuk membiayai kebutuhan aparatur yang dibutuhkan sebagai bahan analisis dalam mengambil kebijakan pembelanjaan APBD khusus untuk sektor kebutuhan aparatur pada periode berikutnya. Tabel 3.3 dan tabel 3.4 dibawah ini akan menampilkan realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan perbandingan antara total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total belanja ditambah dengan pengeluaran pembiayaan.

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp) per tgl 22-12-2021	2022*) (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	511.112.126.643,00	527.799.474.077,45	526.563.190.124,50	464.437.509.673,00	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	352.508.131.676,00	356.807.968.344,00	364.371.963.759,00	357.643.797.117,00	
2	Belanja Tambahan Penghasilan *)	145.375.797.976,00	157.514.476.884,45	148.817.668.016,50	97.599.602	
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	6.130.000.000,00	5.832.996.000,00	5.842.000.000,00		
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah*)	-	-	-		
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.098.196.991,00	7.644.032.849,00	7.531.5		
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-			
B	Belanja Langsung	522.547.865.830,32	635.177.935.500,99			
1	Belanja Honorarium PNS*)	4.400.370.000,00	3.856.432.3			
2	Belanja Honorarium Non PNS	1.656.362.000,00	39.46			
3	Belanja Uang Lembur *)	-				
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	513.460.000,0				
5	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS*)	5.156				
6	Belanja Premi Asuransi Kesehatan					
7	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai**)					
8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya*					
9	Belanja Pakaian Khusus dan Ha					
10	Belanja Perjalanan Dinas					
11	Belanja Perjalanan					
12	Belanja Pem					
13	Bela					

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2018–2022

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Presentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Tahun Anggaran 2018	1.033.659.992.473,32	1.943.669.175.666,91	53%
2	Tahun Anggaran 2019	1.162.977.409.578,44	2.172.743.037.054,89	54 %
3	Tahun Anggaran 2020	1.105.246.711.963,20	2.116.167.034.879,51	52 %
4	Tahun Anggaran 2021 per tgl 22-12-2021	807.486.883.080,42	2.408.073.757.748,00	34 %
5	Tahun Anggaran 2022*)			

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan jika dilihat dari sisi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, namun meningkat dari sisi belanja modal yang peruntukannya pada peningkatan sarana prasarana sebagai upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Jika dilihat persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari tahun 2018–2021, untuk tahun 2018 persentase kebutuhan belanja untuk aparatur mencapai 53 persen dari total pengeluaran daerah sedangkan untuk tahun 2019 meningkat menjadi 54 persen. Pada tahun 2020 persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah kembali menurun menjadi 52 persen pada tahun 2020 kemudian menurun kembali menjadi 34 persen pada tahun 2021. Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun–tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Gambaran ini menjadi bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat periode Tahun 2023–2026 terutama terkait dengan penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit atau Pendapatan Daerah lebih kecil dari belanja daerah, maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Adapun Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang surplus dan harus digunakan untuk Pengeluaran Daerah. Oleh sebab itu, Pembiayaan Daerah terdiri Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Dalam kurun waktu tahun anggaran 2018–2021, defisit riil APBD Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2018 data menunjukkan terjadi surplus sebesar 41,3 Miliar sedangkan pada tahun 2019 terjadi defisit sebesar 31,4 Miliar. Pada tahun 2020 terjadi defisit sebesar 35,8 Miliar dan pada tahun 2021 terjadi surplus APBD yaitu sebesar 188,1 Miliar. Defisit Riil APBD pada kurun waktu tahun anggaran 2019–2020 kemudian ditutupi seluruhnya oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya.

Tabel 3.6
Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp) Per Tgl 22-12-2021	2022*) (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.819.085.595.566,52	2.034.819.568.402,74	2.028.512.932.815,55	1.855.994.070.402,41	
	Dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	1.746.622.067.295,98	2.006.026.015.781,60	2.016.633.004.265,66	1.621.667.060.968,66	
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	31.133.965.964,00	60.225.023.856,00	47.725.023.856,00	46.225.023.856,00	
A	Defisit Riil	41.329.562.306,54	-31.431.471.234,86	-35.845.095.306,11	188.101.985.577,75	
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	41.817.617.023,35	129.324.330.602,89	97.892.859.368,03	61.024.110.459,00	
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang diPisahkan	-	-	-	-	
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	37.059.311.612,00	75.000.000.000,00	
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	46.202.378.525,00	-	-	-	
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	88.019.995.548,35	129.324.330.602,89	134.952.170.980,03	136.024.110.459,00	
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	129.349.557.854,89	97.892.859.368,03	99.107.075.673,92	324.126.096.036,75	

Tabel 3.7
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018–2022

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%) per Tgl 22-12-2021	2022*) (%)
	Defisit Riil					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	23,95	100	0,72	25,59	
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	27,68	74,41	
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	
6	Penerimaan Piutang Daerah	76,05	-	-	-	
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-	-	

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu strategis menjadi bagian terpenting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Analisis permasalahan yang dilakukan secara tepat akan meningkatkan upaya intervensi melalui kebijakan dalam mengatasi permasalahan. Demikian juga dengan pemilihan isu strategis yang sesuai dan relevan akan berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan pembangunan yang akan ditempuh oleh para pengambil kebijakan. Isu Strategis merupakan kondisi eksternal yang berpengaruh positif maupun negatif yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan dan sangat menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Permasalahan pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan daerah akan dibagi menjadi dua bagian yaitu permasalahan pembangunan lingkup makro yang terdiri dari masalah pokok, masalah dan akar masalah dan yang kedua adalah permasalahan berdasarkan urusan pemerintahan. Sedangkan isu strategis yang disusun dikelompokkan berdasarkan isu global, nasional, dan isu regional di wilayah Sulawesi. Identifikasi dan perumusan permasalahan dan isu strategis tersebut merupakan dasar dalam menetapkan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan periodisasi Rencana Pembangunan Daerah tersebut.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Kinerja Pembangunan pada Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan itu dibuat. Tantangan dan permasalahan pembangunan kedepan dari seluruh aspek akan semakin besar, sehingga kita perlu meningkatkan kinerja pembangunan dan memanfaatkan berbagai potensi dan peluang yang ada. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Sulawesi Barat akan menjadi fokus dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026 mendatang. Berikut ini berbagai permasalahan pembangunan di Sulawesi Barat yang terbagi atas dua bagian, antara lain Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (level makro daerah) dan permasalahan pembangunan daerah pada level mikro sektoral / penyelenggaran urusan pemerintahan.

4.1.1. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Level Makro

4.1.1.1. Melambatnya Kinerja Ekonomi

Kondisi Perekonomian Sulawesi Barat mengalami penurunan dan perlambatan sejak lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tumbuh sebesar 6,62 persen, menurun menjadi 6,25 persen di tahun 2018.

Memasuki tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan menjadi 5,66 persen, meskipun di tiga tahun tersebut pertumbuhannya masih berada di atas rata-rata nasional. Namun memasuki periode tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mengalami kontraksi minus 2,42 persen bahkan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yang juga mengalami kontraksi minus 2,07 persen pada saat itu. Kondisi tersebut merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, namun juga berdampak pada sektor ekonomi di daerah. Penurunan ekonomi secara global maupun nasional, akan mempengaruhi kinerja ekonomi di Sulawesi Barat, hal ini sebagai dampak dari menurunnya sisi permintaan dan penawaran karena kurangnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya pembatasan sosial yang berdampak pada gangguan logistik barang.

Dampak covid-19 sangat terasa pada tahun 2020, hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan terjadinya kontraksi pada beberapa lapangan usaha. Terdapat sebanyak 10 lapangan usaha mengalami kontraksi diantaranya adalah lapangan usaha konstruksi (-13,31%), disusul Administrasi Pemerintahan (-8,61%), penyediaan akomodasi dan makan minum (-7,19%), jasa pendidikan (-6,65%), Transportasi dan Pergudangan (-6,47%), Jasa perusahaan (-5,42%), Jasa lainnya (5,08%), Pertambangan dan Penggalian (-4,90%), Industri Pengolahan (-3,52%), Perdagangan (-2,60%). Sedangkan lapangan usaha yang masih mengalami pertumbuhan positif antara lain Pengadaan Listrik dan Gas (6,85%) hal ini didukung oleh kebijakan Work From Home yang meningkatkan konsumsi listrik rumah tangga, selanjutnya adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (6,76%), Informasi dan Komunikasi (5,73%), Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial (2,36%), Real Estate (1,90%), Pengadaan Air dan pengelolaan sampah (1,63%), serta pertanian yang menjadi kontributor terbesar ekonomi di Sulawesi Barat hanya tumbuh sebesar 0,54 persen di tahun 2020.

Penurunan kinerja sektor pertanian dalam beberapa tahun terakhir dan puncaknya pada tahun 2020, sangat dipengaruhi oleh penurunan produksi, produktivitas dan permasalahan nilai tambah sektor pertanian yang belum berjalan optimal. Hal itu kemudian memberi dampak terhadap melambatnya kinerja ekonomi secara keseluruhan di Sulawesi Barat. Belum optimalnya pengelolaan komoditi hulu hingga ke hilir, mulai dari upaya penerapan teknologi, penyiapan SDM, sarana prasarana, dan akses pasar menjadi sebuah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan intervensi kebijakan dalam memaksimalkan sektor tersebut agar dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi kedepan khususnya di Sulawesi Barat.

4.1

Tabel
Pohon Masalah
"Melambatnya Kinerja Ekonomi"

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
- Melambatnya Kinerja Ekonomi	- Belum Optimalnya Produksi, Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengelolaan komoditi sektor pertanian. - Rendahnya penerapan teknologi Pertanian. - Rendahnya SDM Pertanian. - Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana produksi. - Minimnya penggunaan teknologi untuk peningkatan dan pengolahan produk hasil Pertanian. - Masih rendahnya akses terhadap pemasaran produk. - Belum maksimalnya pelatihan dan pendampingan bagi UMKM. - Terbatasnya akses terhadap sumber permodalan.

4.1.1.2. Rendahnya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin

Standar hidup dan daya beli masyarakat masih menjadi permasalahan utama di Sulawesi Barat. Tingkat kemiskinan yang tinggi baik perkotaan dan perdesaan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan masyarakat menjadi masalah yang dapat menciptakan kesenjangan antar lapisan masyarakat. Standar hidup dan kualitas hidup penduduk dapat dilihat melalui ukuran Pendapatan per kapita. Pendapatan perkapita penduduk di Sulawesi Barat menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional dimana pada tahun 2017 sebesar 29,6 juta dan di tahun 2019 meningkat menjadi 34,1 juta. Memasuki tahun 2020 pendapatan perkapita mengalami penurunan menjadi 33,3 juta, hal ini seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat dampak dari pandemi covid-19.

Ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat meskipun mengalami fluktuasi namun masih berada dalam tingkat ketimpangan sedang. Berdasarkan data indeks gini rasio atau ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat pada tahun 2017 sebesar 0,339 poin mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 0,366 poin. Kondisi tersebut menggambarkan ketimpangan pendapatan masyarakat mengalami kenaikan, dimana gini rasio perkotaan sebesar 0,451 poin dan gini rasio perdesaan 0,326 poin tahun 2021. Terjadinya ketimpangan pendapatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap kesempatan kerja dan akses terhadap modal usaha, rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, serta tingginya ketimpangan kekayaan diantara masyarakat.

Standar hidup juga sangat erat kaitannya dengan masalah kemiskinan di Sulawesi Barat yang cukup tinggi masih berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2017 kemiskinan sebesar 11,18 persen dan mengalami penurunan tahun 2019 menjadi 10,95 persen, namun memasuki tahun 2020 angka kemiskinan meningkat menjadi 11,50 persen, sebuah angka yang cukup tinggi dalam capaian kurun waktu lima tahun terakhir, hal tersebut salah satunya disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang sangat berdampak pada masyarakat yang rentan mengalami kemiskinan. Kemudian pada tahun 2021 tingkat kemiskinan kembali mengalami kenaikan pada angka 11,85 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 165,99 ribu jiwa. Adapun penduduk miskin terbesar berada pada wilayah perdesaan sebesar 82,31 persen dan miskin perkotaan sekitar 17,69 persen. Tingginya penduduk miskin di Sulawesi Barat, disebabkan oleh belum maksimalnya upaya pemberdayaan masyarakat khususnya pada wilayah kantong kemiskinan, selain itu masih rendahnya pendidikan dan keterampilan masyarakat ekonomi bawah, belum optimalnya perlindungan dan jaminan Sosial serta belum optimalnya pengelolaan data Kemiskinan yang memiliki validitas tinggi yang dapat menjadi rujukan intervensi kebijakan. Dari total penduduk miskin yang ada, sebanyak 71,7 persen diantaranya berada pada 3 kabupaten yaitu Majene, Mamasa dan Polewali Mandar sehingga intervensi perlu dioptimalkan pada tiga kabupaten prioritas tersebut.

Permasalahan rendahnya standar hidup juga erat kaitannya dengan rendahnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Belum optimalnya pengembangan investasi dan lapangan usaha dalam menyerap tenaga kerja secara besar menyebabkan kesempatan kerja yang terbatas. Kondisi tingkat pengangguran di Sulawesi Barat mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 sebesar 3,21 persen, menurun menjadi 2,98 persen di tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 3,32 persen dan kembali mengalami perbaikan di tahun 2021 yaitu sebesar 3,13 persen, dengan jumlah pengangguran sebanyak 22,21 ribu jiwa. Kondisi pandemi covid-19 juga sangat mempengaruhi terhadap upaya penurunan tingkat pengangguran di Sulawesi Barat. Adapun tingkat pengangguran terbesar berada di Kabupaten Majene sebesar 4,26 persen dan yang terendah adalah Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 2,71 persen. Meskipun pengangguran di Sulawesi Barat masih tergolong rendah, hanya saja kualitas dari tenaga kerja kita masih perlu mendapat perhatian, dimana pekerja di Sulawesi Barat masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah (SLTP ke bawah) yaitu sebesar 64,43 persen atau sekitar 433,6 ribu jiwa. Selain itu, masih rendahnya kompetensi dan skill tenaga kerja dan minimnya pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja serta belum optimalnya pendidikan vokasi dan peningkatan wirausaha baru menjadi mata rantai permasalahan dalam peningkatan produktivitas dan lapangan usaha masyarakat di Sulawesi Barat.

4.2

Tabel

Pohon Masalah
 “Rendahnya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin”

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
- Rendahnya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin	- Tingginya Angka Kemiskinan.	- Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat. - Rendahnya pendidikan dan keterampilan masyarakat ekonomi bawah. - Belum optimalnya perlindungan dan jaminan Sosial. - Belum optimalnya pengelolaan Data Kemiskinan yang Valid.
-	- Masih Adanya Ketimpangan Pendapatan Masyarakat.	- Rendahnya akses terhadap kesempatan kerja dan akses terhadap modal usaha. - Rendahnya keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. - Tingginya ketimpangan kekayaan.
-	- Masih Rendahnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.	- Belum Optimalnya pengembangan Investasi dan Lapangan Usaha yang dapat menyerap tenaga Kerja. - Masih rendahnya Kompetensi dan Skill Tenaga kerja. - Minimnya sertifikasi tenaga kerja. - Belum optimalnya pendampingan bagi tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). - Belum optimalnya peningkatan wirausaha baru.

4.1.1.3. Masih rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat mengalami peningkatan meskipun belum signifikan. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 pertumbuhan IPM selalui tumbuh positif. Pada tahun 2017 sebesar 64,30 poin meningkat menjadi 66,36 poin pada tahun 2021. Meskipun demikian, IPM Sulawesi Barat masih berada pada kategori level sedang dan masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 72,29 poin yang sudah dalam kategori level tinggi. Belum signifikannya kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sangat dipengaruhi oleh masih rendahnya derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berdampak pada nilai indeks yang masih rendah.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia dari sektor pendidikan yaitu Rata-rata lama sekolah, dimana RLS di Sulawesi Barat mencapai 7,96 tahun berada di

bawah rata-rata nasional sebesar 8,54 tahun. Komponen berikutnya adalah Harapan Lama Sekolah. HLS di Sulawesi Barat sebesar 12,86 tahun di bawah rata-rata nasional sebesar 13,08 tahun. Permasalahan utama yang terkait sektor pendidikan di Sulawesi Barat yaitu masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, masih rendahnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan serta perlunya perubahan pola pikir dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini berdasarkan data angka anak tidak sekolah yang masih tinggi sebesar 10,25% atau sekitar 32 ribu anak di Sulawesi Barat yang tidak bersekolah, merupakan yang tertinggi di Kawasan Regional Sulawesi.

Dari dimensi kesehatan, Angka Harapan Hidup di Sulawesi Barat sebesar 65,25 tahun sementara nasional sebesar 71,57 tahun. Rendahnya angka harapan hidup sangat dipengaruhi oleh masih tingginya jumlah kematian bayi sebesar 303 kasus, kematian balita sebesar 325 kasus, dan jumlah kematian Ibu sebesar 46 kasus di tahun 2020. Beberapa permasalahan di sektor kesehatan sangat berkaitan dengan aksesibilitas layanan kesehatan yang berkualitas, perilaku hidup bersih dan sehat yang belum berjalan secara ideal, terbatasnya Sumberdaya Manusia bidang kesehatan terutama tenaga kesehatan yang berkompeten.

Derajat kesehatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti **Lingkungan**, dimana masih terdapat rumah tangga yang belum mampu mengakses air bersih (22,93%) dan masih terdapat rumah tangga yang belum mampu mengakses sanitasi layak (27,25%), faktor yang kedua adalah **Perilaku Kesehatan**, diantaranya proporsi persalinan di fasilitas kesehatan baru mencapai 68,50% (Riskesdas 2018), masih tingginya pernikahan usia anak mencapai 19,20% tertinggi ke-tiga secara nasional. Faktor selanjutnya adalah **Pelayanan kesehatan** terkait dengan penyediaan Akses dan Fasilitas Kesehatan dimana berdasarkan data bahwa Akses Desa/Kelurahan menuju rumah sakit sebesar 46,7%, Rumah sakit bersalin 15,0%, Puskesmas 74,9%, Poliklinik 37,7%, dan Akses Desa/Kelurahan menuju ke tempat Dokter sebesar 63,1% (Podes 2018, TNP2K) dan selanjutnya adalah faktor **keturunan** yang hanya berkontribusi sebesar 5 persen terhadap derajat kesehatan.

Rendahnya kualitas pembangunan manusia di Sulawesi Barat juga disebabkan oleh tingginya angka stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat sebesar 48,02 persen dan pada tahun 2018 angka stunting turun menjadi 41,8 persen, merupakan yang tertinggi kedua secara nasional. Pada tahun 2021 berdasarkan data SSGI Kemenkes, angka stunting mengalami penurunan sebesar 33,8 persen, penurunan tersebut juga diikuti oleh penurunan daerah lainnya yang juga secara masif melakukan kebijakan penanganan stunting, hal itu menyebabkan stunting di Sulawesi Barat meskipun mengalami penurunan namun masih menempati urutan kedua secara nasional di bawah Nusa Tenggara Timur. Stunting sangat erat kaitannya dengan upaya pemenuhan gizi, dimana masih rendahnya pola konsumsi pangan dan akses terhadap pangan bergizi serta sektor terkait lainnya seperti sanitasi dan air bersih yang berkualitas juga sangat mempengaruhi permasalahan stunting.

4.3

Tabel
Pohon Masalah
“Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia”

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
- Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia.	- Masih Rendahnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. - Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. - Rendahnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. - Masih rendahnya jumlah sekolah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). - Masih rendahnya pemenuhan SPM Bidang Pendidikan. - Minimnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. - Masih terbatasnya ketersediaan SDM kesehatan yang berkompeten. - Masih rendahnya tingkat akreditasi pelayanan kesehatan.
-	- Tingginya Angka Prevalensi Stunting	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya pola konsumsi pangan dan akses terhadap pangan bergizi. - Minimnya akses masyarakat terhadap sanitasi dan air bersih yang berkualitas. - Masih tingginya angka pernikahan usia dini.

4.1.1.4. Masih rendahnya tata kelola pemerintahan

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan inti dari sebuah pemerintahan, terutama dalam mengimplementasikan pembangunan daerah. Pengelolaan pemerintahan yang baik akan menciptakan pelayanan publik yang cepat dan bersih sehingga tercipta sinergi yang baik antara pemerintahan dan masyarakat. untuk

mencapai pemerintahan yang baik harus memperhatikan empat elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Keempat hal itu, akan menjadikan pelaksanaan pemerintahan di daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

Rendahnya tata kelola pemerintahan di Sulawesi Barat sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset, pengawasan, SDM aparatur, manajemen pengadaan barang dan jasa serta yang terkait dengan perizinan. Kualitas pelayanan publik yang baik juga sangat menentukan berjalannya tata kelola pemerintahan yang efektif, khususnya untuk pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan dan upaya penataan organisasi pemerintahan. Hal lain yang juga terkait adalah akuntabilitas kinerja yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, manajemen perencanaan dan pelaksanaan kinerja birokrasi.

Capaian Indeks reformasi birokrasi di Sulawesi Barat telah mengalami peningkatan dari “CC” di tahun 2017 menjadi “B” di tahun 2019. Penilaian dilakukan dengan mengukur delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundangundangan, dan pelayanan publik.

4.4

Tabel

Pohon Masalah
“Masih Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan”

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
- Masih Rendahnya Tata Kelola Pemerintahan	- Masih Rendahnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Belum optimalnya manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah. - Belum optimalnya pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). - Masih rendahnya sistem manajemen SDM Aparatur. - Belum optimalnya manajemen pengadaan barang dan jasa. - Belum optimalnya manajemen perizinan.
-	- Masih Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik.	- Masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan. - Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. - Belum optimalnya penataan organisasi.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
-	- Masih Rendahnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.	- Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah sesuai standar. - Belum optimalnya manajemen perencanaan pembangunan daerah. - Masih rendahnya pengelolaan kinerja organisasi.

4.1.1.5. Minimnya Aksesibilitas Infrastruktur yang berkelanjutan

Dalam mendukung berbagai kinerja pembangunan, maka dibutuhkan dukungan infrastruktur sebagai penunjang. Pembangunan infrastruktur dilakukan berbasis wilayah memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan daerah agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Sulawesi Barat. Pembangunan infrastruktur saat ini juga difokuskan dalam rangka peningkatan konektivitas antar wilayah antar kabupaten khususnya dalam membuka akses ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sentra produksi komoditi yang ada di Sulawesi Barat.

Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah masih menjadi masalah utama di Provinsi Sulawesi Barat. Sebagai provinsi yang masih tergolong muda, masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan berbagai infrastruktur konektivitas. Aksesibilitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau secara mudah sangat mempengaruhi distribusi barang maupun jasa. Peningkatan aksesibilitas akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar seperti pendidikan maupun kesehatan. Kondisi mantap jalan provinsi baru mencapai 39,58 persen pada tahun 2020 dan sepertinya sulit memenuhi target akhir di tahun 2022. Disamping itu fasilitas keselamatan jalan masih sangat rendah serta infrastruktur telekomunikasi yang belum sepenuhnya menjangkau daerah khususnya di wilayah perdesaan di Sulawesi Barat.

Di Provinsi Sulawesi Barat terdapat 2 pelabuhan udara, namun hanya satu yang sementara beroperasi dengan kapasitas yang belum optimal dan masih perlu pengembangan. Adapun pelabuhan laut di Sulawesi Barat sebanyak 17 Pelabuhan yang terdiri dari pelabuhan pengumpul sebanyak 2 unit, pelabuhan pengumpan regional sebanyak 4 unit dan pelabuhan pengumpan lokal sebanyak 11 unit, sebagian besar pelabuhan dalam kondisi belum seluruhnya memenuhi standar dan masih dibutuhkan pengembangan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyediaan Infrastruktur Dasar Masyarakat juga masih menjadi kendala di Sulawesi Barat. Infrastruktur dasar masyarakat yang utama dan harus dipenuhi dengan layak adalah masalah perumahan dan pemukiman yang menjadi kebutuhan dasar. Jumlah rumah layak di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017 sebanyak 263.835 rumah dan meningkat di tahun 2020 menjadi 299.365 rumah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama, maka rasio rumah layak huni baru mencapai 0,211 jiwa/rumah.

Salah satu prasyarat kondisi perumahan yang baik adalah apabila rumah memiliki sanitasi yang baik. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2017 mencapai 59,48 persen dan meningkat menjadi 72,75 di tahun 2020. Masih rendahnya capaian tersebut perlu mendapat perhatian karena sanitasi yang layak sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan masyarakat.

Persentase rumah tangga dengan sumber air minum di Sulawesi Barat juga masih sangat rendah dimana air untuk air leding baru mencapai 10,09 persen, dan air dalam kemasan mencapai 26,22 persen. Dan untuk infrastruktur listrik di Sulawesi Barat sudah menggambarkan kondisi cukup baik dimana rasio elektrifikasi tahun 2020 sebesar 96,95 persen namun hal tersebut masih perlu ditingkatkan terutama penyediaan infrastruktur listrik pada daerah yang terisolir dengan kondisi rumah tangga miskin yang masih besar.

Pembangunan yang baik tentunya harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Sulawesi Barat berada pada angka 74,29 di atas rata-rata nasional. Capaian tersebut masih perlu ditingkatkan untuk menjaga degradasi lingkungan di Sulawesi Barat. Beberapa hal yang sangat terkait dengan permasalahan menurunnya kualitas lingkungan hidup antara lain tingginya degradasi lingkungan pada wilayah pesisir. Sulawesi Barat yang merupakan wilayah pesisir sangat rentan terhadap terjadinya degradasi lingkungan pada wilayah tersebut, hal itu bisa terjadi jika kebijakan pembangunan dilaksanakan tanpa memperhatikan ekosistem di wilayah pesisir khususnya hutan mangrove di Sulawesi Barat. Permasalahan lainnya adalah masih tingginya luas lahan kritis yang belum tertangani serta pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis yang dapat menimbulkan pencemaran. Pengelolaan sumberdaya alam tanpa memperhatikan lingkungan akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan, yang akan memicu terjadinya bencana banjir dan kekeringan, perubahan iklim serta dampak sosial ekonomi.

Lingkungan dan ekosistem yang terjaga akan meminimalisir terjadinya bencana. Hal ini sangat menunjang bagi upaya mitigasi bencana di Sulawesi Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sulawesi Barat memiliki risiko bencana yang tinggi sebagai konsekuensi letak daerah ini dari sisi geologis dan geografis. Berdasarkan nilai Indeks Resiko Bencana Indonesia tahun, Provinsi Sulawesi memiliki nilai indeks tertinggi secara nasional yaitu sebesar 166,49 berada pada kategori tinggi. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Provinsi Sulawesi Barat juga diperhadapkan pada kondisi bencana gempa bumi yang terjadi pada Januari tahun 2021 yang lalu bermagnitudo 6,2. Upaya pemulihan pasca bencana tersebut belum berjalan secara optimal dan menjadi sebuah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan intervensi dari pemerintah terutama dalam reskonstruksi pasca bencana tersebut.

4.5

Tabel

Pohon Masalah

“Minimnya aksesibilitas infrastruktur yang berkelanjutan”

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
- Minimnya Aksesibilitas Infrastruktur yang berkelanjutan.	- Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya jalan provinsi dalam kondisi mantap. - Minimnya fasilitas keselamatan jalan provinsi. - Masih minimnya cakupan sinyal telekomunikasi di wilayah perdesaan.
-	- Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya rumah tangga dengan akses air minum layak. - Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. - Masih banyaknya jumlah rumah tangga yang terlayani listrik (PLN dan non-PLN). - Masih rendahnya rumah layak huni masyarakat.
-	- Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya degradasi lingkungan pada wilayah pesisir. - Tingginya luas lahan kritis yang belum tertangani. - Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis. - Masih tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana. - Belum optimalnya sistem pemulihan pasca bencana.

4.1.2. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Level Penyelenggaran Urusan Pemerintahan

4.1.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- a. Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (7,89 tahun) dan rendahnya harapan lama sekolah (12,77 tahun) pada tahun 2020.
- b. Masih rendahnya angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA sederajat dan jenjang perguruan tinggi. Pada tahun 2020 angka partisipasi sekolah pada jenjang SMA sebesar 69,84 persen sedangkan angka partisipasi sekolah pada jenjang perguruan tinggi hanya sebesar 23,24 persen.
- c. Masih kurangnya kuantitas guru pada jenjang Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan.
- d. Masih rendahnya kualitas guru, khususnya guru yang profesional (guru yang telah memiliki sertifikat pendidik).
- e. Belum meratanya distribusi guru pada semua jenjang pendidikan
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap tingkatan pendidikan belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

2) Kesehatan

- a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi. Jumlah Kasus kematian Ibu pada tahun 2020 sebesar 46 Kasus sedangkan untuk kasus kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 303 Kasus. Angka kasus kematian Ibu dan Bayi belum mencapai target yang diharapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 32 kasus untuk Jumlah Kematian Ibu dan 257 kasus untuk Jumlah Kematian Bayi.
- b. Tingginya angka prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2021 angka prevalensi stunting di Sulawesi Barat sebesar 33,8 persen di atas angka rata-rata nasional yaitu 24,4 Persen serta menempati urutan kedua tertinggi secara nasional.
- c. Rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas serta terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan.
- d. Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular.
- e. Belum maksimalnya jumlah peserta jaminan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2020 persentase penduduk yang telah menjadi peserta jaminan kesehatan baru mencapai angka 87,93 persen.
- f. Belum maksimalnya akses terhadap sanitasi layak. Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi layak di Sulawesi Barat baru mencapai 77,07 persen.
- g. Belum optimalnya implementasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Tingginya persentase jalan provinsi yang belum mantap. Panjang jalan provinsi yaitu sebesar 349,67 dimana pada tahun 2020 Kondisi jalan yang tidak mantap sebesar 60,42 persen atau sepanjang 211,27 km sedangkan

- yang berada pada kondisi mantap sebesar 39,58 persen atau sepanjang 138,39 km.
- b. Belum terpenuhinya standar jalan pada sebagian besar jalan provinsi.
 - c. Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum, pada tahun 2020 masih terdapat 26,22 persen rumah tangga menggunakan air kemasan.
 - d. Tingginya kerusakan jaringan irigasi, pada tahun 2018 luas irigasi dalam kondisi baik hanya sebesar 43,31 persen atau 19.470 hektare dari 44.956,54 hektar.
 - e. Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah dan drainase).
 - f. Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional, pada tahun 2018 persentase Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk baru mencapai 9,8 persen.
 - g. Belum memadainya pranata bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang
 - h. Terbatasnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, pada tahun 2018 persentase rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB baru mencapai 11,09 persen.
 - i. Belum terwujudnya sinergitas koordinasi penataan ruang baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi pada kawasan strategis provinsi.
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Rendahnya kualitas hunian untuk rakyat miskin serta tingginya backlog (tidak seimbang) kebutuhan dan penyediaan) rumah. Angka kebutuhan rumah hingga tahun 2018 sebesar 40.005 unit dan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 98.511 unit pada tahun 2020.
 - b. Belum optimalnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Persentase akses terhadap sanitasi layak di Sulawesi Barat sebesar 77,07 persen tahun 2020.
- 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
- a) Satuan Polisi Pamongpraaja dan Pemadam Kebakaran;
 - 1) Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan daerah yang berlaku kepada masyarakat.
 - 2) Masih kurangnya tenaga yang mengikuti diklat PPNS dan diklat dasar Satpol PP.
 - 3) Belum Optimalnya penegakan Perda dan pemberantasan Penyakit Masyarakat.
 - b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 1) Belum tersedianya peta rawan bencana Daerah.
 - 2) Belum maksimalnya upaya mitigasi bencana sebagai langkah dalam mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana.
 - 3) Minimnya sarana prasarana tanggap darurat penanggulangan bencana.

- 6) Sosial
 - a. Meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - b. Belum terintegrasinya upaya penanggulangan kemiskinan;
 - c. Masih rendahnya kualitas penanganan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) sebagai bentuk pemenuhan SPM bidang sosial;
 - d. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi anak;
 - e. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - f. Belum maksimalnya pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

4.1.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

- 1) Tenaga Kerja
 - a. Kurangnya lapangan kerja, terlihat dari tingginya pencari Kerja Terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 3.318, sedangkan lowongan kerja terdaftar sebanyak 543, penempatan atau pemenuhan tenaga kerja sebanyak 1.372.
 - b. Rendahnya Kualitas tenaga kerja terlihat dari tingkat pendidikan tenaga kerja yang ditamatkan masih di dominasi SMP ke bawah yaitu sebanyak 412.430 jiwa atau 62,83 persen, selanjutnya untuk SMA dan SMK 150.440 jiwa atau 22,92 persen, dan yang memiliki Pendidikan Tinggi yaitu Diploma dan Universitas 93.510 jiwa atau 14,25 persen pada tahun 2020.
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Kurangnya pemahaman konsep gender, PUG dan penerapan Pengarusutamaan Gender di Sulawesi Barat;
 - b. Kurangnya pemahaman tentang three ends (kekerasan perempuan dan anak, perdagangan orang (human trafficking) dan kesenjangan ekonomi);
 - c. Masih tingginya jumlah pekerja usia anak. Jumlah pekerja usia anak pada tahun 2020 mencapai 5,28 persen dibandingkan pada tahun 2019 3,46 persen;
 - d. Tingginya pernikahan usia anak di Sulawesi Barat berada pada urutan ke tiga secara nasional di tahun 2020;
 - e. Tingginya angka kekerasan terhadap ibu dan anak. Pada tahun 2016 jumlah korban KDRT sebanyak 126 kasus meningkat di tahun 2017 sebanyak 177 kasus;
 - f. Belum maksimalnya penanganan anak perlindungan khusus;
 - g. Belum optimalnya wadah P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak) dalam menanggulangi kasus.
- 3) Pangan
 - a. Pangan belum terdistribusikan dengan baik;
 - b. Terbatasnya penganekaragaman/diversifikasi pangan;
 - c. Masih terdapatnya daerah rawan pangan.
 - d. Belum optimalnya penyediaan cadangan pangan pemerintah Daerah.

- e. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan.
 - f. Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan segar dan bermutu.
- 4) Lingkungan Hidup
- a. Masih banyaknya lahan kritis, kerusakan hutan dan sumber-sumber air.
 - b. Banyaknya kerusakan ekosistem di pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Tingginya pencemaran lingkungan yang berasal dari sampah;
 - d. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
 - e. Belum efektifnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
- 5) Pertanahan
- a. Banyaknya lahan yang belum bersertifikat. Persentase luas lahan yang bersertifikat hanya sebesar 25,27 persen dari luas APL;
 - b. Masih banyak ditemukan sertifikat ganda untuk satu bidang tanah;
 - c. Tingginya konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah serta masyarakat dengan perusahaan;
 - d. Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T);
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Belum optimalnya pengendalian penduduk;
 - c. Belum optimalnya akses data kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. Tingginya penduduk rentan administrasi kependudukan;
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- a. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan ekonomi masyarakat desa;
 - b. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa;
 - c. Belum optimalnya pembinaan pranata sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
 - d. Masih minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Belum maksimal cakupan layanan KB;
 - b. Belum optimalnya ketahanan keluarga;
 - c. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja;
 - d. Kurangnya intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja;
- 9) Perhubungan
- a. Belum berkembangnya sistem transportasi dan integrasi antar moda angkutan;
 - b. Masih kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dan bidang transportasi laut;

- c. Masih rendahnya kualitas pelayanan umum baik di bidang angkutan darat maupun angkutan sungai dan penyeberangan;
- d. Belum optimalnya bandara dan pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau.

10) Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah;
- b. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi;
- c. Belum optimalnya penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah;
- d. Belum optimalnya layanan e-Government secara holistik dan dikelolanya data sebagai aset strategis.

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Keterbatasan SDM Pelaku Koperasi dan Pelaku Usaha.
- b. Rendahnya Ketersediaan data valid koperasi dan UKM.
- c. Lemahnya Informasi, akses pasar dan Pembiayaan untuk pengembangan usaha.
- d. Rendahnya akses dan fasilitasi pembinaan Koperasi dan UMKM secara digital.
- e. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) belum berjalan secara optimal.

12) Penanaman Modal

- a. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Penanaman Modal melalui PTSP dikarenakan Sarana dan Prasarana yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan bidang perizinan.
- b. Terbatasnya SDM yang memahami dengan baik konsep pelayanan perizinan, kebijakan terkait sistem prosedur perizinan yang efisien dan efektif;
- c. Iklim investasi yang belum kondusif karena sejumlah faktor antara lain kondisi infrastruktur dasar, penerapan regulasi terkait kemudahan berusaha berbasis resiko;
- d. Tidak maksimalnya pelaksanaan promosi diakibatkan oleh kurang updatenya data potensi sektor prioritas;
- e. Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian PMA dan PMDN;

13) Kepemudaan dan Olahraga

- a. Minimnya kegiatan pengembangan potensi dan partisipasi pemuda;
- b. Rendahnya kemampuan pemuda untuk berwirausaha;
- c. Tingginya trend dekadensi moral terkait pornografi, porno aksi dan narkoba;
- d. Minimnya pembibitan olahraga dan mengolahragakan masyarakat;
- e. Minimnya kualitas dan kuantitas pelatih di bidang olahraga prestasi;
- f. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga;
- g. Minimnya kejuaraan olahraga prestasi untuk kelompok umur.

14) Statistik

- a. Belum maksimalnya pelaksanaan satu data,
- b. Belum optimalnya ketersediaan data dasar dan data sektoral yang update dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- c. Belum terintegrasinya data dan informasi pembangunan di Sulawesi Barat.

15) Persandian

- a. Belum maksimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) persandian dalam pengamanan aplikasi atau sistem elektronik.
- b. Belum optimalnya penerapan tanda tangan digital.

16) Kebudayaan

- a. Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal;
- b. Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda;
- c. Masih rendahnya promosi budaya lokal.
- d. Rendahnya minat generasi muda untuk mengelola dan melestarikan kekayaan budaya dan kearifan lokal.

17) Perpustakaan

- a. Minat baca masyarakat masih rendah, ini bisa dilihat dari jumlah pengunjung Perpustakaan Daerah yang semakin menurun, ini dikarenakan masyarakat sekarang cenderung lebih berminat membaca lewat HP/Internet daripada membaca langsung di Perpustakaan Daerah.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana.
- c. Kurangnya tenaga fungsional pustakawan.
- d. Kurangnya koleksi judul buku menjadikan minimnya literasi yang dapat diakses.

18) Kearsipan

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan;
- b. Belum tersedianya tenaga fungsional arsiparis;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan.

4.1.2.3. Permasalahan Menurut Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan Budidaya;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengolahan produk perikanan;
- d. Belum optimalnya pengoperasian pelabuhan perikanan;
- e. Kurangnya penganeekaragaman produk olahan berbahan baku ikan.
- f. Sistem rantai dingin belum optimal;
- g. Belum terkelolanya sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi berbasis pendekatan spasial / kawasan;

- h. Tingginya kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. Minimnya kualitas sumberdaya manusia baik ASN perikanan maupun stakeholder perikanan dan kelautan.
- 2) Pariwisata
- a. Belum optimalnya promosi pariwisata berbasis teknologi informasi.
 - b. Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial dan belum multi stakeholders;
 - c. Belum optimalnya fasilitas pendukung kepariwisataan;
 - d. Belum meluasnya pemahaman sadar wisata pada masyarakat lokal.
 - e. Masih kurangnya investasi sektor pariwisata.
- 3) Pertanian
- a. Masih rendahnya ketersediaan benih bermutu;
 - b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian;
 - c. Masih terbatasnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Pertanian;
 - d. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi peternakan;
 - e. Terbatasnya petugas kesehatan hewan;
 - f. Masih rendahnya penerapan teknologi budidaya, penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - g. Masih rendahnya kemitraan usaha pertanian dengan pelaku agribisnis, baik pada usaha hulu (budidaya) maupun usaha hilir (pengolahan dan pemasaran).
 - h. Laju alih fungsi lahan yang terus meningkat.
 - i. Masih rendahnya nilai tambah komoditas pertanian.
- 4) Kehutanan
- a. Masih terdapat lahan kritis di luar kawasan hutan;
 - b. Belum efektifnya pengelolaan hutan lestari mendukung perekonomian daerah.
 - c. Belum optimalnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB.
 - d. Masih tingginya tekanan dan gangguan keamanan hutan baik karena konflik tenurial kawasan hutan, pembalakan liar dan kebakaran hutan dan lahan.
 - e. Sarana prasarana operasional kesatuan pengelolaan hutan yang belum memadai.
 - f. Masih rendahnya kapasitas sumberdaya manusia, kelompok tani hutan, kelompok usaha perhutanan sosial dalam mengelola potensi hutan.
 - g. Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
 - h. Belum optimalnya Pelestarian dan Perlindungan sumberdaya alam hayati.
- 5) Energi dan Sumberdaya Mineral
- a. Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - b. Rasio elektrifikasi belum mencapai 100 persen dan masih rendahnya rasio desa berlistrik;

- c. Belum optimalnya pemanfaatan air bawah tanah;
 - d. Maraknya Penambangan Tanpa Ijin (PETI).
- 6) Perdagangan
- a. Minimnya Infrastruktur ekspor impor di daerah.
 - b. Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi.
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan Pengujian Mutu Barang.
 - d. Belum optimalnya penerapan kebijakan yang mengatur mata rantai perdagangan.
- 7) Perindustrian
- a. Masih rendahnya daya saing industri;
 - b. Belum Optimalnya Pengolahan Bahan Baku Lokal;
 - c. Belum Optimalnya Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah;
 - d. Validitas data Industri Kecil Menengah Masih Rendah.
 - e. Kurangnya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pengembangan SDM pembina industri.
- 8) Transmigrasi
- a. Masih terdapat lokasi transmigrasi yang belum clean and clear;
 - b. Infrastruktur transportasi di lokasi transmigrasi kurang memadai;
 - c. Kurangnya akses pemasaran produk hasil transmigrasi;
 - d. Belum tersedianya perencanaan tata ruang dan pengembangan kawasan transmigrasi;
 - e. Rendahnya kualitas infrastruktur, bangunan dan fasilitas umum lokasi transmigrasi.

4.1.2.4. Unsur Penunjang

- 1) Perencanaan
- a. Belum optimalnya sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antar pusat dan daerah;
 - b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumberdaya perencana.
 - c. Usulan prioritas masyarakat melalui musrenbang belum terakomodir secara optimal dalam dokumen perencanaan.
 - d. Basis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kurang tersedia.
- 2) Keuangan
- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan terkadang masih belum tepat waktu;
 - b. Belum optimalnya pemahaman dan pengetahuan para bendahara OPD terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan;

- c. Belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan asli daerah;
 - d. Belum sepenuhnya bendahara bersertifikat dalam penatausahaan keuangan;
 - e. Belum optimal pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi BMD.
- 3) Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan
- a. Kinerja aparatur perlu ditingkatkan;
 - b. Belum optimalnya pembinaan pegawai dalam penerapan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian;
 - c. Belum terpenuhinya kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
 - d. Belum dilakukannya analisis beban kerja pada setiap unit kerja sebagai bahan analisis dan menentukan beberapa kebutuhan pegawai tiap OPD;
 - e. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan kediklatan.
- 4) Penelitian dan Pengembangan
- a. Kurangnya desiminasi hasil kelitbangan kepada stakeholders;
 - b. Belum optimalnya pengembangan SIDA;
 - c. Masih minimnya pengembangan SDM bidang kelitbangan;
 - d. Belum adanya pejabat fungsional peneliti di OPD terkait.

4.1.2.5. Unsur Pendukung

- 1) Sekretariat Daerah
- a. Rendahnya ketersediaan dan kualitas SDM pengadaan barang dan jasa.
 - b. Belum optimalnya Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yaitu baru mencapai B pada tahun 2020.
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah.
 - d. Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi terhadap regulasi di daerah.
 - e. Belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan implementasi kerjasama daerah.
- 2) Sekretariat DPRD
- a. Program kerja DPRD telah tersusun dan terintegrasi dalam melaksanakan fungsinya, namun koordinasi antar eksekutif dan legislatif kadang belum berjalan dengan baik.

4.1.2.6. Unsur Pengawasan

- 1) Inspektorat
- a. Belum terbentuknya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di beberapa OPD.
 - b. Kurangnya kepedulian perangkat daerah untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.

4.2. ISU STRATEGIS

4.2.1. ISU GLOBAL

A. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan dari MDGs (*Millenium Development Goals*), yang telah berakhir pada tahun 2015 yang lalu. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup. *Sustainable Development Goals* dimulai dari kesepakatan dari pertemuan dunia pada saat September 2015 melalui agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs*) yang merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / SDGs dilakukan dengan prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". SDGs terdiri dari 169 target dan 17 Tujuan antara lain : Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*); Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*); Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being*); Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*); Kesetaraan Gender (*Gender Equality*); Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*); Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*); Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*); Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Inovation and Infrastructure*); Berkurangnya Kesenjangan (*Reduce Inequalities*); Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*); Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*); Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*); Ekosistem Lautan (*Life Below Water*); Ekosistem Daratan (*Life on Land*); Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace Justice and Strong Institution*); Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*).

Implementasi dan capaian SDGs tentunya sangat diharapkan dan dapat diwujudkan melalui pengembangan kemitraan yang baik antara para pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah, juga diperlukan pengembangan sumberdaya dan kapasitas dalam pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam perencanaan yang ada, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, disamping alokasi anggaran dari pemerintah maupun swasta untuk mendukung setiap tujuan pembangunan yang akan dicapai. Upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam percepatan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan/SDGs ditandai dengan lahirnya Peraturan Gubernur Sulawesi Barat nomor 50 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022. Peraturan Gubernur tersebut memuat kebijakan, strategi, program dan anggaran daerah dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan pencapaian target pada setiap indikator SDGs yang telah ditetapkan.

B. Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19)

Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Virus tersebut pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di provinsi Hubei Cina pada Desember 2019. Covid-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yaitu suatu wabah penyakit global. Menurut World Health Organization (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas. Kondisi ini jelas tidak boleh diremehkan karena hanya ada beberapa penyakit saja sepanjang sejarah yang digolongkan sebagai pandemi. Setelah ditetapkannya pandemi COVID-19, tentu saja negara-negara yang telah terjangkit harus melakukan berbagai upaya untuk menghentikannya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak dari penyebaran virus Corona, tidak hanya kesehatan manusia, COVID-19 juga berdampak pada ekonomi dan sosial. Penurunan ekonomi secara global maupun nasional tentunya akan berdampak pada kinerja ekonomi di Sulawesi Barat, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mengalami penurunan dari hasil capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar minus 2,42 persen di tahun 2020. Hal ini sebagai dampak dari menurunnya konsumsi rumah tangga dalam PDRB pengeluaran karena kurangnya aktivitas ekonomi masyarakat, demikian juga dengan investasi tentunya mengalami penurunan terutama pada sektor infrastruktur yang banyak mengalami relokasi anggaran, disamping itu ekspor juga mengalami penurunan disebabkan oleh turunnya permintaan global khususnya CPO yang menjadi produk ekspor terbesar di Sulawesi Barat.

Dampak lainnya yang perlu diperhatikan adalah terkait angka kemiskinan, Sulawesi Barat selama ini secara konsisten telah menurunkan kemiskinan pada angka 10,95 persen, apabila dampak virus COVID-19 terlambat diatasi maka kemiskinan diperkirakan akan mengalami peningkatan. Besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran virus COVID-19 baik kesehatan, ekonomi dan sosial menuntut daerah untuk melakukan berbagai langkah-langkah dan inovasi tatanan normal baru. Memasuki tahun 2021, kondisi ekonomi saat ini sedikit membaik, dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 tumbuh sebesar 2,54 persen pada triwulan III, hal itu menandakan bahwa pemerintah telah berupaya dengan baik dalam melakukan pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi covid-19, yang dilakukan melalui intervensi sektor kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial, serta program vaksinasi yang berjalan lancar di seluruh kabupaten. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran juga mengalami penurunan menjadi 3,13 persen. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang cukup baik di tengah tantangan pandemi covid-19.

C. Perubahan Iklim (*global warming/climate change*)

Kondisi ketahanan lingkungan pada era globalisasi pembangunan saat ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam. Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan terlebih lagi Sulawesi Barat yang memiliki indeks resiko bencana yang paling tinggi. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir ditengah tantangan pembangunan yang diharapkan akan semakin meningkat.

Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Pemanasan global dapat menyebabkan terjadi perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan wabah penyakit, serta mempengaruhi berbagai ekosistem yang terdapat di daerah dengan garis lintang yang tinggi, lokasi yang tinggi, serta ekosistem-ekosistem pantai.

Pemanasan global terjadi sebagai akibat meningkatnya jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Naiknya intensitas efek rumah kaca yang terjadi karena adanya gas dalam atmosfer yang menyerap sinar panas yaitu sinar infra merah yang dipancarkan oleh bumi menjadikan perubahan iklim global. Jika tidak ada upaya yang sistematis dan terintegrasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan perbaikan kondisi lingkungan lokal dan global mulai dari sekarang, maka dampak yang ditimbulkan akibat adanya perubahan iklim ke depan akan semakin besar dan lebih lanjut akan berdampak pada sulitnya mencapai sistem pembangunan yang berkelanjutan. Upaya Penanganan masa perubahan iklim dalam konteks pembangunan membutuhkan manajemen perubahan iklim secara efektif, dan pada saat bersamaan mengantisipasi dampak perubahan iklim global jangka panjang secara komprehensif. Disamping itu membutuhkan pendekatan lintas sektor baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal melalui upaya adaptasi dan mitigasi. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi isu perubahan iklim adalah dengan membuat rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) tingkat nasional dan daerah yang merupakan dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Olehnya itu, implementasi dari rencana aksi tersebut diharapkan dapat berjalan dan mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun di daerah.

D. Pengarusutamaan Gender

Isu gender akan selalu menjadi permasalahan, sepanjang kaum perempuan belum merasakan hak-haknya dan tidak ada lagi pembangunan yang bias gender. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan jika tidak tertangani akan membawa permasalahan yang akan menghambat pembangunan. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam seluruh pembangunan di berbagai bidang kehidupan, mulai tahap perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan kesetaraan dalam aspirasi, pengalaman, kebutuhan dan permasalahan.

Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, baik terhadap peran dalam pembangunan maupun peran dalam ekonomi dan politik dapat dihitung melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yang memperhatikan ketimpangan Gender. Indikator kedua adalah Indeks Pemberdayaan Gender yang merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam berbagai aktivitas kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumberdaya ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Sulawesi Barat sebesar 89,76 persen pada tahun 2020. Nilai capaian tersebut kurang dari 100 persen yang berarti bahwa capaian perempuan lebih kecil dari capaian laki-laki namun masih tergolong tinggi. Sedangkan untuk nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Sulawesi Barat sebesar 65,92 persen pada 2020.

E. Revolusi Industri 4.0

Dunia industri global sedang memasuki era baru yang dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0 atau yang juga dikenal sebagai era digital. Industri 4.0 merupakan fase baru di revolusi industri yang fokus pada interkoneksi, otomatisasi, *machine learning*, dan *real time data*. Meskipun begitu, dampak dari revolusi industri tidak hanya pada pekerja industri saja namun saat ini semua orang menjadi bagian dari era digital 4.0.

Indonesia telah secara aktif memasuki era baru yang ditandai dengan Bergeraknya berbagai sektor kehidupan ke arah digital serba otomatis. Fenomena ini bisa kita lihat dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan berbasis digital. Perusahaan tersebut ini menawarkan cara berbisnis baru yang tidak kita temukan puluhan tahun lalu. Sebagai contoh adalah bagaimana peran digitalisasi pada masa pandemi covid-19 yang menunjang segala aktivitas kita disaat adanya pembatasan sosial. Ciri utama pada era industri 4.0 adalah bagaimana data menjadi sesuatu yang penting yang terhubung ke internet yang bisa dimaksimalkan untuk membantu bisnis termasuk membaca tren permintaan konsumen, mencari target pasar yang

tepat hingga mengoptimalkan harga yang sangat penting dalam peningkatan industrialisasi di daerah.

Peluang pengembangan industri 4.0 harus segera diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Barat, dimulai dari penyediaan infrastruktur teknologi informasi di seluruh daerah di Sulawesi Barat, selanjutnya adalah upaya digitalisasi sektor industri dan UMKM sehingga dapat menunjang seluruh aktivitas dan pemasaran produk di seluruh wilayah. Peluang dalam pengembangan industri 4.0 juga berada pada Generasi milenial sebagai generasi yang tumbuh besar di tengah teknologi digital, upaya menciptakan wirausaha baru berbasis digitalisasi sangat penting untuk mendukung perkembangan revolusi industri 4.0.

4.2.2. ISU NASIONAL

A. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Salah satu misi Presiden Republik Indonesia yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 adalah Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Kualitas manusia menjadi salah satu fokus yang harus segera ditangani, hal ini juga sesuai dengan arahan presiden untuk melakukan percepatan pembangunan sumberdaya manusia Indonesia yang tertuang dalam salah satu agenda pembangunan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Peningkatan kualitas dan daya saing Sumberdaya Manusia dalam RPJMN 2020-2024 meliputi manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2021 mencapai 72,29, meningkat 0,35 poin (0,49 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (71,94) dan Selama 2010–2021, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,76 persen. Adapun Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Barat masih sebesar 66,36 poin berada di bawah rata-rata nasional, dengan komponen harapan lama sekolah sebesar 12,86 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,96 tahun, angka harapan hidup 65,25 tahun, dan pengeluaran perkapita sebesar 9,1 juta perkapita pertahun. Banyaknya permasalahan terkait pembangunan manusia di Sulawesi Barat menjadi faktor masih rendahnya kualitas pembangunan manusia saat ini, beberapa permasalahan tersebut diantaranya masih tingginya angka stunting yang mencapai 33,8 persen merupakan yang tertinggi kedua secara nasional, selanjutnya adalah tingginya pernikahan usia anak sebesar 19,2 persen berada pada urutan ke-tiga secara nasional serta tingginya permasalahan anak tidak sekolah yang mencapai 10,25 persen dan merupakan yang tertinggi di

wilayah Regional Sulawesi. Upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia yang menjadi salah satu fokus pemerintah pusat dalam RPJMN 2020-2024, harus menjadi perhatian Pemerintah daerah khususnya Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun sinergi kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui program-program strategis guna menghasilkan sumberdaya manusia berkualitas.

B. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Kebijakan Nasional pada misi ke-3 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 adalah pembangunan yang merata dan berkeadilan, hal ini kemudian dijabarkan ke dalam 7 agenda pembangunan dimana agenda yang ke-2 adalah Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pembangunan kewilayahan menjadi salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah dengan sasaran antara lain: (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBI-KTI, Jawa-luar Jawa); (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah; (iii) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah; (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah.

Isu strategis utama pembangunan kewilayahan dalam RPJMN 2020-2024 adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan: (a) Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia sebesar 18,0 persen, Kawasan Barat Indonesia sebesar 10,3 persen, dan kemiskinan perdesaan yang tinggi (12,9 persen), hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,7 persen), (b) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,317 dan perkotaan sebesar 0,392; (c) Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia terutama Pulau Jawa, terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan, dan (e) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.

Ketimpangan wilayah juga menjadi permasalahan di Provinsi Sulawesi Barat, ketimpangan antar wilayah kabupaten atau antara desa dan kota menjadi kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus. Beberapa daerah di Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan yang cepat namun di beberapa daerah lainnya mengalami pertumbuhan yang lambat. Perbedaan kondisi geografis, sumberdaya alam, kondisi fiskal, sumberdaya manusia, infrastruktur, kebijakan daerah, serta konsentrasi ekonomi yang berbeda mengakibatkan satu daerah akan lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Ketimpangan wilayah erat kaitannya dengan Kondisi kemiskinan daerah tersebut. Sulawesi Barat memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi sebesar 11,85 persen masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 9,71 persen. Kemiskinan di Sulawesi Barat sangat didominasi oleh kemiskinan perdesaan yang sebesar 82,31 persen atau

sekitar 138,3 ribu jiwa dan kemiskinan perkotaan hanya sebesar 17,69 persen atau sekitar 27,72 ribu jiwa.

Besarnya jumlah ketimpangan dan kemiskinan di wilayah perdesaan dipengaruhi oleh kondisi atau wilayah Desa tersebut. Berdasarkan data indeks desa membangun tahun 2020 dari 575 desa yang ada di Sulawesi Barat terdapat sekitar 10,96 persen atau sekitar 63 desa dengan kategori sangat tertinggal, hal ini mengalami penurunan dari tahun 2018 yang mencapai 139 desa dalam kondisi sangat tertinggal. Adapun Desa tertinggal sebanyak 42,96 persen atau sebanyak 247 desa, yang juga mengalami penurunan dari tahun 2018 yang mencapai 298 desa dalam kondisi tertinggal. Untuk kategori desa berkembang tahun 2020 sebanyak 41,39 persen atau sekitar 238 desa, telah berhasil ditingkatkan dari tahun 2018 yang hanya mencapai 133 desa. Sedangkan desa Maju sebanyak 4,52 persen atau sekitar 26 desa, yang juga berhasil ditingkatkan dari tahun 2018 yang hanya memiliki 5 desa dengan kategori maju. Dan yang terakhir adalah kategori desa Maju yang hingga tahun 2020 baru terdapat satu desa dengan kategori Maju.

Persentase desa tertinggal (tertinggal dan sangat tertinggal) telah berhasil diturunkan dari 76 persen di tahun 2018 menjadi 53 persen di tahun 2020. Penurunan tersebut merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan program strategis yang telah diarahkan untuk pembangunan dan pemerataan di wilayah perdesaan. Dukungan pemerintah pusat melalui dana desa dan program strategis pemerintah provinsi dan kabupaten sangat berdampak terhadap upaya penurunan persentase desa tertinggal. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang sejak tahun 2018 telah berjalan dalam mengurangi kesenjangan dan mengatasi permasalahan kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan adalah melalui program Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA). Program Marasa merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah perdesaan dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan yang dilakukan melalui integrasi dan sinergi program dan kegiatan strategis lintas sektor yang berbasis di desa. Konsistensi pelaksanaan program Marasa tersebut juga telah mendapatkan *award* melalui penghargaan daerah terbaik Indonesia *Award 2021* pada kategori *economic recovery strategy* terutama dalam inisiatif pemberdayaan digital pada masa pandemi covid-19. Program Marasa dan berbagai program strategis lainnya diharapkan dapat terus dikembangkan dalam upaya mengurangi disparitas antara wilayah, meningkatkan sumberdaya manusia, menciptakan kemandirian desa yang berbasis potensi, serta pada gilirannya akan mengeluarkan desa dari kondisi kemiskinan dan ketertinggalan.

C. Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang memuat pengaturan terkait jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Hal itu merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Sebagai bentuk penguatan terhadap pelaksanaan SPM di daerah maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 202 tentang penerapan standar pelayanan minimal sebagai pengganti dari permendagri 100 tahun 2018 yang sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah. Adapun urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
 - Pelayanan pendidikan menengah;
 - Pelayanan pendidikan khusus;
2. Kesehatan;
 - Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
 - Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;
 - Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;
 - Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;
6. Sosial.
 - Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
 - Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Penerapan SPM dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Hal ini menjadi tantangan pemerintah daerah agar mampu menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM yang telah ditetapkan. Dengan

adanya SPM harapan masyarakat untuk mendapatkan suatu standar pelayanan dasar ataupun pelayanan publik yang sama di setiap daerah akan dapat diwujudkan.

D. Bonus Demografi

Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi merupakan fenomena langka karena hanya akan terjadi satu kali ketika proporsi penduduk usia produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk keseluruhan, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70% berada pada usia produktif antara 15-64 tahun, sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif yaitu berada pada usia dibawah 14 tahun dan di atas 65 tahun pada periode tahun 2020-2045. Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi pada tahun 2020-2035, dan puncaknya di tahun 2028-2030.

Kondisi ini perlu dijadikan sebagai peluang khususnya di Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia usia produktif dalam menghadapi tantangan pasar bebas tenaga kerja. Penyiapan Sumberdaya manusia yang unggul perlu dipersiapkan sejak saat ini, Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi.

E. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur

Salah satu isu strategis dalam RPJMN 2020-2024 adalah pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu merespon cepat terhadap hal itu. Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara akan memicu investasi baru pada daerah sekitar dan akan membuka akses lapangan kerja. Posisi Sulawesi Barat yang berdekatan langsung dengan Ibu Kota Negara dan memiliki letak yang sangat strategis, berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) yang membentang dari Selat Lombok – Selat Makassar – Laut Sulawesi. Dimana jalur ini sangat cocok dilalui oleh kapal niaga besar dan merupakan jalur pelayaran internasional dan jalur ekspor dan impor barang internasional sehingga sangat strategis dalam mendukung konektivitas tol laut. Sulawesi Barat juga diharapkan bisa berperan dalam memasok berbagai kebutuhan ibu kota baru yang sedang mempersiapkan infrastruktur termasuk pangan, tenaga kerja, energi, dan sebagainya.

Dalam rangka menangkap peluang atas pemindahan Ibu Kota Baru, diperlukan beberapa persiapan dan strategi diantaranya mengoptimalkan potensi sumberdaya alam khususnya sektor pertanian dalam rangka pemenuhan logistik dan pangan di Ibu Kota Baru. Pemerintah Sulawesi Barat juga perlu menyiapkan sumberdaya manusia yang unggul, kompeten dan kompetitif dalam menghadapi persaingan tenaga kerja. Selanjutnya adalah percepatan Pengembangan jaringan transportasi laut dan udara di Sulawesi Barat dalam mendukung konektivitas Wilayah terutama ke Ibu Kota Negara dan daerah sekitarnya. Peningkatan akses jalan, baik jalan nasional, provinsi, kabupaten yang akan membuka akses ke sentra produksi, sentra industri dan distribusi ke terminal dan pelabuhan. Dan yang terakhir adalah Mendorong Sulawesi Barat sebagai salah satu pusat

pertumbuhan baru melalui Penguatan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), serta Pengembangan Mamuju *Smart Forest City* yang berbasis ekosistem, ekologi, serta adaptif bencana yang nantinya akan menjadikan Mamuju sebagai *supporting city* dan pengembangan beberapa kabupaten lainnya di Sulawesi Barat untuk mendukung Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur.

4.2.3. ISU REGIONAL SULAWESI

A. Konektivitas Wilayah Pulau Sulawesi

Wilayah regional Sulawesi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Terdapat 3 (tiga) sektor utama yang menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian regional Sulawesi, yaitu sektor pertanian, pertambangan, serta perdagangan dan jasa. Komoditi perkebunan yang paling dominan di Wilayah Sulawesi adalah kakao, dimana memasok sekitar 65 persen lebih produksi kakao secara nasional. Selain itu, Sulawesi memiliki potensi yang menjanjikan dalam komoditas tanaman pangan khususnya padi, jagung kedelai, dimana pada tahun 2020, Sulawesi tercatat sebagai produsen tanaman pangan terbesar kedua setelah pulau Jawa. Demikian pula sektor perikanan, wilayah Sulawesi merupakan salah produsen perikanan terbesar di Indonesia.

Untuk mendukung pergerakan barang dan sumberdaya yang ada tersebut, maka dibutuhkan pengembangan konektivitas antar wilayah di regional Sulawesi melalui pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara. Pembangunan infrastruktur Perhubungan laut didukung oleh wilayah Sulawesi yang berada di Koridor Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II dan ALKI III) yang sangat berpotensi dalam meningkatkan perdagangan barang baik Domestik maupun Internasional. Wilayah Sulawesi juga merupakan wilayah pengembangan strategis infrastruktur pada WPS 27 (Mamuju-Makale-Palopo-Kendari-Bau Bau-Wangi Wangi) serta WPS 28 (Makassar-ParePare-Mamuju). Pengembangan konektivitas telah dilakukan melalui pengembangan rel kereta api trans Sulawesi yang nantinya akan menghubungkan Makassar-Manado. Proyek Perkeretaapian saat ini berada pada trase Makassar-Parepare merupakan pengembangan tahap pertama Jaringan Kereta Api Nasional Trans Sulawesi yang termuat dalam RPJMN 2020-2024, yang pembangunannya dimulai dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang mempunyai pola perjalanan penumpang dan barang terbesar dari provinsi lainnya berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Dengan adanya jalur kereta api atau prasarana yang dibangun, diharapkan penyediaan layanan transportasi penumpang dan transportasi barang yang direncanakan dapat segera terwujud dan manfaat ekonomi dari proyek ini dapat segera terealisasi. Untuk itu peran dari semua Provinsi se-Sulawesi dalam mendukung percepatan pembangunan konektivitas sangat diharapkan melalui perencanaan yang terpadu, terintegrasi serta komprehensif untuk percepatan konektivitas wilayah di regional Sulawesi.

B. Konflik Perbatasan

Konflik tapal batas daerah yang berbatasan langsung biasanya terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumber daya alam, politik dan sosial budaya. Munculnya sengketa tapal batas antara daerah akan menimbulkan ketidakharmonisan antara pemerintahan daerah. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik horizontal baik itu antar masyarakat maupun antar pemerintahan daerah. Kondisi itu juga akan berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan publik oleh daerah kepada masyarakat. Sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaian ketika terjadi sengketa tapal batas dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Selain permasalahan tapal batas di wilayah perbatasan daratan, wilayah yang juga sering mengalami konflik perbatasan adalah wilayah kepulauan. Pulau-pulau kecil terluar yang ada di Sulawesi Barat umumnya memiliki karakteristik yang khas dan sekaligus menjadi sumber permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu lokasi terluar yang umumnya terpencil, jauh dari pusat kegiatan ekonomi, minimnya sarana dan prasarana, akses menuju pulau-pulau tersebut juga sangat terbatas sehingga menjadi penyebab tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada pada daerah tersebut sangat rendah yang kemudian memicu penduduk untuk berpindah wilayah.

Konflik perbatasan antar provinsi yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Barat yang pernah terjadi yaitu sengketa tapal batas antara Sulawesi Barat (Kabupaten Majene) dengan Kalimantan Selatan (Kabupaten Kota baru) terkait Pulau Lerelerekang yang memiliki potensi blok migas yang telah menuai titik temu dimana pemerintah pusat memutuskan menyerahkan pengelolaan sejumlah blok migas dekat Pulau Lere-lerekang kepada Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Kedua provinsi ini telah menyepakati membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama yang memiliki saham masing-masing 50% untuk blok Lere-lerekang dengan partisipasi interestnya dikelola bersama oleh kedua provinsi.

Sengketa tapal batas yang saat ini masih berlangsung adalah tapal batas antara Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah yaitu antara Kabupaten Pasangkayu dengan Kabupaten Donggala. Walaupun telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2018 tentang Batas daerah kabupaten pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, namun tetap menjadi sengketa dan sementara akan dilakukan fasilitasi kembali oleh Kementerian Dalam Negeri terkait tapal batas tersebut. Sengketa tapal batas antar daerah perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah daerah agar lebih fokus dalam membangun wilayah terpencil dan terluar maupun wilayah kepulauan terutama pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik secara maksimal sehingga masyarakat yang berada pada wilayah tersebut juga dapat merasakan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

C. Bencana Alam Gempa Bumi di Wilayah Sulawesi

Sulawesi adalah salah satu pulau yang paling rawan Bencana khususnya gempa. Pulau ini menjadi pertemuan tiga lempeng utama yang menimbulkan dampak geologi yang sangat kompleks dan beragam. Ketiga lempeng besar

tersebut yakni lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat, lempeng Eurasia yang bergerak ke arah selatan-tenggara, dan lempeng yang lebih kecil yaitu lempeng Filipina. Pulau Sulawesi tersusun atas tatanan struktur geologi yang aktif bergerak dengan kecepatan pergeseran yang berbeda-beda. Berdasarkan buku Peta Sumber dan bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017 yang disusun Pusat Studi Gempa Nasional Kementerian PUPR. Pulau Sulawesi diketahui memiliki pergeseran yang berbeda-beda. Adapun di utara Sulawesi tercatat mengalami pergeseran geodetik berkisar 42-50 mm/tahun. Di darat terdapat sesar Gorontalo yang memiliki pergeseran 11 mm/tahun. Sedangkan dari arah timur yang bergerak ke arah sesar Sorong mengalami pergerakan yang cukup signifikan berkisar 32 mm/tahun. Pada bagian tengah Sulawesi juga terdapat sesar Palukoro yang masih aktif bergerak dengan pergeseran geodetik 41-45 mm/tahun, dan pergeseran geologi 29 mm/tahun. Sesar Palukoro sebagai sesar dengan besar pergeseran tinggi dengan kegempaan yang rendah, Selanjutnya ke arah timur Sulawesi terdapat sesar Matano dengan pergeseran sekitar 20 mm/tahun.

Gempa bumi besar yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di wilayah Sulawesi yaitu di Kabupaten Donggala dan Kota Palu berkekuatan 7,4 magnitudo tahun 2018 yang menyebabkan tsunami dan menyebabkan ratusan korban jiwa dan harta benda. Gempa bumi juga pernah terjadi di Sulawesi Barat yaitu tahun 2021 berkekuatan 6,2 magnitudo yang melanda pesisir barat Pulau Sulawesi pada tanggal 15 Januari 2021. Pusat gempa berada di 7 km timur laut Majene dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di sebagian besar bagian barat Pulau Sulawesi hingga pantai timur Kalimantan. Gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal yang diduga kuat akibat aktivitas Sesar Naik Mamuju yang memiliki laju geser 2 milimeter per tahun. Guncangan gempa ini dirasakan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, sebagian daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan di Kalimantan. Upaya penanganan pasca gempa bumi di Sulawesi Barat perlu mendapat perhatian terutama dalam pembangunan kembali atau rekonstruksi berbagai infrastruktur dasar dan pemerintahan di Sulawesi Barat

Berdasarkan kajian Indeks Resiko Bencana Indonesia tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sulawesi Barat memiliki indeks resiko bencana tertinggi sebesar 166,49 poin dengan kategori tinggi. Berdasarkan kajian tersebut terdapat beberapa ancaman bencana di Sulawesi Barat diantaranya Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi. Pada tingkat kabupaten, Majene memiliki tingkat resiko bencana tertinggi sebesar 216,08 poin dan yang terendah adalah kabupaten Polewali Mandar sebesar 140,81 poin.

Pengukuran Indeks Resiko Bencana terdiri dari tiga komponen diantaranya (i) Komponen Bahaya terkait dengan probabilitas dan intensitas, selanjutnya adalah (ii) Komponen Kerentanan terkait dengan kondisi sosial meliputi kepadatan penduduk dan kelompok rentan, kondisi ekonomi meliputi luas lahan produktif, PDRB persektor, kondisi Fisik meliputi rumah, fasilitas umum dan fasilitas kritis, serta kondisi lingkungan yang meliputi hutan lindung, mangrove,

hutan alam, semak dan rawa. Selanjutnya adalah (iii) komponen Kapasitas terkait dengan kapasitas masyarakat yang meliputi pengaruh kesiapsiagaan bencana, pengelolaan tanggap darurat, pengaruh kerentanan masyarakat, ketidaktergantungan masyarakat dan partisipasi masyarakat. selanjutnya terkait dengan 71 Indikator secara umum meliputi penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian resiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana. Dari seluruh komponen yang telah dijabarkan, komponen kerentanan dan kapasitas perlu mendapat dukungan intervensi, khususnya dalam menyiapkan berbagai program strategis untuk penanganan resiko bencana.

Besarnya potensi bencana di Pulau Sulawesi khususnya di Provinsi Sulawesi Barat akan menjadi tantangan dan peluang pembangunan, untuk itu pemerintah perlu mengupayakan pembangunan yang lebih adaptif, responsif, antisipatif dalam mitigasi bencana alam termasuk gempa bumi. Selain itu, salah satu peluang yang dapat diambil adalah dengan menjadikan Sulawesi Barat sebagai pusat studi kebencanaan nasional.

D. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar Pemerintah Daerah merupakan bentuk pengaturan kerjasama yang dilakukan antar pemerintahan daerah dalam bidang-bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan di daerah, oleh karena itu daerah dituntut lebih proaktif dan melakukan inovasi untuk mengatasi berbagai keterbatasan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kerja sama antar daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2018, Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, pemerintah Sulawesi Barat akan menjalin kerjasama dengan beberapa wilayah di Regional Sulawesi dan Kalimantan diantaranya dengan Sulawesi Selatan terkait dengan kerjasama di Bidang Pariwisata yang terintegrasi dengan berbagai destinasi wisata, selanjutnya adalah kerjasama antar Provinsi Sulawesi Barat dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini sudah berjalan terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam minyak dan gas bumi di perairan laut antara Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah rencana kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah kota Balikpapan dengan konsep kerjasama perdagangan Sumberdaya Alam "Ma'balu" (Mamuju-Balikpapan-Palu). Serta rencana kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Provinsi Gorontalo dalam bidang peningkatan sumberdaya alam serta beberapa daerah lainnya yang saat ini sementara dalam tahap peninjauan. Berbagai program kerjasama perlu mendapat perhatian dari seluruh stakeholder

terkait, terutama dalam penyediaan data dan sharing program yang akan dilakukan secara terintegrasi, sehingga upaya untuk peningkatan pembangunan dari seluruh sektor dapat kita wujudkan bersama.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Tujuan dan Sasaran

Mengingat RPJP Daerah merupakan pedoman bagi rencana pembangunan terkait lainnya, maka penentuan arah umum pembangunan jangka panjang, peran sub-wilayah, dan pentahapan pembangunan untuk periode lima tahunan merupakan bagian penting dalam RPJP Provinsi Sulawesi Barat. Arah umum pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005–2025 secara umum diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah, yaitu masyarakat yang sejahtera, daerah yang maju, dan manusia yang malaqbi.

- Pembangunan masyarakat yang sejahtera diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu:
 1. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan makanan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan air bersih, tempat tinggal, kesempatan berusaha,
 2. Meningkatnya taraf hidup masyarakat Sulawesi Barat yang ditandai oleh meningkatnya pendapatan per-kapita dan menurunnya jumlah penduduk miskin. akses terhadap sumberdaya, dan rasa aman.
- Pembangunan daerah yang maju diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:
 1. Terwujudnya pembangunan yang merata antar sektor dan antar wilayah, yang ditandai oleh meningkatnya penyediaan pelayanan infrastruktur (transportasi, listrik, air bersih, dan telekomunikasi), pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah dan antar sektor, dan distribusi pendapatan secara merata.
 2. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yang ditandai oleh menurunnya eksploitasi sumberdaya alam yang merusak lingkungan, terciptanya pendapatan masyarakat yang berkelanjutan, terjaminnya kelestarian lingkungan hidup, dan berkembangnya pariwisata.
 3. Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis, yang ditandai oleh pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas KKN, serta kehidupan masyarakat yang bebas konflik (vertikal dan horizontal).
- Pembangunan manusia yang malaqbi diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:
 1. Terwujudnya karakter manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang semakin berakhlak mulia, bermoral tinggi, dan berbudaya luhur; terlestarikannya secara dinamis nilai-nilai, norma-norma dan kearifan lokal serta mengembangkan seni-budaya lokal dibalik modernisasi dan globalisasi; berkembangnya kehidupan beragama dan harmoni social serta kesatuan dan persatuan dibalik heterogenitas sosial dan multietnik masyarakat; terlestarikannya lingkungan hidup yang indah dan asri; serta semakin mantapnya kepatuhan terhadap hukum.

2. Terwujudnya manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang berdaya saing dengan kualitas pengetahuan dan kesehatan yang tinggi; angka harapan hidup minimal sama dengan rata-rata nasional; kualitas proses dan output pendidikan minimal sama dengan rata-rata nasional; dan kemampuan swadaya dan prakarsa masyarakat serta keberdayaan perempuan yang tinggi.

Penyelenggaraan pembangunan pada periode RPJMD sebelumnya telah membuahkan hasil yang diharapkan, meskipun masih terdapat target-target yang belum tercapai, untuk itu diperlukan perencanaan yang lebih baik lagi agar kinerja pembangunan dapat lebih optimal. Dalam Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Tahun 2025 serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022, maka perlu adanya kerangka yang jelas menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan dan sasaran akan memberi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan yang dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan diuraikan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Sulawesi Barat Tahun 2023-2026

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Perkiraan	Target Capaian				Kondisi Akhir	Sumber Data
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
T.1.	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKEBUDAYAAN			INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	POIN	66,36	67,06	68,16	69,36	70,36	71,56	71,56	BPS
		SS.1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66.36	67.06	68.16	69.36	70.36	71.56	71.56	BPS
		SS.2.	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	33.80	31.80	28.70	26.70	23.50	20	20	KEMENKES RI
T.2.	MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH			PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN	-2,42 (2020)	(2,5 - 3,5)	4.50	5.10	5.80	6.70	6.70	BPS
		SS.3.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,42 (2020)	(2,5 - 3,5)	4.50	5.10	5.80	6.70	6.70	BPS
		SS.4.	Membatkannya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin	Tingkat Kemiskinan	Persen	11.85	11.23	10.72	10.25	9.73	9.06	9.06	BPS
				Laju Inflasi	Persen	4.39	3.5±1	3±1	2.6±1	2.3±1	2±1	2±1	BPS
				Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah/Kapita/Tahun	36.17	39.28	42.65	46.31	50.29	54.61	54.61	BPS
		SS.5.	Menurunnya Kesenjangan antar Lapisan Masyarakat	Indeks Gini Rasio	Poin	0.366	0.355	0.350	0.346	0.338	0.325	0.325	BPS

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Perkiraan	Target Capaian				Kondisi Akhir	Sumber Data
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
		SS.6.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.13	3.05	2.98	2.76	2.45	1.95	1.95	BPS
T.3.	MENINGKATKAN AKSESIBILITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN			PERSENTASE LAYANAN INFRASTRUKTUR	PERSEN	72.13	73.55	75.88	77.82	79.56	81.30	81.3	BAPPEDA
		SS.7.	Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	Persen	42.18	45.19	48.19	50.19	53.19	56.19	56.19	DINAS PUPR
				Cakupan Desa yang Terlayani Sinyal Telekomunikasi	Persen	68.87	73.22	81.91	90.6	95.82	100	100	DINAS KOMINFOPERS
				Tingkat Layanan Fasilitas Perhubungan	Persen	70.95	71.19	73.10	74.52	75.71	76.43	76.43	DINAS PERHUBUNGAN
		SS.8.	Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Dasar Masyarakat	Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Air Minum Layak	Persen	58.89	58.90	59	59.10	59.21	59.31	59.31	BPWP
				Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak	Persen	87.56	88.81	91.31	92.56	95.06	97.56	97.56	BPS
				Persentase Elektrifikasi	Persen	97.83	97.96	98.1	98.21	98.32	100	100	DINAS ESDM
				Persentase Rumah Layak Huni	Persen	78.61	79.56	79.58	79.59	79.6	79.61	79.61	DINAS PERMUKIM
		SS.9.	Meningkatnya Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana	Poin / Kategori	166,49 / Tinggi (2020)	166 / Tinggi	161 / Tinggi	158 / Tinggi	153 / Tinggi	144 / Sedang	144 / Sedang	BNPB

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Perkiraan	Target Capaian				Kondisi Akhir	Sumber Data
						2021		2022	2023	2024	2025	2026	
T.4.	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BAIK DAN BERWIBAWA			INDEKS REFORMASI BIROKRASI	POIN / KATEGORI	60,04 / B (2020)	62,86 / B	66,86 / B	70,16 / BB	74,66 / BB	80,16 / A	80,16 / A	KEMENPAN-RB RI
		SS.10.	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP)	Poin / Kategori	78 / Baik	78,5 / Baik	79 / Baik	79,5 / Baik	80 / Baik	80 / Baik	80 / Baik	KPK RI
		SS.11.	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Nilai SAKIP	Poin / Kategori	63,14 / B (2020)	66,29 / B	70,29 / BB	73,54 / BB	77,54 / BB	80,54 / A	80,54 / A	KEMENPAN-RB RI
				Opini BPK terhadap LKPD	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPK RI
				Indeks SPBE	Poin	2.04	2.20	2.35	2.55	2.80	3	3	KEMKOMINFO
		SS.12.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	0	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Berdasarkan Permasalahan serta Isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama 4 (empat) Tahun 2023-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan tahunan atau tahapan pembangunan per tahunnya yang akan dilaksanakan selama empat tahun kedepan maka perlu ditetapkannya strategi dan arah kebijakan. Hal ini nantinya akan memudahkan dan membantu dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perumusan Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program pembangunan daerah berdasarkan bidang urusan masing-masing organisasi perangkat daerah. Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
TUJUAN 1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKEBUDAYAAN					
SS.1.	Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	1.	Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan, serta Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi dan Angka Kesakitan	1.	Peningkatan Akses Pendidikan
				2.	Penguatan Program Tangani Total Anak Tidak Sekolah (Portal ATS)
				3.	Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				4.	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Sekolah
				5.	Peningkatan Kualitas dan Akses Pemerataan Layanan Kesehatan
				6.	Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Upaya Kesehatan yang Promotif dan Preventif
				7.	Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
SS.2.	Menurunnya Prevalensi Stunting	1.	Menguatkan Intervensi Sensitif dan Spesifik dalam Percepatan Penurunan Stunting	1.	Pemenuhan Akses Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat
				2.	Peningkatan Akses dan Kualitas Sanitasi dan Air Bersih
				3.	Penurunan Angka Perkawinan Anak
				4.	Peningkatan Peran Kelembagaan Posyandu
				5.	Penguatan Fungsi Kelembagaan dan Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting
TUJUAN 2 : MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH					
SS.3.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah	1.	Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan	1.	Peningkatan Upaya Revitalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian serta Dukungan Infrastruktur Penunjang
				2.	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan melalui Penguatan Kapasitas Nelayan, Dukungan Sarana Prasarana dan Peningkatan Sistem Rantai Dingin
				3.	Peningkatan Pengawasan Sarana Prasarana Pertanian, Pemanfaatan Teknologi, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
				4.	Peningkatan Hilirisasi Pengelolaan Komoditas berbasis Sumber Daya Alam (Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan) melalui Dukungan Sarana Prasarana pada Proses Produksi dan Pengolahan serta Pengembangan Digitalisasi UMKM
				5.	Peningkatan Kemitraan dan Jaringan Pemasaran
				6.	Penguatan SDM Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah melalui Pelatihan dan Pendampingan serta Fasilitasi terhadap Pembiayaan Mikro
SS.4.	Membbaiknya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin	1.	Meningkatkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu dan Menyeluruh	1.	Peningkatan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan dengan Fokus pada Peningkatan Keterampilan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kantong-kantong Kemiskinan
				2.	Peningkatan Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat
				3.	Penguatan Sistem data dan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan
SS.5.	Menurunnya Kesenjangan antar Lapisan Masyarakat	1.	Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat dan Menurunkan Ketimpangan Kekayaan	1.	Penguatan Industri Kecil Strategis Berbasis Rakyat, Fasilitasi terhadap Modal Usaha dan Memaksimalkan Potensi Lokal
				2.	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
				3.	Penerapan Pajak/Subsidi, Peningkatan Program Afiriasi yang Efektif dan Fasilitasi Kredit UMKM Pertanian
SS.6.	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.	Memperluas Kesempatan Kerja, Mendorong Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja serta Mengembangkan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah	1.	Peningkatan Investasi serta Penguatan dan Perluasan Kerjasama Antar Daerah
				2.	Meningkatkan Kompetensi dan Skill Tenaga Kerja melalui Pelatihan, Sertifikasi dan Kemitraan dengan Dunia Industri
				3.	Penguatan Vokasional dalam Kerangka link and match dengan Dunia Usaha dan Industri
				4.	Mendorong dan Meningkatkan Tumbuhnya Wirausaha Baru yang Berdaya Saing

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
TUJUAN 3 : MENINGKATKAN AKSESIBILITAS INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN					
SS.7.	Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah	1.	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah	1.	Peningkatan Kondisi Mantap Jalan Provinsi pada Kategori Rusak Ringan
				2.	Peningkatan Cakupan Sinyal Telekomunikasi di Wilayah Perdesaan
				3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi
SS.8.	Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Dasar Masyarakat	1.	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar Masyarakat	1.	Peningkatan Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak
				2.	Peningkatan Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak
				3.	Peningkatan Elektrifikasi Rumah Tangga
				4.	Peningkatan Rumah Layak Huni Masyarakat
SS.9.	Meningkatnya Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan	1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada Wilayah Daratan, Pesisir dan Laut
				2.	Optimalisasi Pengelolaan Sampah
				3.	Optimalisasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis
				4.	Penurunan Tingkat Kerentanan terhadap Bencana melalui Peningkatan Kapasitas
				5.	Pengembangan Sistem Pemulihan Pasca Bencana
TUJUAN 4 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BAIK DAN BERWIBAWA					
SS.10.	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	1.	Meningkatkan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.	Optimalisasi Manajemen Penganggaran Daerah
				2.	Optimalisasi Manajemen Aset Daerah
				3.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
				4.	Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
				5.	Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
				6.	Optimalisasi Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa
				7.	Optimalisasi Manajemen Perizinan

Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
SS.11.	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	1.	Meningkatkan Kapabilitas Kinerja Birokrasi	1.	Optimalisasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah
				2.	Peningkatan Manajemen Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
				3.	Optimalisasi Manajemen Keuangan Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
				4.	Peningkatan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SS.12.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
				2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah
				3.	Peningkatan Kualitas Pelayanan pada SAMSAT
				4.	Optimalisasi Penataan Organisasi

6.2. Arah Kebijakan

Program pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 merupakan pelaksanaan dari sasaran pembangunan jangka menengah yang mencerminkan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dijabarkan kedalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 6.2

Tabel 6.2
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif (Berdasarkan Nomenklatur PMDN 86/2018)
Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERKEBUDAYAAN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	POIN	66.36	67.06	68.16	186,908,578,329.65	69.36	139,270,297,982.78	70.36	190,083,323,188.32	71.56	202,207,283,711.16	71.56	202,207,283,711.16	
1	1	Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat	Poin	66.36	67.06	68.16	171,955,892,063.28	69.36	128,128,674,144.16	70.36	174,876,657,333.26	71.56	186,030,701,014.27	71.56	186,030,701,014.27	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persen	71.22	75	84.75	150,633,361,447.43	88.99	112,240,718,550.28	93.44	153,191,951,823.93	98.11	162,962,894,088.50	98.11	162,962,894,088.50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persen	75.4	82.94	87.09	859,779,460.32	89.70	640,643,370.72	92.39	874,383,286.67	95.16	930,153,505.07	95.16	930,153,505.07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persen	35.02	40.05	44.06	687,823,568.25	48.46	512,514,696.58	53.31	699,506,629.33	58.64	744,122,804.06	58.64	744,122,804.06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	Person	69.31	72.775 5	100	1,719,558,920.63	100	1,281,286,741.44	100	1,748,766,573.33	100	1,860,307,010.14	100	1,860,307,010.14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	Person	78.72	82.656	100	1,031,735,352.38	100	768,772,044.86	100	1,049,259,944.00	100	1,116,184,206.09	100	1,116,184,206.09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusikan Sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan	Person	75.05	78.80	82.7 4	1,375,647,136.51	86. 88	1,025,029,393.15	91.22	1,399,013,258.67	95.7 8	1,488,245,608.11	95.78	1,488,245,608.11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi	PTK	1288	1418	1548	1,375,647,136.51	169 8	1,025,029,393.15	1828	1,399,013,258.67	1958	1,488,245,608.11	1958	1,488,245,608.11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan oleh Masyarakat yang Diselenggarakan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Person	30.7	45.04	49.54	1,031,735,352.38	54.50	768,772,044.86	59.95	1,049,259,944.00	65.94	1,116,184,206.09	65.94	1,116,184,206.09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	Person	86.11	87.96	91.66	5,158,676,761.90	94.44	3,843,860,224.32	96.3	5,246,299,720.00	99.07	5,580,921,030.43	99.07	5,580,921,030.43	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	Angka	234	210	195	2,579,338,380.95	179	1,921,930,112.16	163	2,623,149,860.00	150	2,790,460,515.21	150	2,790,460,515.21	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	Angka	10,29	9,28	8.38	1,203,691,244.44	7.56	896,900,719.01	6.82	1,224,136,601.33	6	1,302,214,907.10	6	1,302,214,907.10	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Person	78	82	84	859,779,460.32	86	640,643,370.72	88	874,383,286.67	90	930,153,505.07	90	930,153,505.07	Dinas Kesehatan

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)		
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	Person	50	60	70	1,031,735,352.38	80	768,772,044.86	85	1,049,259,944.00	90	1,116,184,206.09	90	1,116,184,206.09	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM Usia 15 Tahun Keatas	Person	60	70	80	515,867,676.19	85	384,386,022.43	90	524,629,972.00	95	558,092,103.04	95	558,092,103.04	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial	Person	90.27	92.27	95	515,867,676.19	97	384,386,022.43	98	524,629,972.00	99	558,092,103.04	99	558,092,103.04	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS	Person	33	40	45	687,823,568.25	50	512,514,696.58	55	699,506,629.33	60	744,122,804.06	60	744,122,804.06	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Person	58	60	63	687,823,568.25	66	512,514,696.58	69	699,506,629.33	72	744,122,804.06	72	744,122,804.06	Dinas Kesehatan
1	2	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Person	33.8	31.8	28.7	14,952,686,266.37	26.7	11,141,623,838.62	23.5	15,206,665,855.07	20	16,176,582,696.89	20	16,176,582,696.89	
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Person	78	83.8	86.7	1,495,268,626.64	89.6	1,114,162,383.86	92.5	1,520,666,585.51	95.4	1,617,658,269.69	95.4	1,617,658,269.69	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Tertangani	Person	35.3	38	45	971,924,607.31	50	724,205,549.51	55	988,433,280.58	60	1,051,477,875.30	60	1,051,477,875.30	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	60.45	63	66.5	635,489,166.32	68	473,519,013.14	70	646,283,298.84	72.5	687,504,764.62	72.5	687,504,764.62	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Balita Wasting	Person	7.1	6.8	6.3	4,485,805,879.91	6	3,342,487,151.59	5	4,561,999,756.52	4	4,852,974,809.07	4	4,852,974,809.07	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Surveilans Gizi	Person	47.9	58.4	69	747,634,313.32	79	557,081,191.93	90	760,333,292.75	100	808,829,134.84	100	808,829,134.84	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar	Person	76.49	85.25	86.3	822,397,744.65	87	612,789,311.12	88.4	836,366,622.03	89	889,712,048.33	89	889,712,048.33	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Person	28	33	36	971,924,607.31	39	724,205,549.51	44	988,433,280.58	50	1,051,477,875.30	50	1,051,477,875.30	Dinas Kesehatan

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar	Person	65.38	70	80	448,580,587.99	85	334,248,715.16	90	456,199,975.65	100	485,297,480.91	100	485,297,480.91	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Prevalensi Perkawinan Anak	Person	17.12	16.5	16	1,495,268,626.64	15.5	1,114,162,383.86	15	1,520,666,585.51	14.5	1,617,658,269.69	14.5	1,617,658,269.69	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Posyandu Aktif	Person	92	93.5	96	1,009,306,322.98	97	752,059,609.11	98	1,026,449,945.22	100	1,091,919,332.04	100	1,091,919,332.04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa memiliki Regulasi Perkawinan Anak	Person	5	15	25	523,344,019.32	30	389,956,834.35	40	532,233,304.93	50	566,180,394.39	50	566,180,394.39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kabupaten yang Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif	Person	33	50	60	149,526,862.66	70	111,416,238.39	85	152,066,658.55	100	161,765,826.97	100	161,765,826.97	Dinas Kesehatan

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)		
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program Intervensi Stunting dalam Dokumen RKP	Persentase	60	70	80	1,196,214,901.31	85	891,329,907.09	90	1,216,533,268.41	95	1,294,126,615.75	95	1,294,126,615.75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2		MENINGKATKAN KEMANDIRIAAN EKONOMI DAERAH	PERTUMBUHAN EKONOMI	PERSEN	-2,42 (2020)	(2,5 - 3,5)	4.5	163,545,006,038.44	5.1	121,861,510,734.93	5.8	166,322,907,789.78	6.7	176,931,373,247.27	6.7	176,931,373,247.27	
2	3	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	-2,42 (2020)	(2,5 - 3,5)	4.5	57,240,752,113.45	5.1	42,651,528,757.23	5.8	58,213,017,726.42	6.7	61,925,980,636.54	6.7	61,925,980,636.54	
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian	Persentase	70	70	75	22,642,790,000.00	78	24,680,714,000.00	80	26,815,023,900.00	82	28,651,545,365.00	82	28,651,545,365.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan	Persentase	25	25	25	2,441,084,038.00	25	2,582,666,912.00	25	2,732,461,593.00	25	2,890,944,365.00	25	2,890,944,365.00	Dinas Perkebunan
		Program Pengelolaan Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Persentase	0.33 (2020)	0.34	0.35	15,000,000,000.00	0.36	17,000,000,000.00	0.36	19,000,000,000.00	0.37	21,000,000,000.00	0.37	21,000,000,000.00	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Areal D.I. Kewenangan Provinsi yang Fungsional dalam Kondisi Baik	Persentase	33.32	34.72	37.17	11,000,000,000.00	39.89	13,250,000,000.00	42.08	15,000,000,000.00	45.1	17,750,000,000.00	45.1	17,750,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Perkembangan Permukiman Transmigrasi Mandiri (PDRB)	Person	42	43	45	5,000,000,000.00	46	5,500,000,000.00	50	5,700,000,000.00	52	6,000,000,000.00	52	6,000,000,000.00	Dinas Transmigrasi
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Person	2	1.5	2	20,947,000,000.00	2	18,947,000,000.00	2	18,947,000,000.00	3	18,947,000,000.00	3	18,947,000,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Person	1	2	2	5,021,000,000.00	2	4,547,500,000.00	2	5,257,000,000.00	2	5,340,200,000.00	2	5,340,200,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah	Person	70	70	75	6,564,690,000.00	78	6,754,011,500.00	80	6,587,643,025.00	82	6,347,372,258.75	82	6,347,372,258.75	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Pengembangan Kawasan Perkebunan	Person	15	15	15	12,020,580,045.00	15	12,717,773,688.00	15	13,455,404,562.00	15	14,235,818,027.00	15	14,235,818,027.00	Dinas Perkebunan
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Layanan Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Pertanian berbasis Korporasi dan Kawasan Pertanian Strategis	Person	60	65	75	11,600,000,000.00	78	13,275,000,000.00	80	15,186,215,000.00	82	17,369,187,500.00	82	17,369,187,500.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Petani yang Menerapkan GAP dan GHP	Perse n	60	65	75	3,600,000,000.00	78	3,900,000,000.00	80	3,268,000,000.00	82	3,488,000,000.00	82	3,488,000,000.00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah Kelompok Tani yang Tergabung dalam Korporasi Petani	Perse n	30	30	30	3,434,033,300.00	30	3,633,207,231.00	30	3,843,933,250.00	30	4,066,881,379.00	30	4,066,881,379.00	Dinas Perkebunan
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penerapan GAP dan GHP pada Kawasan Pengembang Komoditi Perkebunan	Perse n	35	35	35	2,123,390,000.00	35	2,246,546,620.00	35	2,376,846,324.00	35	2,514,703,411.00	35	2,514,703,411.00	Dinas Perkebunan
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaa n Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Kelompok Masyarakat Kehutanan Mandiri	Perse n	2	2	5	6,000,000,000.00	8	7,000,000,000.00	12	8,000,000,000.00	15	9,000,000,000.00	15	9,000,000,000.00	Dinas Kehutanan
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaa n Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap PIAPS	Perse n	32.79	32.79	35	2,000,000,000.00	40	2,000,000,000.00	45	2,000,000,000.00	50	2,000,000,000.00	50	2,000,000,000.00	Dinas Kehutanan

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)		
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP	Person	10	10	15	3,100,000,000.00	20	3,900,000,000.00	25	4,600,000,000.00	30	5,150,000,000.00	30	5,150,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal	Person	13	15	21.05	1,200,000,000.00	26.32	1,360,000,000.00	26.32	1,440,000,000.00	26.32	1,495,000,000.00	26.32	1,495,000,000.00	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olah Perikanan	Person	-46.47	2	2	3,211,400,000.00	3	6,400,228,000.00	3	6,400,228,000.00	3	6,400,228,000.00	3	6,400,228,000.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Person	20.79	24.4	27.85	2,800,000,000.00	28.71	3,900,000,000.00	30.77	4,300,000,000.00	32.35	5,100,000,000.00	32.35	5,100,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
2	4	Membbaiknya Standar Hidup dan Daya Beli Masyarakat Miskin	Tingkat Kemiskinan	Person	11.85	11.23	10.72	32,709,001,207.69	10.25	24,372,302,146.99	9.73	33,264,581,557.96	9.06	35,386,274,649.45	9.06	35,386,274,649.45	
			Laju Inflasi	Person	4.39	3.5±1	3±1	24,531,750,905.77	2.6±1	18,279,226,610.24	2.3±1	24,948,436,168.47	2±1	26,539,705,987.09	2±1	26,539,705,987.09	
			Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah/Kapita/Tahun	36.17	39.28	42.65	8,177,250,301.92	46.31	6,093,075,536.75	50.29	8,316,145,389.49	54.61	8,846,568,662.36	54.61	8,846,568,662.36	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)		
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Perkembangan Status Desa	Person	33	44.71	56.48	5,868,000,000.00	68.25	6,093,000,000.00	80.01	6,273,000,000.00	91.78	6,543,000,000.00	91.78	6,543,000,000.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Person	10	15	25	1,200,000,000.00	29	1,500,000,000.00	35	1,600,000,000.00	30	1,800,000,000.00	30	1,800,000,000.00	Dinas Pariwisata	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan	Person	87.93	90.03	92.13	15,555,635,045.00	94.23	16,037,859,731.00	96.33	16,535,033,383.00	98.43	17,047,619,417.00	98.43	17,047,619,417.00	Dinas Kesehatan	
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial	Person	20	20	47	5,500,000,000.00	47	3,500,000,000.00	53	6,000,000,000.00	60	7,000,000,000.00	60	7,000,000,000.00	Dinas Sosial	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pengolahan Data DTKS	Person	46.9	60	60	4,500,000,000.00	60	4,500,000,000.00	60	4,500,000,000.00	60	4,500,000,000.00	60	4,500,000,000.00	Dinas Sosial	
2	5	Menurunnya Kesenjangan antar Lapisan Masyarakat	Indeks Gini Rasio	Poin	0.366	0.355	0.35	16,354,500,603.84	0.346	12,186,151,073.49	0.338	16,632,290,778.98	0.338	17,693,137,324.73	0.338	17,693,137,324.73	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Person	17	17	20	1,000,000,000.00	25	1,250,000,000.00	30	1,500,000,000.00	35	1,750,000,000.00	35	1,750,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)		
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Person	50	60	76	1,000,000,000.00	80	1,250,000,000.00	83	1,500,000,000.00	86	1,750,000,000.00	86	1,750,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Person	0.02	0.02	0.02	300,000,000.00	0.02	350,000,000.00	0.02	400,000,000.00	0.02	450,000,000.00	0.02	450,000,000.00	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi PAD terhadap Target PAD	Person	1.02	98	94	6,000,000,000.00	96	7,000,000,000.00	98	8,000,000,000.00	100	9,000,000,000.00	100	9,000,000,000.00	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	Person	20	20	25	2,000,000,000.00	30	2,250,000,000.00	35	2,500,000,000.00	40	2,750,000,000.00	40	2,750,000,000.00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
2	6	Meningkatnya Kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Person	3.13	3.05	2.98	24,531,750,905.77	2.76	18,279,226,610.24	2.45	24,948,436,168.47	1.95	26,539,705,987.09	1.95	26,539,705,987.09	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal	Person	38.86	39	39.5	1,150,000,000.00	40	1,225,000,000.00	40.5	850,000,000.00	41	700,000,000.00	41	700,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Person	11	11.5	12	1,000,000,000.00	12	1,200,000,000.00	12	1,500,000,000.00	12	1,700,000,000.00	12	1,700,000,000.00	Dinas Pariwisata
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi	Person	11.43	11.44	11.45	740,000,000.00	11.47	840,000,000.00	11.48	940,000,000.00	11.49	1,130,000,000.00	11.49	1,130,000,000.00	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Satu Provinsi	Person	41.35	42	43	530,000,000.00	44	540,000,000.00	45	550,000,000.00	46	600,000,000.00	46	600,000,000.00	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pengelolaan Pendidikan	Prepresentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA	Person	35,02	40.05	44.06	600,000,000.00	48.46	600,000,000.00	53.31	600,000,000.00	58.64	600,000,000.00	58.64	600,000,000.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembang an UMKM	Meningkatny a Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	Person	20	20	25	2,000,000,000.00	30	2,250,000,000.00	35	2,500,000,000.00	40	2,750,000,000.00	40	2,750,000,000.00	Dinas Perdaganga n, Perindustria n, Koperasi dan UKM
3	MENINGKAT KAN AKSESIBILIT AS INFRASTRU KTUR YANG BERKELANJ UTAN	PERSENTA SE LAYANAN INFRASTR UKTUR	PERS EN	72.127 483	73.547 211	75.8 8361	204,431,257,548.05	77. 824 83	152,326,888,418.67	79.55 9184	207,903,634,737.23	81.2 9979 6	221,164,216,559.08	81.29 9796	221,164,216,559.08	
3	7	Meningkatny a Aksesibilit as Infrastrukt ur Wilayah	Person	42.18	45.19	48.19	84,838,971,882.44	50.19	63,215,658,693.75	53.19	86,280,008,415.95	56.19	91,783,149,872.02	56.19	91,783,149,872.02	
	Program Penyelenggar aan Jalan	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	Person	42.18	45.19	48.19	84,838,971,882.44	50.19	63,215,658,693.75	53.19	86,280,008,415.95	56.19	91,783,149,872.02	56.19	91,783,149,872.02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan Desa yang Terlayani Sinyal Telekomuni- kasi	Perse- n	68.87	73.22	81.9 1	3,066,468,863.22	90. 6	2,284,903,326.28	95.82	3,118,554,521.06	100	3,317,463,248.39	100	3,317,463,248.39	
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Penyediaan Layanan Telekomuni- kasi Desa	Perse- n	68.87	73.22	81.9 1	2,146,528,204.25	90. 6	1,599,432,328.40	95.82	2,182,988,164.74	100	2,322,224,273.87	100	2,322,224,273.87	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	Program Penataan Desa	Tingkat Layanan Komunikasi dan Informasi Pemerintah- an Desa	Perse- n	68.87	73.22	81.9 1	919,940,658.97	90. 6	685,470,997.88	95.82	935,566,356.32	100	995,238,974.52	100	995,238,974.52	Dinas Pemberdaya- an Masyarakat dan Desa
		Tingkat Layanan Fasilitas Perhubung- an	Perse- n	70.952 381	71.190 476	73.0 9524	4,088,625,150.96	74. 523 81	3,046,537,768.37	75.71 4286	4,158,072,694.74	76.4 2857 1	4,423,284,331.18	76.42 8571	4,423,284,331.18	
	Program Penyelenggar- aan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubung- an Darat	Perse- n	63.57	64.29	67.1 4	1,635,450,060.38	69. 29	1,218,615,107.35	70.71	1,663,229,077.90	71.4 3	1,769,313,732.47	71.43	1,769,313,732.47	Dinas Perhubung- an
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubung- an Laut	Perse- n	79.17	79.17	80	2,453,175,090.58	80. 83	1,827,922,661.02	81.67	2,494,843,616.85	83.3 3	2,653,970,598.71	83.33	2,653,970,598.71	Dinas Perhubung- an
3	8	Meningkatny- a Aksesibilitas Infrastruktur Dasar Masyarakat	Perse- n	58.89	58.9	59	12,265,875,452.88	59. 1	9,139,613,305.12	59.21	12,474,218,084.23	59.3 1	13,269,852,993.55	59.31	13,269,852,993.55	

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Air Minum Layak	Person	58.89	58.9	59	12,265,875,452.88	59.1	9,139,613,305.12	59.21	12,474,218,084.23	59.31	13,269,852,993.55	59.31	13,269,852,993.55	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak	Person	87.56	88.81	91.31	8,177,250,301.92	92.56	6,093,075,536.75	95.06	8,316,145,389.49	97.56	8,846,568,662.36	97.56	8,846,568,662.36	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	Person	87.56	88.81	91.31	8,177,250,301.92	92.56	6,093,075,536.75	95.06	8,316,145,389.49	97.56	8,846,568,662.36	97.56	8,846,568,662.36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Elektrifikasi	Person	97.83	97.96	98.1	14,310,188,028.36	98.21	10,662,882,189.31	98.32	14,553,254,431.61	100	15,481,495,159.14	100	15,481,495,159.14	
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Person	97.83	97.96	98.1	5,724,075,211.35	98.21	4,265,152,875.72	98.32	5,821,301,772.64	100	6,192,598,063.65	100	6,192,598,063.65	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Desa yang Teraliri Listrik	Person	93.85	94.62	96.15	8,586,112,817.02	96.92	6,397,729,313.58	98.46	8,731,952,658.96	100	9,288,897,095.48	100	9,288,897,095.48	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Rumah Layak Huni	Person	78.61	79.56	79.58	36,797,626,358.65	79.59	27,418,839,915.36	79.6	37,422,654,252.70	79.61	39,809,558,980.63	79.61	39,809,558,980.63	
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Person	12.83	12.26	12.25	36,797,626,358.65	12.25	27,418,839,915.36	12.24	37,422,654,252.70	12.23	39,809,558,980.63	12.23	39,809,558,980.63	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)		
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3	9	Meningkatnya Ketahanan Bencana yang Berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana	Poin / Kategori	166,49 / Tinggi (2020)	166 / Tinggi	161 / Tinggi	40,886,251,509.61	158 /Tinggi	30,465,377,683.73	153/T inggi	41,580,726,947.45	144/ Sedang	44,232,843,311.82	144/S edang	44,232,843,311.82	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75.72	75.92	76.4 5	8,177,250,301.92	78. 5	6,093,075,536.75	79.75	8,316,145,389.49	80.5	8,846,568,662.36	80.5	8,846,568,662.36	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Hutan	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Ha	5.06	6.39	7.74	10,000,000,000	9.1	10,000,000,000	10.46	10,000,000,000	11.8 1	10,000,000,000	11.81	10,000,000,000.00	Dinas Kehutanan
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	Perse n	60	62.5	65	1,226,587,545.29	66	913,961,330.51	68.5	1,247,421,808.42	70	1,326,985,299.35	70	1,326,985,299.35	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Layanan Penanganan Limbah B3 Medis	Perse n	60	61.25	65	2,044,312,575.48	67. 5	1,523,268,884.19	70	2,079,036,347.37	75	2,211,642,165.59	75	2,211,642,165.59	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanggulan Bencana	Tingkat Kapasitas Penanggulan Bencana Daerah	Perse n	60	61	67.5	11,243,719,165.14	70	8,377,978,863.03	75	11,434,699,910.55	85	12,164,031,910.75	85	12,164,031,910.75	Badan Penanggulan Bencana

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Person	100	100	100	3,066,468,863.22	100	2,284,903,326.28	100	3,118,554,521.06	100	3,317,463,248.39	100	3,317,463,248.39	Dinas Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Person	100	100	100	1,022,156,287.74	100	761,634,442.09	100	1,039,518,173.69	100	1,105,821,082.80	100	1,105,821,082.80	Dinas Kesehatan
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi	Person	8.56	8.18	8.17	6,132,937,726.44	8.16	4,569,806,652.56	8.2	6,237,109,042.12	8.16	6,634,926,496.77	8.16	6,634,926,496.77	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Saat Tanggap Darurat	Person	100	100	100	5,110,781,438.70	100	3,808,172,210.47	100	5,197,590,868.43	100	5,529,105,413.98	100	5,529,105,413.98	Dinas Sosial
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana	Person	100	100	100	1,860,324,443.69	100	1,386,174,684.61	100	1,891,923,076.11	100	2,012,594,370.69	100	2,012,594,370.69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar	Person	45.81	55.57	65.33	1,001,713,161.99	75.09	746,401,753.25	84.85	1,018,727,810.21	94.61	1,083,704,661.14	94.61	1,083,704,661.14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BAIK DAN BERWIBAWA	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	POIN / KATEGORI	60,04 / B (2020)	62,86 / B	66,86 / B	29,204,465,364.01	70, 16/ BB	21,760,984,059.81	74,66 /BB	29,700,519,248.18	80,1 6/A	31,594,888,079.87	80,16 /A	31,594,888,079.87	
4	10 Meningkatnya Kapasitas Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP)	Poin / Kategori	78 / Baik	78,5 / Baik	79 / Baik	10,805,652,184.68	79, 5/Baik	8,051,564,102.13	80/Baik	10,989,192,121.82	80/Baik	11,690,108,589.55	80/Baik	11,690,108,589.55	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu terhadap Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD	Person	85	90	95	1,080,565,218.47	97	805,156,410.21	99	1,098,919,212.18	100	1,169,010,858.96	100	1,169,010,858.96	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Person	44.31	46	48	864,452,174.77	50	644,125,128.17	55	879,135,369.75	60	935,208,687.16	60	935,208,687.16	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi PAD terhadap Target PAD	Person	102	98	94	1,296,678,262.16	96	966,187,692.26	98	1,318,703,054.62	100	1,402,813,030.75	100	1,402,813,030.75	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)	
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	972,508,696.62	3	724,640,769.19	3	989,027,290.96	3	1,052,109,773.06	3	1,052,109,773.06	Inspektorat Daerah
	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Dimensi Kualifikasi terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	14.17	15	17	1,620,847,827.70	18	1,207,734,615.32	20	1,648,378,818.27	22	1,753,516,288.43	22	1,753,516,288.43	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Dimensi Kinerja terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	14.86	16	17	324,169,565.54	18	241,546,923.06	20	329,675,763.65	22	350,703,257.69	22	350,703,257.69	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Dimensi Disiplin terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	5	5	5	216,113,043.69	5	161,031,282.04	5	219,783,842.44	5	233,802,171.79	5	233,802,171.79	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Tata Kelola Manajemen ASN	Persentase	55.7	60	70	648,339,131.08	75	483,093,846.13	80	659,351,527.31	85	701,406,515.37	85	701,406,515.37	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	7.43	10	10	2,161,130,436.94	11	1,610,312,820.43	12	2,197,838,424.36	13	2,338,021,717.91	13	2,338,021,717.91	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase	100	100	100	864,452,174.77	100	644,125,128.17	100	879,135,369.75	100	935,208,687.16	100	935,208,687.16	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp. (Juta)		
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha	Person	2.33	0.76	1.08	756,395,652.93	1.06	563,609,487.15	1.05	769,243,448.53	1.56	818,307,601.27	1.56	818,307,601.27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
4	11	Meningkatnya Birokrasi yang Kapabel	Nilai SAKIP	Poin / Kategori	63,14 / B (2020)	66,29 / B	70,29 / BB	3,796,580,497.32	73,54 / BB	2,828,927,927.78	77,54 / BB	3,861,067,502.26	80,54 / A	4,107,335,450.38	80,54 / A	4,107,335,450.38	
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Renstra dan Renja pada Bobot diatas 21%	Person	67.5	78.57	85.71	2,277,948,298.39	88.09	1,697,356,756.67	95.23	2,316,640,501.36	100	2,464,401,270.23	100	2,464,401,270.23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal BB	Person	9.52	14.28	19.04	1,518,632,198.93	23.8	1,131,571,171.11	28.57	1,544,427,000.91	33.33	1,642,934,180.15	33.33	1,642,934,180.15	Biro Organisasi
			Opini BPK terhadap LKPD	Kategori	WTP	WTP	WTP	1,460,223,268.20	WTP	1,088,049,202.99	WTP	1,485,025,962.41	WTP	1,579,744,403.99	WTP	1,579,744,403.99	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan SAP	Person	90	95	100	1,460,223,268.20	100	1,088,049,202.99	100	1,485,025,962.41	100	1,579,744,403.99	100	1,579,744,403.99	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Indeks SPBE	Poin	2.04	2.2	2.35	7,301,116,341.00	2.55	5,440,246,014.95	2.8	7,425,129,812.04	3	7,898,722,019.97	3	7,898,722,019.97	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan SPBE	Person	40.8	44	47	7,301,116,341.00	51	5,440,246,014.95	56	7,425,129,812.04	60	7,898,722,019.97	60	7,898,722,019.97	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program Prioritas Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/ Program)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target (15)	Rp. (Juta) (16)		
						Target (7)	Rp. (Juta) (8)	Target (9)	Rp. (Juta) (10)	Target (11)	Rp. (Juta) (12)	Target (13)	Rp. (Juta) (14)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
4	1 2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	0	100	100	5,840,893,072.80	100	4,352,196,811.96	100	5,940,103,849.64	100	6,318,977,615.97	100	6,318,977,615.97	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan PTSP	Person	87.00 (Baik)	89.00 (Sangat Baik)	89.00 (Sangat Baik)	876,133,960.92	90.00 (Sangat Baik)	652,829,521.79	90.00 (Sangat Baik)	92.00 (Sangat Baik)	891,015,577.45	947,846,642.40	92.00 (Sangat Baik)	947,846,642.40	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Pelanggan	Person	90	90	90	2,920,446,536.40	90	2,176,098,405.98	90	2,970,051,924.82	90	3,159,488,807.99	90	3,159,488,807.99	Rumah Sakit Umum Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan SAMSAT	Person	90	90	92	1,460,223,268.20	94	1,088,049,202.99	96	1,485,025,962.41	98	1,579,744,403.99	98	1,579,744,403.99	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Minimal B+	Person	0	0	33.3	584,089,307.28	33.3	435,219,681.20	66.67	594,010,384.96	100	631,897,761.60	100	631,897,761.60	Biro Organisasi

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pada bab ini disajikan kerangka pendanaan pembangunan yang akan digunakan untuk pelaksanaan program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026. Kerangka pendanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat merupakan uraian proyeksi dari pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk mengalokasikan pemenuhan belanja wajib, program prioritas dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 merupakan penjabaran perencanaan tahap pembangunan keempat dari RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005–2025. Kerangka pendanaan yang dialokasikan untuk pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan dapat diproyeksikan sebagaimana tercantum pada Tabel 7.1 berikut:

**Tabel 7.1. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023-2026
Provinsi Sulawesi Barat**

Uraian	Pertumbuhan (%)	Proyeksi			
		2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	2,051	1.858.744.890.976,00	1.900.271.725.695,00	1.935.689.495.610,00	1.975.485.172.557,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5,473	419.600.742.896,00	446.429.956.135,00	467.252.944.356,00	492.305.073.591,00
Pajak Daerah	5,601	351.188.245.375,00	374.641.052.534,00	393.839.155.860,00	413.531.113.652,00
Retribusi Daerah	6,468	3.917.680.000,00	4.286.064.000,00	4.500.367.200,00	4.725.385.560,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,000	13.510.610.182,00	14.186.140.691,00	14.895.447.725,00	15.640.220.111,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	4,673	50.984.207.339,00	53.316.698.910,00	54.017.973.571,00	58.408.354.268,00
PENDAPATAN TRANSFER	1,000	1.438.052.148.080,00	1.452.432.669.560,00	1.466.956.996.254,00	1.481.626.566.216,00
Transfer Pemerintah Pusat	1,000	1.438.052.148.080,00	1.452.432.669.560,00	1.466.956.996.254,00	1.481.626.566.216,00
Dana Perimbangan	1,000	1.436.553.733.290,00	1.450.919.270.622,00	1.465.428.463.327,00	1.480.082.747.960,00
Dana Transfer Umum	1,000	997.187.183.430,00	1.007.159.055.264,00	1.017.230.645.816,00	1.027.402.952.274,00
<i>Dana Bagi Hasil (DBH)</i>	<i>1,000</i>	<i>15.276.111.630,00</i>	<i>15.428.872.746,00</i>	<i>15.583.161.473,00</i>	<i>15.738.993.088,00</i>
<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>1,000</i>	<i>981.911.071.800,00</i>	<i>991.730.182.518,00</i>	<i>1.001.647.484.343,00</i>	<i>1.011.663.959.186,00</i>
Dana Transfer Khusus	1,000	439.366.549.860,00	443.760.215.358,00	448.197.817.511,00	452.679.795.686,00
<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</i>	<i>1,000</i>	<i>249.726.530.910,00</i>	<i>252.223.796.219,00</i>	<i>254.746.034.181,00</i>	<i>257.293.494.523,00</i>
<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</i>	<i>1,000</i>	<i>189.640.018.950,00</i>	<i>191.536.419.139,00</i>	<i>193.451.783.330,00</i>	<i>195.386.301.163,00</i>
Dana Insentif Daerah	1,000	1.498.414.790,00	1.513.398.938,00	1.528.532.927,00	1.543.818.256,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13,013	1.092.000.000,00	1.409.100.000,00	1.479.555.000,00	1.553.532.750,00
Hibah	13,013	1.092.000.000,00	1.409.100.000,00	1.479.555.000,00	1.553.532.750,00
Dana Darurat		-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan		-	-	-	-
BELANJA DAERAH	6,342	1.609.598.234.892,00	1.990.904.248.195,00	1.826.322.018.110,00	1.892.151.839.224,00
BELANJA OPERASI	1,655	1.195.663.117.477,00	1.360.832.086.804,00	1.181.672.642.383,00	1.232.681.867.985,00
Belanja Pegawai	1,000	689.511.562.996,00	696.406.678.627,00	703.370.745.413,00	710.404.452.867,00
Belanja Barang dan Jasa	2,596	422.534.481.389,00	384.146.743.507,00	402.666.492.430,00	451.190.854.412,00
Belanja Bunga	-46,533	18.735.352.900,00	14.099.310.074,00	8.132.462.852,00	2.233.560.185,00

Uraian	Pertumbuhan (%)	Proyeksi			
		2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
Belanja Subsidi		-	-	-	-
Belanja Hibah	81,360	63.463.920.192,00	264.733.198.596,00	66.027.862.568,00	67.348.419.819,00
Belanja Bantuan Sosial	2,000	1.417.800.000,00	1.446.156.000,00	1.475.079.120,00	1.504.580.702,00
BELANJA MODAL	32,759	212.015.323.861,00	416.135.477.099,00	420.296.831.871,00	424.499.800.190,00
Belanja Modal Tanah	1,000	18.316.956.000,00	18.500.125.560,00	18.685.126.816,00	18.871.978.084,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,000	72.239.456.315,00	72.961.850.878,00	73.691.469.387,00	74.428.384.081,00
Belanja Modal Bangunan dan Gedung	119,756	28.349.549.718,00	129.633.045.215,00	130.929.375.667,00	132.238.669.424,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	51,997	66.016.440.583,00	167.676.604.989,00	169.353.371.039,00	171.046.904.749,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,000	27.092.921.245,00	27.363.850.457,00	27.637.488.962,00	27.913.863.852,00
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000	11.324.563.051,00	11.890.791.204,00	12.485.330.764,00	13.109.597.302,00
Belanja Tidak Terduga	5,000	11.324.563.051,00	11.890.791.204,00	12.485.330.764,00	13.109.597.302,00
BELANJA TRANSFER	5,195	190.595.230.503,00	202.045.893.088,00	211.867.213.092,00	221.860.573.747,00
Belanja Bagi Hasil	5,526	178.595.230.503,00	190.045.893.088,00	199.867.213.092,00	209.860.573.747,00
Belanja Bantuan Keuangan		12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota		12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi kepada Desa		-	-	-	-
SURPLUS / (DEFISIT)		249.146.656.084,00	-90.632.522.500,00	109.367.477.500,00	83.333.333.333,00
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			200.000.000.000,00		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya		-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan		-	200.000.000.000,00	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya		-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		249.146.656.084,00	109.367.477.500,00	109.367.477.500,00	83.333.333.333,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		49.146.656.084,00	109.367.477.500,00	109.367.477.500,00	83.333.333.333,00
Penyertaan Modal Daerah		-	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan		200.000.000.000,00	-	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya		-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		-249.146.656.084,00	90.632.522.500,00	-109.367.477.500,00	-83.333.333.333,00
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)					

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah selama 4 (empat) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 4 tahun kedepan (2023- 2026) dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan kebijakan kapasitas riil kemampuan anggaran daerah, selanjutnya perlu

ditetapkan kebijakan alokasi indikatif dari kapasitas riil kemampuan anggaran daerah tersebut kedalam berbagai program sesuai urutan prioritas. Prioritas program dikelompokkan menjadi Kelompok Prioritas I (KPI), Kelompok Prioritas II (KP II), dan Kelompok Prioritas III (KP III), Kelompok Prioritas I mendapat Prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas II mendapat alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I terpenuhi kebutuhan dananya begitupun dengan Kelompok Prioritas selanjutnya. Kapasitas riil tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja pada program prioritas kurun waktu 2023 sampai 2026 yang dapat dilihat pada tabel 7.2 dan tabel 7.3 berikut.

Tabel 7.2. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026

No.	Uraian	Proyeksi			
		2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1.	Pendapatan	1.858.744.890.976,00	1.900.271.725.695,00	1.935.689.495.610,00	1.975.485.172.557,00
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	200.000.000.000,00	-	-
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	-	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN (1+2+3)	1.858.744.890.976,00	2.100.271.725.695,00	1.935.689.495.610,00	1.975.485.172.557,00
	Dikurangi:				
4.	Belanja Pegawai	618.934.849.273,45	618.934.849.273,45	618.934.849.273,45	618.934.849.273,45
5.	Belanja Tidak Terduga	11.324.563.051,00	11.890.791.204,00	12.485.330.764,00	13.109.597.302,00
6.	Belanja Bunga	18.735.352.900,00	14.099.310.074,00	8.132.462.852,00	2.233.560.185,00
7.	Belanja Bagi Hasil	178.595.230.503,00	190.045.893.088,00	199.867.213.092,00	209.860.573.747,00
8.	Pembentukan Dana Cadangan	200.000.000.000,00	-	-	-
9.	Pembayaran Pokok Utang	49.146.656.084,00	109.367.477.500,00	109.367.477.500,00	83.333.333.333,00
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	782.008.239.164,55	1.155.933.404.555,55	986.902.162.128,55	1.048.013.258.716,55

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021

Tabel 7.3. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

No.	Uraian	Proyeksi			
		2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	782.008.239.164,55	1.155.933.404.555,55	986.902.162.128,55	1.048.013.258.716,55
1.	Prioritas I	428.846.709.879,11	594.843.776.673,50	619.121.157.962,65	672.671.075.930,72
2.	Prioritas II	130.112.142.368,32	133.033.020.798,65	135.498.264.692,70	138.283.962.078,99
3.	Prioritas III	223.049.386.917,12	228.056.607.083,40	232.282.739.473,20	237.058.220.706,84

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2021

7.2. Program Perangkat Daerah

Arsitektur perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program Perangkat Daerah yang selanjutnya diterjemahkan oleh PD ke dalam kegiatan. Perencanaan program Perangkat Daerah dalam dokumen RPD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya esensi program Perangkat Daerah bagi rujukan utama pelaksanaan perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dan program yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear). Selain program pembangunan daerah (program prioritas II), program dan kegiatan ini wajib mendapatkan prioritas pendanaan karena sifatnya yang berkesinambungan. Program Perangkat daerah yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD.

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah di atas, maka program perangkat daerah dalam 4 (empat) tahun disusun berdasarkan program perangkat daerah beserta pagu indikatif pelaksanaannya. Indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja serta kebutuhan pendanaan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana tercantum pada Tabel 7.4. berikut:

Tabel 7.4.
Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2023 s/d Tahun 2026
Provinsi Sulawesi Barat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
X	XX																	
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin	60,44	62,5	64,5	147.212.595.365,30	66,5	150.517.360.675,04	68,5	153.306.608.052,31	70,5	156.458.425.666,51	70,5	156.458.425.666,51	Semua OPD
				Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD	Persen	60	65	75	699.325.736.020,35	80	706.441.169.338,67	90	713.591.185.949,82	100	720.835.014.578,10	100	720.835.014.578,10	Semua OPD
				Nilai Rapor SPBE Lingkup OPD	Poin	53,02	58	65	25.516.849.863,32	70	26.089.675.850,34	85	26.573.145.395,73	100	27.119.460.448,86	100	27.119.460.448,86	Semua OPD
				Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD	Persen	60	65	75	13.739.842.234,09	85	14.048.286.996,34	95	14.308.616.751,55	100	14.602.786.395,54	100	14.602.786.395,54	Semua OPD
1				Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar														
1	01			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan														
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimal Akreditasi B	Persen	71,22	75	84,75	150.633.361.447,43	88,99	112.240.718.550,28	93,44	153.191.951.823,93	98,11	162.962.894.088,50	98,11	162.962.894.088,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Lulusan SMA/SMK yang Tersemp pada Perguruan Tinggi	Persen	75,4	82,94	87,09	859.779.460,32	89,70	640.643.370,72	92,39	874.383.286,67	95,16	930.153.505,07	95,16	930.153.505,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Lulusan SMK yang Tersemp dalam IDUKA	Persen	35,02	40,05	44,06	1.287.823.568,25	48,46	1.112.514.696,58	53,31	1.299.506.629,33	58,64	1.344.122.804,06	58,64	1.344.122.804,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Bertasipasi dalam Pendidikan Menengah	Persen	69,31	72,7755	100	1.719.558.920,63	100	1.281.286.741,44	100	1.748.766.573,33	100	1.860.307.010,14	100	1.860.307.010,14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Warga Negara Usia 4 18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	Persen	78,72	82,656	100	1.031.735.352,38	100	768.772.044,86	100	1.049.259.944,00	100	1.116.184.206,09	100	1.116.184.206,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan dan Diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persen	60,1	66,11	71,40	1.500.000.000,00	77,11	1.650.000.000,00	83,28	1.815.000.000,00	89,94	1.996.500.000,00	89,94	1.996.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusikan Sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan	Persen	75,05	78,8025	82,74	1.375.647.136,51	86,88	1.025.029.393,15	91,22	1.399.013.258,67	95,78	1.488.245.608,11	95,78	1.488.245.608,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi	PTK	1288	1418	1548	1.375.647.136,51	1698	1.025.029.393,15	1828	1.399.013.258,67	1958	1.488.245.608,11	1958	1.488.245.608,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan oleh Masyarakat yang Diselenggarakan Sesuai Peraturan Perundang-	Persen	30,7	45,04	49,54	1.031.735.352,38	54,50	768.772.044,86	59,95	1.049.259.944,00	65,94	1.116.184.206,09	65,94	1.116.184.206,09	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Bahasa dan Sastra yang Didokumentasikan dan Dikembangkan	Persen	7554	6900	7107	1.066.050.000,00	7462	1.119.352.500,00	7835	1.175.320.125,00	8227	1.234.086.131,25	8227	1.234.086.131,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	02			Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan														
				Dinas Kesehatan														
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	86	88	91,66	5.158.676.761,90	94	3.843.860.224,32	96	5.246.299.720,00	99	5.580.921.030,43	99,07	5.580.921.030,43	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	Angka	234	210	195	2.579.338.380,95	179	1.921.930.112,16	163	2.623.149.860,00	150	2.790.460.515,21	150	2.790.460.515,21	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	Angka	10,29	9,28	8,38	1.203.691.244,44	8	896.900.719,01	7	1.224.136.601,33	6	1.302.214.907,10	6	1.302.214.907,10	Dinas Kesehatan
				Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	78	82	84	859.779.460,32	86	640.643.370,72	88	874.383.286,67	90	930.153.505,07	90	930.153.505,07	Dinas Kesehatan
				Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	Persen	50	60	70	1.031.735.352,38	80	768.772.044,86	85	1.049.259.944,00	90	1.116.184.206,09	90	1.116.184.206,09	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM Usia 15 Tahun Keatas	Persen	60	70	80	515.867.676,19	85	384.386.022,43	90	524.629.972,00	95	558.092.103,04	95	558.092.103,04	Dinas Kesehatan		
		Prevelansi Balita Wasting	Persen	7	7	6,3	4.485.805.879,91	6	3.342.487.151,59	5	4.561.999.756,52	4	4.852.974.809,07	4	4.852.974.809,07	Dinas Kesehatan		
		Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Surveilans Gizi	Persen	48	58	69	747.634.313,32	79	557.081.191,93	90	760.333.292,75	100	808.829.134,84	100	808.829.134,84	Dinas Kesehatan		
		Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar	Persen	76	85	86,3	822.397.744,65	87	612.789.311,12	88	836.366.622,03	89	889.712.048,33	89	889.712.048,33	Dinas Kesehatan		
		Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persen	28	33	36	971.924.607,31	39	724.205.549,51	44	988.433.280,58	50	1.051.477.875,30	50	1.051.477.875,30	Dinas Kesehatan		
		Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air Minum sesuai	Persen	65	70	80	448.580.587,99	85	334.248.715,16	90	456.199.975,65	100	485.297.480,91	100	485.297.480,91	Dinas Kesehatan		
		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan	Persen	88	90	92,13	15.555.635.045,00	94	16.037.859.731,00	96	16.535.033.383,00	98	17.047.619.417,00	98,43	17.047.619.417,00	Dinas Kesehatan		
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	Persen	100	100	100	3.066.468.863,22	100	2.284.903.326,28	100	3.118.554.521,06	100	3.317.463.248,39	100	3.317.463.248,39	Dinas Kesehatan		
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa	Persen	100	100	100	1.022.156.287,74	100	761.634.442,09	100	1.039.518.173,69	100	1.105.821.082,80	100	1.105.821.082,80	Dinas Kesehatan		
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia	Persen	58	60	63	687.823.568,25	66	512.514.696,58	69	699.506.629,33	72	744.122.804,06	72	744.122.804,06	Dinas Kesehatan
1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial	Persen	90,27	92,27	95	515.867.676,19	97	384.386.022,43	98	524.629.972,00	99	558.092.103,04	99	558.092.103,04	Dinas Kesehatan
1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan	Persen	33	40	45	687.823.568,25	50	512.514.696,58	55	699.506.629,33	60	744.122.804,06	60	744.122.804,06	Dinas Kesehatan
				Persentase Kabupaten yang Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif	Persen	33	50	60	149.526.862,66	70	111.416.238,39	85	152.066.658,55	100	161.765.826,97	100	161.765.826,97	Dinas Kesehatan
				Rumah Sakit Umum Daerah														
1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Pelanggan	Persen	90	90	90	2.920.446.536,40	90	2.176.098.405,98	90	2.970.051.924,82	90	3.159.488.807,99	90	3.159.488.807,99	Rumah Sakit Umum Daerah
				Capaian Mutu Kinerja Pelayanan Rawat Inap	Persen	12	60	65	300.000.000,00	70	315.000.000,00	80	330.750.000,00	80	347.287.500,00	80	347.287.500,00	Rumah Sakit Umum Daerah
				Capaian Kelas RS	Persen	C	B	B	315.000.000,00	B	330.750.000,00	B	347.287.500,00	B	364.651.875,00	B	364.651.875,00	Rumah Sakit Umum Daerah
				Capaian Akreditasi RS	Persen	Utama	Paripurna	Paripurna	1.050.000.000,00	Paripurna	1.102.500.000,00	Paripurna	1.157.625.000,00	Paripurna	1.215.506.250,00	Paripurna	1.215.506.250,00	Rumah Sakit Umum Daerah
				Persentase Jumlah Sarana Prasarana dan Sediaan Farmasi yang Sesuai Ketentuan	Persen	41	58	70	3.634.620.225,00	78	3.816.351.236,25	85	4.007.168.798,06	95	4.207.527.237,97	95	4.207.527.237,97	Rumah Sakit Umum Daerah
				Persentase Penerapan SIM RS	Persen	80	85	85	400.000.000,00	90	420.000.000,00	95	441.000.000,00	95	463.050.000,00	95	463.050.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan yang Terlatih Minimal 20 Jam Setahun	Persen	19,6	50	70	2.300.000.000,00	80	2.415.000.000,00	90	2.535.750.000,00	95	2.662.537.500,00	95	2.662.537.500,00	Rumah Sakit Umum Daerah
1	03		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Areal D.I. Kewenangan Provinsi yang Fungsional dalam Kondisi Baik	Persen	33,32	34,72	37,17	11.000.000.000,00	39,89	13.250.000.000,00	42,08	15.000.000.000,00	45,1	17.750.000.000,00	45,1	17.750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pemenuhan Data pada Laporan SPM terkait Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten	Persen	0	30	80	250.000.000,00	100	280.000.000,00	100	300.000.000,00	100	330.000.000,00	100	330.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pemenuhan Data pada Laporan SPM terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Persen	0	0	60	50.000.000,00	80	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Kawasan Perkantoran yang Termanfaatkan	Persen	69,0476	71,42857	73,81	25.000.000.000,00	76,19	27.000.000.000,00	78,57	29.000.000.000,00	80,95	31.000.000.000,00	80,95	31.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
1	03	09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Luas Wilayah di Kawasan Strategis yang Dikembangkan	Persen	0,1	0,2	0,3	10.000.000.000,00	0,4	12.500.000.000,00	0,5	15.000.000.000,00	0,6	17.000.000.000,00	0,6	17.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	Persen	42,18	45,19	48,19	84.838.971.882,44	50,19	63.215.658.693,75	53,19	86.280.008.415,95	56,19	91.783.149.872,02	56,19	91.783.149.872,02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana	Persen	100	100	100	1.860.324.443,69	100	1.386.174.684,61	100	1.891.923.076,11	100	2.012.594.370,69	100	2.012.594.370,69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli di Provinsi Sulawesi Barat	Persen	28,2667	32,26667	38,93	2.230.000.000,00	48,93	3.230.000.000,00	62,27	3.930.000.000,00	78,93	4.730.000.000,00	78,93	4.730.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an terhadap RTRW Provinsi	Persen	50	52,5	55	2.600.000.000,00	60	2.100.000.000,00	65	1.950.000.000,00	70	2.200.000.000,00	70	2.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04		Usuran Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman															
			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman															
1	04	02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi	Persen	8,556	8,176	8,17	6.132.937.726,44	8,16	4.569.806.652,56	8,16	6.237.109.042,12	8,16	6.634.926.496,77	8,16	6.634.926.496,77	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persen	12,834	12,264	12,25	36.797.626.358,65	12,25	27.418.839.915,36	12,24	37.422.654.252,70	12,23	39.809.558.980,63	12,23	39.809.558.980,63	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	04	05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Air Minum Layak	Persen	58,89	58,9	59	12.265.875.452,88	59,1	9.139.613.305,12	59,21	12.474.218.084,23	59,31	13.269.852.993,55	59,31	13.269.852.993,55	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	Persen	87,56	88,81	91,31	8.177.250.301,92	92,56	6.093.075.536,75	95,06	8.316.145.389,49	97,56	8.846.568.662,36	97,56	8.846.568.662,36	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	05		Usuran Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat															
			Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran															
1	05	02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi	Persen	100	100	100	9.100.000.000,00	100	10.200.000.000,00	100	8.875.000.000,00	100	8.975.000.000,00	100	8.975.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	05	04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupaten	Persen	100	100	100	2.775.000.000,00	100	2.775.000.000,00	100	2.775.000.000,00	100	2.775.000.000,00	100	2.775.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah															
1	05	03	Program Penanggulangan Bencana	Tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana	Persen	60	61	67,5	11.243.719.165,14	70	8.377.978.863,03	75	11.434.699.910,55	85	12.164.031.910,75	85	12.164.031.910,75	Badan Penanggulangan
1	06		Usuran Pemerintahan Bidang Sosial															
			Dinas Sosial															
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan	Persen	33,36	47,64	46,4286	2.000.000.000,00	46,43	2.000.000.000,00	53,57	4.000.000.000,00	60,71	5.000.000.000,00	60,71	5.000.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial	Persen	20	20	47	5.500.000.000,00	47	3.500.000.000,00	53	6.000.000.000,00	60	7.000.000.000,00	60	7.000.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pengolahan Data DTKS	Persen	47	60	60	4.500.000.000,00	60	4.500.000.000,00	60	4.500.000.000,00	60	4.500.000.000,00	60	4.500.000.000,00	Dinas Sosial
1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Saat Tanggap Darurat	Persen	100	100	100	5.110.781.438,70	100	3.808.172.210,47	100	5.197.590.868,43	100	5.529.105.413,98	100	5.529.105.413,98	Dinas Sosial
1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	Persen	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Dinas Sosial
2			Usuran Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
2	07		Usuran Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja															
			Dinas Tenaga Kerja															
2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	0,0215	0,0216	0,02	300.000.000,00	0,02	350.000.000,00	0,02	400.000.000,00	0,02	450.000.000,00	0,02	450.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi	Persen	11,43	11,44	11,45	740.000.000,00	11,47	840.000.000,00	11,48	940.000.000,00	11,49	1.130.000.000,00	11,49	1.130.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Persen	41,35	42	43	530.000.000,00	44	540.000.000,00	45	550.000.000,00	46	600.000.000,00	46	600.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bpartitn Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	87,79	87,79	87,79	1.075.000.000,00	89,02	1.025.000.000,00	90,25	1.050.000.000,00	91,47	1.075.000.000,00	91,47	1.075.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	07	06	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Pengawasan Perusahaan	Persen	8,82353	3,921569	12,35	670.000.000,00	14,12	840.000.000,00	17,65	920.000.000,00	21,18	1.010.000.000,00	21,18	1.010.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
2	08		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
2	08	02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	65,92	66,2	66,5	350.000.000,00	67,2	450.000.000,00	68,2	600.000.000,00	70,2	700.000.000,00	70,2	700.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,43	90,25	91,5	400.000.000,00	92,5	500.000.000,00	93,5	600.000.000,00	95	700.000.000,00	95	700.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	3,5	5,2	7	250.000.000,00	8,73	300.000.000,00	10,5	350.000.000,00	12,3	400.000.000,00	12,25	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Terlayani Sesuai Standar (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	56,68	66,44	76,2	1.150.000.000,00	85,96	1.450.000.000,00	95,76	1.650.000.000,00	100	1.750.000.000,00	100	1.750.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Rasio Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO	Persen	56,68	51	46	400.000.000,00	41	650.000.000,00	36	750.000.000,00	35	850.000.000,00	35	850.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Data Gender dan Anak yang Terpilah	Persen	30	50	60	400.000.000,00	70	500.000.000,00	80	600.000.000,00	90	700.000.000,00	90	700.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	33,3	50	50	400.000.000,00	75	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar	Persen	45,81	55,57	65,33	1.001.713.161,99	75,09	746.401.753,25	84,85	1.018.727.810,21	94,61	1.083.704.661,14	94,61	1.083.704.661,14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	09		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan															
			Dinas Ketahanan Pangan															
2	09	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian	Persentase Revitalisasi Infrastruktur Pascapanen Pangan Utama	Persen	0	0	70	2.350.000.000,00	90	2.692.500.000,00	95	2.695.125.000,00	100	2.697.881.250,00	100	2.697.881.250,00	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	09	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	78	83,8	86,7	1.495.268.626,64	89,6	1.114.162.383,86	92,5	1.520.666.585,51	95,4	1.617.658.269,69	95,4	1.617.658.269,69	Dinas Ketahanan Pangan
				Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal	Persen	13	15	21,05	1.200.000.000,00	26,32	1.360.000.000,00	26,32	1.440.000.000,00	26,32	1.495.000.000,00	26,32	1.495.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
				Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	Persen	3498	3500	3550	200.000.000,00	3600	250.000.000,00	3650	300.000.000,00	3700	350.000.000,00	3700	350.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
				Angka Kecukupan Protein (AKP)	Persen	76,28	76	77	250.000.000,00	77,5	320.000.000,00	78	350.000.000,00	78,5	380.000.000,00	78,5	380.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
				Skor PPH Ketersediaan Kelompok Pangan Umbi-	Nilai	1,07	1,09	2	1.280.000.000,00	2,1	1.300.000.000,00	2,2	1.320.000.000,00	2,3	1.400.000.000,00	2,3	1.400.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
				Skor PPH Ketersediaan Kelompok Pangan Hewani	Nilai	8,8	9,5	12,5	880.000.000,00	15	920.000.000,00	17,5	1.350.000.000,00	20	1.360.000.000,00	20	1.360.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
				Skor PPH Ketersediaan Kelompok Pangan Sayur dan	Nilai	18,47	20	22,5	860.000.000,00	23,5	890.000.000,00	25,5	1.360.000.000,00	28,5	1.580.000.000,00	28,5	1.580.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Tertangani	Persen	35,3	38	45	971.924.607,31	50	724.205.549,51	55	988.433.280,58	60	1.051.477.875,30	60	1.051.477.875,30	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan	Persen	1	0,85	0,92	1.200.000.000,00	0,93	1.200.000.000,00	0,94	1.200.000.000,00	0,95	1.200.000.000,00	0,95	1.200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	10		Usuran Pemerintahan Bidang Pertanahan															
			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman															
2	10	03	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Penyediaan Lahan untuk Pembangunan	Persen	100	100	100	30.000.000.000,00	100	15.000.000.000,00	100	32.000.000.000,00	100	35.000.000.000,00	100	35.000.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	11		Usuran Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup															
			Dinas Lingkungan Hidup															
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	150.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	400.000.000,00	100	575.000.000,00	100	575.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75,72	75,92	76,45	8.177.250.301,92	78,5	6.093.075.536,75	79,75	8.316.145.389,49	80,5	8.846.568.662,36	80,5	8.846.568.662,36	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Layanan Penanganan Limbah B3 Medis	Persen	60	61,25	65	2.044.312.575,48	67,5	1.523.268.884,19	70	2.079.036.347,37	75	2.211.642.165,59	75	2.211.642.165,59	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Persen	16,67	23,81	35,71	600.000.000,00	35,71	450.000.000,00	35,71	750.000.000,00	35,71	500.000.000,00	35,71	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan	Persen	2	2	2	225.000.000,00	2	260.000.000,00	2	295.000.000,00	2	330.000.000,00	2	330.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan	Persen	15	13	17	120.000.000,00	17	130.000.000,00	17	140.000.000,00	17	150.000.000,00	17	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan	Persen	100	100	100	300.000.000,00	100	225.000.000,00	100	250.000.000,00	100	400.000.000,00	100	400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	Persen	60	62,5	65	1.226.587.545,29	66	913.961.330,51	68,5	1.247.421.808,42	70	1.326.985.299,35	70	1.326.985.299,35	Dinas Lingkungan Hidup
2	12		Usuran Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Pependudukan	Persen	99,67	100	91,3	2.122.000.000,00	93	1.870.000.000,00	95	1.902.000.000,00	98	2.001.000.000,00	98	2.001.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	99,85	95	90	700.000.000,00	94	700.000.000,00	97	700.000.000,00	100	700.000.000,00	100	700.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	Persen	99,9	95	0,26	1.043.000.000,00	0,28	1.043.000.000,00	0,29	1.043.000.000,00	0,3	1.043.000.000,00	0,3	1.043.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Dokumen Kependudukan yang	Persen	100	95	30	80.000.000,00	35	80.000.000,00	38	80.000.000,00	42	80.000.000,00	42	80.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2	13	02	Program Penataan Desa	Tingkat Layanan Komunikasi dan Informasi Pemerintahan	Persen	68,87	73,22	81,91	919.940.658,97	90,6	685.470.997,88	95,82	935.566.356,32	100	995.238.974,52	100	995.238.974,52	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	13	03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Desa	Persen	10	10	25	490.000.000,00	50	520.000.000,00	75	550.000.000,00	100	580.000.000,00	100	580.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa memiliki Regulasi Perkawinan Anak	Persen	0,05	0,15	0,25	523.344.019,32	0,3	389.956.834,35	0,4	532.233.304,93	0,5	566.180.394,39	0,5	566.180.394,39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Peningkatan Perkembangan Status Desa	Persen	33	44,71	56,48	5.868.000.000,00	68,25	6.093.000.000,00	80,01	6.273.000.000,00	91,78	6.543.000.000,00	91,78	6.543.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat	Presentase Posyandu Aktif	Persen	0,92	93,5	0,96	1.009.306.322,98	0,97	752.059.609,11	0,98	1.026.449.945,22	1	1.091.919.332,04	1	1.091.919.332,04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	55	60	65	1.555.000.000,00	70	1.675.000.000,00	80	1.760.000.000,00	90	1.880.000.000,00	90	1.880.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
			Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga															
2	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,82	1,79	1,76	1.100.000.000,00	1,73	1.100.000.000,00	1,7	1.100.000.000,00	1,67	1.100.000.000,00	1,67	1.100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TFR (Rata-rata Anak yang Dilahirkan pada usia 15-49 Tahun)	Persen	2,69	2,65	2,6	800.000.000,00	2,56	800.000.000,00	2,52	800.000.000,00	2,48	800.000.000,00	2,48	800.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				mCPR (Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern)	Persen	49,5	50,3	50,7		51,1		51,5		51,9		51,9		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Unmmet Need (Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi)	Persen	12,1	11,6	11		10,5		9,8		9,4		9,4		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				ASFR (Jumlah kelahiran per 1000 Wanita pada Kelompok Usia 15-19 Tahun)	Persen	37,3	37	32		27		22		20		20		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Prevalensi Perkawinan Anak	Persen	17,12	16,5	16	1.495.268.626,64	15,5	1.114.162.383,86	15	1.520.666.585,51	14,5	1.617.658.269,69	14,5	1.617.658.269,69	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan															
			Dinas Perhubungan															
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Persen	63,5714	64,28571	67,1	1.635.450.060,38	69,3	1.218.615.107,35	70,7	1.663.229.077,90	71,4	1.769.313.732,47	71,4	1.769.313.732,47	Dinas Perhubungan
				Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	100	100	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	800.000.000,00	100	800.000.000,00	100	800.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persen	79,1667	79,16667	80	2.453.175.090,58	80,83	1.827.922.661,02	81,67	2.494.843.616,85	83,33	2.653.970.598,71	83,33	2.653.970.598,71	Dinas Perhubungan
2	15	05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Perkeretaapian Sulawesi Barat	Persen	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	800.000.000,00	100	800.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika															
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan															
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Persen	85	80	85	5.076.775.063,00	85	5.327.024.884,00	85	5.654.185.424,00	85	6.004.435.589,00	85	6.004.435.589,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Presentase Penyediaan Layanan Telekomunikasi Desa	Persen	68,87	73,22	81,91	2.146.528.204,25	90,6	1.599.432.328,40	95,82	2.182.988.164,74	100	2.322.224.273,87	100	2.322.224.273,87	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
				Tingkat Pemenuhan Pengelolaan SPBE	Persen	40,8	44	47	7.301.116.341,00	51	5.440.246.014,95	56	7.425.129.812,04	60	7.898.722.019,97	60	7.898.722.019,97	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
			Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM															
2	17	05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	50	60	76	1.000.000.000,00	80	1.250.000.000,00	83	1.500.000.000,00	86	1.750.000.000,00	86	1.750.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
2	17	07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	17	17	20	1.000.000.000,00	25	1.250.000.000,00	30	1.500.000.000,00	35	1.750.000.000,00	35	1.750.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
2	17	08	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	Persen	20	20	25	4.000.000.000,00	30	4.500.000.000,00	35	5.000.000.000,00	40	5.500.000.000,00	40	5.500.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal															
			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															
2	18	02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman	Persen	38,86	39	39,5	1.150.000.000,00	40	1.225.000.000,00	40,5	850.000.000,00	41	700.000.000,00	41	700.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal	Persen	10	10	10	750.000.000,00	12	350.000.000,00	15	400.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Tingkat Fasilitas Layanan Perizinan Pelaku Usaha	Persen	2,33	0,76	1,08	756.395.652,93	1,06	563.609.487,15	1,05	769.243.448,53	1,56	818.307.601,27	1,56	818.307.601,27	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan PTSP	Persen	87,00 (Baik)	89,00 (Sangat Baik)	89,00 (Sangat Baik)	876.133.960,92	90,00 (Sangat Baik)	652.829.521,79	90,00 (Sangat Baik)	891.015.577,45	92,00 (Sangat Baik)	947.846.642,40	92,00 (Sangat Baik)	947.846.642,40	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	50	60	90	400.000.000,00	90	430.000.000,00	100	475.000.000,00	100	475.000.000,00	100	475.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	18	06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Persen	90	90	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	100	120.000.000,00	100	130.000.000,00	100	130.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga															
			Dinas Kepemudaan dan Olahraga															
2	19	02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persen	54,55	45,45	54,55	4.480.000.000,00	54,55	2.780.000.000,00	63,64	4.580.000.000,00	72,73	4.630.000.000,00	72,73	4.630.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Insan Olahraga yang Terlibat pada Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Orang	32	115	209	6.450.000.000,00	189	6.500.000.000,00	247	7.100.000.000,00	258	7.550.000.000,00	258	7.550.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Jumlah Lembaga Pramuka yang Aktif	Lembaga	7	7	7	1.400.400.000,00	7	900.000.000,00	7	2.000.000.000,00	7	1.450.000.000,00	7	1.450.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik															
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan															
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial	Persentase Cakupan Pemenuhan Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat	Persen	85	80	100	1.853.775.050,00	100	1.708.638.600,00	100	1.708.638.600,00	100	1.708.638.600,00	100	1.708.638.600,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian															
			Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan															
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi, Pengamanan Sistem Elektronik/Aplikasi dan Pengamanan Signal	Persen	100	100	100	2.907.135.843,00	100	3.624.081.093,00	100	4.473.149.929,00	100	5.449.365.032,00	100	5.449.365.032,00	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan															
			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan															
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Nilai Budaya dan Kearifan Lokal yang Terdokumentasikan	Persen	80	84,8	90,14	2.000.000.000,00	92,85	2.200.000.000,00	95,63	2.420.000.000,00	98,50	2.662.000.000,00	98,50	2.662.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional Daerah di Provinsi yang Didokumentasikan dan Dikembangkan	Persen	65	71,5	76,00	1.000.000.000,00	78,28	1.100.000.000,00	80,63	1.210.000.000,00	83,05	1.331.000.000,00	83,05	1.331.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah Lokal Provinsi yang Difasilitasi dan Didokumentasikan	Persen	77,31	85,041	87,59	3.000.000.000,00	90,22	3.300.000.000,00	92,93	3.630.000.000,00	95,71	3.993.000.000,00	95,71	3.993.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	80,5	88,55	91,21	750.000.000,00	93,94	825.000.000,00	96,76	907.500.000,00	99,66	998.250.000,00	99,66	998.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Persen	85	89,25	91,04	1.000.000.000,00	92,86	1.100.000.000,00	94,71	1.210.000.000,00	96,61	1.331.000.000,00	96,61	1.331.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan															
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan															
2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	Persen	1,86	1,875	2,5	2.055.000.000,00	3	2.750.000.000,00	4	3.135.000.000,00	5	4.500.000.000,00	5	4.500.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Serah Simpan KCKR menjadi Koleksi Nasional	Persen	50	50	50	350.000.000,00	50	350.000.000,00	50	350.000.000,00	50	350.000.000,00	50	350.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan															
			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan															
2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan di	Persen	53,49	60	60	1.325.000.000,00	62	7.625.000.000,00	65	1.850.000.000,00	70	1.325.000.000,00	70	1.325.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3			Urusan Pemerintahan Pilihan															
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan															
			Dinas Kelautan dan Perikanan															
3	25	02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat	Persen	60	65	75	1.215.000.000,00	80	1.065.000.000,00	90	1.097.000.000,00	100	1.095.000.000,00	100	1.095.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	2	1,5	2	20.947.000.000,00	2	18.947.000.000,00	2	18.947.000.000,00	3	18.947.000.000,00	3	18.947.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	1	2	2	5.021.000.000,00	2	4.547.500.000,00	2	5.257.000.000,00	2	5.340.200.000,00	2	5.340.200.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Penanganan Kegiatan IUU FISHING, Destruktif dan Pelanggaran	Persen	97	100	100	1.705.000.000,00	100	1.763.700.000,00	100	1.833.000.000,00	100	96.000.000,00	100	96.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	60,45	63	66,5	635.489.166,32	68	473.519.013,14	70	646.283.298,84	72,5	687.504.764,62	72,5	687.504.764,62	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Persen	-46,47	2	2	3.211.400.000,00	3	6.400.228.000,00	3	6.400.228.000,00	3	6.400.228.000,00	3	6.400.228.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata															
			Dinas Pariwisata															
3	26	02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Jumlah Kamar Terjual	Persen	36	40	45	3.634.333.467,50	33,75	2.708.033.571,83	45	3.696.064.617,50	47	3.931.808.294,39	47	3.931.808.294,39	Dinas Pariwisata
3	26	03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persen	11	11,5	12	1.000.000.000,00	12	1.200.000.000,00	12	1.500.000.000,00	12	1.700.000.000,00	12	1.700.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	10	15	25	1.200.000.000,00	29	1.500.000.000,00	35	1.600.000.000,00	30	1.800.000.000,00	30	1.800.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Kompetensinya	Persen	0	15	25	3.634.333.467,50	18,75	2.708.033.571,83	25	3.696.064.617,50	30	3.931.808.294,39	30	3.931.808.294,39	Dinas Pariwisata
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian															
			Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan															
3	27	02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian	Persen	70	70	75	22.642.790.000,00	78	24.680.714.000,00	80	26.815.023.900,00	82	28.651.545.365,00	82	28.651.545.365,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah	Persen	70	70	75	6.564.690.000,00	78	6.754.011.500,00	80	6.587.643.025,00	82	6.347.372.258,75	82	6.347.372.258,75	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27	04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	70	70	75	4.007.750.000,00	78	4.367.750.000,00	80	4.758.750.000,00	80	5.183.850.000,00	80	5.183.850.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan dan Keamanan Produk Hewan	Persen	70	70	75		78		80		80		80		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27 05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	70	70	75	2.225.000.000,00	78	2.225.000.000,00	80	2.225.000.000,00	80	2.225.000.000,00	80	2.225.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
3	27 07	Program Penyuluhan Pertanian	Persen	60	65	75	11.600.000.000,00	78	13.275.000.000,00	80	15.186.215.000,00	82	17.369.187.500,00	82	17.369.187.500,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
		Persentase Kelembagaan Petani yang Menerapkan GAP dan GHP	Persen	60	65	75	3.600.000.000,00	78	3.900.000.000,00	80	3.268.000.000,00	82	3.488.000.000,00	82	3.488.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Dinas Perkebunan																
3	27 02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Persen	25	25	25	2.441.084.038,00	25	2.582.666.912,00	25	2.732.461.593,00	25	2.890.944.365,00	25	2.890.944.365,00	Dinas Perkebunan
3	27 03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persen	15	15	15	12.020.580.045,00	15	12.717.773.688,00	15	13.455.404.562,00	15	14.235.818.027,00	15	14.235.818.027,00	Dinas Perkebunan
3	27 05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Ha	1200	1200	1200	404.302.560,00	1200	427.752.108,00	1200	452.561.730,00	1200	478.810.310,00	1200	478.810.310,00	Dinas Perkebunan
		Tingkat Pengendalian Bencana Tanaman Perkebunan	Kategori	Cukup	Cukup	Cukup	204.302.000,00	Cukup	216.151.516,00	Cukup	228.688.304,00	Cukup	241.952.226,00	Cukup	241.952.226,00	Dinas Perkebunan
		Tingkat Penanggulangan Bencana Tanaman Perkebunan	Kategori	Cukup	Cukup	Cukup	1.040.205.600,00	Cukup	1.100.537.525,00	Cukup	1.164.368.701,00	Cukup	1.231.902.086,00	Cukup	1.231.902.086,00	Dinas Perkebunan
3	27 06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persen	50	50	50	269.737.080,00	50	285.381.831,00	50	301.933.977,00	50	319.446.148,00	50	319.446.148,00	Dinas Perkebunan
3	27 07	Program Penyuluhan Pertanian	Persen	30	30	30	3.434.033.300,00	30	3.633.207.231,00	30	3.843.933.250,00	30	4.066.881.379,00	30	4.066.881.379,00	Dinas Perkebunan
		Persentase Penerapan GAP dan GHP pada Kawasan Pengembangan Komoditi Perkebunan	Persen	35	35	35	2.123.390.000,00	35	2.246.546.620,00	35	2.376.846.324,00	35	2.514.703.411,00	35	2.514.703.411,00	Dinas Perkebunan
3	28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan														
Dinas Kehutanan																
3	28 03	Program Pengelolaan Hutan	Persen	0,33 (2020)	0,34	0,35	15.000.000.000,00	0,36	17.000.000.000,00	0,36	19.000.000.000,00	0,37	21.000.000.000,00	0,37	21.000.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Ha	5,06	6,39	7,74	10.000.000.000,00	9,1	10.000.000.000,00	10,46	10.000.000.000,00	11,81	10.000.000.000,00	11,81	10.000.000.000,00	Dinas Kehutanan
3	28 04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persen	32,79	32,79	35	2.000.000.000,00	43	2.000.000.000,00	45	2.000.000.000,00	48	2.000.000.000,00	48	2.000.000.000,00	Dinas Kehutanan
3	28 05	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persen	2	2	5	6.000.000.000,00	8	7.000.000.000,00	12	8.000.000.000,00	15	9.000.000.000,00	15	9.000.000.000,00	Dinas Kehutanan
		Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap PIAPS	Persen	32,79	32,79	35	2.000.000.000,00	40	2.000.000.000,00	45	2.000.000.000,00	50	2.000.000.000,00	50	2.000.000.000,00	Dinas Kehutanan
3	28 06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persen	65	70	70	500.000.000,00	73	600.000.000,00	75	700.000.000,00	78	800.000.000,00	78	800.000.000,00	Dinas Kehutanan
3	29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya														
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral																
3	29 02	Program Pengelolaan Aspek Geologi	Persen	0	0	0	800.000.000,00	5	800.000.000,00	7	600.000.000,00	9	600.000.000,00	9	600.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 03	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persen	20	20	25	400.000.000,00	25	400.000.000,00	25	400.000.000,00	25	450.000.000,00	25	450.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 05	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persen	93,8462	94,61538	96,1538	8.586.112.817,02	96,9231	6.397.729.313,58	98,461538	8.731.952.658,96	100	9.288.897.095,48	100	9.288.897.095,48	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	29 06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persen	97,83	97,96	98,1	5.724.075.211,35	98,21	4.265.152.875,72	98,32	5.821.301.772,64	100	6.192.598.063,65	100	6.192.598.063,65	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan														

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM																	
3	30	05	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persen	20,79	24,4	27,85	2.800.000.000,00	28,71	3.900.000.000,00	30,77	4.300.000.000,00	32,35	5.100.000.000,00	32,35	5.100.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian															
	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM																	
3	31	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam	Persen	10	10	15	3.100.000.000,00	20	3.900.000.000,00	25	4.600.000.000,00	30	5.150.000.000,00	30	5.150.000.000,00	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
3	32		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi															
	Dinas Transmigrasi																	
3	32	02	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi Menjadi Kegiatan Teknis	Persen	80	82	85	2.000.000.000,00	90	2.500.000.000,00	95	2.700.000.000,00	97	2.800.000.000,00	97	2.800.000.000,00	Dinas Transmigrasi
3	32	03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya	Persen	90	97	95	6.000.000.000,00	96	7.000.000.000,00	97	8.000.000.000,00	98	9.000.000.000,00	98	9.000.000.000,00	Dinas Transmigrasi
3	32	04	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Perkembangan Permukiman Transmigrasi Mandiri (PDRB)	Persen	42	43	45	5.000.000.000,00	46	5.500.000.000,00	50	5.700.000.000,00	52	6.000.000.000,00	52	6.000.000.000,00	Dinas Transmigrasi
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan															
4	01		Sekretariat Daerah															
			Sekretariat Daerah															
4	01	01	Program Administrasi Umum	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum	Persen	100	100	100	117.264.233.624,57	100	134.703.868.668,25	100	156.353.019.490,88	100	179.384.713.732,31	100	179.384.713.732,31	Biro Umum
4	01	02	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal BB	Persen	10	14	19,04	1.518.632.198,93	24	1.131.571.171,11	29	1.544.427.000,91	33	1.642.934.180,15	33,33	1.642.934.180,15	Biro Organisasi
				Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Minimal B+	Persen	-	-	33,3	584.089.307,28	33	435.219.681,20	67	594.010.384,96	100	631.897.761,60	100	631.897.761,60	Biro Organisasi
4	01	03	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persen	100	100	100	2.685.731.000,00	100	2.865.130.000,00	100	3.049.411.000,00	100	3.356.920.000,00	100	3.356.920.000,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4	01	04	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100	30.547.501.000,00	100	31.286.563.900,00	100	32.446.810.000,00	100	33.198.039.400,00	100	33.198.039.400,00	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4	01	05	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Persen	100	100	100	2.000.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.200.000.000,00	100	2.300.000.000,00	100	2.300.000.000,00	Biro Hukum
4	01	06	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	100	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	01	07	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	100	864.452.174,77	100	644.125.128,17	100	879.135.369,75	100	935.208.687,16	100	935.208.687,16	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4	01	08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	Persen	100	100	100	1.400.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.400.000.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
4	02		Sekretariat DPRD															
			Sekretariat DPRD															
4	02	01	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi	Persentase Layanan Administrasi Umum Sekretariat	Persen	94,63	95	95	72.565.560.000,00	95,5	74.742.526.800,00	96	76.984.802.604,00	96,5	79.294.346.682,12	96,5	79.294.346.682,12	Sekretariat DPRD
4	02	02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	98,68	98,8	99	50.817.110.000,00	99,12	52.341.623.300,00	99,33	53.911.871.999,00	99,5	55.529.228.158,97	99,5	55.529.228.158,97	Sekretariat DPRD
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan															
5	01		Perencanaan															
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
5	01	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Renstra dan Renja pada Bobot diatas 21%	Persen	67,5	78,57	85,71	2.277.948.298,39	88,09	1.697.356.756,67	95,23	2.316.640.501,36	100	2.464.401.270,23	100	2.464.401.270,23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program Intervensi Stunting dalam Dokumen RRPD	Persen	0,6	0,7	0,8	1.196.214.901,31	0,85	891.329.907,09	0,9	1.216.533.268,41	0,95	1.294.126.615,75	0,95	1.294.126.615,75	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	02		Keuangan															
			Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah															
5	02	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu terhadap Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD	Persen	85	90	95	1.080.565.218,47	97	805.156.410,21	99	1.098.919.212,18	100	1.169.010.858,96	100	1.169.010.858,96	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
				Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan SAP	Persen	90	95	100	1.460.223.268,20	100	1.088.049.202,99	100	1.485.025.962,41	100	1.579.744.403,99	100	1.579.744.403,99	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	44,31	46	48	864.452.174,77	50	644.125.128,17	55	879.135.369,75	60	935.208.687,16	60	935.208.687,16	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	02	04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Realisasi PAD terhadap Target PAD	Persen	102	98	94	7.296.678.262,16	96	7.966.187.692,26	98	9.318.703.054,62	100	10.402.813.030,75	100	10.402.813.030,75	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan SAMSAT	Persen	90	90	92	1.460.223.268,20	94	1.088.049.202,99	96	1.485.025.962,41	98	1.579.744.403,99	98	1.579.744.403,99	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
5	03		Kepegawaian															
			Badan Kepegawaian Daerah															
5	03	02	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Dimensi Kualifikasi terhadap Indeks Profesionalitas	Poin	14,17	15	17	1.620.847.827,70	18	1.207.734.615,32	20	1.648.378.818,27	22	1.753.516.288,43	22	1.753.516.288,43	Badan Kepegawaian Daerah
				Nilai Dimensi Kinerja terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	14,86	16	17	324.169.565,54	18	241.546.923,06	20	329.675.763,65	22	350.703.257,69	22	350.703.257,69	Badan Kepegawaian Daerah
				Nilai Dimensi Disiplin terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	5	5	5	216.113.043,69	5	161.031.282,04	5	219.783.842,44	5	233.802.171,79	5	233.802.171,79	Badan Kepegawaian Daerah
				Persentase Tata Kelola Manajemen ASN	Persen	55,7	60	70	648.339.131,08	75	483.093.846,13	80	659.351.527,31	85	701.406.515,37	85	701.406.515,37	Badan Kepegawaian Daerah
5	04		Pendidikan dan Pelatihan															
			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia															
5	04	02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	7,43	10	10	2.161.130.436,94	11	1.610.312.820,43	12	2.197.838.424,36	13	2.338.021.717,91	13	2.338.021.717,91	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	05		Penelitian dan Pengembangan															
			Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah															
5	05	02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diusulkan sebagai Bahan Kebijakan	Persen	60	65	75	2.000.000.000,00	80	2.000.000.000,00	90	2.250.000.000,00	100	2.500.000.000,00	100	2.500.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	07		Penghubung															
			Badan Penghubung Provinsi															
5	07	02	Program Pelayanan Penghubung	Tingkat Layanan Penghubung	Persen	100	100	100	1.892.600.000,00	100	1.987.230.000,00	100	2.091.323.000,00	100	2.038.992.610,00	100	2.038.992.610,00	Badan Penghubung Provinsi
6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan															
6	01		Inspektorat Daerah															
6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	972.508.696,62	3	724.640.769,19	3	989.027.290,96	3	1.052.109.773,06	3	1.052.109.773,06	Inspektorat Daerah
6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.000.000.000,00	Inspektorat Daerah
8			Unsur Pemerintahan Umum															
8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik															
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik															
8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persen	100	100	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
8	01	04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Hasil Pengawasan Organisasi	Persen	100	100	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100	100	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kondisi Waspada Nasional, Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	100	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencer minkan berfungsi keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 secara terukur diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi: Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi: Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan indikator makro pembangunan yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Angka kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini). Indikator kinerja makro tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional dan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat.

Penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian yang ditetapkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel 8.1 dan tabel 8.2 sebagai berikut :

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sulawesi Barat

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Perkiraan	Target Capaian				Kondisi Akhir	Penanggungjawab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66.36	67.06	68.16	69.36	70.36	71.56	71.56	BPS
2	Prevalensi Stunting	Persen	33.80	31.80	28.70	26.70	23.50	20	20	KEMENKES RI
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,42 (2020)	(2,5 - 3,5)	4.50	5.10	5.80	6.70	6.70	BPS
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	11.85	11.23	10.72	10.25	9.73	9.06	9.06	BPS
5	Laju Inflasi	Persen	4.39	3.5±1	3±1	2.6±1	2.3±1	2±1	2±1	BPS
6	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah/Ka pita/Tahun	36.17	39.28	42.65	46.31	50.29	54.61	54.61	BPS
7	Indeks Gini Rasio	Poin	0.366	0.355	0.350	0.346	0.338	0.325	0.325	BPS
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3.13	3.05	2.98	2.76	2.45	1.95	1.95	BPS
9	Persentase Layanan Infrastruktur	Persen	71.40	73.13	75.28	77.28	78.93	80.83	80.834	BAPPEDA
10	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	Persen	42.18	45.19	48.19	50.19	53.19	56.19	56.19	DINAS PUPR
11	Cakupan Desa yang Terlayani Sinyal Telekomunikasi	Persen	68.87	73.22	81.91	90.6	95.82	100	100	DINAS KOMINFOPERS
12	Persentase Layanan Fasilitas Perhubungan	Persen	65.854	68.293	68.902	70.732	71.341	73.171	73.171	DINAS PERHUBUNGAN

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Perkiraan	Target Capaian				Kondisi Akhir	Penanggungjawab
			2021		2022	2023	2024	2025	2026	
13	Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Air Minum Layak	Persen	58.89	58.90	59	59.10	59.21	59.31	59.31	BPWP
14	Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak	Persen	87.56	88.81	91.31	92.56	95.06	97.56	97.56	BPS
15	Persentase Elektrifikasi	Persen	97.83	97.96	98.1	98.21	98.32	100	100	DINAS ESDM
16	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	78.61	79.56	79.58	79.59	79.6	79.61	79.61	DINAS PERMUKIM
17	Indeks Risiko Bencana	Poin / Kategori	166,49 / Tinggi (2020)	166 / Tinggi	161 / Tinggi	158 / Tinggi	153 / Tinggi	144 / Sedang	144 / Sedang	BNPB
18	Indeks Reformasi Birokrasi	POIN / KATEGORI RI	60,04 / B (2020)	62,86 / B	66,86 / B	70,16 / BB	74,66 / BB	80,16 / A	80,16 / A	KEMENPAN-RB RI
19	Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP)	Poin / Kategori	78 / Baik	78,5 / Baik	79 / Baik	79,5 / Baik	80 / Baik	80 / Baik	80 / Baik	KPK RI
20	Nilai SAKIP	Poin / Kategori	63,14 / B (2020)	66,29 / B	70,29 / BB	73,54 / BB	77,54 / BB	80,54 / A	80,54 / A	KEMENPAN-RB RI
21	Opini BPK terhadap LKPD	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPK RI
22	Indeks SPBE	Poin	2.04	2.2	2.35	2.55	2.8	3	3	KEMKOMINFO
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	0	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
1.1	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan	Persen	88	90	92,13	94,23	96,33	98,43	98,43	Dinas Kesehatan
1.2	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
1.3	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Beresiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
1.4	Persentase Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	58	60	63	66	69	72	72	Dinas Kesehatan
1.5	Persentase Kabupaten dengan Ketersediaan Obat Esensial	Persen	90,27	92,27	95	97	98	99	99	Dinas Kesehatan
1.6	Indeks Kepuasan Pelanggan	Persen	90	90	90	90	90	90	90	Rumah Sakit Umum Daerah

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
2.1	Persentase Areal D.I. Kewenangan Provinsi yang Fungsional dalam Kondisi Baik	Persen	33,32	34,72	37,17	39,89	42,08	45,1	45,1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.2	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	Persen	42,18	45,19	48,19	50,19	53,19	56,19	56,19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3	Persentase Penanganan Jalan dan Jembatan Akibat Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.4	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli di Provinsi Sulawesi Barat	Persen	28,267	32,2667	38,93	48,93	62,27	78,93	78,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
3.1	Persentase Pemberdayaan Sosial	Persen	33,36	47,64	46,429	46,43	53,57	60,71	60,71	Dinas Sosial
3.2	Persentase Penanganan Warga Negara Pekerja Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
4	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
4.1	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bpartitn Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketengakerjaan	Persen	87,79	87,79	87,79	89,02	90,25	91,47	91,47	Dinas Tenaga Kerja

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
5.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	65,92	66,2	66,5	67,2	68,2	70,2	70,2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,43	90,25	91,5	92,5	93,5	95	95	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									
6.1	Persentase Revitalisasi Infrastruktur Pascapanen Pangan Utama	Persen	0	0	70	90	95	100	100	Dinas Ketahanan Pangan
6.2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persen	78	83,8	86,7	89,6	92,5	95,4	95,4	Dinas Ketahanan Pangan
6.3	Persentase Peningkatan Usaha Pangan Lokal	Persen	13	15	21,05	26,32	26,32	26,32	26,32	Dinas Ketahanan Pangan
6.4	Skor PPH Ketersediaan Kelompok Pangan Umbi-umbian	Nilai	1,07	1,09	2	2,1	2,2	2,3	2,3	Dinas Ketahanan Pangan
6.5	Skor PPH Ketersediaan Kelompok Pangan Hewani	Nilai	8,8	9,5	12,5	15	17,5	20	20	Dinas Ketahanan Pangan
6.6	Skor PPH Ketersediaan Kelompok Pangan Sayur dan Buah	Nilai	18,47	20	22,5	23,5	25,5	28,5	28,5	Dinas Ketahanan Pangan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.7	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang Tertangani	Persen	35,3	38	45	50	55	60	60	Dinas Ketahanan Pangan
6.8	Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan Pangan	Persen	1	0,85	0,92	0,93	0,94	0,95	0,95	Dinas Ketahanan Pangan
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan									
7.1	Persentase Penyediaan Lahan untuk Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
8.1	Persentase Peningkatan Perkembangan Status Desa	Persen	33	44,71	56,48	68,25	80,01	91,78	91,78	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8,2	Presentase Posyandu Aktif	Persen	92	93,5	96,00	97,00	98	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
9.1	Persentase Prevalensi Perkawinan Anak	Persen	17,12	16,5	16	15,5	15	14,5	14,5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
10.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan PTSP	Persen	87.00 (Baik)	89.00 (Sangat Baik)	89.00 (Sangat Baik)	90.00 (Sangat Baik)	90.00 (Sangat Baik)	92.00 (Sangat Baik)	92.00 (Sangat Baik)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
11	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
11.1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persen	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Kelautan dan Perikanan
12	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
12.1	Persentase Jumlah Kelompok Tani yang Tergabung dalam Korporasi Petani	Persen	30	30	30	30	30	30	30	Dinas Perkebunan
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan									
13.1	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Persen	33 (2020)	34	35	36	36	37	37	Dinas Kehutanan
13.2	Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap PIAPS	Persen	32,79	32,79	35	40	45	50	50	Dinas Kehutanan
14	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi									
14.1	Persentase Transmigran yang Difasilitasi Penempatannya	Persen	90	97	95	96	97	98	98	Dinas Transmigrasi

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Keuangan									
15.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan SAMSAT	Persen	90	90	92	94	96	98	98	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1.1	Persentase Kawasan Perkantoran yang Termanfaatkan	Persen	69,048	71,4286	73,81	76,19	78,57	80,95	80,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.2	Persentase Luas Wilayah di Kawasan Strategis yang Dikembangkan	Persen	10	20	30	40	50	60	60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.3	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur ke-PU-an terhadap RTRW Provinsi	Persen	50	52,5	55	60	65	70	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
2.1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Dinas Tenaga Kerja
2.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikasi Kompetensi	Persen	11,43	11,44	11,45	11,47	11,48	11,49	11,49	Dinas Tenaga Kerja

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
3.1	Cakupan Penerima Penghargaan Lingkungan	Persen	15	13	17	17	17	17	17	Dinas Lingkungan Hidup
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan									
4.1	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat	Persen	63,571	64,2857	67,1	69,3	70,7	71,4	71,4	Dinas Perhubungan
4.2	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Persen	79,167	79,1667	80	80,83	81,67	83,33	83,33	Dinas Perhubungan
4.3	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pendukung Perkeretaapian Sulawesi Barat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
5	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
5.1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	50	60	76	80	83	86	86	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
5.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	17	17	20	25	30	35	35	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
5.3	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	Persen	20	20	25	30	35	40	40	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
6.1	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal	Persen	38,86	39	39,5	40	40,5	41	41	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
6.2	Persentase Peningkatan Minat Penanaman Modal	Persen	10	10	10	12	15	20	20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
7	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga									
7.1	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persen	54,55	45,45	54,55	54,55	63,64	72,73	72,73	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7.2	Jumlah Insan Olahraga yang Terlibat pada Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Orang	32	115	209	189	247	258	1050	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
8	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
8.1	Persentase Pengelolaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Sulawesi Barat	Persen	60	65	75	80	90	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.2	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	Persen	-46,47	2	2	3	3	3	3	Dinas Kelautan dan Perikanan
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
9.1	Meningkatnya Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen	10	15	25	29	35	30	30	Dinas Pariwisata

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9.2	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Kompetensinya	Persen	0	15	25	18,75	25	30	30	Dinas Pariwisata
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
10.1	Luas Lahan Penerapan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Ha	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	Dinas Perkebunan
10.2	Persentase Penerapan GAP dan GHP pada Kawasan Pengembangan Komoditi Perkebunan	Persen	35	35	35	35	35	35	35	Dinas Perkebunan
11	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan									
11.1	Persentase Kelompok Masyarakat Kehutanan Mandiri	Persen	2	2	5	8	12	15	15	Dinas Kehutanan
12	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral									
12.1	Persentase Tingkat Pengendalian Pemanfaatan Air yang Berbasis Konservasi	Persen	0	0	0	5	7	9	9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
13	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
13.1	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persen	20,79	24,4	27,85	28,71	30,77	32,35	32,35	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									
14,1	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIP	Persen	10	10	15	20	25	30	30	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
15	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi									
15.1	Persentase Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Transmigrasi yang Terealisasi Menjadi Kegiatan Teknis	Persen	80	82	85	90	95	97	97	Dinas Transmigrasi
16	Sekretariat Daerah									
16.1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP Minimal BB	Persen	10	14	19,04	24	29	33	33,33	Biro Organisasi
16'1	Persentase Perangkat Daerah dengan IPP Mnimal B+	Persen	-	-	33,3	33	67	100	100	Biro Organisasi
17	Perencanaan									
17.1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Renstra dan Renja pada Bobot diatas 21%	Persen	67,5	78,57	85,71	88,09	95,23	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17.2	Persentase Konsistensi Program Intervensi Stunting dalam Dokumen RKPD	Persen	0,6	0,7	0,8	0,85	0,9	0,95	0,95	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	Inspektorat Daerah									
18.1	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	Inspektorat Daerah
ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Urusan Bidang Pendidikan									
1.1	Persentase Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Kejuruan yang Memenuhi SNP dan Minimal Akreditasi B	Persen	71,22	75	84,75	88,99	93,44	98,11	98,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.2	Persentase Lulusan SMA/SMK yang Terserap pada Perguruan Tinggi	Persen	75,4	82,94	87,09	89,70	92,39	95,16	95,16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.3	Persentase Lulusan SMK yang Terserap dalam IDUKA	Persen	35,02	40,05	44,06	48,46	53,31	58,64	58,64	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.4	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Bertasipasi dalam Pendidikan Menengah	Persen	69,31	72,7755	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.5	Persentase Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	Persen	78,72	82,656	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.6	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan dan Diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persen	60,1	66,11	71,40	77,11	83,28	89,94	89,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.7	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Didistribusikan Sesuai Hasil Perhitungan dan Pemetaan	Persen	75,05	78,8025	82,74	86,88	91,22	95,78	95,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.8	Jumlah PTK yang Memenuhi Kualifikasi Sertifikasi	PTK	1288	1418	1548	1698	1828	1958	1958	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.9	Persentase Satuan Pendidikan oleh Masyarakat yang Diselenggarakan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persen	30,7	45,04	49,54	54,50	59,95	65,94	65,94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.10	Persentase Bahasa dan Sastra yang Didokumentasikan dan Dikembangkan	Persen	7554	6900	7107	7462	7835	8227	8227	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
2.1	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi	Persen	86	88	91,66	94,44	96,30	99,07	99,07	Dinas Kesehatan
2.2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	Angka	234	210	195	179	163	150	150	Dinas Kesehatan
2.3	Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)	Angka	10,29	9,28	8,38	8	7	6	6	Dinas Kesehatan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.4	Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	78	82	84	86	88	90	90	Dinas Kesehatan
2.5	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	Persen	50	60	70	80	85	90	90	Dinas Kesehatan
2.6	Persentase Kab/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Risiko PTM Usia 15 Tahun Keatas	Persen	60	70	80	85	90	95	95	Dinas Kesehatan
2.7	Prevelansi Balita Wasting	Persen	7	7	6,3	6	5	4	4	Dinas Kesehatan
2.8	Persentase Pukesmas yang Melaksanakan Surveilans Gizi	Persen	48	58	69	79	90	100	100	Dinas Kesehatan
2.9	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan ANC Lengkap Sesuai Standar	Persen	76	85	86,3	87	88	89	89	Dinas Kesehatan
2.10	Persentase Desa dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persen	28	33	36	39	44	50	50	Dinas Kesehatan
2.11	Persentase Sarana Air Minum yang Diawasi/Diperiksa Kualitas Air Minum sesuai Standar	Persen	65	70	80	85	90	100	100	Dinas Kesehatan
2.12	Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan GERMAS	Persen	33	40	45	50	55	60	60	Dinas Kesehatan
2.13	Persentase Kabupaten yang Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif	Persen	33	50	60	70	85	100	100	Dinas Kesehatan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.14	Capaian Mutu Kinerja Pelayanan Rawat Inap	Persen	12	60	65	70	80	80	80	Rumah Sakit Umum Daerah
2.15	Capaian Kelas RS	Persen	C	B	B	B	B	B	B	Rumah Sakit Umum Daerah
2.16	Capaian Akreditasi RS	Persen	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Rumah Sakit Umum Daerah
2.17	Persentase Jumlah Sarana Prasarana dan Sediaan Farmasi yang Sesuai Ketentuan	Persen	41	58	70	78	85	95	95	Rumah Sakit Umum Daerah
2.18	Persentase Penerapan SIM RS	Persen	80	85	85	90	95	95	95	Rumah Sakit Umum Daerah
2.19	Persentase Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan yang Terlatih Minimal 20 Jam Setahun	Persen	19,6	50	70	80	90	95	95	Rumah Sakit Umum Daerah
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1	Persentase Pemenuhan Data pada Laporan SPM terkait Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten	Persen	0	30	80	100	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.2	Persentase Pemenuhan Data pada Laporan SPM terkait Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Persen	0	0	60	80	100	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman									
4.1	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi	Persen	8,556	8,176	8,17	8,16	8,16	8,16	8,16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persen	12,834	12,264	12,25	12,25	12,24	12,23	12,23	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.3	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Air Minum Layak	Persen	58,89	58,9	59	59,1	59,21	59,31	59,31	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	Persen	87,56	88,81	91,31	92,56	95,06	97,56	97,56	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
5.1	Persentase Penegakan Pelanggaran Perda dan Perkada Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5.2	Tingkat Kapasitas Pemadam Kebakaran Kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
6.1	Tingkat Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	Persen	60	61	67,5	70	75	85	85	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
7.1	Persentase Mutu Layanan Rehabilitasi Sosial	Persen	20	20	47	47	53	60	60	Dinas Sosial
7.2	Persentase Pengolahan Data DTKS	Persen	47	60	60	60	60	60	60	Dinas Sosial
7.3	Persentase Penanganan Bencana Saat Tanggap Darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
7.4	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Dikelola	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
8	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
8.1	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Persen	41,35	42	43	44	45	46	46	Dinas Tenaga Kerja
8.2	Persentase Pengawasan Perusahaan	Persen	8,8235	3,92157	12,35	14,12	17,65	21,18	21,18	Dinas Tenaga Kerja

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
9.1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	3,5	5,2	7	8,73	10,5	12,3	12,25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang Terlayani Sesuai Standar (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	56,68	66,44	76,2	85,96	95,76	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.3	Rasio Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO	Persen	56,68	51	46	41	36	35	35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.4	Persentase Data Gender dan Anak yang Terpilah	Persen	30	50	60	70	80	90	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.5	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	33,3	50	50	75	100	100	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.6	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Tertangani Sesuai Standar	Persen	45,81	55,57	65,33	75,09	84,85	94,61	94,61	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									
10.1	Angka Kecukupan Energi (AKE) Ketersediaan	Persen	3498	3500	3550	3600	3650	3700	3700	Dinas Ketahanan Pangan
10.2	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Persen	76,28	76	77	77,5	78	78,5	78,5	Dinas Ketahanan Pangan
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
11.1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
11.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75,72	75,92	76,45	78,5	79,75	80,5	80,5	Dinas Lingkungan Hidup
11.3	Persentase Layanan Penanganan Limbah B3 Medis	Persen	60	61,25	65	67,5	70	75	75	Dinas Lingkungan Hidup
11.4	Persentase Ketaatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	Persen	16,67	23,81	35,71	35,71	35,71	35,71	35,71	Dinas Lingkungan Hidup
11.5	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat/Kelompok Peduli Lingkungan	Persen	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup
11.6	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11.7	Presentase Penanganan Sampah	Persen	60	62,5	65	66	68,5	70	70	Dinas Lingkungan Hidup
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
12.1	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Pependudukan	Persen	99,67	100	91,3	93	95	98	98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.2	Tingkat Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	99,85	95	90	94	97	100	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.3	Tingkat Akurasi Data Kependudukan Skala Provinsi	Persen	99,9	95	0,26	0,28	0,29	0,3	0,3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.4	Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan	Persen	100	95	30	35	38	42	42	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
13.1	Tingkat Layanan Komunikasi dan Informasi Pemerintahan Desa	Persen	68,87	73,22	81,91	90,6	95,82	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13.2	Persentase Kerjasama Desa	Persen	10	10	25	50	75	100	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13.3	Persentase Desa memiliki Regulasi Perkawinan Anak	Persen	0,05	0,15	0,25	0,3	0,4	0,5	0,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13.4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	55	60	65	70	80	90	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
14.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,82	1,79	1,76	1,73	1,7	1,67	1,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14.2	TFR (Rata-rata Anak yang Dilahirkan pada usia 15-49 Tahun)	Persen	2,69	2,65	2,6	2,56	2,52	2,48	2,48	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14.3	mCPR (Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern)	Persen	49,5	50,3	50,7	51,1	51,5	51,9	51,9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14.4	Unmmet Need (Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi)	Persen	12,1	11,6	11	10,5	9,8	9,4	9,4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14.5	ASFR (Jumlah kelahiran per 1000 Wanita pada Kelompok Usia 15-19 Tahun)	Persen	37,3	37	32	27	22	20	20	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan									
15.1	Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
16.1	Persentase Penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	85	80	85	85	85	85	85	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
16.2	Persentase Penyediaan Layanan Telekomunikasi Desa	Persen	68,87	73,22	81,91	90,6	95,82	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan SPBE	Persen	40,8	44	47	51	56	60	60	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
17	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
17.1	Tingkat Fasilitasi Layanan Perizinan Pelaku Usaha	Persen	2,33	0,76	1,08	1,06	1,05	1,56	1,56	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
17.2	Persentase Penanganan Hambatan dan Masalah Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen	50	60	90	90	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
17.3	Cakupan Ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Persen	90	90	100	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga									
18.1	Jumlah Lembaga Pramuka yang Aktif	Lembaga	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
19	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									
19.1	Persentase Cakupan Pemenuhan Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat	Persen	85	80	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
20	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
20.1	Persentase Pengamanan Informasi, Pengamanan Sistem Elektronik/Aplikasi dan Pengamanan Signal	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
21	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
21.1	Persentase Nilai Budaya dan Kearifan Lokal yang Terdokumentasikan	Persen	80	84,8	90,14	92,85	95,63	98,50	98,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21.2	Persentase Kesenian Tradisional Daerah di Provinsi yang Didokumentasikan dan Dikembangkan	Persen	65	71,5	76,00	78,28	80,63	83,05	83,05	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21.3	Persentase Sejarah Lokal Provinsi yang Difasilitasi dan Didokumentasikan	Persen	77,31	85,041	87,59	90,22	92,93	95,71	95,71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
21.4	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Persen	80,5	88,55	91,21	93,94	96,76	99,66	99,66	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21.5	Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Persen	85	89,25	91,04	92,86	94,71	96,61	96,61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Usuran Pemerintahan Bidang Perpustakaan									
22.1	Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk	Persen	1,86	1,875	2,5	3	4	5	5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22.2	Persentase Peningkatan Serah Simpan KCKR menjadi Koleksi Nasional	Persen	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22.3	Usuran Pemerintahan Bidang Kearsipan									
22.4	Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan di Bidang Kearsipan	Persen	53,49	60	60	62	65	70	70	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Usuran Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan									
23.1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	2	1,5	2	2	2	3	3	Dinas Kelautan dan Perikanan
23.2	Persentase Penanganan Kegiatan IUU Fisihing, Destruktif dan Pelanggaran Usaha Perikanan	Persen	97	100	100	100	100	100	100	Dinas Kelautan dan Perikanan
23.3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita	60,45	63	66,5	68	70	72,5	72,5	Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
24.1	Persentase Jumlah Kamar Terjual	Persen	36	40	45	33,75	45	47	47	Dinas Pariwisata
24.2	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	Persen	11	11,5	12	12	12	12	12	Dinas Pariwisata
25	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
25.1	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian terhadap Lahan Pertanian	Persen	70	70	75	78	80	82	82	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
25.2	Cakupan Layanan Prasarana Pertanian Spesifik Lokasi dan Sesuai Potensi Wilayah	Persen	70	70	75	78	80	82	82	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
25.3	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	70	70	75	78	80	80	80	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
25.4	Persentase Unit Usaha Produk Hewan yang Menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan dan Keamanan Produk Hewan	Persen	70	70	75	78	80	80	80	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
25.5	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	70	70	75	78	80	80	80	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
25.6	Persentase Layanan Penyuluhan Pertanian pada Kawasan Pertanian berbasis Koperasi dan Kawasan Pertanian Strategis	Persen	60	65	75	78	80	82	82	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
25.7	Persentase Kelembagaan Petani yang Menerapkan GAP dan GHP	Persen	60	65	75	78	80	82	82	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
25.8	Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan	Persen	25	25	25	25	25	25	25	Dinas Perkebunan
25.9	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Pengembangan Kawasan Perkebunan	Persen	15	15	15	15	15	15	15	Dinas Perkebunan
25.10	Tingkat Pengendalian Bencana Tanaman Perkebunan	Kategori	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Dinas Perkebunan
25.11	Tingkat Penanggulangan Bencana Tanaman Perkebunan	Kategori	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Cukup	Dinas Perkebunan
25.12	Persentase Pemenuhan Legalitas Perizinan Usaha Perkebunan	Persen	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Perkebunan
26	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan									
26.1	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	Ha	5,06	6,39	7,74	9,1	10,46	11,81	11,81	Dinas Kehutanan
26.2	Rasio Luas Kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap Luas Total Kawasan Hutan	Persen	32,79	32,79	35	43	45	48	48	Dinas Kehutanan
26.3	Persentase Pengelolaan DAS yang Dioptimalkan	Persen	65	70	70	73	75	78	78	Dinas Kehutanan
27	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral									

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
27.1	Persentase Perusahaan Pertambangan yang Memenuhi Aspek Administrasi, Teknis, Finansial dan Lingkungan	Persen	20	20	25	25	25	25	25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
27.2	Persentase Desa yang Teraliri Listrik	Persen	93,85	94,62	96,15	96,92	98,46	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
27.3	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	97,83	97,96	98,1	98,21	98,32	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
28	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi									
28.1	Persentase Perkembangan Permukiman Transmigrasi Mandiri (PDRB)	Persen	42	43	45	46	50	52	52	Dinas Transmigrasi
29	Sekretariat Daerah									
29.1	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Biro Umum
29.2	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
29.3	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
29.4	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Hukum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Biro Hukum
29.5	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
29.6	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
29.7	Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
30	Sekretariat DPRD									
30.1	Persentase Layanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD	Persen	94,63	95	95	95,5	96	96,5	96,5	Sekretariat DPRD
30.2	Persentase Layanan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	98,68	98,8	99	99,12	99,33	99,5	99,5	Sekretariat DPRD
31	Keuangan									
31.1	Persentase Ketepatan Waktu terhadap Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD	Persen	85	90	95	97	99	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
31.2	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan SAP	Persen	90	95	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
31.3	Persentase Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	44,31	46	48	50	55	60	60	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
31.4	Persentase Capaian Realisasi PAD terhadap Target PAD	Persen	102	98	94	96	98	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
32	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan									
32.1	Nilai Dimensi Kualifikasi terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	14,17	15	17	18	20	22	22	Badan Kepegawaian Daerah
32.2	Nilai Dimensi Kinerja terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	14,86	16	17	18	20	22	22	Badan Kepegawaian Daerah
32.3	Nilai Dimensi Disiplin terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	5	5	5	5	5	5	5	Badan Kepegawaian Daerah
32.4	Persentase Tata Kelola Manajemen ASN	Persen	55,7	60	70	75	80	85	85	Badan Kepegawaian Daerah
32.5	Nilai Dimensi Kompetensi terhadap Indeks Profesionalitas ASN	Poin	7,43	10	10	11	12	13	13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
33	Penelitian dan Pengembangan									
33.1	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Diusulkan sebagai Bahan Kebijakan	Persen	60	65	75	80	90	100	100	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
34	Penghubung									
34.1	Tingkat Layanan Penghubung	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Penghubung Provinsi
35	Inspektorat Daerah									
35.1	Persentase Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
36	Kesatuan Bangsa dan Politik									
36.1	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
36.2	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
36.3	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Hasil Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
36.4	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal 2021	Perkiraan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Akhir 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
					Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
36.5	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kondisi Waspada Nasional, Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023–2026 adalah merupakan instrumen penting dalam rangka perencanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat. Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPD Tahun 2023–2026 sangat tergantung kepada keseriusan dan konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran serta pengendalian terhadap pelaksanaan berbagai strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan.

Dokumen Perencanaan Menengah Pembangunan Daerah 2023–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026 disusun secara teknokratik dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah tetap memperhatikan kondisi, potensi, masalah dan isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Barat.

9.1. Pedoman Transisi

Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 2017–2022 akan berakhir pada bulan Mei 2022 dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak nasional pada tahun 2024.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) berfungsi sebagai : a) Pedoman penyusunan Renstra OPD dan Penyusunan RKPD; b) Pedoman dalam penyusunan RKPD untuk kurun waktu 4 (empat) tahun; dan c) Instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 dapat diubah apabila : a) Hasil pengendalian evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; b) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; c) Terjadi perubahan mendasar; dan d) Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026, yang selanjutnya digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-PD) Provinsi Sulawesi Barat dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya. Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026.

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP :19740112 199311 1 001